



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BONTANG TAHUN 2022





WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BONTANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2022 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah.

BAB II

RKPD

Pasal 2

- (1) RKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan Daerah memuat:
 - a. rancangan kerangka ekonomi Daerah;
 - b. prioritas pembangunan Daerah;
 - c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
 - d. kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 di Daerah.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rancangan akhir RKPD.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan dengan sistematika:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
 - d. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
 - e. rencana kerja dan pendanaan Daerah;
 - f. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
 - g. penutup.

- (4) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

- (1) RKPD dijadikan sebagai pedoman:
- a. perumusan penyempurnaan akhir rencana kerja SKPD; dan
 - b. penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja Daerah Tahun 2022 serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara Daerah.
- (2) Rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja Daerah Tahun 2022 serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan Wali Kota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Daerah Tahun 2022.
- (3) Rancangan anggaran pendapatan dan belanja Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan SKPD dalam melakukan pembahasan rencana kerja dan anggaran SKPD dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 4

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan Daerah menelaah kesesuaian antara rencana kerja dan anggaran SKPD Tahun 2022 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan RKPD.

BAB III PERUBAHAN RKPD

Pasal 5

- (1) Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah rencana pembangunan jangka menengah Daerah ditetapkan.
- (3) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman perubahan rencana kerja SKPD.
- (4) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (5) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 7 Juli 2021
WALI KOTA BONTANG,


BASRI RASE

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 7 Juli 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,



AJI ERLYNAWATI
BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2021 NOMOR 12

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2022

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	4
1.3 Hubungan Antar Dokumen.....	5
1.4 Maksud dan Tujuan	6
1.4.1 Maksud	6
1.4.2 Tujuan.....	7
1.5 Sistematika Dokumen RKPD.....	7
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	11
2.1 Kondisi Umum Daerah.....	11
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	11
2.1.1.1 Kondisi Geografis.....	11
2.1.1.2 Aspek Demografi.....	34
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	39
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum	60
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah.....	88
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD Tahun 2020	99
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah	142
2.3.1 Permasalahan Pencapaian Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	142
2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.....	144
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	159
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	159
3.1.1 Perkembangan Ekonomi Kota Bontang	159
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2023	167
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	170
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	171
3.2.2 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan	173
3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah	176

3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah 179

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 181

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan..... 181

4.2 Prioritas Pembangunan Daerah 187

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS..... 199

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.... 376

6.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah tahun 2022..... 376

6.2. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah..... 376

BAB VII PENUTUP 384

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jumlah RT dan luas kelurahan	12
Tabel 2. 2 Luasan penggunaan lahan tahun 2002, 2009 dan 2016	19
Tabel 2. 3 Tabel Jumlah Kejadian Bencana Kota Bontang Tahun 2017-2020.....	24
Tabel 2. 4 Jumlah Penduduk Kota Bontang Menurut Kelompok Umur	37
Tabel 2. 5 Komposisi Penduduk Kota Bontang.....	37
Tabel 2. 6 PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan 2016-2020....	42
Tabel 2. 7 Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen).....	43
Tabel 2. 8 Nilai PDRB per kapita Kota Bontang 2016-2020	44
Tabel 2. 9 Statistik kemiskinan Kota Bontang tahun 2016-2020	49
Tabel 2. 10 Perbandingan Persentase penduduk miskin Kota Bontang dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota	50
Tabel 2. 11 Indikator Kriminalitas Kota Bontang tahun 2016 - 2020	51
Tabel 2. 12 Komponen IPM Kota Bontang tahun 2016 – 2020	53
Tabel 2. 13 Perkembangan Seni, Budaya dan Olah raga Kota Bontang Tahun 2016-2020	60
Tabel 2. 14 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pendidikan tahun 2016-2020	60
Tabel 2. 15 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kesehatan Tahun 2017-2020.	64
Tabel 2. 16 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016-2020.....	65
Tabel 2. 17 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2016-2020	66
Tabel 2. 18 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2016-2020.....	67
Tabel 2. 19 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Sosial Tahun 2016-2020	68
Tabel 2. 20 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Tenaga Kerja Tahun 2016-2020	70
Tabel 2. 21 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016-2020.....	70
Tabel 2. 22 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pangan Tahun 2016-2020	71
Tabel 2. 23 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pertanahan Tahun 2016-2020	71
Tabel 2. 24 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2016-2020	72
Tabel 2. 25 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016-2020	73
Tabel 2. 26 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2016-2020.....	74
Tabel 2. 27 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2016-2020	75
Tabel 2. 28 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perhubungan Tahun 2016-2020	75
Tabel 2. 29 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2020.....	76
Tabel 2. 30 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2016-2020	77
Tabel 2. 31 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Penanaman Modal Tahun 2016-2020	78
Tabel 2. 32 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pemuda dan Olah Raga Tahun 2016-2018.....	78
Tabel 2. 33 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Statistik Tahun 2016-2020....	79
Tabel 2. 34 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Persandian Tahun 2016-2020	79

Tabel 2. 35 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kebudayaan Tahun 2016-2020	80
Tabel 2. 36 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perpustakaan Tahun 2016-2020	80
Tabel 2. 37 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kearsipan Tahun 2016-2020	81
Tabel 2. 38 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2016-2020.....	82
Tabel 2. 39 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pariwisata Tahun 2016-2020.....	82
Tabel 2. 40 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pertanian Tahun 2016-2020.....	83
Tabel 2. 41 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perdagangan Tahun 2016-2020	84
Tabel 2. 42 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perindustrian Tahun 2016-2020	84
Tabel 2. 43 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perencanaan Tahun 2016-2020	85
Tabel 2. 44 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Keuangan Tahun 2016-2020	86
Tabel 2. 45 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2016-2020.....	86
Tabel 2. 46 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Penelitian dan Pengembangan Tahun 2016-2020.....	87
Tabel 2. 47 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pengawasan Tahun 2016-2020	87
Tabel 2. 48 Pengeluaran Konsumsi Pangan Rumah Tangga Per Kapita.....	88
Tabel 2. 49 Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Rumah Tangga Per Kapita	89
Tabel 2. 50 Profil Kondisi Jalan di Kota Bontang Tahun 2020	91
Tabel 2. 51 Luas banjir/tergenang	91
Tabel 2. 52 Perkembangan Banyaknya Pelanggan, Pemakaian & Penjualan Air Minum PDAM	92
Tabel 2. 53 Persentase Rumah Tangga Menurut Kepemilikan Telepon Seluler (HP).....	93
Tabel 2. 54 Jumlah Hotel Menurut Kecamatan dan Klasifikasi di Kota Bontang 2020	93
Tabel 2. 55 Perkembangan Jumlah Restoran dan Rumah Makan di Kota Bontang Tahun 2016-2020	94
Tabel 2. 56 Perkembangan Jumlah Obyek Wisata di Kota Bontang Tahun 2016 - 2020	94
Tabel 2. 57 Perkembangan Jumlah Industri	95
Tabel 2. 58 Perkembangan Jumlah Pasar	95
Tabel 2. 59 Perkembangan Lama Proses Ijin di Kota Bontang Tahun 2016 - 2020	96
Tabel 2. 60 Perkembangan Pajak dan Retribusi di Kota Bontang Tahun 2016 - 2020	96
Tabel 2. 61 Perkembangan Fasilitas Pendidikan Di Kota Bontang Tahun 2015 - 2020	97
Tabel 2. 62 Perkembangan Fasilitas Kesehatan Di Kota Bontang Tahun 2015 - 2020	98
Tabel 2. 63 Perkembangan Kependudukan Kota Bontang Tahun 2016 - 2020.....	99
Tabel 2. 64 Rekapitulasi Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Berdasarkan Perangkat Daerah Tahun 2020.....	99
Tabel 2. 65 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Tahun Anggaran 2020	101
Tabel 2.66 Rencana Program Dan Kegiatan Perubahan Tahun Anggaran 2020.....	103
Tabel 3. 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota	161
Tabel 3. 2 PDRB Kota Bontang 2015-2020.....	162
Tabel 3. 3 PDRB Per Kapita Kota Bontang 2015-2019.....	162
Tabel 3. 4 Angka Pengangguran Kab/Kota.....	163

Tabel 3. 5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kab/Kota	164
Tabel 3. 6 Tingkat Kemiskinan Kab/Kota Provinsi Kaltim 2015-2020	164
Tabel 3. 7 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kab/Kota	166
Tabel 3. 8 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kab/Kota.....	166
Tabel 3. 9 Target Indikator Makro.....	168
Tabel 3. 10 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Bontang 2019-2023.....	175
Tabel 3. 11 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Bontang	178
Tabel 3. 12 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2019-2023	179
Tabel 3. 13. Proyeksi/Target SiLPA Tahun 2021	180
Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Tahun 2022	183
Tabel 4. 2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah	184
Tabel 4. 3 Keselarasan Arah Kebijakan Pembangunan RKPD	187
Tabel 4. 4 Keselarasan Arah Kebijakan Pembangunan RKPD Bontang dengan RKPD Provinsi Kaltim Tahun 2022.....	189
Tabel 4. 5 Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Kota Bontang Tahun 2022.....	190
Tabel 5. 1 Rekapitulasi Pagu Indikatif Perangkat Daerah RKPD Tahun 2022	200
Tabel 5.2 Rencana Program, dan Sub Kegiatan Belanja Langsung Perangkat Daerah pada RKPD Kota Bontang Tahun 2022.....	202
Tabel 6. 1 Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2022	376
Tabel 6. 2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022.....	377

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan.....	6
Gambar 2. 1 Peta Batas Administrasi Kota Bontang.....	11
Gambar 2. 2 Peta Orientasi Lokasi Kota Bontang.....	13
Gambar 2. 3 Peta Ketinggian Kota Bontang	14
Gambar 2. 4 Peta Kelerengan Kota Bontang.....	14
Gambar 2. 5 Peta Geologi Kota Bontang	16
Gambar 2. 6 Peta DAS Kota Bontang.....	18
Gambar 2. 7 Peta Penggunaan lahan tahun 2019	20
Gambar 2. 10 Indeks Rawan Bencana Indonesia Kalimantan Timur.....	23
Gambar 2. 11 Peta Resiko Bencana Angin Puting Beliung	25
Gambar 2. 12 Peta Resiko Bencana Banjir.....	27
Gambar 2. 13 Peta Resiko Bencana Epidemi Penyakit.....	28
Gambar 2. 14 Infografis COVID-19 di Kota Bontang.....	28
Gambar 2. 15 Peta Resiko Bencana Gempa bumi	30
Gambar 2. 16 BMKG ShakeMap 2018	30
Gambar 2. 17 Peta Resiko Bencana Longsor	32
Gambar 2. 18 Zona Konservasi Air Tanah.....	34
Gambar 2. 19 Sebaran Penduduk Kota Bontang.....	35
Gambar 2. 20 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Bontang	36
Gambar 2. 21 Piramida Penduduk Kota Bontang Tahun 2020	38
Gambar 2. 22 Perkembangan Penduduk Kota Bontang Tahun 2020	38
Gambar 2. 23 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bontang Tahun 2016-2020.....	40
Gambar 2. 24 Rasio Gini Kota Bontang Tahun 2015 – 2020.....	47
Gambar 2. 25 Perbandingan Rasio Gini Kota Bontang tahun 2020 dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota.....	47
Gambar 2. 26 Laju Inflasi Provinsi Kalimantan Timur dan Kota Samarinda.....	48
Gambar 2. 27 Perbandingan IPM Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dan Indonesia.	53
Gambar 2. 28 Statistik Ketenagakerjaan Kota Bontang Tahun 2016 – 2020	56
Gambar 2. 29 Perbandingan TPT dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Indonesia Kota Bontang Tahun 2020.....	57
Gambar 2. 30 Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota Kalimantan Timur Tahun 2020	57
Gambar 2. 31 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Bontang	58
Gambar 3. 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bontang, Prov. Kaltim	160
Gambar 3. 2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bontang	161
Gambar 3. 3 Perkembangan Inflasi Kaltim.....	163
Gambar 3. 4 Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Kota Bontang Tahun 2005-2020.....	165

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan salah satu bagian penting dalam siklus pelaksanaan pembangunan daerah setiap tahunnya. Penyusunan RKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Dokumen perencanaan pembangunan tersebut harus disusun secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan.

Dalam kerangka pikir pencapaian sasaran perencanaan pembangunan nasional di atas, perencanaan pembangunan daerah harus dapat direncanakan dengan cermat untuk memastikan bahwa pembangunan yang akan dilaksanakan dapat menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien dan mendorong terjadinya pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan sebagai proses penentuan skala prioritas, menjadi sangat penting dilaksanakan secara efektif agar pengalokasian sumberdaya yang relatif terbatas dibandingkan kebutuhan pembangunan dapat secara cermat dialokasikan pada program/kegiatan pembangunan yang memiliki daya ungkit paling optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menjamin agar penyusunan RKPD dapat menghasilkan perencanaan pembangunan yang efektif, maka penyusunannya harus berdasarkan pendekatan partisipatif, teknokratif, politis serta top-down dan bottom-up, dengan berorientasi secara Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial (THIS). Sejalan dengan prinsip dasar tersebut, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 selanjutnya mengatur bahwa tahapan penyusunan RKPD harus mencakup tahapan persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal RKPD, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan Musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD.

Berasarkan pada prinsip dasar, pendekatan dan ketentuan di atas, maka penyusunan RKPD Kota Bontang Tahun 2022 dihadapkan pada situasi ketidakpastian kondisi perekonomian daerah yang memerlukan intervensi dan strategi pemulihan ekonomi yang lebih komprehensif sehubungan penanggulangan pandemi covid-19. Sektor pariwisata dan sektor UMKM membutuhkan stimulasi lebih intensif

dan terukur agar dapat kembali bergairah sehingga dapat memicu tumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakat secara lebih stabil dan berkelanjutan. Pada bidang ketenagakerjaan, tingkat pengangguran juga mengalami peningkatan yang juga berimplikasi pada kembali meningkatnya tingkat kemiskinan. Permasalahan mendasar tersebut menjadi tantangan utama dalam rangka pencapaian tujuan pokok visi dan misi pembangunan yakni kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, perencanaan pembangunan tahun 2022 juga harus mampu menyusun agenda-agenda pembangunan yang lebih fokus, terarah, dan efektif sehingga transisi periode perencanaan jangka menengah 2016-2021 menuju 2021-2026 dapat disipakan secara lebih berkesinambungan. Hal ini harus dapat disiapkan karena tantangan dan dinamika realitas sosial yang semakin dinamis dan saling berkaitan.

Sebagai perencanaan pembangunan tahun pertama RPJMD tahun 2021-2026, RKPD Kota Bontang tahun 2022 akan ditetapkan mendahului penetapan Peraturan Daerah RPJMD Kota Bontang periode tahun 2021-2026. Namun demikian sesuai dengan Permendagri Nomor 17 tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 dijelaskan bahwa disamping mengacu pada RPJPD, mengacu juga pada visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam rangka merumuskan prioritas pembangunan daerah tahun 2022, telah dilakukan penyesuaian dengan arah kebijakan dan program prioritas kepala daerah terpilih yang telah dituangkan dalam Rancangan Awal RPJMD tahun 2021-2026 dengan visi “Terwujudnya Kota Bontang yang Lebih Hebat dan Beradab”.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan tersebut, arah kebijakan pembangunan tahun 2022 menjabarkan fokus misi pembangunan yang secara umum menekankan pada:

1. Perbaikan tatakelola pemerintahan;
2. Peningkatan perekonomian daerah dan lingkungan berkelanjutan;
3. Peningkatan kualitas SDM unggul dan kesejahteraan masyarakat.

Fokus pembangunan tersebut sangat relevan dengan arah kebijakan RPJPD periode lima tahunan ke lima 2020-2025 yang merupakan tahap pemantapan.

Berdasarkan fokus pembangunan tersebut, kebijakan pembangunan pada tahun 2022 harus mengarah pada program-program yang outcomenya mendukung sasaran kinerja masing-masing fokus pembangunan tersebut.

Kebijakan umum pembangunan tersebut harus dituangkan secara cermat ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022 sehingga agenda-agenda pembangunan sebagaimana visi dan misi pembangunan Kota Bontang dapat diimplementasikan sesuai dengan tahapan dan mencapai target-target yang ditetapkan.

Agenda-agenda pembangunan daerah dalam RKPD pada prinsipnya merupakan sebuah proses yang direncanakan dalam rangka mencapai kondisi yang lebih baik dibandingkan keadaan sebelumnya. Oleh karena itu RKPD menjadi sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk menjamin tercapainya sasaran-sasaran pembangunan daerah dan mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional. Dengan demikian RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan
4. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat

Mengingat posisi strategis dokumen RKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka perhatian yang besar pantas diberikan sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RKPD sehingga dapat dihasilkan dokumen RKPD yang berkualitas. Berkualitas dalam hal ini adalah telah memenuhi kriteria bahwa penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan tatacara penyusunan, tahapan dan tata cara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka RKPD Kota Bontang tahun 2022 telah disusun dengan memperhatikan kriteria antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya.
2. Program prioritas dalam RKPD harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD pada tahun berkenaan.

3. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus konsisten dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) untuk program dan indikator kinerja keluaran (output) untuk kegiatan, yang bersifat realistis dan terukur.
5. Program dan kegiatan dalam RKPD harus dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

RKPD tahun 2022 disusun berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

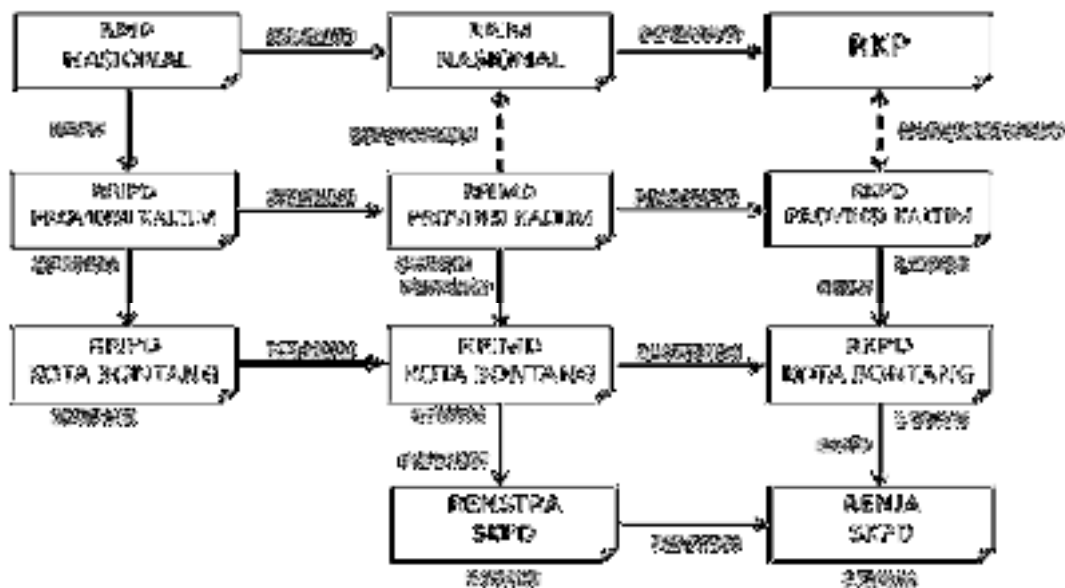
1. Undang-Undang Nomor 47 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan SPM;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bontang Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 – 2036;
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023;
16. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang Tahun 2019-2039.
17. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K)

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Perencanaan pembangunan daerah pada dasarnya merupakan satu-kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini memiliki makna bahwa terdapat relevansi yang jelas antara sasaran-sasaran pembangunan daerah dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional. Sehubungan dengan tersebut dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah konsistensi dan kesesuaian antar lingkup dokumen perencanaan yang terdiri RPJPD, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah harus memiliki benang merah yang jelas dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan sesuai dengan tahapannya.

Untuk lebih memahami keterkaitan dokumen perencanaan yang sesuai dengan kerangka sistem perencanaan pembangunan nasional secara diagramatis dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 1. 1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan.

Untuk menjamin keselarasan dan integrasi pelaksanaan pembangunan dalam merealisasikan Visi dan Misi RPJMD Kota Bontang Tahun 2021-2026 maka penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 oleh masing-masing Perangkat Daerah harus mengacu pada RKPD Tahun 2022. Dalam hal ini Perangkat Daerah menyusun program kegiatan, anggaran serta target kinerja harus sesuai dengan yang tertuang dalam RKPD.

Untuk menghindari pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peruntukannya, penyusunan RKPD Kota Bontang Tahun 2022 juga telah dilakukan dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bontang Tahun 2019-2039. Hal ini penting artinya untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup maupun koordinasi lintas sektoral dalam pemanfaatan ruang.

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, selain itu juga dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bontang Tahun 2022 disusun dengan maksud untuk :

- a. Menyediakan acuan resmi bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun 2022.

- b. Memberikan koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

1.4.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bontang adalah:

- a. Menciptakan sinergitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah;
- b. Sebagai pedoman atau acuan dalam menetapkan kebijakan dan strategi pembangunan;
- c. Sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022
- d. Rencana pelaksanaan pembangunan Kota Bontang Tahun 2022 yang merupakan tahun pertama penjabaran RPJMD tahun 2021-2026, secara umum masih dihadapkan pada permasalahan Pandemi Covid 19 yang belum dapat diyakini bahwa dapat dikendalikan atau semakin diturunkan potensi penularannya dimasyarakat.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Secara substansial, RKPD tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra SKPD, Renja Perangkat Daerah serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJPN, RPJPD Provinsi Kaltim, RTRW nasional, dan RTRW Kota Bontang.

1.4. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD dan sasaran penyusunan dokumen RKPD Kota Bontang

1.5. Sistematika Dokumen

Mengemukakan struktur batang tubuh dari dokumen RKPD tahun 2022.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun 2020 dengan memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan.

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bagian ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD.

2.3. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan daerah berdasarkan hasil evaluasi program dan kegiatan yaitu isu permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan

permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), RKPD provinsi dan juga kebijakan di bidang ekonomi dalam dokumen RPJMD Kota Bontang.

Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta isu strategis daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan sesuai yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Bontang 2021-2026.

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan gambaran prioritas pembangunan tahun 2022 sesuai dengan program pembangunan daerah tahun 2022 dalam RPJMD Kota Bontang Tahun 2021-2026.

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2022 yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. Diuraikan dalam tabel yang berisi rencana program dan indikasi kegiatan yang dilengkapi dengan tujuan dan sasaran, lokasi, anggaran yang dibutuhkan, sumber dana, dan penanggung jawab.

BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kota Bontang sebagai panduan dalam pencapaian kinerja tahunan dan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun 2022.

BAB VII. PENUTUP

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD, sebagai pedoman bagi semua pihak dalam memfungsikan RKPD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

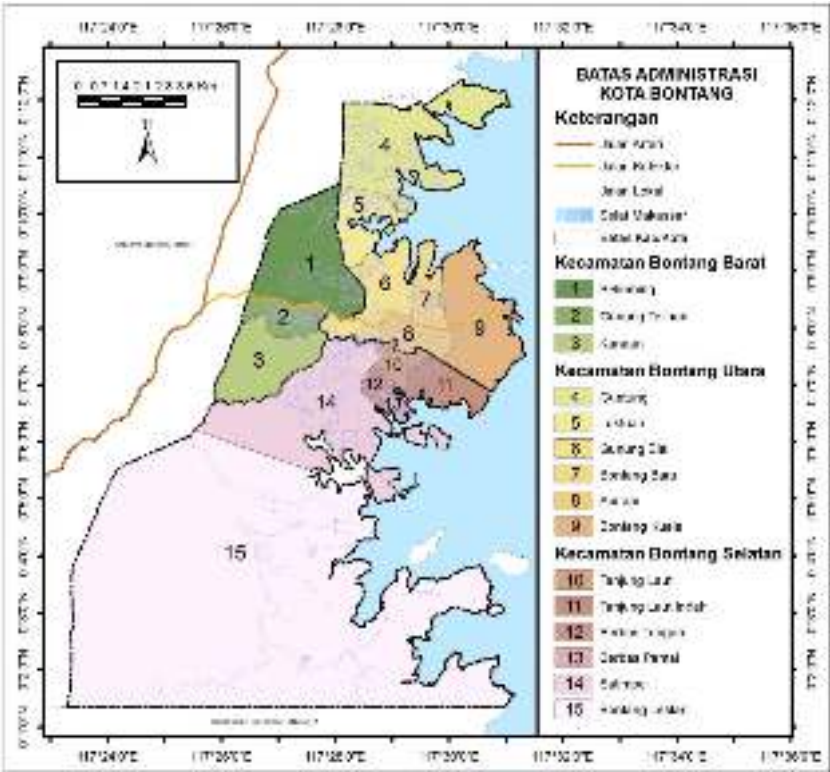
2.1 Kondisi Umum Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Kondisi Geografis

Kota Bontang merupakan kota dengan luas wilayah paling kecil di Provinsi Kalimantan Timur dengan luas wilayah darat ± 16.188 ha, adapun batas wilayah Kota Bontang meliputi:

- Sebelah utara : Kabupaten Kutai Timur
- Sebelah timur : Selat Makassar
- Sebelah selatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
- Sebelah barat : Kabupaten Kutai Timur



Gambar 2. 1 Peta Batas Administrasi Kota Bontang

Sumber: RTRW Kota Bontang, Tahun 2019 - 2039

Pada awalnya Kota Bontang merupakan kota administratif sebagai bagian dari Kabupaten Kutai dan menjadi daerah otonom berdasarkan Undang-Undang No. 47 Tahun 1999 tentang pemekaran Provinsi dan Kabupaten, bersama-sama dengan Kabupaten Kutai Timur, Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Sejak disahkannya Peraturan Daerah Kota Bontang No. 17 tahun 2002 Kota Bontang

terbagi menjadi tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Bontang Selatan, Kecamatan Bontang Utara, dan Kecamatan Bontang Barat, yang meliputi 15 (lima belas) kelurahan dan 499 Rukun Tetangga (RT).

Tabel 2. 1 Jumlah RT dan luas kelurahan

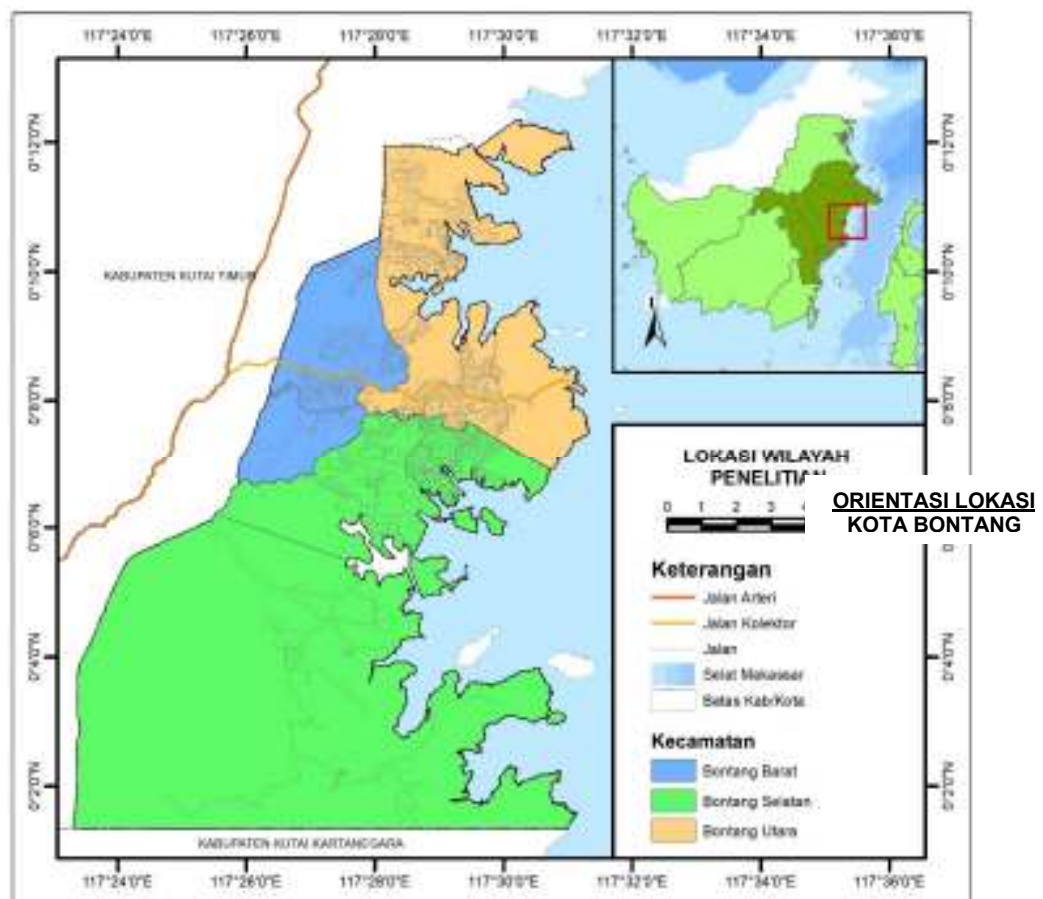
No	Kecamatan/Kelurahan	Jumlah RT	Luas (ha)
A	Bontang Selatan	201	11.091
1	Tanjung Laut	38	143
2	Berbas Pantai	24	57
3	Berebas Tengah	62	85
4	Tanjung Laut Indah	33	252
5	Satimpo	25	1.771
6	Bontang Lestari	19	8.782
B	Bontang Utara	205	3.303
1	Guntung	18	1.135
2	Loktuan	52	335
3	Gunung Elai	45	502
4	Bontang Baru	28	222
5	Bontang Kuala	20	894
6	Api-Api	42	215
C	Bontang Barat	93	1.794
1	Belimbing	51	959
2	Gunung Telihan	30	229
3	Kanaan	12	605
	TOTAL	499	16.188

Sumber: RTRW Kota Bontang, Tahun 2019 - 2039

A. Letak dan Kondisi Geografis

Kota Bontang secara geografis terletak diantara 0°01’ Lintang Utara - 0°12’ Lintang Utara dan 117°23’ Bujur Timur - 117°38’ Bujur Timur. Kota Bontang berada pada lokasi yang strategis, dilewati jalan poros trans-kalimantan dan berbatasan langsung dengan Selat Makassar yang merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II. PT. Badak NGL dan PT. Pupuk Kalimantan Timur dibangun di Kota Bontang karena faktor lokasi tersebut dan menjadi salah satu faktor perdorong utama pertumbuhan dan perkembangan Kota Bontang.

Kota Bontang juga memiliki beberapa pulau-pulau kecil, seperti Pulau Beras Basah yang menjadi salah satu objek daya tarik wisata, Pulau Gusung yang terdapat permukiman diatasnya, pulau mangrove yang tersebar dari utara hingga selatan, juga terdapat permukiman diatas laut seperti melahing dan tihik-tihik.



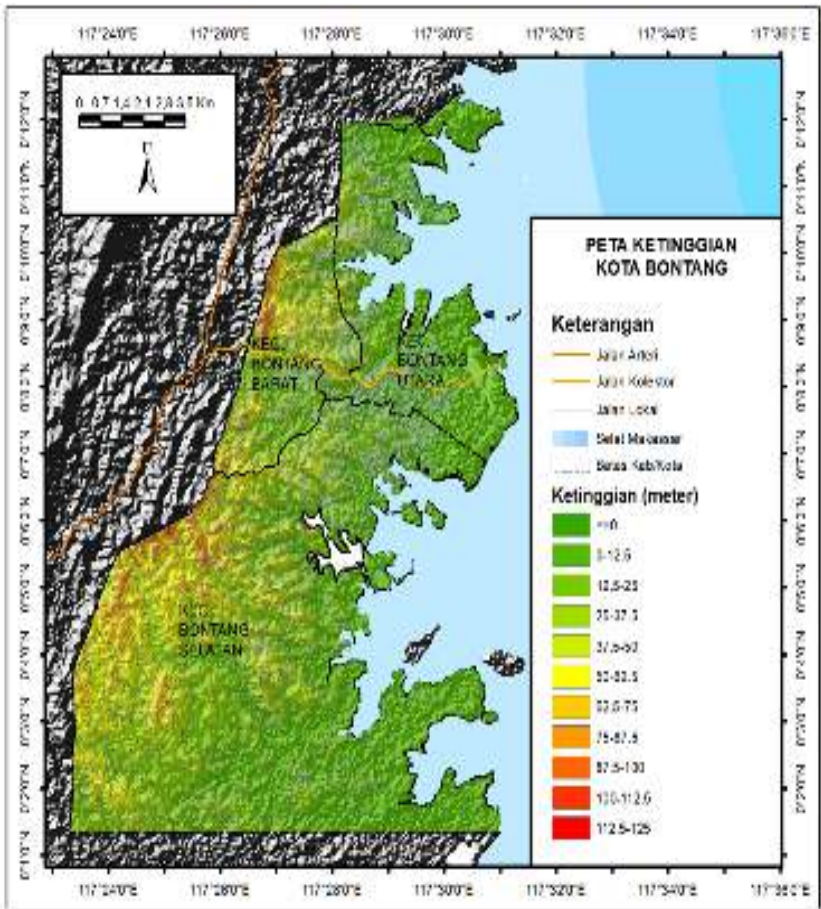
Gambar 2. 2 Peta Orientasi Lokasi Kota Bontang

Sumber: RTRW Kota Bontang, Tahun 2019 - 2039

B. Topografi

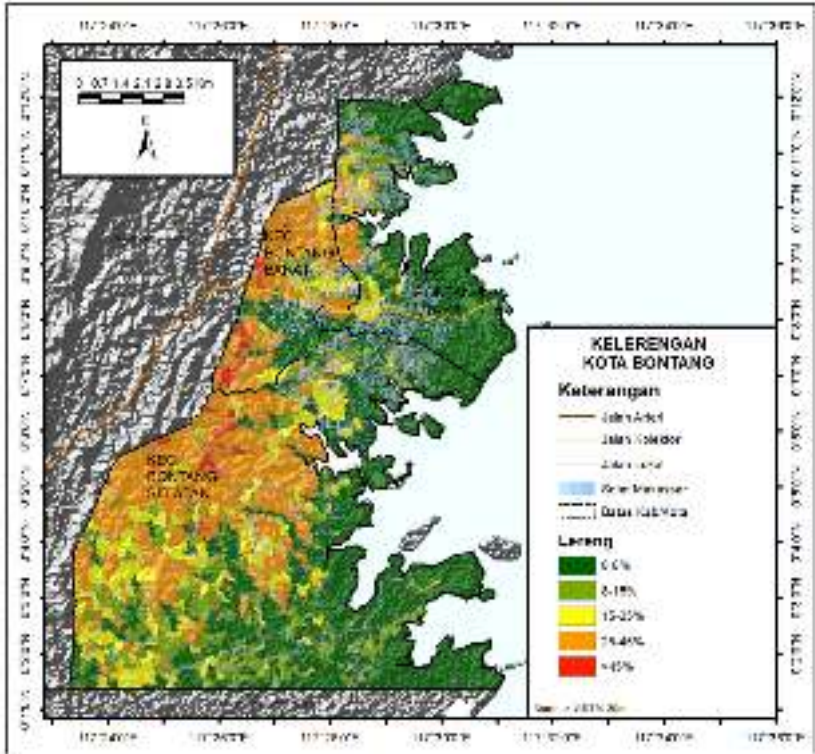
Secara topografis Kota Bontang didominasi oleh permukaan tanah yang datar, landai dan sedikit berbukit dengan ketinggian antara 0 – 125 m diatas permukaan laut. Mayoritas wilayah (64%) menempati kawasan pinggir pantai yang relatif datar, sehingga relief Kota Bontang terlihat mendatar khususnya di wilayah pantai dan bergerak membukit dan bergelombang dari bagian selatan ke barat. Sebaran ketinggian dan kelerengan dapat dilihat pada Gambar 2.2 dan Gambar 2.3.

Daerah barat merupakan daerah tertinggi, berbukit dan perlahan melandai kearah timur yang merupakan daerah pesisir. Kawasan perbukitan di daerah barat ini pula yang memiliki kelerengan relatif curam dibanding daerah timur. Karena itu daerah barat memang memiliki keterbatasan dan idealnya menjadi kawasan yang perlu dijaga dan dihijaukan karena menjadi penyangga bagi wilayah perkotaan.



Gambar 2. 3 Peta Ketinggian Kota Bontang

Sumber: RTRW Kota Bontang, Tahun 2019 – 2039



Gambar 2. 4 Peta Kelerengan Kota Bontang

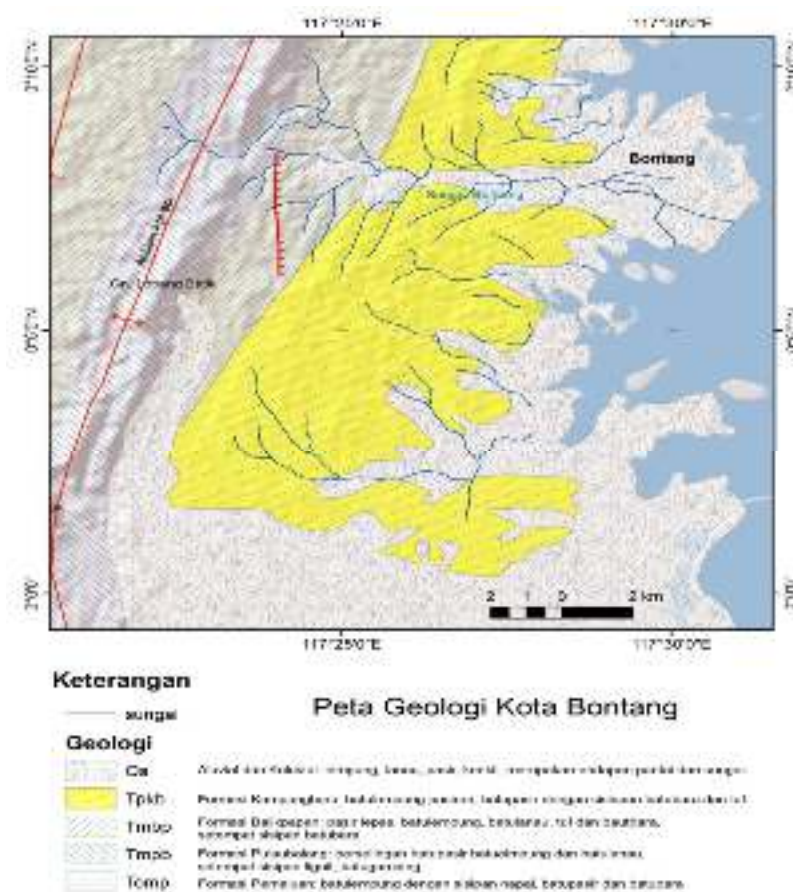
Sumber: RTRW Kota Bontang, Tahun 2019 - 2039

C. Struktur Geologi

Ditinjau dari aspek geologi, Kota Bontang termasuk dalam sub bagian cekungan kutai dengan batas fisik di sebelah timur Selat Makassar, sebelah selatan Sungai Santan, sebelah perbukitan sebelah timur Gunung Lobang Batik dan sebelah utara Sungai Temputuk. Dari aspek litologi, formasi batuan di Kota Bontang terdiri dari enam formasi batuan, yaitu:

- 1) Endapan Alluvium, yang tersusun oleh kerakal, kerikil, lempung dan lumpur sebagai endapan sungai, rawa, pantai dan delta.
- 2) Formasi Kampungbaru, yang tersusun atas batu pasir kuarsa dengan sisipan lempung, lanau dan serpih dengan sifat lunak dan mudah hancur. Formasi ini memiliki akuifer potensial di daerah Bontang dengan jenis batuan yang bertindak sebagai akuifer berupa kerikil, pasir kuarsa yang bersifat lepas, batu pasir dan pasir lempung. Formasi ini menindih selaras dan setempat tidak selaras terhadap Formasi Balikpapan.
- 3) Formasi Balikpapan, yang terdiri atas perselingan batu pasir kuarsa, batu lempung lanauan dan serpih dengan sisipan napal, batu gamping dan batubara. Formasi Balikpapan merupakan formasi terbesar di Kawasan Pesisir Bontang dengan arah utara-selatan.
- 4) Formasi Pulaubalang. Merupakan perselingan batu pasir kuarsa, batu pasir dan batu lempung dengan sisipan batubara.
- 5) Formasi Bebulu. Merupakan formasi batuan terkecil di Kawasan Pesisir Bontang yang tersusun atas batu gamping dengan sisipan lempung lanauan dan sedikit napal.
- 6) Formasi Pamaluan. Tersusun atas batu lempung dan serpih dengan sedikit napal, batu pasir dan batu gamping.

Jenis tanah didominasi oleh podsolik merah kuning, 15lluvial dan kompleks latosol. Jenis tanah ini memiliki lapisan kuning (top soil) yang tipis, peka erosi dan miskin unsur hara. Untuk pemanfaatan lahan pertanian dan perkebunan dibutuhkan pengolahan awal berupa perbaikan tanah (soil stabilization) dan pengamanan hutan, sehingga kestabilan tanah dan persediaan air tanah tetap terjaga.



Gambar 2. 5 Peta Geologi Kota Bontang

Sumber: RTRW Kota Bontang, Tahun 2019 – 2039

D. Kondisi Klimatologi

Proses pergantian panas dan uap air antara bumi dan atmosfer dalam jangka waktu yang lama menghasilkan suatu keadaan yang dinamakan iklim. Iklim merupakan suatu kumpulan dari kondisi atmosfer yang meliputi panas, kelembaban dan gerakan udara.

Kota Bontang berada di wilayah khatulistiwa yang memiliki iklim tropis, sehingga mengalami dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan serta dipengaruhi oleh angin muson, yaitu Muson Barat pada bulan November-April dan angin Muson Timur pada bulan Mei-Oktober.

Suhu udara rata-rata tertinggi di Kota Bontang sebesar 27,52°C pada bulan Februari dan terendahnya 24,36°C pada bulan November. Kelembaban udara tertinggi 100% pada bulan Juni, terendahnya 63,75% pada bulan September.

Terdapat empat stasiun pengamatan cuaca di Bontang, yaitu Stasiun Pengamatan Bontang Lestari, Tanjung Laut, Gunung Elai, dan Gunung Telihan. Intensitas curah hujan rata-rata tertinggi tercatat pada stasiun pengamatan Gunung Telihan sebesar 166,39 mm3 dengan rata-rata 11 hari hujan perbulan. Sedangkan rata-rata terendah curah hujan di Bontang tercatat pada stasiun pengamatan

Bontang Lestari sebesar 119,19 mm³ dengan rata-rata 14 hari hujan perbulan.

E. Hidrologi

Secara hidrologi, wilayah Kota Bontang terdiri atas 3 Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu:

1. DAS Guntung

Luas DAS Guntung kurang lebih 1.195,23 ha. Terletak di wilayah utara Kota Bontang yang meliputi 3 (tiga) kelurahan, yakni Kelurahan Guntung, sebagian Kelurahan Loktuan, dan sebagian Kelurahan Belimbing. Terdapat 2 (dua) aliran sungai yaitu Sungai Guntung dan Sungai Kanibungan. Sungai Guntung memiliki panjang kurang lebih 4 km, sedangkan Sungai Kanibungan memiliki panjang kurang lebih 2 km. Lebar kedua sungai tersebut antara 2-10 meter dengan kedalaman rata-rata 1-2 meter. Ketinggian air pada saat surut terendah adalah $\pm$ 1 meter, sedangkan ketinggian air pada saat pasang tertinggi adalah $\pm$ 3,5 meter.

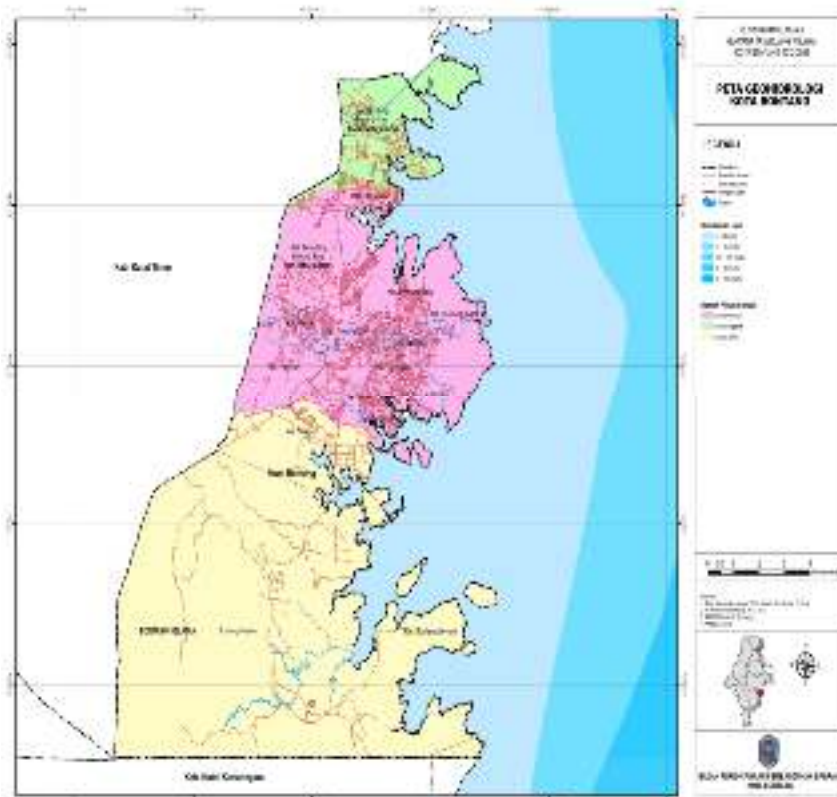
2. DAS Bontang

Luas DAS Bontang kurang lebih 4.914 ha. Terletak di wilayah tengah Kota Bontang yang mencakup 13 (tiga belas) kelurahan, yakni sebagian Kelurahan Belimbing, Sebagian Kelurahan Loktuan, Kelurahan Gunung Elai, Kelurahan Bontang Baru, Kelurahan Bontang Kuala, Kelurahan Api-Api, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kelurahan Tanjung Laut, Kelurahan Berebas Tengah, Kelurahan Berbas Pantai, sebagian Kelurahan Satimpo, Kelurahan Kanaan, dan Kelurahan Gunung Telihan. Terdapat aliran Sungai Bontang yang membentang sepanjang kurang lebih 18 km dan lebar antara 4-10 meter dengan kedalaman rata-rata 1-2,5 meter. Ketinggian air pada saat surut terendah adalah 1 meter, sedangkan ketinggian air pada saat pasang tertinggi adalah 3,5 meter.

3. DAS Nyerakat

Luas DAS Nyerakat kurang lebih 9.845,98 km². Terletak di wilayah selatan Kota Bontang yang meliputi 2 (dua) kelurahan, yaitu sebagian Kelurahan Satimpo dan Kelurahan Bontang Lestari. Terdapat Sungai Nyerakat dengan panjang aliran kurang lebih 17 km dan lebar sungai antara 3-10 meter dengan kedalaman rata-rata 1-2 meter.

Ketiga DAS tersebut merupakan bagian dari Sub DAS Santan Ilir yang semuanya bermuara di Selat Makassar. Sungai-sungai tersebut juga mengalirkan air yang berasal dari mata air, terutama air yang keluar dari batuan pasir halus, pasir kasar dan lempung pasiran yang berasal dari formasi Balikpapan.



Gambar 2. 6 Peta DAS Kota Bontang

Sumber: RTRW Kota Bontang, Tahun 2019 - 2039

Ditinjau dari aspek geohidrologi, cekungan air tanah Kota Bontang termasuk dalam sub bagian cekungan Kutai dengan batas fisik di sebelah timur Selat Makassar, sebelah selatan Sungai Santan, sebelah barat Gunung Lobang Batik dan sebelah utara Sungai Temputuk.

Bagian barat Bontang ke arah perbukitan G.Lobang Batik merupakan daerah utama untuk peresapan air tanah tertekan. Air hujan di daerah ini meresap pada batuan formasi Kampungbaru yang didominasi oleh pasir, dibagian paling barat berbatasan dengan formasi Balikpapan, yang terletak memanjang dari utara ke selatan sejajar dengan penyebaran batuan formasi Balikpapan yang menempati sayap antiklin bagian timur, untuk itu perlu untuk menjaga daerah tersebut demi keberlanjutan air tanah dalam yang menjadi air baku utama dan satu-satunya di Kota Bontang.

Secara umum aliran air tanah mengikuti kemiringan lapisan batuan dengan keadaan kemiringan yang lebih tua dari formasi Kampungbaru serta kemiringannya yang lebih terjal (dapat mencapai 400 makin dekat ke arah sumbu antiklin) tidak dapat memberikan imbuhan kepada batuan Formasi Kampungbaru, karena di samping mengalir air pada bidang sendiri juga ada bidang pemisah yaitu unconformity (ketidakselarasan). Bidang kontak tersebut dapat dijumpai sekitar jalur pemipaan PT. Pupuk Kaltim. Maka sebagai

batas bawah (lantai dasar) cekungan potensial Bontang adalah dialasi oleh Formasi batuan Balikpapan.

F. Penggunaan Lahan

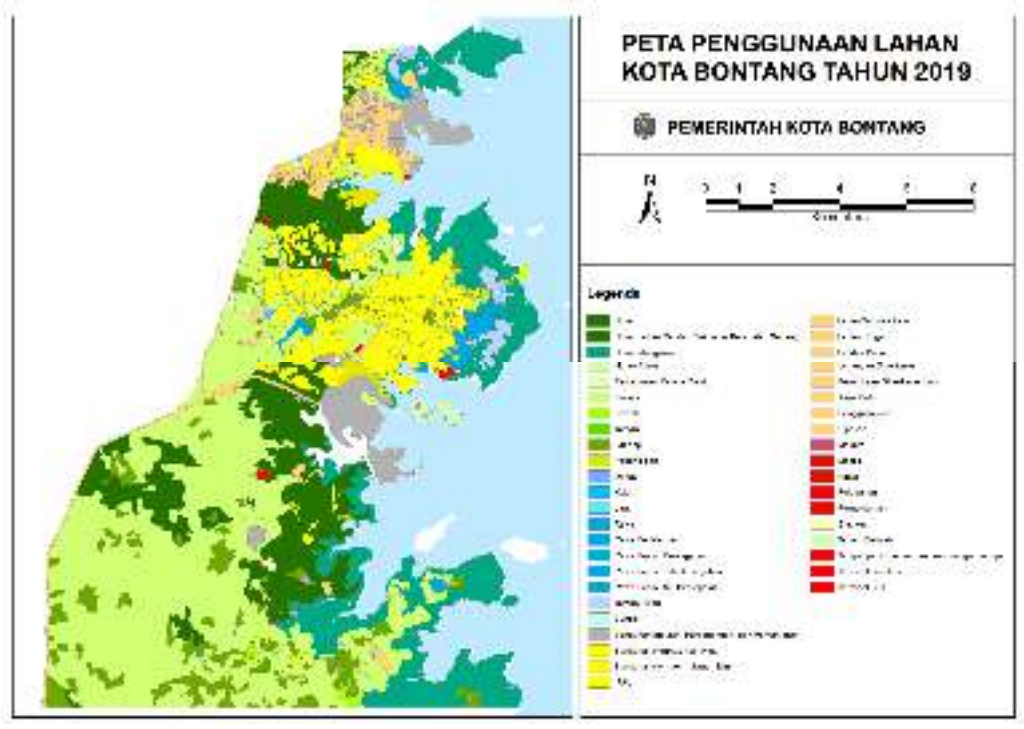
Penggunaan lahan dan tutupan lahan di Kota Bontang pada tahun 2019 secara umum didominasi oleh lima jenis penggunaan, dengan urutan dari yang terluas adalah penggunaan lahan semak, hutan mangrove, hutan lahan rendah, bangunan permukiman kota, serta bangunan industri, perdagangan dan perkantoran. Penggunaan lahan di Kota Bontang didominasi oleh kawasan non terbangun yang mencapai sekitar 82%. Hal tersebut menunjukkan potensi bontang untuk berkembang masih sangat tinggi tentunya dengan memperhatikan keberadaan kawasan kehutanan.

Tabel 2. 2 Luasan penggunaan lahan tahun 2002, 2009 dan 2016

No	LAND COVER 2019	LUAS (HA)	Persentase
1	Area Parkir	1,11	0,01
2	Bangunan Industri, Perdagangan, dan Perkantoran	735,24	4,63
3	Bangunan non-permukiman lain	2,98	0,02
4	Bangunan Permukiman Kota	1.787,79	11,27
5	Danau	9,40	0,06
6	Hutan	27,96	0,18
7	Hutan Lahan Rendah Sekunder Kerapatan Sedang	2.331,81	14,70
8	Hutan Mangrove	2.622,44	16,53
9	Hutan Pinus	62,81	0,40
10	IPAL	0,03	0,00
11	Kolam	9,41	0,06
12	Ladang	957,31	6,03
13	Lahan Terbuka Lain	112,30	0,71
14	Lahan Urugan	254,46	1,60
15	Landas Pacu	36,50	0,23
16	Lapangan Diperkeras	1,13	0,01
17	Laut	10,25	0,06
18	Makam	6,18	0,04
19	Masjid	3,97	0,03
20	Padang golf	111,55	0,70
21	Pasar	1,26	0,01
22	Pelabuhan	3,76	0,02
23	Penggalian sirtu	26,39	0,17
24	Pergudangan	11,49	0,07

No	LAND COVER 2019	LUAS (HA)	Persentase
25	Perkebunan Kelapa Sawit	51,07	0,32
26	Permukaan Diperkeras Lain	32,07	0,20
27	Pipeline	167,75	1,06
28	Rawa	54,09	0,34
29	Rawa Pedalaman	4,19	0,03
30	Rawa Pesisir Bervegetasi	50,34	0,32
31	Rawa Pesisir Tak Bervegetasi	120,38	0,76
32	Sawah	40,40	0,25
33	Semak	5.932,92	37,39
34	Stadion	27,68	0,17
35	Sungai	47,62	0,30
36	Taman	2,45	0,02
37	Taman Bermain	6,96	0,04
38	Tambak Ikan	184,00	1,16
39	Tempat penimbunan dan pembuangan sampah	13,04	0,08
40	Terminal Bandara	4,42	0,03
41	Terminal Bus	0,80	0,01
	TOTAL	15.867,71	100,00

Sumber : hasil analisis tahun 2021



Gambar 2. 7 Peta Penggunaan lahan tahun 2019

G. Potensi Pengembangan Wilayah

Perkembangan Kota Bontang jika dilihat dari aspek fisik khususnya kawasan terbangun, relatif lebih berkembang dan terkonsentrasi di wilayah utara, untuk itu salah satu kebijakan Pemerintah Kota Bontang adalah mengupayakan akselerasi pembangunan di wilayah selatan. Percepatan pembangunan di wilayah selatan juga bertujuan untuk pemerataan pembangunan, salah satu kebijakannya adalah dengan membangun akses/ jaringan yang memadai dan memindahkan pusat pemerintahan ke Kelurahan Bontang Lestari. Selain itu pengembangan kawasan industri baru seluas $\pm$ 1.200 hektar diharapkan dapat menjadi magnet pertumbuhan di wilayah selatan.

Potensi utama Kota Bontang memang berada disektor industri terutama industri migas dan pengolahan, namun seiring penurunan sektor industri saat ini Pemerintah Kota Bontang berupaya menggali potensi disektor lainnya. Salah satu yang diupayakan saat ini adalah sektor pariwisata.

H. Kawasan Strategis Ekonomi

Kawasan strategis kota dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi ditetapkan di Bontang Lestari. Pada kawasan tersebut terdapat kawasan pengembangan industri baru yang diharapkan mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi kota dan berpotensi ekspor dengan didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi.

Bontang Lestari diarahkan sesuai dengan kriteria pengembangan kota berbasis industri dan peningkatan fungsi kawasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Kota Bontang berkedudukan pada lokasi strategis dalam lingkup regional, yaitu antara kota Samarinda/Balikpapan dan kota Sangatta – Bengalon dan memiliki akses langsung ke Selat Makassar. Kondisi strategis ini diperkuat dengan adanya sistem aktivitas industri berat dan manufaktur berskala nasional, bahkan internasional.

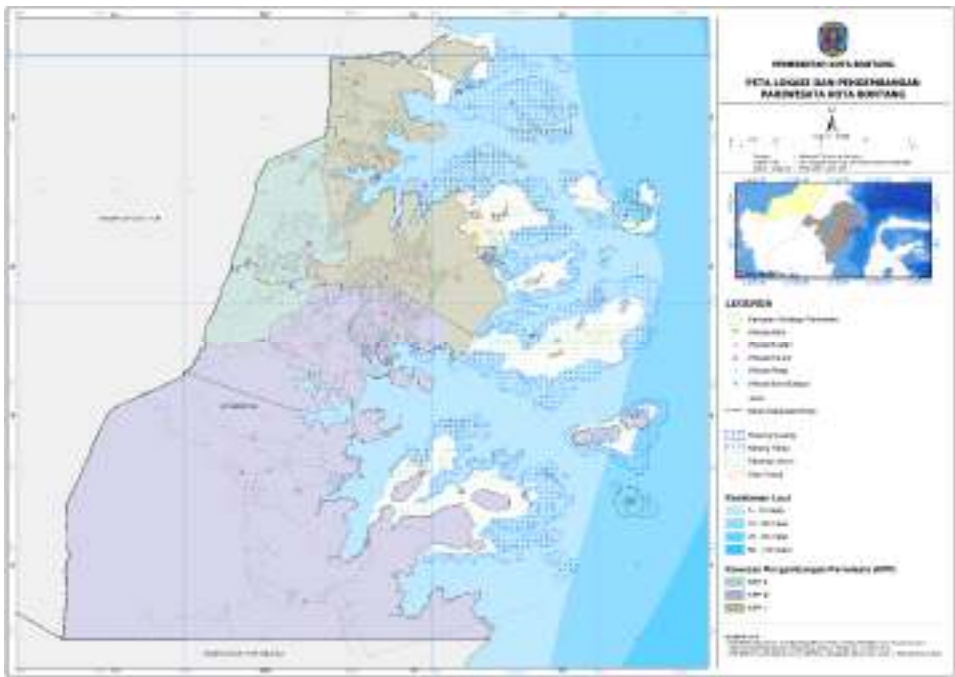
I. Kawasan Strategis Pariwisata

Kota Bontang mempunyai potensi pariwisata, terutama pariwisata bahari, hal tersebut tidak lepas dari lokasi Kota Bontang yang berada di pesisir. Salah satu potensi daya tarik wisata bahari adalah Pulau Beras Basah dengan keindahan pantai pasir putih dan keragaman terumbu karangnya, Pulau Kedindingan dengan keindahan hutan mangrove, serta kawasan hutan mangrove sepanjang pesisir Tanjung Limau – Bontang Kuala – Tanjung Laut Indah hingga ke Berbas Pantai.

Produksi perikanan kelautan Kota Bontang pun cukup menjanjikan seperti tangkapan ikan laut, budidaya karamba, maupun produksi rumput laut serta keberadaan perkampungan nelayan di Bontang Kuala, Selangan, Melahing, Tihik-tihik, dan lainnya serta dapat menjadi potensi pariwisata bahari yang mengedepankan aspek marinkultur dan budaya. Potensi lainnya yang dimiliki Kota Bontang antara lain:

1. Daya tarik wisata alam lainnya, seperti kawasan hutan lindung yang menyambung dengan Taman Nasional Kutai Timur, maupun hutan kota/hutan rakyat di kawasan Bontang Lestari, Sungai Kanibungan serta Danau Kanaan dengan keindahan panorama waduknya;
2. Daya tarik wisata budaya, seperti Erau Guntung, Makam Toraja, dan event Pesta Laut Bontang Kuala. Wisata edukasi budaya, seperti edukasi pembuatan batik dan pembelajaran seni tari khas Bontang bagi wisatawan.

Potensi-potensi pariwisata ini harus direncanakan dan dikelola dengan baik agar dapat menjadi sumber pendapatan daerah pasca migas atau minyak dan gas bumi yang merupakan SDA tidak terbarukan (*non-renewable natural resource*). Sektor pariwisata pada masa yang akan datang dapat dijadikan andalan dan generator aktivitas pembangunan kota Bontang pasca migas.

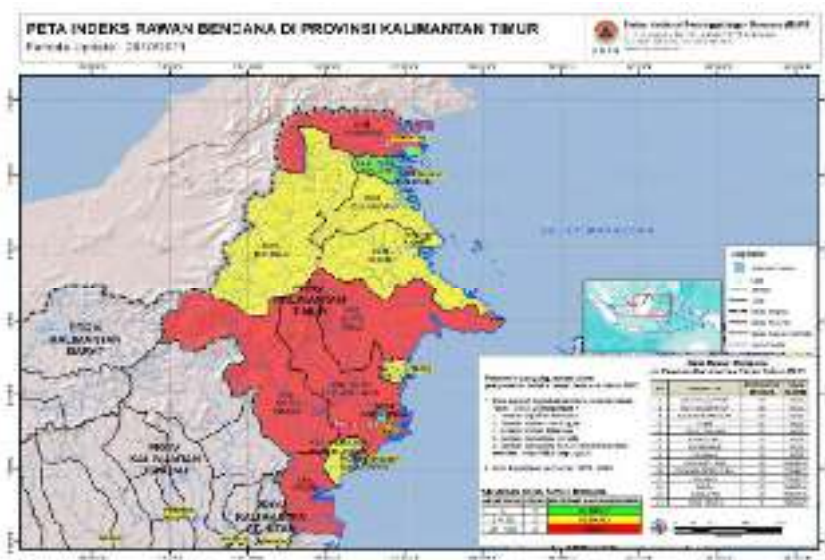


Gambar 2. 8 Peta Lokasi dan Pengembangan Pariwisata Kota Bontang

J. Wilayah Rawan Bencana

Potensi bencana di Kota Bontang menggunakan pendekatan Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) yang telah dilakukan oleh BNPB. IRBI merupakan suatu perangkat analisis kebencanaan yang berbentuk indeks yang menunjukkan riwayat nyata kebencanaan yang telah terjadi dan menimbulkan kerugian. IRBI dikembangkan atas konsep analisis riwayat kebencanaan yang terjadi dan memberikan kerugian signifikan pada suatu wilayah hingga tingkat kota.

Berdasarkan IRBI menunjukkan secara umum Kota Bontang merupakan daerah dengan tingkat kerawanan bencana sedang. Klasifikasi potensi sedang ini disebabkan karena Kota Bontang memiliki kerawanan bencana yang cukup kompleks. Potensi bencana di Kota Bontang dapat terjadi secara alami maupun akibat adanya pengaruh manusia, selain itu penanganannya harus dilakukan secara menyeluruh yang melibatkan seluruh aspek.



Gambar 2. 9 Indeks Rawan Bencana Indonesia Kalimantan Timur

Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2020

Hasil analisis kemungkinan dampak bencana berdasarkan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kota Bontang menunjukkan setidaknya terdapat 8 resiko bencana yang dapat terjadi di Kota Bontang yaitu:

- 1. Resiko bencana angin;
- 2. Resiko bencana banjir;
- 3. Resiko epidemi penyakit;
- 4. Resiko bencana gempa bumi;
- 5. Resiko bencana kebakaran;
- 6. Resiko bencana longsor;
- 7. Resiko bencana tsunami;
- 8. Resiko bencana kegagalan teknologi.

Berdasarkan data kejadian bencana sepanjang tahun 2017-2020, terlihat kebakaran, kecelakaan laut dan banjir merupakan bencana yang paling sering terjadi. Bencana kebakaran perlu menjadi perhatian karena dalam 2 tahun terakhir mengalami peningkatan dengan rata-rata 5 kejadian per bulan. Kejadian banjir walaupun hanya terjadi sekali di tahun 2019 namun merupakan salah satu bencana banjir terparah dan berdampak terbesar yang pernah terjadi di Kota Bontang.

Tabel 2. 3 Tabel Jumlah Kejadian Bencana Kota Bontang Tahun 2017-2020

No	Jenis Bencana	2017	2018	2019	2020
1	Rumah roboh	-	-	1	-
2	Banjir	7	3	1	-
3	Tanah longsor	-	3	4	-
4	Gempa bumi	-	-	-	-
5	Tsunami	-	-	-	-
6	Angin kencang	1	-	-	-
7	Angin putting beliung	1	-	-	-
8	Kecelakaan laut	4	6	9	3
9	Kebakaran	27	29	77	50
	JUMLAH	40	41	91	53

Sumber: BPBD dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

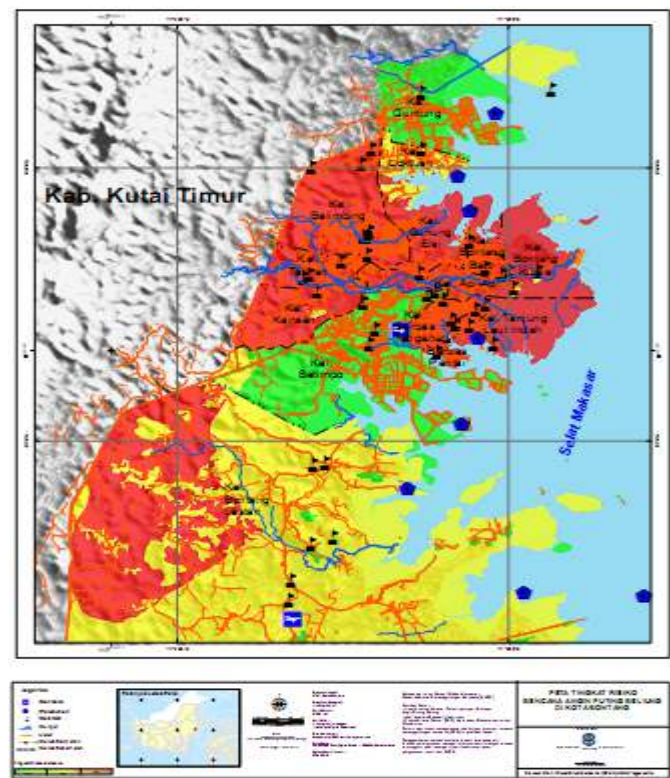
1. Bencana Angin Puting Beliung

Ancaman angin puting beliung dapat terjadi di Kota Bontang. Berdasarkan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kota Bontang yang disusun pada Tahun 2013, luas daerah yang memiliki potensi ancaman tinggi bencana angin puting beliung adalah 42%, sedangkan sisanya merupakan potensi sedang hingga rendah.

Potensi kerentanan dan kapasitas terhadap bencana angin puting beliung relatif tinggi sebesar 15,79%, sedangkan potensi kerentanan dan kapasitas sedang dan rendah masing-masing sebesar 31,7% dan 52,51%. Tingkat kapasitas ini belum secara menyeluruh karena kejadian angin puting beliung berdasarkan catatan bencana relatif rendah. Ketika bencana datangnya tidak sering dan tidak terlalu merugikan, biasanya masyarakat cenderung tidak memperhatikan bencana dan lingkungan sekitar.

Risiko bencana angin tinggi di bagian utara Kota Bontang, yaitu di seluruh Kecamatan Bontang Barat, Kecamatan Bontang Utara bagian timur (Kelurahan Gunung Elai, Bontang Baru, Api-api, Bontang Kuala, dan sebagian Kelurahan Loktuan), dan sebagian Kecamatan Bontang Selatan (Kelurahan Tanjung Laut, Tanjung Laut Indah,

Berbas tengah, Berbas Pantai, dan bagian barat Kelurahan Bontang Lestari. Sebagian Kelurahan Bontang Lestari dan sebagian Kelurahan Loktuan memiliki risiko bencana angin sedang. Risiko bencana angin rendah ada di bagian utara (Kelurahan Guntung) dan tengah (Kelurahan Satimpo). Persentase risiko tinggi, sedang, rendah secara berurutan adalah 34%, 49%, dan 17%.



Gambar 2. 10 Peta Resiko Bencana Angin Puting Beliung

Sumber : Kajian Rencana Penanggulangan Bencana Kota Bontang Tahun 2013

2. Bencana Banjir

Secara umum, permasalahan banjir di Kota Bontang disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam dipengaruhi oleh curah hujan dan topografi. Wilayah Bontang mengalami banjir karena curah hujan tinggi sekitar 2.200-2.700 mm/tahun. Di samping itu, banjir juga disebabkan oleh topografi Kota Bontang yang berbentuk seperti distribusi poisson, yakni tinggi di bagian Barat dan Selatan, tapi rendah di bagian Timur dan Utara. Air limpasan dari daerah tinggi di Selatan dan Barat Kota Bontang potensial membanjiri kawasan dataran rendah di Timur dan Utara Kota Bontang. Limpasan ini kurang efektif dilayani oleh Sungai Bontang karena secara morfologis sudah tidak ideal.

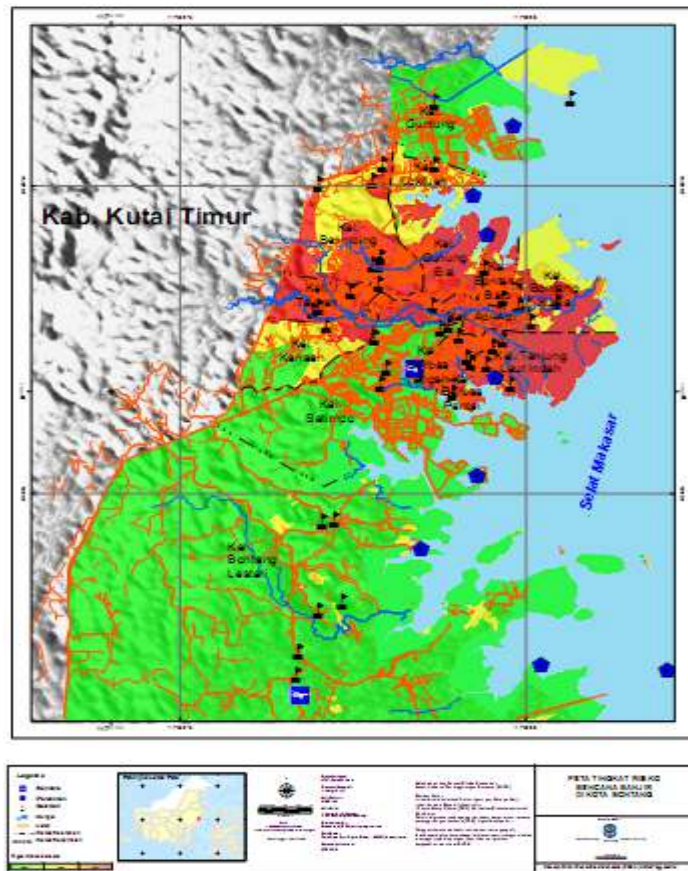
Faktor manusia yang menyebabkan banjir antara lain perilaku membuang sampah/limbah padat ke sungai, membangun permukiman di bantaran sungai, dan merusak hutan yang menjadi daerah tangkapan air. Sungai yang terdapat di Kota Bontang kondisi fisiknya termasuk buruk, sebagian besar mengalami pendangkalan

ditambah adanya permukiman di Kawasan sempadannya. Pada tahun 2019 terjadi bencana banjir besar dengan skala yang lebih tinggi dibanding banjir tahunan baik dari luas genangan, ketinggian banjir hingga durasinya.

Banjir rob juga terjadi di Kota Bontang. Banjir rob terjadi pada saat air laut sedang pasang dan ketika itu terjadi hujan. *Run off* yang seharusnya menuju ke laut akan terhalang karena adanya kenaikan muka air laut. Terdapat beberapa wilayah di Kota Bontang yang berpotensi rawan banjir rob, seperti Kelurahan Bontang Kuala, Guntung, Gunung Elai, dan Loktuan.

Kerentanan dan kapasitas terhadap banjir termasuk rendah karena menganggap kejadian banjir selama ini hanya terjadi relatif kecil dan hanya berlangsung dalam waktu maksimal 1 hari. Ketinggian banjir yang terjadi di Kota Bontang kurang lebih paling tinggi adalah setinggi lutut orang dewasa atau perkiraan kurang dari 50 cm. Keadaan ini yang menyebabkan masyarakat di Kota Bontang hanya sedikit yang meninggikan bangunan rumahnya sehingga air tidak masuk ke dalam rumah.

Kapasitas pemerintah dalam menanggulangi banjir terlihat dari pelaksanaan normalisasi sungai dan penurapan sungai Bontang. Akan tetapi program pengendalian banjir yang dilaksanakan oleh pemerintah tidak disertai oleh kesadaran masyarakat untuk tidak tinggal di sempadan sungai dan tidak membuang sampah di sungai. Dalam menanggulangi banjir, masyarakat Kota Bontang cenderung hanya menggantungkan kebijakan pemerintah dan perusahaan. Kedepannya perlu adanya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama sesuai dengan kapasitasnya berperan secara aktif dalam penanggulangan banjir di Kota Bontang.



Gambar 2. 11 Peta Resiko Bencana Banjir

Sumber : Kajian Rencana Penanggulangan Bencana Kota Bontang Tahun 2013

3. Bencana Epidemi Penyakit

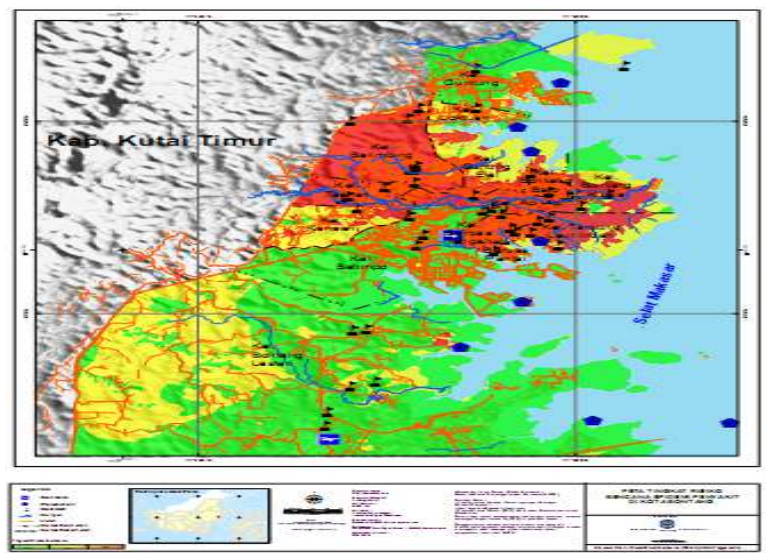
Ancaman bencana epidemi penyakit dalam hal ini terkait dengan adanya penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), demam berdarah yang pada tahun 2020 mengalami lonjakan dibanding tahun-tahun sebelumnya, malaria dan sejenisnya, serta bencana pandemi COVID-19 yang juga melanda dunia saat ini.

Adaptasi kebiasaan baru merupakan salah satu upaya untuk mengatasi pandemi dan sekaligus meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Selain itu perlu penyediaan berbagai fasilitas Kesehatan dan penyuluhan Kesehatan agar masyarakat dapat berperilaku hidup sehat dan selalu mengingat protokol Kesehatan dalam aktivitasnya.

Terkait dengan ancaman bencana epidemi lokal, wilayah Bontang bagian tengah memiliki tingkat risiko tinggi terhadap bencana epidemi penyakit. Wilayah ini meliputi Kelurahan Belimbing, Gunung Telihan, Bontang Baru, Api-api, Berbas Tengah; sebagian besar Kelurahan Tanjung Laut Indah, Berbas Pantai; dan Sebagian kecil wilayah kelurahan Kanaan, Gunung Elai, Bontang Kuala. Tingginya risiko epidemi penyakit ini terkait dengan kejadian banjir yang kerap terjadi di wilayah ini. Banjir yang menggenang kawasan permukiman dan pusat-pusat kegiatan masyarakat dapat meningkatkan potensi

epidemi penyakit. Walaupun persentase keseluruhan wilayah dengan tingkat risiko tinggi di Kota Bontang relatif kecil (18%) tetapi berada di area terbangun dan pusat kegiatan penduduk. Sehingga perlu adanya upaya mitigasi untuk pengurangan risiko bencana ini.

Risiko sedang sebesar 27% terdistribusi di sebagian Kelurahan Guntung, Kanaan, Loktuan, Bontang Kuala, dan Bontang Lestari. Sedangkan risiko rendah sebesar 56% berada di kelurahan Satimpo, dan sebagian besar wilayah Kelurahan Guntung dan Bontang Lestari.



Gambar 2. 12 Peta Resiko Bencana Epidemi Penyakit

Sumber : Kajian Rencana Penanggulangan Bencana Kota Bontang Tahun 2013



Gambar 2. 13 Infografis COVID-19 di Kota Bontang

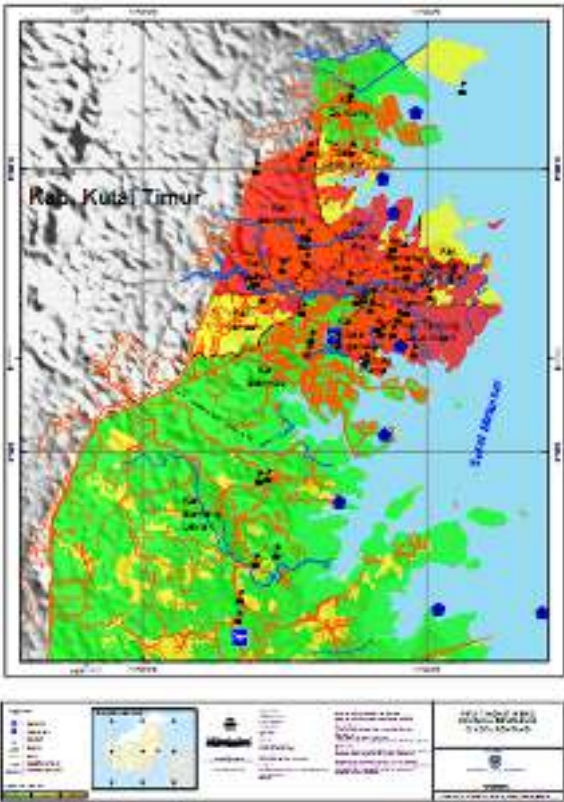
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2020

4. Bencana Gempa Bumi

Ancaman gempa bumi ditentukan berdasarkan perhitungan Peak Ground Acceleration (PGA) yang biasa disebut percepatan tanah apabila terkena guncangan. Berdasarkan sejarahnya belum pernah terjadi pusat gempa berada di Kota Bontang. Akan tetapi gempa bumi pernah terjadi di wilayah sebelah utara atau timur laut dari Kota Bontang diantaranya pada tahun 1921, 1923, 1926, 1975, 2018 dan 2020. Adanya gempa bumi yang terjadi di daerah utara mungkin dapat berpengaruh pada Kota Bontang walaupun secara kekuatan relatif akan berbeda jauh.

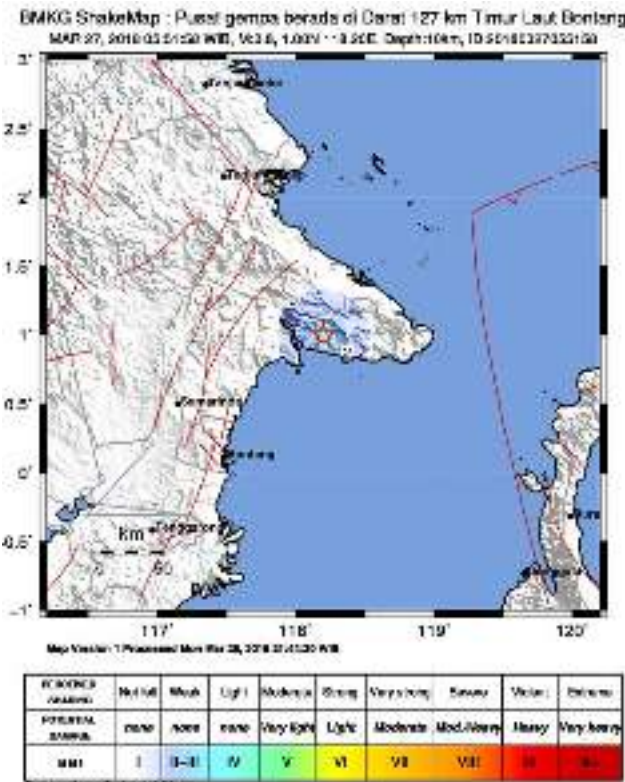
Tingkat kesadaran masyarakat Bontang terhadap gempa bumi termasuk rendah. Hal ini disebabkan karena anggapan masyarakat bahwa Kota Bontang bebas dari ancaman gempa bumi. Kelurahan Bontang Lestari merupakan daerah yang potensi bencana gempa buminya relatif sedang. Hal ini disebabkan oleh asal sumber bencana gempa bumi yang terletak di daerah utara Kota Bontang. Kelurahan Guntung dan Satimpo berpotensi tinggi karena terdapat sosialisasi dari perusahaan PT. Pupuk Kaltim maupun PT Badak NGL walaupun tidak secara spesifik pada bencana gempabumi tetapi di dalam kesiapannya meliputi bencana yang sewaktu-waktu akan terjadi.

Risiko gempa bumi sangat berkaitan dengan ancaman bencana, kerentanan, dan kapasitas. Kota Bontang bagian tengah sampai bagian utara, tingkat kapasitasnya tinggi, sedangkan bagian selatan sedang. Bagian tengah merupakan daerah terbangun dan pusat kegiatan sehingga tingkat kerentanannya tinggi. Faktor kerentanan inilah yang menyebabkan wilayah bagian tengah memiliki tingkat risiko tinggi terhadap bencana gempa bumi. Wilayah tersebut sebesar 21% meliputi wilayah Kelurahan Belimbing, Telihan, Gunung Elai, Bontang Baru, Api-api, Tanjung Laut, Berbas Tengah, Berbas Pantai, Tanjung Laut Indah; dan sebagian wilayah Kelurahan Loktuan, Bontang Kuala, dan Kanaan. Wilayah dengan tingkat risiko sedang sebesar 16% berada di sebagian wilayah Kelurahan Loktuan, Kanaan, Bontang Kuala, dan Bontang Lestari. Sedangkan wilayah lainnya memiliki tingkat risiko rendah yaitu Kelurahan Satimpo, Guntung, dan sebagian besar Kelurahan Bontang Lestari.



Gambar 2. 14 Peta Resiko Bencana Gempa bumi

Sumber : Kajian Rencana Penanggulangan Bencana Kota Bontang Tahun 2013



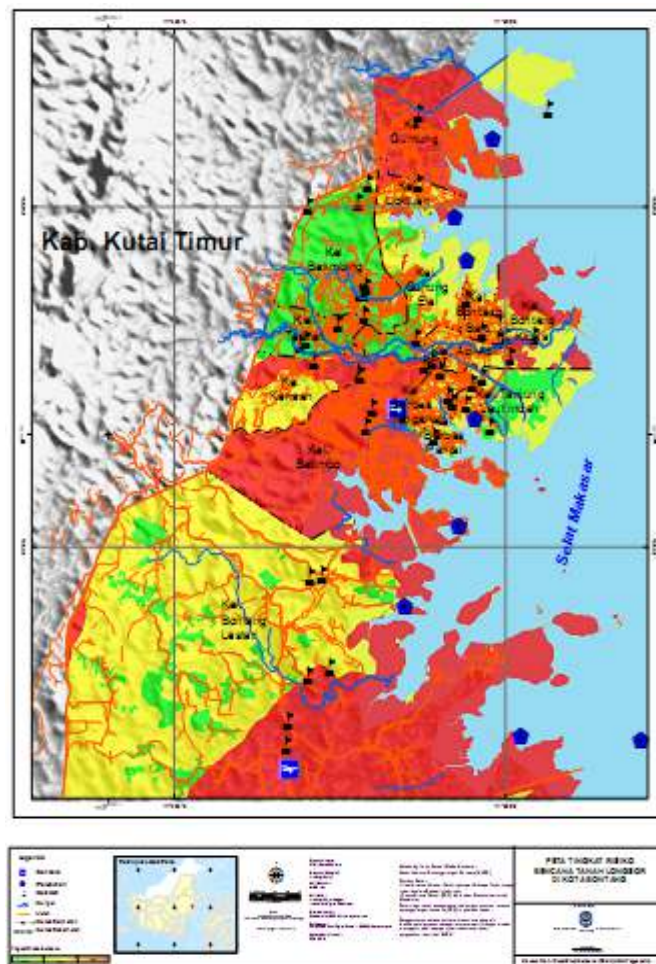
Gambar 2. 15 BMKG ShakeMap 2018

Sumber: Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG)

5. Bencana Bencana Longsor

Bencana tanah longsor yang terdapat di Kota Bontang terjadi akibat adanya pembukaan lahan dari hutan menjadi jalan atau penggunaan lainnya. Semakin tingginya potensi longsor dapat ditandai dengan semakin banyaknya erosi yang terjadi. Adanya erosi merupakan indikasi yang sangat kuat bahwa potensi longsornya juga akan semakin tinggi. Erosi mencerminkan bahwa kekuatan daya tarik antar agregat-agregat tanah sudah mulai berkurang. Ketika kekuatan gaya tarik antar agregat sudah berkurang maka kemungkinan longsor akan semakin besar. Kemungkinan ini dapat terjadi apabila tanah sudah mengalami kejenuhan air dan ketika mengalami pembebanan.

Risiko longsor tinggi terdistribusi pada daerah dengan kemiringan lereng terjal dan terdapat permukiman atau bangunan infrastruktur. Risiko tinggi sebesar 38% berada di Kelurahan Guntung, Satimpo, dan sebagian wilayah Kelurahan Loktuan, Bontang Kuala, Kanaan, dan Bontang Lestari. Risiko rendah sebesar 13% antara lain di Kelurahan Belimbing, Telihan, dan sebagian Kelurahan Gunung Elai dan Tanjung Laut Indah. Risiko sedang sebesar 49% berada di daerah perbukitan dengan penggunaan lahan utama berupa hutan, dan wilayah kelurahan pada dataran rendah. Risiko sedang ini antara lain adalah sebagian wilayah Kelurahan Gunung Elai, Loktuan, Kanaan, Bontang Kuala, Tanjung Laut Indah, Kelurahan Bontang Baru, Kelurahan Apiapi, Kelurahan Tanjung Laut, Kelurahan Berbas Tengah, Kelurahan Berbas Pantai, dan Sebagian besar wilayah Kelurahan Bontang Lestari.



Gambar 2. 16 Peta Resiko Bencana Longsor

Sumber : Kajian Rencana Penanggulangan Bencana Kota Bontang Tahun 2013

6. Kawasan Kerusakan Air Tanah

Pertumbuhan penduduk dan pembangunan di Kota Bontang menyebabkan kebutuhan air bersih juga semakin meningkat. Hingga saat ini kebutuhan air bersih untuk keperluan rumah tangga dan industri seluruhnya berasal dari sumber air tanah. Bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kegiatan perekonomian di Kota Bontang berdampak pada terjadinya peningkatan secara signifikan kebutuhan air bersih dan lahan untuk perumahan bagi masyarakat.

Pengambilan air tanah secara besar-besaran tanpa diimbangi dengan perbaikan lingkungan pada daerah resapan air (*recharge area*) dapat menyebabkan penurunan kuantitas air tanah yang ditunjukkan oleh penurunan muka air tanah secara menerus hingga melebihi batas muka air tanah aman. Dampak lanjutan lainnya yang dapat terjadi adalah degradasi kualitas air tanah karena intrusi air laut dan polusi air tanah serta penurunan muka tanah atau amblesan tanah (*land subsidence*).

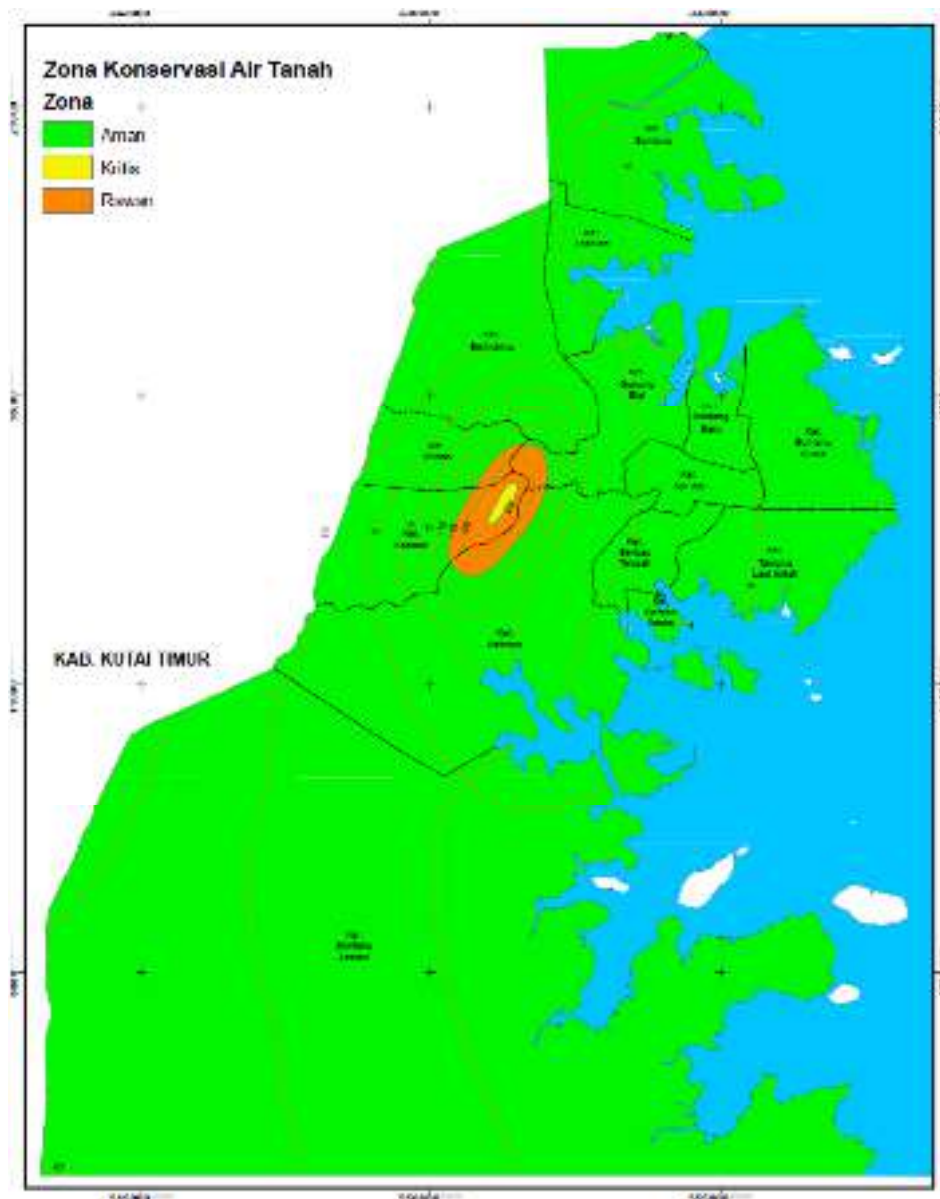
Hutan Lindung Bontang yang berfungsi menjaga ketersediaan air tanah saat ini mengalami kerusakan akibat kebakaran hutan dan alih fungsi akibat perambahan hutan. Apabila tidak segera dilakukan

perbaikan lingkungan di kawasan hutan lindung tersebut maka hal ini akan dapat menyebabkan berkurangnya air hujan yang meresap ke dalam tanah dan meningkatnya aliran permukaan (*run off*) sehingga mengakibatkan bencana banjir.

Salah satu permasalahan yang terjadi akibat pengambilan air tanah adalah terjadinya penurunan muka air tanah. Hasil pengukuran pada beberapa sumur bor pantau dan produksi menunjukkan penurunan kedudukan muka piezometrik di Kota Bontang 27.5 m atau hampir sekitar 1 m/tahun di daerah kompleks industri PT. Badak NGL atau turun 17.5 m atau hampir 0.5 m/tahun di kompleks industri PT Pupuk Kaltim.

Berdasarkan perubahan kedudukan MAT, tingkat kerusakan air tanah atau zonasi konservasi air tanah pada system akuifer terkekang di Kota Bontang saat ini dalam kategori rusak, kritis, rawan, dan aman, yaitu sebagai berikut:

- Zona rusak; daerah dengan penurunan kedudukan muka air tanah dihitung sejak kondisi awal lebih dari 80%; saat ini tidak dijumpai.
- Zona kritis; pada zona ini terdapat daerah dengan penurunan kedudukan muka air tanah terkekang dihitung sejak kondisi awal antara 60-80%, muka air tanah saat ini berada pada kedudukan antara 35 m bmt, atau elevasi sekitar -25 m yaitu menempati daerah Komplek sekitar PT.Badak NGL, Kecamatan Bontang Barat;
- Zona rawan, Zona ini menempati pula daerah dengan penurunan kedudukan muka air tanah terkekang di hitung sejak kondisi awal antara 40-60%, muka air tanah saat ini berada pada kedudukan sekitar 25 m bmt atau elevasi -15 m yaitu di bagian luar komplek PT.Badak NGL (Bontang Barat) dan Komplek PT.Pupuk Kaltim (Bontang Utara);
- Zona aman, Zona ini menempati pula daerah dengan penurunan kedudukan muka air tanah terkekang di hitung sejak kondisi awal antara <40%, muka air tanah saat ini berada pada kedudukan sekitar 10 m bmt atau > elevasi 0 m yaitu terutama daerah selatan (Bontang Selatan) dan daerah Barat



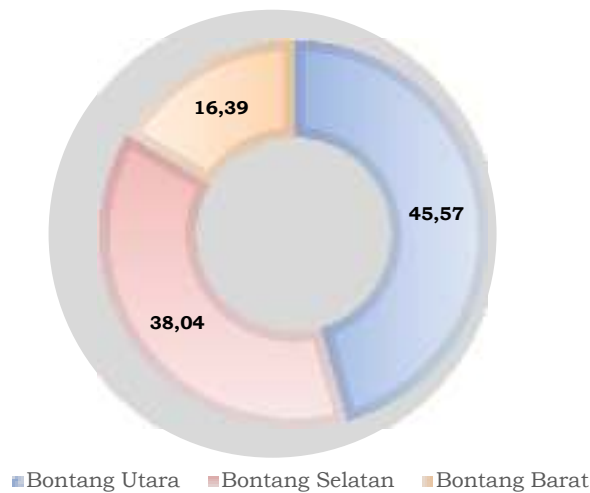
Gambar 2. 17 Zona Konservasi Air Tanah

Sumber : Kajian Konservasi Air Tanah Tahun 2013

2.1.1.2 Aspek Demografi

A. Profil Persebaran dan Pertumbuhan Penduduk

Kota Bontang yang terdiri dari 3 Kecamatan dan 15 Kelurahan pada tahun 2020 memiliki jumlah penduduk sebesar 184.784 jiwa. Penduduk Kota Bontang tersebar di Kecamatan Bontang Utara sebanyak 45,57 persen, di Kecamatan Bontang Selatan sebesar 38,04 persen dan sebesar 16,39 persen berada di Kecamatan Bontang Barat.

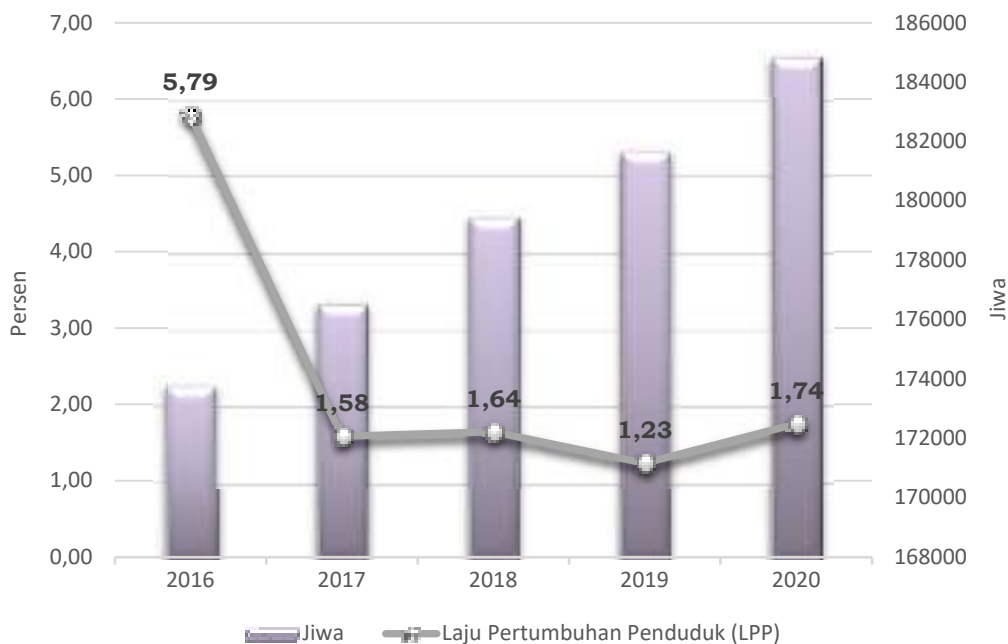


Gambar 2. 18 Sebaran Penduduk Kota Bontang

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2020, diolah

Berdasarkan kepadatannya, Kecamatan Bontang Utara memiliki kepadatan penduduk paling tinggi dibandingkan dengan kedua kecamatan sisanya yaitu sebesar 2.550 jiwa/km². Sedangkan Kecamatan Bontang Barat dan Bontang Selatan sebesar 1.689 jiwa/km² dan 634 jiwa/km². Kota Bontang juga merupakan Kota dengan banyak pulau kecil yaitu sebanyak 22 pulau, dengan 3 pulau yang berpenghuni seperti Pulau Melahing, Tihi-Tihi, dan Gusung. Penduduk Kota Bontang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Berdasarkan data kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang tahun 2016-2020, tercatat penduduk Kota Bontang Tahun 2016 adalah sebesar 173.770 jiwa. Angka ini terus meningkat hingga tahun 2020 sebesar 184.784 jiwa dengan laju pertumbuhan rata-rata per tahunnya adalah berkisar 2 persen.

Dilihat dari tren pertumbuhan penduduk, laju pertumbuhan secara konstan melambat mulai tahun 2016 yaitu sebesar 5,79 persen, turun menjadi 1,64 persen pada tahun 2018 selanjutnya meningkat kembali sebesar 1,74 persen di tahun 2020.



Gambar 2. 19 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Bontang

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2020, diolah

Struktur penduduk Kota Bontang berdasarkan kelompok umur dapat dibagi menjadi kelompok umur produktif dan tidak produktif. Umur produktif adalah umur pada angkatan kerja yaitu umur 15 – 64 tahun. Penduduk di umur ini diharapkan dan yang berpeluang besar untuk bekerja dan menghasilkan nilai ekonomi untuk mendorong kegiatan ekonomi Kota Bontang. Sedangkan penduduk tidak produktif adalah penduduk pada kelompok umur 0-14 tahun dan 65 ke atas. Penduduk pada Kelompok umur ini adalah penduduk umur bersekolah dan lansia yang kemungkinan kecil untuk menghasilkan nilai ekonomi. Komposisi penduduk Kota Bontang Tahun 2016 hingga 2020 masih di dominasi oleh penduduk produktif namun setiap tahunnya cenderung mengalami penurunan. Tercatat penduduk usia produktif sebesar 70,63 persen di tahun 2016, mengalami kenaikan pada tahun 2017 sebesar 70,83 persen. Angka ini menurun di tahun 2018 sebesar 70,21 persen, hingga tahun 2020 sebesar 69,81 persen. Sejalan dengan menurunnya penduduk usia produktif, maka semakin meningkat pula penduduk usia tidak produktif. Pada tahun 2016 tercatat penduduk usia 0-4 tahun sebesar 27,1 persen, angka tersebut meningkat hingga tahun 2019 mencapai 28,23 persen kemudian menurun menjadi 27,95 persen di tahun 2020. Sedangkan penduduk kelompok umur 65 keatas cenderung meningkat dari tahun 2016. Pada tahun 2020 tercatat sebesar 2,24 persen penduduk lansia dimana lebih besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dapat dipengaruhi oleh umur harapan hidup penduduk Kota Bontang tahun 2020 yang meningkat setiap tahunnya dibandingkan

dengan tahun 2016 dan adaya peningkatan pelayanan dan fasilitas kesehatan untuk penduduk lansia.

Tabel 2. 4 Jumlah Penduduk Kota Bontang Menurut Kelompok Umur

No.	Kelompok Usia (Tahun)	Jumlah Penduduk				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	0-4	15.988	15.228	15.984	16.222	16.114
2	5-9	16.497	17.185	17.720	18.192	18.218
3	10-14	15.658	15.995	16.349	16.850	17.319
4	15-19	13.866	15.649	16.142	15.211	15.917
5	20-24	16.785	16.424	16.243	16.459	16.675
6	25-29	17.350	17.109	16.756	16.739	16.691
7	30-34	16.586	16.237	15.954	15.884	15.855
8	35-39	14.491	14.840	14.868	14.853	15.023
9	40-44	12.576	12.416	12.516	13.001	13.308
10	45-49	11.595	11.976	11.831	11.581	11.630
11	50-54	9.924	9.973	10.394	10.759	10.717
12	55-59	6.329	6.899	7.282	7.619	8.111
13	60-64	3.228	3.509	3.976	4.457	5.073
14	65-69	1.466	1.667	1.887	2.178	2.314
15	70-74	761	726	799	880	1.009
16	>75	670	682	707	733	810
	Jumlah	173.770	176.515	179.408	181.618	184.784

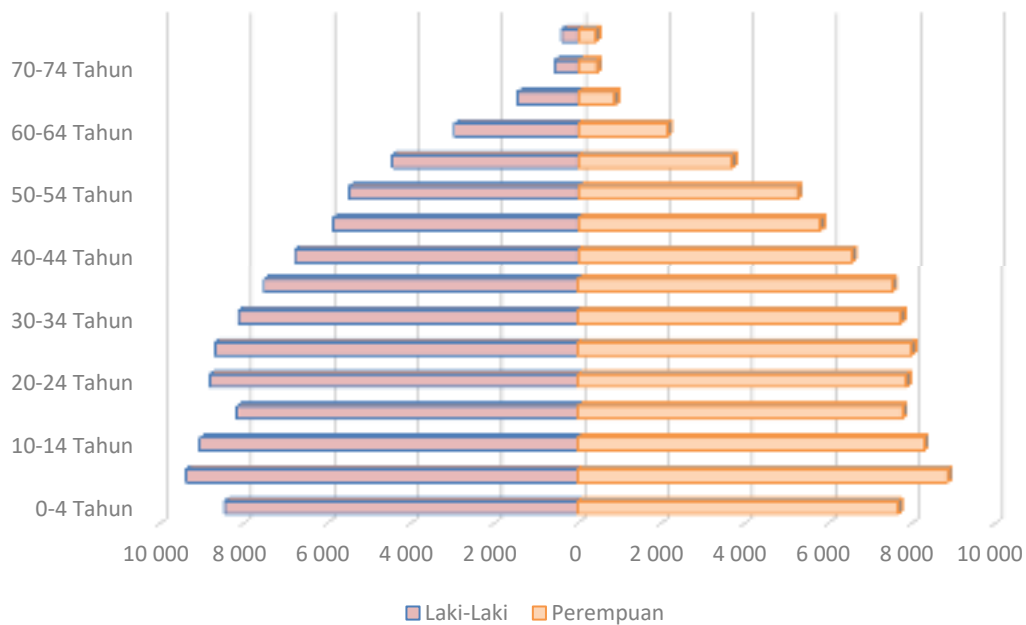
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020

Tabel 2. 5 Komposisi Penduduk Kota Bontang

No.	Kelompok Usia(Tahun)	% Penduduk				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	0-4	27,21	27,42	27,90	28,23	27,95
2	15-64	70,63	70,83	70,21	69,69	69,81
3	>65	1,67	1,74	1,89	2,09	2,24

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2020

Bentuk piramida penduduk Kota Bontang berbentuk Expansive, sebagian besar penduduk berada pada kelompok umur muda. Lebih tingginya persentase penduduk produktif dibandingkan dengan penduduk non produktif, identik dengan kondisi bonus demografi. Hal ini haruslah dimanfaatkan oleh Pemerintah sebagai pengambil kebijakan untuk menentukan arah pembangunan Kota Bontang. Proporsi penduduk produktif yang lebih besar, diharapkan dapat menambah nilai ekonomi terhadap kegiatan ekonomi Kota Bontang.

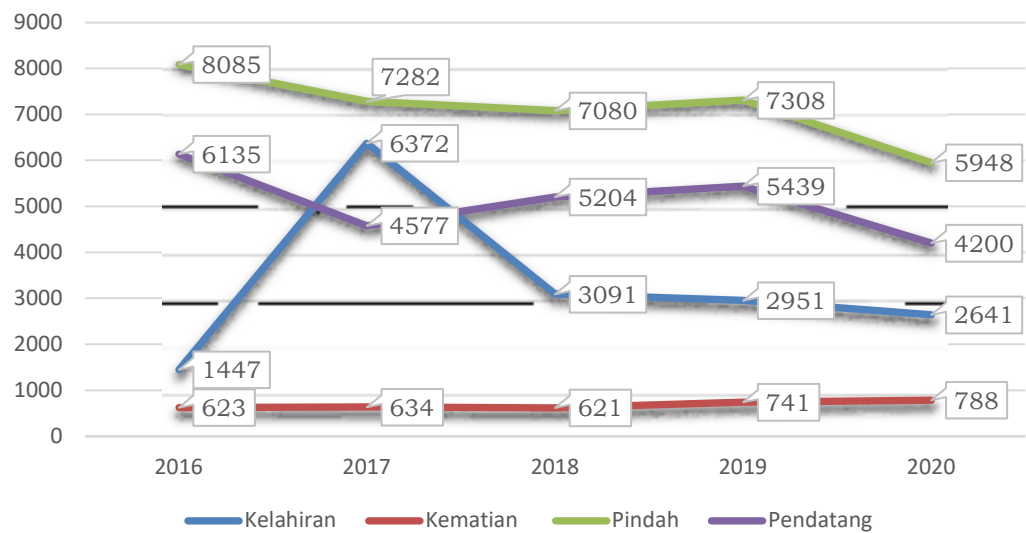


Gambar 2. 20 Piramida Penduduk Kota Bontang Tahun 2020

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2020, diolah

B. Komposisi Penduduk (Migrasi, kelahiran dan kematian)

Pertumbuhan jumlah penduduk Kota Bontang dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain kelahiran, kematian dan migrasi. Kota Bontang tahun 2020 memiliki kelahiran sebanyak 2642 jiwa dan kematian sebanyak 788 jiwa. Sedangkan migrasi masuk sebanyak 4200 jiwa dan migrasi keluar sebanyak 5948 jiwa.



Gambar 2. 21 Perkembangan Penduduk Kota Bontang Tahun 2020

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2020, diolah

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

A. Pertumbuhan PDRB/Laju Pertumbuhan Ekonomi

Dinamika ekonomi makro di tingkat global, nasional maupun di tingkat Provinsi Kalimantan Timur sedikit banyak akan mempengaruhi pergerakan ekonomi di Kota Bontang. Kondisi perekonomian ini setiap tahun ditunjukkan oleh pertumbuhan PDRB. Pada tahun 2020, perekonomian Kota Bontang (dengan migas) mengalami perlambatan sebesar 0,6 persen dibandingkan tahun 2019, yaitu mencapai -2,76 persen. Hal ini dikarenakan beberapa perusahaan besar di sektor industri pengolahan yang menopang perekonomian Kota Bontang seperti gas alam cair (Badak LNG) mengalami penurunan aktivitas produksi. Badak LNG dalam aktivitas ekonominya berorientasi pada kegiatan ekspor, sehingga dampak dari penurunan produksi yaitu semakin turunnya ekspor_netto yang berimplikasi pada menurunnya pertumbuhan Ekonomi di Bontang. Ekspor Neto merupakan penyangga utama perekonomian Kota Bontang diikuti PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto) dan Konsumsi Akhir Rumah Tangga.

Kinerja sektor industri pengolahan migas yang terus turun tersebut menjadi faktor dominan melemahnya ekonomi Kota Bontang. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, industri pengolahan merupakan sektor dengan kontribusi terbesar PDRB Kota Bontang, yang pada tahun 2020 mencapai 79,60 persen. Jika dilihat tren kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB Kota Bontang tahun 2016 – 2020, terjadi penurunan secara konsisten terutama di tahun 2018 yakni sebesar 5,73 persen. Namun penurunan ini tidak serta merta menyebabkan penurunan kinerja ekonomi sebab beberapa sektor masih mampu tumbuh positif dan turut mempengaruhi pergerakan perekonomian walaupun masih cukup kecil. Namun, karena penurunan sektor industri pengolahan yang cukup dalam membuat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan juga tertekan cukup dalam. Tantangan terbesar Kota Bontang adalah bagaimana menggerakkan sektor berbasis non SDA seperti akomodasi, konstruksi, perdagangan, dan seterusnya, yang memang kontribusinya terus membaik. Sehingga dengan kerja-kerja seperti itu diharapkan roda perekonomian terus berjalan positif. Secara makro, pertumbuhan ekonomi menggambarkan perubahan produksi seluruh barang dan jasa pada suatu wilayah dalam satu periode tertentu dibandingkan dengan produksi seluruh barang dan jasa pada periode sebelumnya.

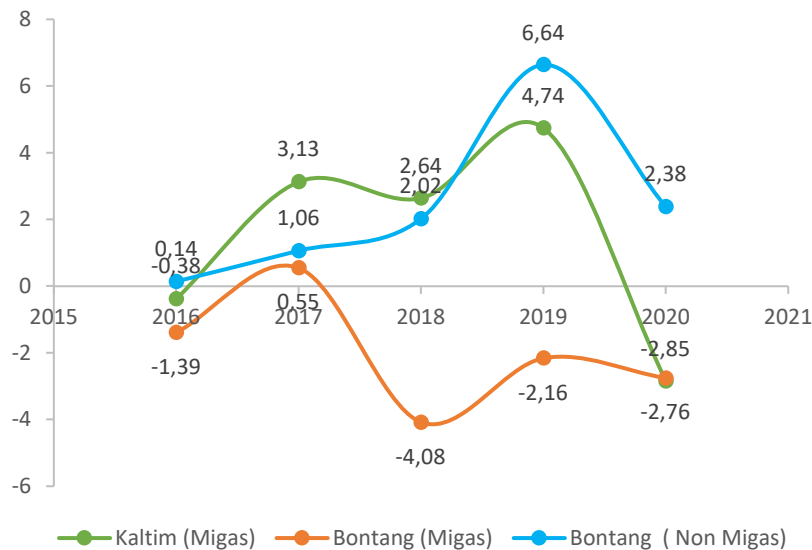
Pertumbuhan yang positif menunjukkan terjadinya peningkatan produksi barang dan jasa, sebaliknya pertumbuhan yang negatif menunjukkan terjadinya penurunan produksi barang dan jasa. Berdasarkan hasil penghitungan PDRB Kota Bontang atas dasar

Harga Konstan 2010, pertumbuhan ekonomi Kota Bontang secara total mengalami laju pertumbuhan negatif (menurun) hampir setiap tahunnya selama periode 2016-2020. Pertumbuhan positif hanya terjadi pada tahun 2015-2017.

Sementara itu jika kita melihat pertumbuhan ekonomi tanpa migas, justru terjadi sebaliknya. Ekonomi Kota Bontang tanpa migas masih mampu tumbuh secara konsisten mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 dengan rata-rata pertumbuhan 2,47 persen, meskipun pada tahun 2020 laju pertumbuhan perekonomian tanpa migas Kota Bontang masih tumbuh positif dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 2,38 persen. Salah satu penyebab meningkatnya terjadinya peningkatan produksi pada Lapangan Jasa Kesehatan tahun 2020. Hal itu kemudian didukung oleh pertumbuhan positif yang juga terjadi pada beberapa lapangan usaha lainnya seperti Pengadaan Listrik dan Gas; Konstruksi; serta Informasi dan Komunikasi.

Terkontraksinya perekonomian Kota Bontang bersumber dari kinerja konsumsi yang menurun pada tahun 2020 seiring dengan pembatasan aktivitas masyarakat dalam rangka kebijakan pembatasan aktivitas yang cukup ketat di masa pandemi COVID-19.

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Bontang selama tahun 2016 sampai dengan 2020 disajikan pada Gambar 2.22 berikut ini.



Gambar 2. 22 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bontang Tahun 2016-2020.

Sumber: BPS Kota Bontang 2020

Meski mengalami penurunan di tahun 2020, Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bontang dengan migas lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur yaitu sebesar -2,85 persen. Sedangkan untuk Kabupaten/Kota, pertumbuhan ekonomi tahun

2020 secara keseluruhan mengalami perlambatan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami kontraksi sebesar -4,4 persen, sedangkan Kabupaten Mahakam Ulu mengalami pertumbuhan paling baik karena “hanya” mengalami kontraksi sebesar -0,26 persen. Dari gambar 2.23 di bawah ini, laju pertumbuhan ekonomi Kota Bontang berada pada posisi diantara Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar -2,34 persen dan Kabupaten Paser sebesar -2,77 persen. Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bontang dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2020 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2. 23 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bontang dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2020

Sumber: BPS Kota Bontang 2020

Nilai PDRB Kota Bontang atas dasar harga berlaku tahun 2020 tercatat sebesar 56,56 triliun rupiah atau menurun sekitar 1,78 triliun rupiah apabila dibandingkan dengan nilai PDRB atas dasar harga berlaku yang tercipta sepanjang tahun 2019. Apabila dilihat menurut masing-masing komponen pengeluarannya, penurunan tersebut tidak terjadi pada semua komponen. Pada tahun 2020, salah satu dari enam komponen pengeluaran yaitu Net Ekspor mengalami penurunan yaitu sekitar -2,03 triliun rupiah atau sekitar -4,65 persen dibanding tahun 2019. Aktivitas ekspor impor Kota Bontang berkaitan erat dengan aktivitas lapangan usaha Industri Pengolahan yang merupakan motor

utama penggerak perekonomian Kota Bontang, dimana komoditas utama industri pengolahan seperti LNG, pupuk, Amoniak, Metanol, dan beberapa komoditas hasil industri kecil seperti amplang dan pempek merupakan komoditas ekspor baik ke luar negeri maupun ke provinsi/kabupaten/kota lainnya. Begitu pula sebagian komoditas pertanian, seperti ikan dan rumput laut. Penurunan volume produksi komoditas-komoditas tersebut secara langsung mempengaruhi nilai ekspor yang tercipta di samping adanya pengaruh perubahan harga. Komponen pengeluaran yang mengalami peningkatan terbesar di tahun 2020 adalah konsumsi rumah tangga yaitu sekitar 3,09 persen diikuti dengan komponen pengeluaran pembentukan modal tetap bruto sebesar 0,99 persen. Meningkatnya konsumsi rumah tangga sebesar 3,09 tersebut masih lebih rendah jika dibandingkan dengan peningkatan pada tahun 2019 yang mencapai 5,26 persen. Perlambatan pertumbuhan ini disebabkan oleh adanya wabah virus COVID-19 yang menyebabkan berkurangnya daya beli masyarakat.

Gambaran tentang perkembangan ekonomi Kota Bontang berdasarkan PDRB menurut pengeluaran atas dasar harga konstan selama kurun waktu 2016–2020 dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut ini.

Tabel 2. 6 PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan 2016-2020

Jenis Pengeluaran		PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran (juta rupiah)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3.525.726,38	3.601.872,39	3.671.935,61	3.744.118,98	3.743.104,06
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	156.715,27	171.406,93	187.110,31	198.402,83	196.332,29
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	598.506,61	502.867,67	543.114,36	591.851,29	590.300,40
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	4.380.787,85	4.573.613,48	4.737.000,07	4.928.998,22	4.935.922,52
5	Perubahan Inventori	39.458,19	33.458,19	31.442,41	19.225,42	20.798,82
6	Ekspor Barang dan Jasa Netto	34.134.314,81	34.189.837,78	32.145.614,10	30.940.798,36	29.822.750,41
7	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	42.835.509,11	43.073.056,45	41.316.216,87	40.423.395,11	39.309.208,50

Sumber : BPS Kota Bontang Tahun 2020

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, struktur perekonomian Kota Bontang masih sangat didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan, yang dimotori oleh dua perusahaan besar di kota ini, yaitu PT. Badak dan PT. Pupuk Kaltim. Selain dua perusahaan BUMN

tersebut, terdapat pula perusahaan swasta lainnya seperti PT. Kaltim Nitrate Indonesia sebagai penghasil Ammonium Nitrat, PT. Kaltim Parna Industri sebagai produsen Amoniak, dan PT. Black Bear Resources sebagai penghasil Ammonium Nitrate Emulsion. Sampai saat ini, kegiatan industri pengolahan mempengaruhi perekonomian Kota Bontang sekitar 80 persen setiap tahunnya. Kehadiran beberapa perusahaan yang utamanya bergerak di bidang industri kimia tersebut menjadi pemicu bagi pergerakan ekonomi di lapangan usaha lainnya. Salah satu lapangan usaha yang turut mengalami kemajuan dengan kehadiran kegiatan industri pengolahan adalah Lapangan Usaha Konstruksi. Lapangan usaha tersebut sangat dibutuhkan dalam penyediaan infrastruktur bagi berbagai kegiatan ekonomi seperti pembangunan pabrik, jalan, gedung perkantoran, dan rumah tempat tinggal yang meningkat permintaannya seiring dengan cukup tingginya migrasi penduduk pendatang ke Kota Bontang, Dengan peranan sebesar 4-6 persen setiap tahunnya, Lapangan Usaha Konstruksi menempati urutan kedua di dalam struktur perekonomian Kota Bontang. Tabel 2.5 di bawah ini menunjukkan peranan masing-masing lapangan usaha dalam membentuk kue ekonomi Kota Bontang dalam selang waktu 2016-2020.

Tabel 2. 7 Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen)

Jenis Pengeluaran		Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen)				
		2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.87	0.93	1.06	1.17	1.27
B	Pertambangan dan Penggalian	0.62	0.82	0.75	0.60	0.47
C	Industri Pengolahan	84.42	83.93	82.26	80.73	79.60
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03
F	Konstruksi	4.69	4.90	5.62	6.34	6.59
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.54	2.52	2.77	3.04	3.31
H	Transportasi dan Pergudangan	1.18	1.19	1.32	1.39	1.49
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.41	0.44	0.50	0.57	0.58
J	Informasi dan Komunikasi	0.71	0.68	0.73	0.77	0.84

K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.72	0.69	0.73	0.76	0.82
L	Real Estat	0.40	0.40	0.42	0.45	0.50
M,N	Jasa Perusahaan	0.39	0.39	0.42	0.46	0.49
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.29	1.26	1.35	1.45	1.49
P	Jasa Pendidikan	0.85	0.88	1.00	1.07	1.19
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.58	0.60	0.68	0.74	0.90
R,S,T,U	Jasa lainnya	0.28	0.31	0.35	0.39	0.41
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber: BPS Kota Bontang Tahun 2020

B. PDRB Per Kapita

Indikator PDRB per kapita diperoleh dengan membagi nilai PDRB suatu wilayah pada suatu periode tertentu dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang tinggal di wilayah itu. Angka PDRB per kapita biasanya diturunkan dari nilai PDRB atas dasar harga berlaku, sehingga nilainya menunjukkan rata-rata pendapatan bruto yang dihasilkan per satu orang penduduk selama periode tersebut. Nilai PDRB per kapita dapat dijadikan sebagai indikator awal untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu negara/wilayah. Namun hal tersebut tidak berlaku mutlak karena di dalam nilai PDRB per kapita masih terkandung nilai penyusutan dan pajak, serta nilai keuntungan usaha yang belum tentu seluruhnya dinikmati oleh penduduk negara/wilayah bersangkutan. Hal itu dapat terjadi apabila barang modal yang terlibat di dalam proses produksi bukanlah milik penduduk setempat. Dengan kata lain, pemilik modal adalah penduduk dari luar negeri/luar wilayah, sehingga keuntungan usaha pun akan mengalir ke luar negeri/luar wilayah tersebut.

Pada tahun 2020, dengan jumlah penduduk sekitar 184 ribu jiwa, PDRB per kapita Kota Bontang mencapai nilai 312,15 juta rupiah. Dengan kata lain, rata-rata setiap satu orang penduduk Kota Bontang pada tahun 2020 mampu menghasilkan produk domestik sebesar 312,15 juta per tahun atau sekitar 26,01 juta per bulan. Nilai PDRB per kapita Kota Bontang selama periode 2016-2020 ditunjukkan oleh Tabel 2.6 di bawah ini.

Tabel 2. 8 Nilai PDRB per kapita Kota Bontang 2016-2020

Jenis Pengeluaran		PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha (Ribuan Rp), 2016-2020				
		2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.863,93	3.217,26	3.566,58	3.840,02	3.953,42

Jenis Pengeluaran		PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha (Ribu Rp), 2016-2020				
		2016	2017	2018	2019	2020
B	Pertambangan dan Penggalian	2.036,73	2.832,97	2.516,98	1.960,67	1.479,21
C	Industri Pengolahan	279.469,25	289 687,63	277.573,62	264.989,46	248.479,69
D	Pengadaan Listrik dan Gas	82,90	95,65	101,33	107,49	118,69
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	60,44	69,91	77,72	80,17	82,80
F	Konstruksi	15.524,18	16.919,80	18.968,84	20.821,85	20.555,59
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.423,81	8.714,82	9.364,14	9.991,87	10.322,50
H	Transportasi dan Pergudangan	3.913,80	4.108,72	4.468,77	4.572,84	4.655,11
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.367,29	1.510,18	1.699,94	1.858,61	1.804,14
J	Informasi dan Komunikasi	2.347,49	2.351,64	2.449,09	2.537,46	2.634,54
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.382,64	2.364,80	2.461,23	2.497,35	2.545,44
L	Real Estat	1.323,67	1.373,61	1.414,73	1.482,59	1.545,60
M,N	Jasa Perusahaan	1.280,73	1.355,13	1.420,61	1.508,28	1.523,94
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.286,44	4.355,77	4.539,48	4.755,85	4.637,41
P	Jasa Pendidikan	2.802,88	3.046,56	3.366,18	3.508,46	3.715,79
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.931,33	2.082,82	2.287,57	2.433,50	2.816,53
R,S,T,U	Jasa lainnya	938,44	1.058,55	1.173,61	1.294,72	1.275,04
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	331.035,96	345.145,85	337.450,41	328.241,18	312.145,42

Sumber : BPS Kota Bontang tahun 2020

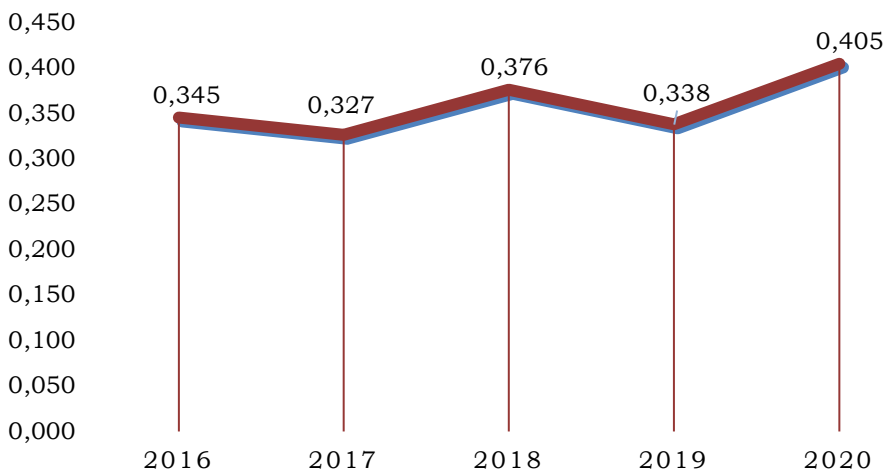
Fluktuasi nilai PDRB pada tahun 2016- 2020 lebih banyak disebabkan oleh penurunan harga komoditas migas. Apabila lapangan usaha yang bergerak di bidang migas dikeluarkan dari penghitungan PDRB, kemudian dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, maka dapat diperoleh nilai PDRB tanpa migas per kapita. Nilai PDRB per kapita tanpa migas Kota Bontang cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya. Memasuki tahun 2016, nilai PDRB per kapita tanpa migas Kota Bontang naik sebesar 1,10 persen atau meningkat sebesar 1,61 juta rupiah apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2017 dan 2018, pertumbuhan PDRB per kapita tanpa migas penduduk Kota Bontang mengalami kenaikan yang tidak signifikan. Pertumbuhan PDRB per kapita naik cukup signifikan hingga 9,30 persen di tahun 2019, jauh lebih tinggi

dibandingkan tiga tahun sebelumnya yaitu sebesar 14,94 juta. Pada tahun 2020 pertumbuhan PDRB tanpa migas tetap mengalami kenaikan walaupun tidak sebesar tahun sebelumnya yaitu sebesar 2,43 persen atau meningkat sebesar 4,22 juta rupiah dibanding tahun sebelumnya. Dengan kenaikan tersebut, secara rata-rata dapat dikatakan bahwa setiap penduduk Kota Bontang di 2020 mampu menghasilkan produk domestik dari aktivitas ekonomi selain migas sekitar 178,18 juta rupiah per tahun atau sebesar 14,85 juta rupiah per bulan.

C. Rasio Gini (Gini Ratio)

Koefisien gini (rasio gini) merupakan salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Koefisien gini didasarkan pada kurva Lorenz yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi variabel tertentu dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk.

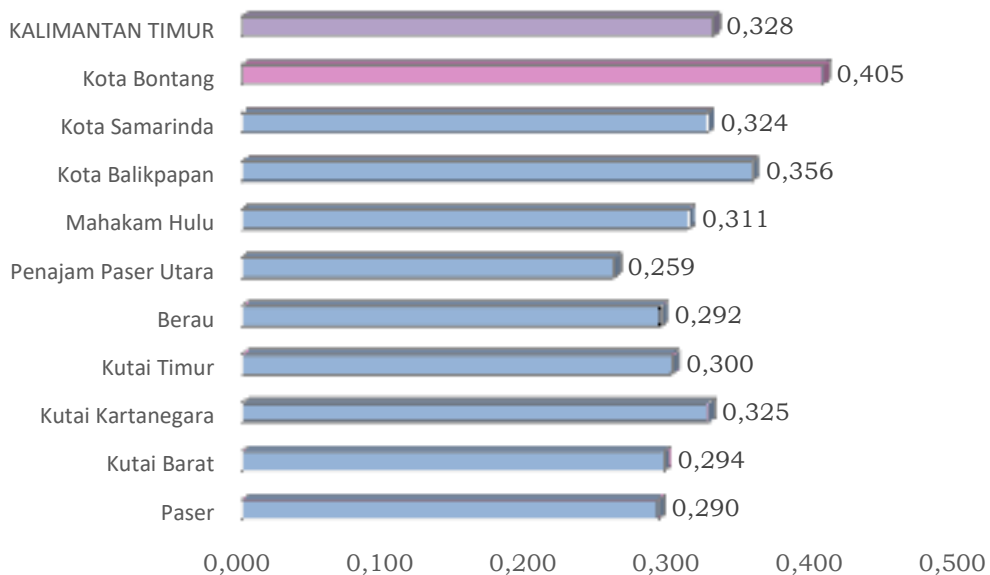
Peningkatan pengeluaran per kapita atau semakin sejahtera masyarakat, belum tentu terdapat pemerataan pendapatan di dalam suatu wilayah. Semakin besar angka rasio gini maka semakin tidak rataanya distribusi pendapatan. Rasio gini Kota Bontang pada tahun 2017 tercatat sebesar 0.327 menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 0.345. Jika dilihat pada tahun 2018, terjadi peningkatan menjadi 0,376, namun terjadi penurunan kembali di tahun 2019 menjadi 0,338. Adanya pandemi COVID-19 di tahun 2020 berdampak secara signifikan terhadap perekonomian masyarakat di Kota Bontang. Hal ini terlihat dari peningkatan kinerja indikator perekonomian daerah antara lain peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran. Sedangkan dilihat dari perkembangan rasio gini Kota Bontang tahun 2016-2020, tekanan paling tinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 0,405 yang dikategorikan sebagai ketimpangan sedang (*moderat*). Fluktuasi rasio gini Kota Bontang dapat dilihat pada gambar 2.21 sebagai berikut:



Gambar 2. 24 Rasio Gini Kota Bontang Tahun 2015 – 2020

Sumber: BPS Kota Bontang 2020

Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, ketimpangan pendapatan Kota Bontang merupakan yang paling tinggi. Sebagaimana tergambar pada gambar 2.22 dibawah ini, Rasio gini tahun 2020 tertinggi dialami oleh Kota Bontang sebesar 0,405, disusul oleh Kabupaten Kutai Barat sebesar 0,338 dan Kabupaten Kutai Timur sebesar 0,325. Meski pandemi COVID-19 cukup berdampak pada perekonomian Provinsi Kalimantan Timur, namun rasio gini Provinsi Kalimantan Timur menurun menjadi 0,328 di tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 0,330. Perbandingan Rasio Gini Kota Bontang tahun 2020 dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota lain dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

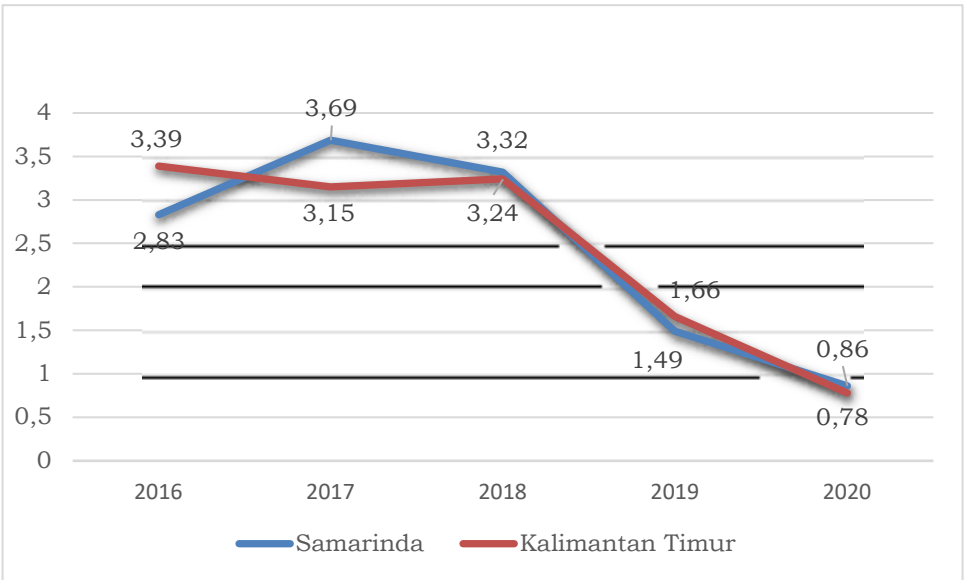


Gambar 2. 25 Perbandingan Rasio Gini Kota Bontang tahun 2020 dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota

Sumber: BPS Kota Bontang 2020

D. Laju Inflasi

Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Karena tidak dilakukan perhitungan tingkat inflasi secara khusus untuk wilayah Kota Bontang, maka tingkat inflasi merujuk pada hasil perhitungan nilai inflasi Kota Samarinda, sebagai daerah yang memiliki keterkaitan aktivitas ekonomi terdekat. Berdasarkan pada pendekatan tersebut, tingkat inflasi tahun ke tahun Kota Bontang selama periode 2016-2020 berfluktuasi dengan inflasi terendah terjadi pada tahun 2019 yang tercatat sebesar 1,49 persen dan yang tertinggi terjadi pada tahun 2017 dengan inflasi sebesar 3,69 persen. Tingkat inflasi pada tahun 2020 sedikit mengalami penurunan dibandingkan dengan tingkat inflasi tahun 2019 yakni sebesar 0,86 persen. Secara keseluruhan tingkat inflasi yang diacu Kota Bontang masih dalam kategori terkendali dengan tingkat inflasi dibawah 5 persen. Sedangkan Provinsi Kalimantan Timur mengalami inflasi tahun kalender sebesar 1,66 persen pada tahun 2019. Laju inflasi Provinsi Kalimantan Timur dan Kota Samarinda dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Gambar 2. 26 Laju Inflasi Provinsi Kalimantan Timur dan Kota Samarinda

Sumber: BPS Kota Bontang 2020

E. Persentase Penduduk Miskin

Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu prioritas pembangunan Indonesia. Hal ini sejalan dengan komitmen pertama Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), yakni menurunkan kemiskinan dan kelaparan. Tersedianya angka kemiskinan yang akurat di setiap wilayah

merupakan syarat mutlak dalam penyusunan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Di Indonesia, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik menghitung kemiskinan berdasarkan ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Indikator kemiskinan ini menjadi tolok ukur dalam menilai tingkat kesejahteraan. Dengan garis kemiskinan 636.491 rupiah per kapita per bulan, maka sekitar 4,38 persen penduduk Bontang terkategorisasi miskin. Angka tersebut relatif rendah, bahkan dalam peta regional (provinsi), tingkat kemiskinan di Bontang merupakan yang terendah kedua. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa upaya penanganan kemiskinan di Kota Bontang cukup berhasil. Selain ditunjukkan oleh angka kemiskinan yang rendah, juga ditunjukkan oleh kecenderungan tren yang terus menurun dalam empat tahun terakhir (2016-2019), meskipun terjadi kenaikan sebesar 0,16 persen menjadi 4,38 persen di tahun 2020. Kenaikan ini dipicu oleh perlambatan perekonomian di Kota Bontang salah satunya akibat pembatasan aktivitas masyarakat untuk mencegah penyebaran virus COVID-19.

Tabel 2. 9 Statistik kemiskinan Kota Bontang tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	513.205	542.985	549.830	582.188	636.491
Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa)	8,60	8,75	8,1	7,47	7,91
Penduduk Miskin (%)	5,18	5,16	4,67	4,22	4,38
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (%)	0,842	0,92	0,93	0,42	0,54
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (%)	0,204	0,25	0,26	0,08	0,09

Sumber: BPS Kota Bontang 2020

Tingkat kemiskinan yang rendah mengindikasikan pentingnya untuk melihat lebih detail persoalan kemiskinan, seperti ketimpangan yang terjadi di dalamnya. Hal ini penting karena seringkali tingkat kemiskinan dapat ditekan, namun ketimpangannya masih tinggi yang menandakan bahwa ada penguasaan sumber daya pada golongan dan kelompok tertentu yang ikut menyumbang pada tingginya pendapatan per kapita. Lebih dari itu, ketimpangan juga terjadi antara individu atau rumah tangga dalam cakupan wilayah tertentu. Ukuran inilah yang disebut sebagai tingkat keparahan kemiskinan yang angkanya

relatif masih tinggi. Dalam Tabel 2.7 dapat diamati bahwa tingkat keparahan kemiskinan di tahun 2016 adalah 0,24 persen dan bertahan hingga tahun 2018. Sedangkan tahun 2019 dan 2020 menurun sebesar 0,08 dan 0,09. Dari angka ini terlihat ketimpangan yang pendapatan yang cukup rendah. Demikian juga dengan tingkat kedalaman kemiskinan yang mencapai 0,8 persen di 2016, berkisar sebesar 0,9 persen di tahun 2019 dan 2018 kemudian menurun menjadi 0,42 persen di tahun 2019. Sedangkan tahun 2020 tingkat kedalaman kemiskinan meningkat kembali, yakni 0,54%. Hal ini menandakan walau berfluktuasi selama periode lima tahun terakhir, jarak antara pendapatan penduduk dibawah garis kemiskinan semakin dekat dengan garis kemiskinan di Kota Bontang. Kondisi ini menunjukkan bahwa strategi penanggulangan kemiskinan di Kota Bontang mampu memberikan efek, meskipun masih perlu peningkatan proporsi anggaran untuk jaminan kesehatan atau perlunya strategi untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin.

Tabel 2. 10 Perbandingan Persentase penduduk miskin Kota Bontang dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin (PO) menurut Kabupaten/Kota (Persen)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Paser	8.68	9.28	9.03	8.95	9.23
Kutai Barat	8.65	8.72	9.15	9.09	9.29
Kutai Kartanegara	7.63	7.57	7.41	7.20	7.31
Kutai Timur	9.16	9.29	9.22	9.48	9.55
Berau	5.37	5.41	5.04	5.04	5.19
Penajam Paser Utara	7.49	7.63	7.40	7.18	7.36
Mahakam Ulu	10.65	11.29	11.62	11.25	11.44
Balikpapan	2.81	2.82	2.64	2.42	2.57
Samarinda	4.72	4.77	4.59	4.59	4.76
Bontang	5.18	5.16	4.67	4.22	4.38
Kalimantan Timur	6.11	6.19	6.03	5.94	6.10

Sumber: BPS Kota Bontang 2020

F. Angka Kriminalitas

Kondusivitas suatu wilayah dapat dilihat dari angka kriminalitas (*crime rate*). Angka Kriminalitas atau Risiko Terkena Kejahatan adalah jumlah kejahatan setahun dibagi dengan jumlah penduduk tahun berkenaan dikalikan 100.000 jumlah penduduk. Semakin tinggi angka kejahatan berarti semakin rendah tingkat keamanan di suatu wilayah. Angka kriminalitas Kota Bontang cenderung menurun dari tahun 2016 sebesar 161,2 sampai dengan tahun 2019 sebesar 104,6. Angka ini meningkat kembali di tahun 2020 sebesar 152,6 yang artinya resiko tindak kriminal penduduk pada tahun 2020 adalah

sebesar 152 orang dari 100 ribu penduduk. Indikator kriminalitas di Kota Bontang dapat dilihat pada tabel 2.9 Sebagai berikut:

Tabel 2. 11 Indikator Kriminalitas Kota Bontang tahun 2016 - 2020

Uraian	Kriminalitas				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah tindak pidana	269	249	247	190	282
Angka kriminalitas	161,2	145,9	137,6	104,6	152,6
Persentase penyelesaian tindak pidana	53,5	91,1	99,1	96,3	87,2
Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	40	82	86	63	68

Sumber: BPS Kota Bontang 2020

Secara umum, persentase penyelesaian tindak pidana di Kota Bontang tahun 2020 mengalami penurunan yaitu 87,2 persen jika dibandingkan tahun 2019 sebesar 96,3 persen. Kasus kejahatan atau tindak pidana di Kota Bontang relatif rendah namun cenderung menurun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Namun terjadi kenaikan jumlah tindak pidana yang cukup signifikan sebesar 48,42% yang dipicu oleh tingginya penurunan pendapatan dan pemutusan hubungan kerja yang dialami oleh masyarakat akibat pandemi COVID-19. Sedangkan prevalensi penyalahgunaan narkoba di Kota Bontang mengalami fluktuasi, tahun 2016 terjadi 40 kasus, kemudian meningkat menjadi 86 kasus di tahun 2018. Selanjutnya menurun menjadi 68 kasus di tahun 2020. Dari informasi data diatas dapat dikatakan bahwa kondisi Kota Bontang cukup aman dan kondusif.

G. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Keberhasilan pembangunan pada setiap daerah merupakan tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan suatu perubahan. Perubahan dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas manusia. Potret kondisi dan potensi pembangunan sebuah daerah dapat dilihat dari pendekatan pembangunan manusia. Sejak tahun 1990 United Nations (PBB) telah memperkenalkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) sebagai alat untuk mengukur/mengontrol pembangunan manusia melalui suatu model untuk melihat pemberdayaan manusia.

Untuk mengetahui sejauh mana pembangunan manusia di Kota Bontang, perlu diketahui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun ke tahun. Angka IPM dihitung dari agregasi tiga dimensi, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Setiap dimensi diwakili oleh indikator. Dimensi umur panjang

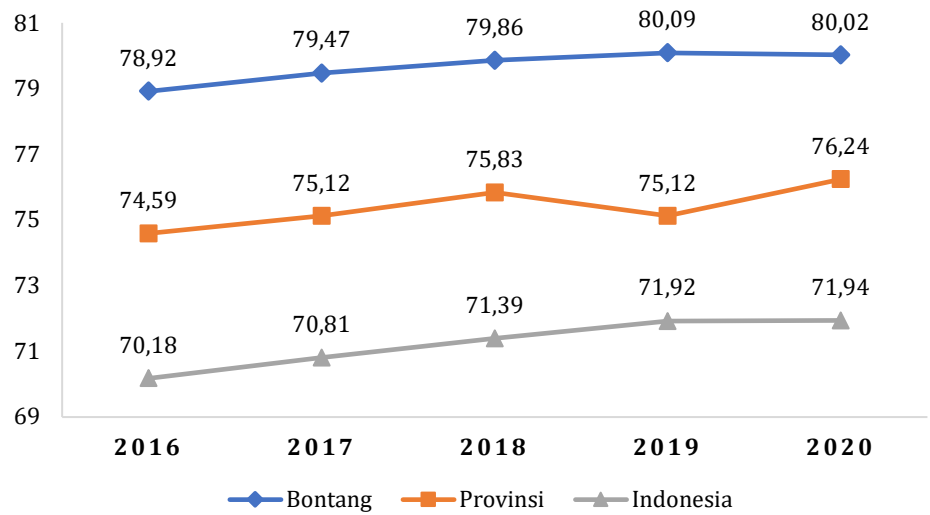
dan hidup sehat diwakili oleh indikator angka harapan hidup saat lahir. Sementara itu, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah merupakan indikator yang mewakili dimensi pengetahuan. Terakhir, dimensi standar hidup layak diwakili oleh indikator pengeluaran perkapita yang disesuaikan.

Sejak tahun 2010, pembangunan manusia di Kota Bontang memperlihatkan perkembangan yang positif. Tercatat bahwa IPM Kota Bontang tahun 2010 adalah 76,97. Angka ini terus meningkat hingga tahun 2019 yaitu menjadi sebesar 80,09 dimana setiap tahunnya, IPM Kota Bontang meningkat rata-rata 0,35 poin per tahun. Selama tahun 2010-2019, telah terjadi kenaikan IPM hingga 3,12 poin. Perkembangan ini menunjukkan semakin membaiknya pembangunan manusia secara umum di Kota Bontang. Namun adanya pandemi COVID-19 berkontribusi pada penurunan IPM Kota Bontang pada tahun 2020 menjadi 80,02. Penurunan ini dipengaruhi oleh penurunan daya beli masyarakat karena adanya kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat dalam rangka pengendalian virus COVID-19 yang masih berlangsung hingga saat ini. Penurunan pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan tahun 2020 adalah sebesar 16.278 ribu/kapita/tahun.

Pencapaian IPM Kota Bontang tahun 2020 lebih tinggi jika dibandingkan IPM Provinsi Kalimantan Timur yaitu sebesar 76,24 dan IPM Indonesia sebesar 71,94. Dan dibandingkan dengan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Timur, Kota Bontang berada pada peringkat ketiga teratas dan termasuk pada kategori IPM sangat tinggi.

Kondisi ini memperlihatkan keberhasilan Kota Bontang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas. Namun dalam periode lima tahun kedepan serta menghadapi revolusi industri 4.0 dan perkembangan Kota Bontang sebagai kota penyangga Ibu Kota Negara, diperlukan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dibawah ini dapat dilihat perkembangan IPM Kota Bontang dan perbandingan dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Indonesia Tahun 2016-2021.



Gambar 2. 27 Perbandingan IPM Kota Bontang, Provinsi KalimantanTimur dan Indonesia.

Sumber: BPS Kota Bontang 2020

Indikator pembentuk IPM Kota Bontang yang meliputi usia harapan hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah dan pengeluaran per kapita yang disesuaikan, cenderung meningkat dalam kurun waktu 2016-2020. Rincian nilai pembentuk IPM dapat dilihat pada tabel 2.12 berikut ini:

Tabel 2. 12 Komponen IPM Kota Bontang tahun 2016 – 2020

Tahun	IPM	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) (Tahun)	Harapan Lama Sekolah (HLS) (Tahun)	Umur Harapan Hidup (UHH) (Tahun)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rup./Kapita/Thn)
2016	78.92	10.39	12.79	73.71	16 157.00
2017	79.47	10.70	12.88	73.72	16 271.00
2018	79.86	10.72	12.89	73.94	16 698.00
2019	80.09	10.73	12.90	74.18	16 843.00
2020	80.02	10.79	13.03	74.28	16 278.00

Sumber: BPS Kota Bontang 2020

1. Pendidikan

Peningkatan pembangunan manusia ke arah yang lebih baik, tidak terlepas dari pendidikan. Pendidikan merupakan komponen terpenting, yang memiliki peranan dalam meningkatkan kualitas hidup. Makin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat, makin baik pula kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas pendidikan

dapat pula berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Dalam hal ini, indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat Pendidikan adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

Pada tahun 2020, AHLS Kota Bontang mencapai 13,03 atau naik sebesar 0,13 dibandingkan tahun 2019 (12,9). Pada tabel 2.10 diatas terlihat bahwa AHLS Kota Bontang terus naik dari 12,77 di tahun 2016 menjadi 13,03 di tahun 2019. Kenaikan cukup besar terjadi di tahun 2020, dibandingkan sebelumnya melandai dari tahun 2016 sampai dengan 2019. Peningkatan AHLS yang belum terlalu signifikan di beberapa tahun terakhir, memerlukan upaya yang berkaitan dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kota Bontang di bidang pendidikan. Salah satu upaya peningkatan SDM tersebut adalah dengan dicanangkan program Wajib Belajar (Wajar) pendidikan dasar 12 tahun sejak tahun 2004, beasiswa bagi pelajar, memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan serta peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan. Landasan ini memberikan gambaran bahwa pemerintah Kota Bontang serius dalam upaya meningkatkan kualitas SDM bidang pendidikan di Kota Bontang.

Komponen pembentuk IPM lainnya di bidang pendidikan adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS). RLS Kota Bontang mengalami kenaikan secara landai pada periode 2016 hingga 2017 yakni sebesar 0,01, tetapi pada periode 2016-2017 terjadi kenaikan cukup berarti yakni 0,31 tahun dan pada periode 2017-2020 kenaikan terjadi 0,02 tahun, 0,01 tahun dan 0,06 tahun. Secara keseluruhan telah terjadi kenaikan RLS 0,41 tahun sepanjang periode 2016 hingga 2020. RLS Kota Bontang di tahun 2020 mencapai angka 10,79 tahun, yang mengandung makna bahwa rata-rata penduduk Kota Bontang bersekolah hingga kelas sepuluh atau kelas dua Sekolah Menengah Umum (SMU). Dengan kata lain penduduk Kota Bontang rata-rata menempuh pendidikan hingga jenjang SMU selama lebih dari 1 tahun. Hal ini tentunya tidak terlepas dari banyaknya program pendidikan yang terus diupayakan oleh Pemerintah Kota Bontang. Tidak dapat dipungkiri angka rata-rata lama sekolah ini akan terus meningkat dari tahun ke tahun, karena tingkat kesadaran penduduk akan pentingnya pendidikan yang makin tinggi dan peranan aktif dari pemerintah untuk membuka akses yang makin luas terhadap sarana dan fasilitas pendidikan.

2. Kesehatan

Indikator pembentuk IPM bidang kesehatan adalah usia harapan hidup. Angka Harapan Hidup (AHH) adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh seseorang selama hidup. Indikator ini menunjukkan kondisi dan sistem pelayanan kesehatan masyarakat, karena mampu mempresentasikan output dari upaya pelayanan kesehatan secara komprehensif. Hal ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa jika seseorang memiliki derajat kesehatan yang baik maka yang bersangkutan akan berpeluang memiliki usia lebih panjang atau mempunyai angka harapan hidup (AHH) yang lebih tinggi. Besarnya nilai AHH berkaitan erat dengan angka kematian bayi, yaitu makin tinggi angka kematian bayi maka makin menurun nilai AHH. Faktor yang mempengaruhi perubahan AHH dapat ditinjau dari berbagai hal seperti kondisi lingkungan hidup, status sosial ekonomi, ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan, status gizi dan lain-lain.

Perkembangan usia harapan hidup Kota Bontang terus mengalami penurunan sebesar 0,49 sejak tahun 2016 hingga tahun 2020. Pada tahun 2020, UHH di Kota Bontang adalah sebesar 73,69 tahun yang artinya harapan hidup bayi yang baru lahir di tahun tersebut untuk bertahan hidup adalah sebesar 73,69 tahun.

Keberhasilan pemerintah Kota Bontang di bidang kesehatan melalui indikator yang diukur dengan angka harapan hidup terus berupaya mewujudkan masyarakat sadar kesehatan melalui pemberian penyuluhan kesehatan agar keluarga berperilaku hidup sehat, pemberian BPJS PIB serta melakukan perbaikan dan melengkapi sarana dan prasarana kesehatan masyarakat termasuk belanja modal pengadaan gedung dan bangunan Rumah Sakit BLUD di RSUD Taman Husada, rehab/sedang/berat pembangunan Rumah Sakit Tipe D, dll

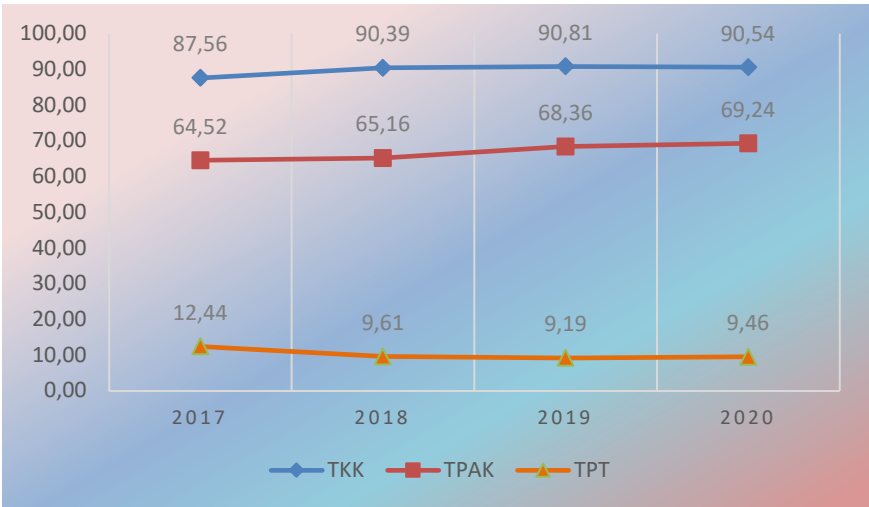
H. Kesempatan Kerja

Penduduk usia produktif erat kaitannya dengan ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan merupakan aspek yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Setiap upaya pembangunan selalu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja, sehingga penduduk dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan. Salah satu sasaran utama pembangunan dalam Rangka Kerja Pemerintah adalah terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar tenaga kerja tiap tahunnya. Kondisi ketenagakerjaan dapat dilihat dari berbagai indikator, antara lain Tingkat Partisipasi Tenaga Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK). Indikator TPAK merupakan perbandingan

antara jumlah penduduk yang aktif secara ekonomi (bekerja dan atau mencari pekerjaan) dengan seluruh penduduk usia kerja. Indikator ini menunjukkan jumlah penduduk yang potensial untuk dapat menghasilkan barang dan jasa. Makin besar nilai TPAK menunjukkan makin besar jumlah penduduk yang terlibat dan berusaha terlibat di dalam kegiatan produksi barang dan jasa pada suatu waktu tertentu.

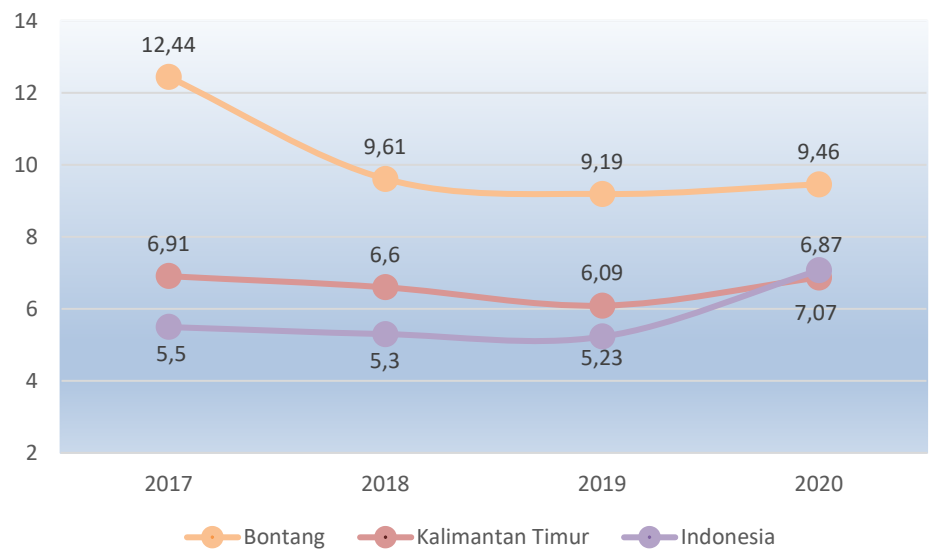
Indikator TPT merupakan persentase penduduk usia kerja yang sedang aktif mencari pekerjaan terhadap jumlah keseluruhan angkatan kerja. Sedangkan TKK adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang bekerja dengan jumlah angkatan kerja.

Indikator untuk melihat angka pengangguran adalah TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) yaitu proporsi penduduk yang menganggur dengan jumlah angkatan kerja. Pada tahun 2020 angka TPT di Kota Bontang adalah sebesar 9.46 persen. Angka ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan. Tingginya tingkat pengangguran tidak terlepas pula dengan indikator Tingkat Kesempatan Kerja, tercatat TKK di Kota Bontang adalah sebesar 90,98 persen, angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 90,59 persen. Jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota lain, TPT Kota Bontang merupakan yang paling tertinggi. Hal ini berbanding terbalik dengan Kota Bontang sebagai Kota Industri.



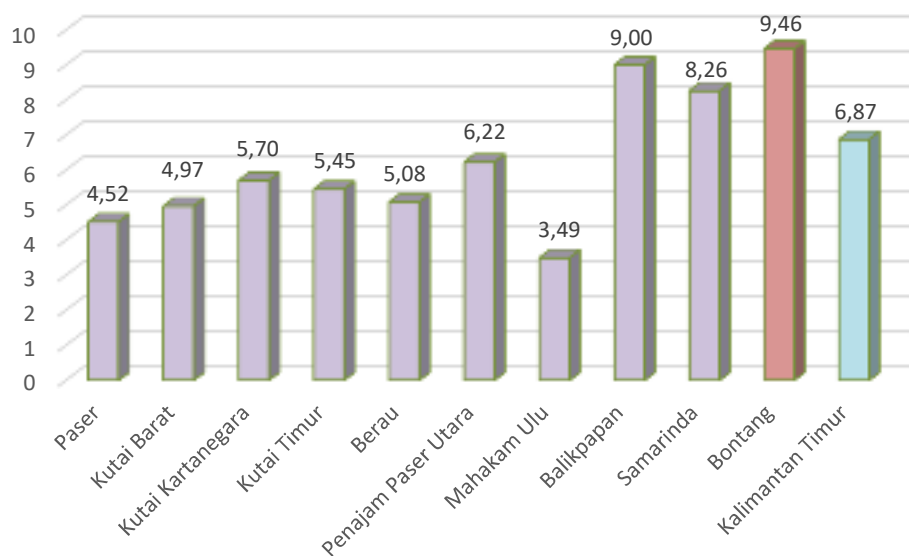
Gambar 2. 28 Statistik Ketenagakerjaan Kota Bontang Tahun 2016 – 2020

Sumber: BPS Kota Bontang 2020



Gambar 2. 29 Perbandingan TPT dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Indonesia Kota Bontang Tahun 2020

Sumber: BPS Kota Bontang 2020



Gambar 2. 30 Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota Kalimantan Timur Tahun 2020

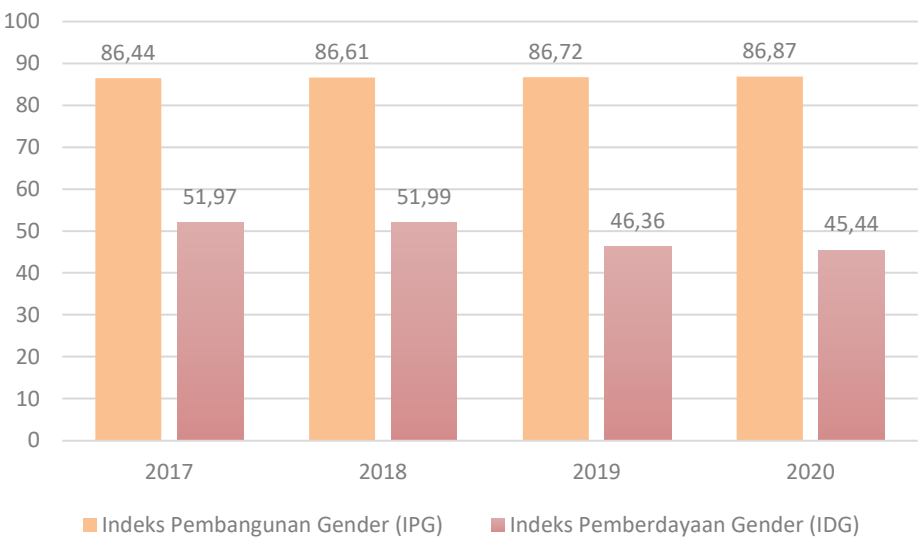
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

I. Pembangunan Gender

Tingkat keberhasilan pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender dapat diukur, salah satunya adalah dengan IPG (Indeks Pembangunan Gender), yaitu ukuran pembangunan manusia yang merupakan komposit dari empat indikator, yang lebih menekankan status gender, khususnya dalam mengukur kemampuan dasar. Nilai IPG yang ideal jika mendekati 100. Apabila IPG berada jauh di bawah 100, artinya capaian pembangunan manusia yang

dicapai laki-laki di wilayah tersebut lebih tinggi daripada perempuan, begitu pula jika sebaliknya.

Hingga tahun 2020, pembangunan manusia yang dicapai oleh laki-laki masih lebih tinggi dibanding perempuan. Hal ini tercermin pada angka IPG Kota Bontang yang mengalami kenaikan secara kontinyu mulai dari tahun 2017 sebesar 86,44 menjadi 86,87 pada tahun 2020 sebagaimana terlihat pada Gambar 2.30 Artinya, capaian pembangunan manusia laki-laki masih relatif lebih tinggi dibanding perempuan. Namun, tren kenaikan IPG yang semakin mendekati 100 setiap tahunnya tentu merupakan hal yang sangat baik. Jika tren positif ini terus berlanjut, maka bukan tidak mungkin jika suatu saat nanti disparitas gender di Kota Bontang akan semakin mengecil.



Gambar 2. 31 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Bontang

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020

Selain Indeks Pembangunan Gender (IPG), terdapat ukuran komposit lainnya yang terkait dengan gender, yakni Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang digunakan untuk mengukur persamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. Pada tahun 2017, IDG Kota Bontang sebesar 45,44, dan dalam kurun waktu 2 tahun terus meningkat menjadi 51,99 di tahun 2019. Namun di tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 0,02 menjadi 51,7. Hal ini dapat diartikan bahwa peranan perempuan dalam pengambilan keputusan dan kegiatan ekonomi semakin menuju ke arah yang lebih baik terlihat dari semakin meningkatnya kesetaraan peran gender. Dengan demikian, peranan perempuan semakin strategis dibanding sebelumnya, meski dilihat dari sisi angka, capaian perempuan

dibandingkan laki-laki di Kota Bontang masih relatif rendah, diduga disebabkan oleh dua hal. Pertama, bahwa pembangunan yang selama ini dilakukan lebih banyak menguntungkan laki-laki; dan kedua, walaupun pembangunan manusia telah memberikan kesempatan yang sama kepada semua penduduk tanpa terkecuali, namun kesempatan ini belum dapat digunakan secara optimal oleh kelompok lain (dalam hal ini perempuan).

J. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga erat hubungannya dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Pembangunan pada fokus seni, budaya dan olahraga meliputi indikator jumlah grup kesenian, gedung kesenian, benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan, organisasi olahraga dan gedung olahraga. Jumlah grup kesenian di Kota Bontang pada tahun 2020 sebanyak 37 grup, mengalami penurunan sebanyak 17 grup jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kurangnya jumlah grup kesenian ini disebabkan adanya pembatasan aktivitas masyarakat karena pandemi COVID-19. Sampai dengan tahun 2020, jumlah gedung kesenian Kota Bontang sebanyak 5 gedung. Jika dilihat dari jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk maka nilai rasionya cenderung menurun. Hal ini terjadi karena jumlah penduduk terus bertambah sedangkan jumlah gedung tidak bertambah. Di Kota Bontang terdapat 103 benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan. Cagar Budaya yang dilestarikan terletak di Kelurahan Bontang Kuala, yaitu mesjid tua Al Wahab, bekas kantor desa Bontang Kuala dan bekas penjara.

Perkembangan bidang olah raga selama periode 2016-2021 dapat dilihat dari perkembangan jumlah klub dan gedung olahraga. Dari tabel di bawah ini terlihat bahwa jumlah klub olahraga di Kota Bontang menurun menjadi 214 pada tahun 2020 dibandingkan dengan 250 klub di tahun 2016. Sedangkan jumlah gedung olahraga meningkat sebanyak 1 unit di tahun 2017 menjadi 5 unit dan hingga 2020 belum ada penambahan gedung olahraga. Jika dilihat dari proporsinya, maka dapat disimpulkan bahwa 1 gedung olahraga dimanfaatkan oleh 50.000 penduduk. Kondisi ini sangat kurang mengingat capaian prestasi olahraga perlu didukung oleh sarana dan prasarna yang memadai.

Tabel 2. 13 Perkembangan Seni, Budaya dan Olah raga Kota Bontang Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Group Kesenian	49	50	51	54	37
Jumlah Gedung Kesenian	5	5	5	5	5
Jumlah Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	103	103	103	103	103
Jumlah Klub Olah Raga	250	250	246	267	214
Jumlah Gedung Olah Raga	4	5	5	5	5

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2020
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum
A. Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Untuk mewujudkan Kota Bontang yang berdaya saing melalui peningkatan SDM yang berkualitas, salah satunya dilakukan melalui pelayanan bidang pendidikan yang merupakan pelayanan dasar. Keberhasilan pelayanan pendidikan dapat diukur melalui Harapan Lama Sekolah (HLS), Angka Rata-rata lama sekolah, APK, APM, Angka Kelulusan (AL), dan Angka Putus Sekolah (APS).

Tabel 2. 14 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pendidikan tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,77	12,79	12,88	12,9	13.03
Angka rata-rata Lama Sekolah	10,39	10,7	10,72	10,73	10.79
Angka Partisipasi Kasar (APK)					
- SD/MI/Paket A (%)	105.5	106,07	101,07	94,88	103.41
- SMP/MTS/Paket B (%)	107,3	106,99	108,26	97,05	102.26
Angka Pendidikan yang ditamatkan					
- SD/MI/Paket A (%)	1,98	2,02	1,95	1.80	1.72
- SMP/MTS/Paket B (%)	1,86	1,88	1,77	1.79	1.67
Angka Partisipasi Murni (APM)					
- SD/MI/Paket A (%)	96,5	97,09	92,5	91.04	93.02
- SMP/MTS/Paket B (%)	83,62	74,17	81,36	75.68	80.27
Pendidikan Sekolah Dasar					

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
- Angka Partisipasi Sekolah	896,64	970,89	925,01	910.38	977.21
- Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah	33,06	31,08	30,44	30.78	28.2
- Rasio Guru/Murid	524,69	507,92	535,15	505.45	522
- Rasio Guru / Murid Per Kelas rata-rata	52,47	50,79	53,52	50.54	49.2
Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)					
- Angka Partisipasi Sekolah	711,33	740,58	813,57	756.76	826.63
- Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah	29,53	37,25	38,36	38,49	34.35
- Rasio Guru/Murid	730,14	647,4	638,79	630.74	680.66
- Rasio Guru / Murid Per Kelas rata-rata	73,01	64,74	73,88	63.07	64.44
Penduduk yang berusia > 15 Tahun Melek Huruf (tidak buta aksara)	99,78	99,41	99,77	99.36	99.36
Fasilitas Pendidikan					
- Sekolah / Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	95	95	95,08	91.80	91.80
- Sekolah / Pendidikan SMP/MTS Kondisi Bangunan Baik	91,67	91,18	91,43	82.35	84,85
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)					
- Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	68,89	99,68	96,4	78.65	49.69
Angka Putus Sekolah					
- Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,015	0	0	0	0
- Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTS	0,032	0	0	0	0

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang Tahun 2020

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah persentase jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang menempuh pendidikan di jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Nilai APK bisa lebih dari 100 persen karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut. Penyebabnya adalah adanya

pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang telat bersekolah, atau pengulangan kelas. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya

Untuk Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SD di Kota Bontang pada tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 APK tingkat SD mencapai 103,41%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat masyarakat Kota Bontang diluar umur 7-12 tahun yang bersekolah di tingkat SD. Sedangkan APK untuk tingkat SMP pada tahun 2020 adalah sebesar 102,26%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat masyarakat Kota Bontang diluar umur 13-15 tahun yang bersekolah di tingkat SMP.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Nilai APM berkisar antara 0-100. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen. Secara umum, APM akan selalu lebih rendah dari APK karena APK memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan.

APM Kota Bontang untuk tingkat SD dan SMP pada tahun 2016 hingga 2020 mengalami fluktuasi. Nilai APM dan APK sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk pada tahun bersangkutan yang menyebabkan fluktuasi angka. Angka Partisipasi Murni jenjang SD tahun 2020 mengalami peningkatan 1,98 % dibandingkan dengan tahun 2019 namun tidak mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 98,82%. Untuk Jenjang SMP tahun 2020 juga mengalami peningkatan 4,59% namun dibawah target sebesar 1,87%.

Penduduk yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara) di tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,56% dari tahun sebelumnya dan dibawah target yang ditetapkan. Penurunan ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah penduduk usia >15 tahun di Kota Bontang. Menurut data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang pada tahun 2020, sebanyak 843 penduduk berusia >15 tahun masih buta aksara. Sehingga perlu upaya lebih lanjut untuk mencapai target 100%.

2. Urusan Kesehatan

Capaian indikator Angka Kematian Ibu (AKI) per 1.000 kelahiran hidup tahun 2020 mengalami peningkatan yang signifikan dari target menjadi 1,03 per 1.000 kelahiran hidup. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Bontang terdapat 4 kasus kematian ibu dari jumlah 3.886_kelahiran hidup. Kematian ibu tersebut karena adanya penyebab tidak langsung (penyakit tidak menular sebanyak 3 kasus kematian) dan penyebab langsung (hemorrhagic post partum sebanyak 1 kasus kematian). Kondisi saat ini hanya terdapat 2 rumah sakit dari total 5 rumah sakit yang memenuhi standar Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) yaitu RSUD Taman Husada dan Rumah Sakit Pupuk Kaltim. Selain itu, perlu penggerakan peningkatan kelas ibu hamil di kelurahan/ Puskesmas serta melakukan edukasi suami siaga.

Capaian indikator Angka Kematian Bayi (AKB) mengalami peningkatan menjadi 13 per 1.000 kelahiran hidup dari target yang ditetapkan. Berdasarkan data tahun 2020, terdapat 53 kasus kematian bayi yang dilaporkan, terdiri dari kematian neonatal (berumur 0-28 hari) sebanyak 44 kasus dan kematian post natal (berumur 29 hari – 11 bulan) sebanyak 9 kasus dari jumlah 3.886 kelahiran hidup yang disebabkan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), asfiksia, penyakit bawaan (kelainan kongenital), pneumonia, kelainan saluran cerna dan lain-lain. Oleh sebab itu, perlu dilakukan peningkatan kesadaran ibu hamil, keluarga dan masyarakat terhadap resiko kematian bayi serta pemenuhan sarana prasarana kegawatdaruratan neonatal yang sampai saat ini hanya terdapat di RSUD Taman Husada dan Rumah Sakit Pupuk Kaltim yang memiliki ruang perawatan Neonatal Intensive Care Unit (NICU).

Capaian indikator Prevalensi Balita Gizi Kurang/Underweight (BB/U) mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 10,56% dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2020 terdapat 774 balita gizi kurang dari total 7.328 balita seluruhnya yang ditimbang. Hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: kemiskinan, kurangnya akses air bersih dan sanitasi, praktik pengasuhan anak yang kurang tepat dan/atau konsumsi makanan bergizi yang rendah. Tindak lanjut yang diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK), edukasi bagi ibu hamil terkait manfaat zat besi (FE) selama kehamilan, peningkatan pelayanan ANC pada fasilitas kesehatan sesuai standar dengan pembinaan oleh Dinas Kesehatan secara berkala, memaksimalkan pelayanan kelas ibu hamil, penyuluhan calon pengantin serta edukasi tentang pola asuh dan pola makan yang sesuai dengan usia balita.

Capaian indikator Insiden Rate (IR) DBD mengalami peningkatan yang signifikan dari target yang ditetapkan yaitu 78,46 dan terealisasi

sebesar 148,46 per 100.000 penduduk. Pada tahun 2020 terdapat 269 kasus DBD dari total penduduk sebanyak 184.784 jiwa. Kota Bontang merupakan salah satu daerah endemis demam berdarah, dimana angka IR DBD cenderung meningkat yang diakibatkan oleh faktor perilaku dan partisipasi masyarakat yang masih kurang dalam kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) serta faktor pertambahan jumlah penduduk dan peningkatan mobilitas penduduk yang diiringi oleh peningkatan sarana transportasi yang menyebabkan penyebaran virus DBD semakin mudah dan semakin luas.

Tabel 2. 15 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kesehatan Tahun 2017-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Kematian Ibu per-1000 kelahiran hidup	-	1,32	5,1	0,79	1,03
Angka Kematian Ibu per-100000 kelahiran hidup	-	131,61	512,4	78,80	102,93
Angka Kematian Bayi	-	8	1,3	11,3	13,6
Prevalensi balita gizi kurang	-	-	1,3	7,4	10,6
Insiden Rate DBD	-	8	1,3	11,3	13,6
Presentase Rumah tangga ber-PHBS	-	64,00	-	-	-

Sumber : Dinas Kesehatan, BPS Kota Bontang Tahun 2020

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Perkembangan aktivitas perekonomian masyarakat erat kaitannya dengan kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang. Pada tahun 2020, panjang jalan di Kota Bontang mencapai 195.337 meter. Jika dipotret berdasarkan kondisi, maka proporsi panjang jalan dalam kondisi baik di Kota Bontang adalah sebesar 89,70 persen. Kondisi ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2019, yaitu 91,15 persen. Penurunan ini dipicu oleh frekuensi lalu lintas kendaraan berat yang melebihi kapasitas badan jalan memingkat seiring tumbuhnya industri di Bontang, terutama di Kelurahan Bontang Lestari.

Selain jalan, air bersih merupakan layanan penting yang wajib difasilitasi pemenuhannya. Selama periode 2016 – 2018 terjadi peningkatan secara konsisten terhadap indikator ini. Tahun 2016 tercatat 96 persen rumah tangga yang bersanitasi dan meningkat sebanyak 3,51 persen menjadi 99,51 persen di tahun 2018 Namun adanya kerusakan sambungan IPAL skala kawasan menyebabkan

persentase rumah tangga bersanitasi menurun di tahun 2020 menjadi 97,15 persen.

Tahun 2020 persentase rumah tangga yang terlayani air minum adalah sebesar 81,69 persen. Kinerja ini didukung oleh peningkatan pemasangan sambungan rumah (SR) oleh PDAM dan perusahaan dengan jumlah sambungan rumah sebanyak 29.380. Untuk kapasitas produksi air minum tahun 2019 – 2020 berturut-turut sebesar 320, 341, 335, 315 dan 392 liter per detik.

Sementara itu, penataan ruang di Kota Bontang sudah cukup baik, persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan perencanaan tata ruang (RTRW) tahun 2016 sebesar 86 persen. Kedepan perlu dilakukan pengukuran kesesuaian pemanfaatan ruang kembali dan upaya pengendalian yang lebih komprehensif dari Pemerintah Kota Bontang agar pemanfaatan ruang mengacu pada dan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Tabel 2. 16 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	94,62	94,72	89,13	91,15	89,70
Persentase rumah tangga yang terlayani air minum	-	-	-	-	81,69
Jumlah sambungan rumah air minum (SR)	-	-	-	-	29.380
Kapasitas produksi air minum (lt/dtk)	320	341	335	315	392
Rumah tangga ber Sanitasi (%)	96,00	99,51	99,51	98,69	97,15
Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan Perencanaan Tata Ruang	86	-	-	-	-

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang Tahun 2020

4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kinerja urusan perumahan dan kawasan permukiman dapat dilihat dari potret kawasan kumuh dan kondisi rumah layak huni. Luas kawasan kumuh di Kota Bontang mengalami fluktuasi selama periode 2016-2020. Tercatat di Kota Bontang terdapat 88,20 hektar kawasan kumuh pada tahun 2016, menurun hingga mencapai 16,33 hektar pada tahun 2019. Adanya perubahan parameter dan delineasi pemetaan kawasan kumuh pada tahun 2020 mempengaruhi identifikasi luas kawasan kumuh menjadi 73,56 hektar yang ditetapkan dengan SK Walikota Bontang No. 188.45/509/DPKP2/2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Bontang tanggal 31 Agustus 2020. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat penambahan kawasan kumuh baru di Kota Bontang. Sampai dengan akhir tahun 2020, dilakukan penanganan kawasan kumuh sehingga luas kawasan kumuh berkurang menjadi 68,19 hektar. Perlu strategi yang terintegrasi antar seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat agar luasan kawasan kumuh berkurang sesuai target.

Persentase rumah layak huni di Kota Bontang cenderung menurun selama lima tahun terakhir. Terlihat pada tabel 2.17 dibawah ini bahwa pada tahun 2020 terdapat 97,15 persen atau sebanyak 49.842 rumah layak huni dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 97,67 persen atau sebanyak 50.058 rumah layak huni. Penurunan jumlah rumah layak huni dan peningkatan luas kawasan kumuh mengindikasikan bahwa penanganan yang dilakukan oleh pemerintah belum optimal. Kedepannya perlu peningkatan upaya penanganan seperti bantuan pemugaran rumah layak huni dan pencegahan agar tidak terdapat kawasan kumuh baru.

Tabel 2. 17 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Luas kawasan kumuh (ha)	88,20	73,56	26,13	16,33	68,19
Persentase rumah layak huni	-	97,35	-	97,67	97,15

Sumber : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2020

5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat bertujuan untuk melindungi masyarakat dan mendukung penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketertiban umum serta menumbuhkan budaya tertib

masyarakat dan penyelenggara pemerintahan. Adapun urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dicerminkan dalam indikator sebagai berikut :

Tabel 2. 18 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2016-2020

Tahun	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	6,94	7,05	5,4	5,45	5,56
Persentase Penegakan PERDA	66	85	100	100	100
Cakupan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	62,21%

Sumber : Satpol PP Kota Bontang Tahun 2020

Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk mencerminkan tingkat kemampuan suatu daerah untuk menjamin ketenteraman, ketertiban umum dan penegakan Peraturan Daerah dengan mengukur sisi kuantitas Petugas Satuan Polisi Pamong Praja terhadap jumlah penduduk. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin tinggi kemampuan suatu daerah untuk menjamin ketenteraman, ketertiban dan penegakan aturan; dan semakin mampu daerah tersebut menjalankan otonomi daerah. Rasio Satpol PP pada tahun 2016-2020 di Kota Bontang mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2020 mencapai 5,56. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 5 hingga 6 anggota Satpol PP yang bertugas menjamin ketenteraman dan ketertiban setiap 10.000 penduduk Kota Bontang.

Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk mencerminkan tingkat kemampuan suatu daerah untuk menjamin ketenteraman, ketertiban umum dan penegakan Peraturan Daerah dengan mengukur sisi kuantitas Petugas Satuan Polisi Pamong Praja terhadap jumlah penduduk. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin tinggi kemampuan suatu daerah untuk menjamin ketenteraman, ketertiban dan penegakan aturan; dan semakin mampu daerah tersebut menjalankan otonomi daerah. Rasio Satpol PP pada tahun 2016-2020 di Kota Bontang mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2020 mencapai 5,56. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 5 hingga 6 anggota Satpol PP yang bertugas menjamin ketenteraman dan ketertiban setiap 10.000 penduduk Kota Bontang.

Salah satu tugas Satuan Polisi Pamong Praja yaitu melakukan tindakan penertiban nonyustisial, menindak bagi yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penyelidikan terhadap pelanggaran perda dan/atau perkara. Indikator persentase

penegakan Perda sejak tahun 2018 hingga tahun 2020 telah mencapai 100%.

6. Urusan Sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan salah satu masalah sosial yang menjadi urusan wajib bagi pemerintah daerah. Adanya gelandangan, pengemis, Wanita Rawan Sosial Ekonomi, anak terlantar dan anak jalanan menunjukkan masih banyaknya kemiskinan di daerah. Hal ini merupakan pekerjaan rumah yang harus segera dicarikan solusinya guna mewujudkan kesejahteraan sosial. Pengelompokan daerah berdasar PMKS sangat penting dilakukan untuk memberikan gambaran masalah PMKS dengan tujuan kebijakan yang diambil tepat sasaran. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial tidak dapat diatasi seluruhnya namun dapat ditekan rendah dan ditangani secara serius dalm pembangunan secara merata ke lapisan masyarakat.

Berdasarkan basis data PMKS Kota Bontang Tahun 2020, jumlah PMKS sebanyak 18.981 jiwa yang terbagi dalam 26 jenis/kategori. Pada tabel di atas menunjukkan bahwa Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), Cakupan PMKS yang ditangani, PMKS yg memperoleh bantuan social dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Kondisi akhir pada tahun 2020 menunjukkan bahwa penanganan PMKS mencapai 100%. Bantuan terbesar diberikan kepada kelompok fakir miskin melalui program PKH (Program Keluarga Harapan), KKS (Kartu Keluarga Sejahtera), PBI JKN (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional), PBI Daerah (Penerima Bantuan Iuran Daerah), dan bantuan pendidikan. Selain itu, sejumlah besar bantuan berikutnya diberikan untuk kelompok Anak dengan Kedisabilitasan (ADK).

Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bontang telah berupaya semaksimal mungkin untuk menangani dan menyalurkan bantuan sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Penanganan PMKS tidak hanya dari segi fisik namun secara holistik dengan menggunakan pendekatan biopsikososial dan spiritual. Pendekatan biopsikososial melibatkan suatu konsep hubungan interaksi antara faktor biologis, psikologis, dan sosial dalam upaya mengerti dan memahami kondisi PMKS, sehingga penanganannya dapat paripurna.

Tabel 2. 19 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Sosial Tahun 2016-2020

Tahun	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah PMKS	45.264	52.138	30.705	37.763	10.164

Tahun	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah penduduk miskin (indikator daerah)	38703	38703	37232	33938	34098
Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	-	70,64	90,16	95,48	100
Cakupan PMKS yang ditangani (%)	-	76,1	93,57	99,08	100
PMKS yg memperoleh bantuan sosial	-	70,64	90,16	95,48	100

Sumber Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang Tahun 2020

B. Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Urusan Tenaga Kerja

Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara Pengusaha atau gabungan Pengusaha dengan Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat Buruh dalam satu perusahaan. Di Kota Bontang angka sengketa pengusaha-pekerja menurun dari tahun 2019 yaitu sebesar 10,53, dimana jumlah sengketa perusaha pekerja sebanyak 8 sengketa dari 760 perusahaan ditahun 2020.

Pencari kerja yang ditempatkan adalah Persentase jumlah pencari kerja yang mendaftarkan dan tercatat serta jumlah pencari kerja yang diterima bekerja oleh pemberi kerja dalam hal ini perusahaan yang mendaftarkan lowongan pekerjaannya. Sejak tahun 2016 hingga 2020 mengalami fluktuasi. Sejak tahun 2017, pencari kerja yang ditempatkan semakin meningkat. Pada tahun 2020 pencari kerja yang ditempatkan adalah sebesar 18,68 yang mengalami peningkatan sebesar 2,42% dari tahun sebelumnya. Dalam hal ini telah dilakukan upaya melalui kegiatan sosialisasi kepada pencari dan pemberi kerja serta pencarian informasi lowongan dan penempatan tenaga kerja.

Tabel 2. 20 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Tenaga Kerja Tahun 2016-2020

Tahun	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	38,16	36,84	40,79	36,84	10,53
Pencari kerja yang ditempatkan (%)	21.75	15.60	15.31	16,16	18,58

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang

2. **Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Rasio KDRT adalah jumlah KDRT yang dilaporkan dalam periode 1 (satu) tahun per 1.000 rumah tangga. Selama 5 tahun terakhir di Kota Bontang Rasio KDRT pada tahun 2018 merupakan capaian terendah yaitu sebesar 0,005 dan kembali meningkat pada tahun 2019 dan 2020 yang masing-masing sebesar 0,02 dan 0,04. Rasio KDRT meningkat bisa jadi karena keberanian korban untuk melaporkan.

Penyelesaian pengaduan Perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan Pelayanan pengaduan merupakan pintu awal bagi perempuan dan anak korban kekerasan untuk melaporkan kasus yang dialami. Dari data pada tabel 2.39 menunjukkan bahwa dari tahun 2016 hingga tahun 2020, Penyelesaian pengaduan Perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa dari pengaduan yang ada dapat diselesaikan secara keseluruhan.

Tabel 2. 21 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio KDRT (%)	0,021	0,015	0,005	0,02	0,04
Penyelesaian pengaduan Perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB

3. **Urusan Pangan**

Berdasarkan data Pola Pangan Harapan Kota Bontang, kualitas konsumsi pangan masyarakat Kota Bontang yang ditunjukkan oleh skor Pola Pangan Harapan, dari tahun ke tahun cenderung menurun menjadi 89,40 di tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan di Kota Bontang belum sepenuhnya seimbang yang disebabkan oleh beberapa hal seperti bahan pangan yang relative masih kurang dan rendahnya daya beli masyarakat.

Tabel 2. 22 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pangan Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pola Pangan Harapan (PPH)	90,84	90,84	86,80	89,40	

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota BontangTahun 2020

4. **Urusan Pertanahan**

Jika dibandingkan dengan luas lahan di Kota Bontang yang seharusnya bersertifikat, kepengurusan sertifikat tanah cenderung menurun mulai tahun 2017 – 2020. Kepengurusan sertifikat tanah di tahun 2017 adalah seluas 291,75 hektar, sedangkan ditahun 2020 hanya terdapat penambahan 19,03 hektar lahan yang bersertifikat.

Kota Bontang juga mengalami permasalahan menyangkut tanah negara. Jumlah kasus tanah negara pada periode 2016 – 2020 termasuk rendah ditandai dengan tidak adanya kasus di tahun 2016, 2017, dan 2019. Tahun 2020 terdapat 4 kasus tanah negara yang terdaftar dan dapat diselesaikan sebanyak 2 kasus atau sebesar 50 persen.

Tabel 2. 23 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pertanahan Tahun 2016-2020

Tahun	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Luas lahan bersertifikat di suatu daerah	37,09	291,75	200,61	173,07	19,03
Penyelesaian Kasus Tanah Negara	0	0	50	0	50

Sumber : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang Tahun 2020

5. **Urusan Lingkungan Hidup**

Persentase pelayanan persampahan menunjukkan bahwa sampah di Kota Bontang sudah dilayani dan ditangani dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari persentase pelayanan persampahan yang selalu

meningkat dan mencapai 96,62 persen pada tahun 2020. Beberapa hal yang perlu ditingkatkan dalam penanganan sampah diantaranya adalah peremajaan armada pengangkut sampah dan peningkatan kesadaran masyarakat karena masih ditemukan banyak sampah industry di daerah pesisir dan sepanjang sungai.

Indikator lingkungan hidup lainnya yang sangat penting adalah indeks pencemaran air dan udara. Indeks pencemaran udara Kota Bontang tahun 2020 mencapai 86,30 meningkat industry tahun 2016 sebesar 75,64. Nilai ini termasuk dalam kategori sedang (50-100), artinya tingkat kualitas udara tidak berpengaruh pada industry manusia ataupun hewan tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang industry dan mempunyai nilai estetik. Nilai sedang untuk kota industry seperti Bontang industry cukup baik dan menunjukkan bahwa upaya penanganan polusi udara akibat kegiatan industry dapat ditangani dan dikelola dengan baik oleh pihak industry.

Tabel 2. 24 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2016-2020

Tahun	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Pencemaran Air	70	70	84,44	80	83.33
Indeks Pencemaran Udara	75,64	79,11	85,32	87,62	86.30
Prosentase pelayanan persampahan	94,85	94,89	94,49	96,66	95,63

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang Tahun 2020

6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rasio Penduduk ber-KTP per satuan penduduk pada tahun 2020 adalah sebesar 0,99 artinya bahwa di tahun 2020 menunjukkan hampir seluruh penduduk di Kota Bontang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP_el).

Kepemilikan KTP (Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk KTP) mengalami fluktuasi tetapi perbedaannya tidak besar antar tahun. Pada tahun 2018 hingga 2020 cakupan penerbitan KTP adalah sebesar 99%. Untuk capaian cakupan penerbitan KTP mengalami peningkatan hingga akhir tahun 2020 masyarakat Kota Bontang sudah 100% ber KTP.

Tabel 2. 25 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016-2020

Tahun	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Penduduk ber-KTP per satuan penduduk	0,958	0,929	0,988	0,965	0,999
Kepemilikan KTP (Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk KTP)	0,97	96	99	99	100
Rasio Bayi Berakta Kelahiran	0,72	0,7	0,69	0,69	0.95
Rasio pasangan berakta nikah	0,475	0,495	0,561	0,598	0,631
Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk (Cakupan penerbitan akta kelahiran)	56,70	59,11	62,71	65,42	66,81

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang Tahun 2020

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, pada tahun 2016 hingga tahun 2020 rasio pasangan yang berakte nikah mengalami peningkatan sebesar 0,156. Pasangan berakte nikah yang dimaksud di sini adalah pasangan baru yang mendapat akte nikah. Capaian ini dapat dikatakan belum maksimal karena masih banyaknya masyarakat yang menikah secara agama dan tidak mendaftarkan pernikahannya secara legal. Hal ini menyebabkan susahnya pasangan tersebut mengurus akta kelahiran anak.

Indikator Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk (Cakupan penerbitan akta kelahiran) di Kota Bontang menunjukkan bahwa sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 semakin meningkat. Capaian pada tahun 2020 adalah sebesar 66,81% meningkat sebesar 1,39% dari tahun sebelumnya. Kondisi ini sejalan dengan data pasangan yang mendapatkan akta nikah yang semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Bontang dalam mengawal Penduduk Kota Bontang tertib administrasi.

7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat

Capaian indikator LPM aktif, PKK aktif dan Posyandu aktif tidak mengalami penurunan dari yang berarti bahwa tingginya komitmen dari pengurus LPM, PKK dan Posyandu untuk mempertahankan kinerja. Serta dukungan penuh Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam menggandeng masyarakat dengan program-program yang dilaksanakan. Sedangkan

swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat melampaui target yang telah ditentukan. Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat Secara persentase pada tahun 2020 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2019 yakni sebesar 0,92 persen.

Tabel 2. 26 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Rata-rata jumlah Kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	100	100	100	100	100
Rata-rata jumlah Kelompok Binaan PKK	0	0	120,53	163,21	163,21
Jumlah LPM	0	1	1	1	1
LPM Berprestasi (%)	0	0	0	0	0
PKK Aktif (%)	100	100	100	100	100
Posyandu Aktif (%)	100	100	100	100	100
Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	0	0	5,15	1,28	2,2
LPM aktif (%)		100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial dan Pembedayaan Masyarakat Kota Bontang Tahun 2020

8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Angka Kelahiran Total atau Total Fertility Rate yang sering disingkat TFR adalah jumlah rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang 74ndica selama masa usia suburnya (antara umur 15-49 tahun). Indikator ini penting dan strategis untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan suatu negara ataupun seluruh negara dalam mengendalikan jumlah penduduknya melalui program Keluarga Berencana. Dalam hal ini, TFR sebesar 2,1 merupakan angka standar capaian ideal bagi seluruh negara (penduduk tumbuh seimbang). Di Kota Bontang angka TFRnya pada tahun 2020 mencapai 2,3 yang menunjukkan 2 orang anak yang dilahirkan hanya akan menggantikan kedua orang tuanya. Angka tidak tepat 2,0 karena memperhitungkan 74ndica mortalitas dari bayi yang dilahirkan.

Program keluarga berencana tidak selalu mengalami keberhasilan. Salah satu 74ndicator kurang berhasilnya program keluarga berencana ialah masih terdapatnya kebutuhan keluarga berencana yang tidak terpenuhi atau yang disebut unmet need KB. Di Kota Bontang angka Unmet need KB mengalami fluktuasi di tiap tahunnya.

Pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 2,56%. Hal ini menunjukkan bahwa pasangan usia subur yang dilayani semakin meningkat yang berarti pasangan usia subur ditahun 2020 banyak yang mau berKB.

Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama.Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Rasio Akseptor KB dari tahun 2016 hingga 2020 mengalami kecenderungan meningkat. Hal ini menunjukkan peran pemerintah yang aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk penggunaan KB.

Tabel 2. 27 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Total Fertility Rate (TFR)		2,7	0	14,8	2,3
Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	19,49	17,4	17,97	18,17	15,61
Ratio Akseptor KB	75,97	76,35	76,73	77,11	77,49

Sumber: Dinas Pembedayaan Perempuan dan KB Kota Bontang Tahun 2020

9. **Urusan Perhubungan**

Seiring bertambahnya penduduk Kota Bontang permintaan kendaraan bermotor pun semakin meningkat, sehingga pemerintah perlu menyediakan infrastruktur jalan untuk mengakomodir kebutuhan transportasi masyarakat Bontang.

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan menurun setiap tahunnya pada periode 2016 – 2020 yakni 0,00327 di tahun 2016 menjadi 0,00228 pada tahun 2020. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang signifikan tiap tahunnya tidak diimbangi dengan penambahan panjang jalan.

Tabel 2. 28 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perhubungan Tahun 2016-2020

Tahun	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,00327	0,00295	0,00265	0,00242	0,00228

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bontang Tahun 2020

10. Urusan Komunikasi dan Informatika

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan E-Government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya.

Kegiatan Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) merupakan kegiatan yang ditujukan untuk memberikan acuan pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan pemerintah; mendorong peningkatan pemanfaatan TIK di lingkungan instansi pemerintah; serta untuk mendapatkan peta kondisi pemanfaatan TIK. Kegiatan PeGI hanya dilaksanakan hingga tahun 2017 dimana Kota Bontang mendapatkan nilai 3,29. Untuk tahun 2018 kegiatan ini berganti penilaian menjadi Indeks Penguatan Manajemen Pengelolaan TIK (PemanTIK) dimana Kota Bontang mendapatkan nilai 3,68 dan nilai 3,30 pada tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Provinsi Kalimantan Timur. Juga pada tahun 2019 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemePAN-RB) melakukan penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Kota Bontang mendapatkan predikat baik dengan nilai 2,64 di tahun 2019 dan meningkat menjadi 3,28 pada tahun 2020.

Peranan penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak Publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan Publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi Publik. Hasil pemeringkatan keterbukaan informasi Publik sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 Kota Bontang mendapatkan nilai 88,4 dan meningkat sebesar 1,3 poin menjadi 89,7 di tahun 2020.

Kinerja pelayanan umum urusan komunikasi dan informatika Kota Bontang tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 29 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2020

Tahun	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai Pemeringkatan eGovernment Indonesia(PeGi)	2,60	3,29	-	-	-
Hasil pemeringkatan keterbukaan informasi publik	0	85,80	87,10	88,40	89,70

Indeks Pemantik	-	-	3,68	3,30	-
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	-	-	-	2,64	3,28

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang Tahun 2020

11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Indikator persentase koperasi aktif pada tahun 2016 hingga 2020 mengalami fluktuasi pada tahun 2019 mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Tetapi pada tahun 2020 mengalami sedikit penurunan menjadi 94,87 persen karena terdampak COVID-19.

Sektor UMKM memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja, pembentuk produk domestik bruto (PDB), serta sumber ekspor nonmigas. Persentase Usaha Mikro dan Kecil tidak mengalami banyak perubahan dari tahun 2016 hingga 2020. Pada tahun 2020 tercatat sebesar 99,62 persen.

Tabel 2. 30 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2016-2020

Tahun	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kontribusi sektor industri terhadap PDRB non migas	35,50	34,29	36,73	42,52	46,68
Persentase Koperasi Aktif	83,76	83.54	62,39	63.37	94.87
Persentase Usaha Mikro dan Kecil	99.74	99.74	96.48	99.62	99.62

Sumber : Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Bontang Tahun 2020

12. Urusan Penanaman Modal

Keberhasilan urusan penanaman modal dapat dilihat dari jumlah investor dan jumlah nilai investasi PMDN/PMA. Jumlah investor PMDN/PMA tahun 2020 yakni 97 investor menurun dibandingkan tahun 2019 sebanyak 180 investor. Penurunan jumlah investor ini selaras dengan penurunan nilai investasi PMDN/PMA di tahun yang sama, yaitu 4,876 Triliun tahun 2019 dan 4,149 Triliun di tahun 2020. Dengan demikian penurunan realisasi PMDN/PMA adalah sebesar 726,863 Milyar.

Tabel 2. 31 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Penanaman Modal Tahun 2016-2020

Tahun	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah investor berskala nasional (PMDN)	9	6	10	172	90
Jumlah investor berskala nasional (PMA)	14	18	14	8	7
Jumlah Nilai berskala nasional (PMDN)	17.210.901,80	449.648,50	7.984.643,63	1.724.046,96	1.519.405,40
Jumlah Nilai berskala nasional (PMA)	\$ 152,38	\$ 5.273,39	\$ 266.768,51	\$ 1.547,99	\$ 104.808,59
Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN/PMA (milyar rupiah)	4,112,008	700,113	4,747,346	3,308,155	726,863

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bontang Tahun 2020

13. Urusan Pemuda dan Olah Raga

Kinerja urusan pemuda dan olahraga tergambar dari indikator jumlah pemuda berprestasi dan jumlah atlit berprestasi. Capaian ini sangat tergantung kepada pekan olahraga dan event kepemudaan yang diselenggarakan baik di tingkat provinsi maupun nasional. Adapun capaian indikator urusan pemuda dan olahraga disampaikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 32 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pemuda dan Olah Raga Tahun 2016-2018

Tahun	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah pemuda berprestasi	-	22	28	155	11
Jumlah atlit berprestasi	-	53	1135	547	99

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang Tahun 2020

14. Urusan Statistik

Urusan statistik diarahkan pada peningkatan ketersediaan data statistik daerah. Pelaksanaan urusan wajib statistik dilakukan dengan memperhatikan pada indikator kinerja program pengembangan data/informasi/statistik daerah yaitu ketersediaan data statistik pembangunan daerah. Hingga tahun 2020, Kota Bontang masih belum memiliki sistem data dan statistik yang terintegrasi. Sehingga diperlukan sistem data yang telah terintegrasi. Tetapi Kota Bontang telah memiliki sistem Informasi yang dapat

menginput data sektoral di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) bernama SIMPATIKU sejak tahun 2019 tetapi belum terintegrasi dengan sistem yang lainnya. Sehingga kedepannya perlu dilakukan pengembangan sistem agar SIMPATIKU dapat menjadi bank data Kota Bontang yang terintegrasi.

Tabel 2. 33 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Statistik Tahun 2016-2020

Tahun	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang Tahun 2020

15. Urusan Persandian

Salah satu yang dapat dihitung dari penggunaan persandian utk pengamanan informasi adalah pemasangan SSL (Secure Socket Layer), dimana SSL merupakan pengamanan terhadap website/aplikasi yang sudah online. Rendahnya persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah disebabkan masih minimnya SDM teknis yang menangani urusan tersebut dibandingkan dengan sistem dan aplikasi yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Bontang.

Tabel 2. 34 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Persandian Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	5	5	6	6	6

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang Tahun 2020

16. Urusan Kebudayaan

Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya di Kota Bontang pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 1 event dibandingkan 17 event yang diselenggarakan pada tahun 2019. Penurunan ini dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang mengharuskan Pemerintah melakukan pembatasan aktifitas masyarakat terutama kegiatan yang mengundang kerumuman/massa.

Tabel 2. 35 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kebudayaan Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	2	3	19	17	1

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang Tahun 2020

17. **Urusan Perpustakaan**

Perpustakaan adalah institusi pengelolaan koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian informasi, dan rekreasi para pemustaka. Perpustakaan umum juga dapat dijadikan sebagai tempat pelestarian kekayaan budaya bangsa yang fungsinya dapat melestarikan dan menyebarkan hasil budaya masyarakat. Adapun kegiatan utama di perpustakaan umum adalah melayani masyarakat sebagai pemustaka.

Jumlah Pengunjung perpustakaan per tahun di Kota Bontang mengalami penurunan yang signifikan dari menjadi 58.115 pengunjung di tahun 2019 menjadi 28.940 pada tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19 yang mengharuskan masyarakat melakukan aktivitas dari rumah.

Jumlah buku yang tersedia di perpustakaan daerah tidak mengalami penambahan koleksi selama 2 tahun terakhir. Namun demikian perpustakaan daerah mengembangkan perpustakaan digital yang memiliki 1.413 judul buku.

Tabel 2. 36 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perpustakaan Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Pengunjung perpustakaan pertahun	N/A	N/A	N/A	58.115	28.940
Jumlah buku yang tersedia di perpustakaan daerah	N/A	N/A	N/A	149653	149653

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang Tahun 2020

18. **Urusan Kearsipan**

Pengelolaan arsip secara baku sangat penting dilakukan agar dokumen yang ada terjamin keamanannya dan memudahkan apabila suatu saat membutuhkan arsip dokumen. Selama periode 2016 – 2020, pengelolaan arsip secara baku menurun dari 82,14 pada tahun 2016 menjadi 19,36 di tahun 2020.

Tabel 2. 37 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kearsipan Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pengelolaan arsip secara baku	82,14	79,31	79,31	22,58	48,38

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang Tahun 2020

Indikator pengelolaan arsip secara baku mengalami penurunan nilai pada tahun 2019 dan 2020. Hal ini disebabkan oleh pada tahun 2016 hingga tahun 2018 kriteria penilaian pengelolaan arsip masih dilakukan secara internal saja dimana Perangkat Daerah yang tercatat mengelola arsip secara baku adalah sebesar 23 PD dari 29 PD di Kota Bontang sehingga didapatkan angka sebesar 79,31 persen. Sedangkan pada tahun 2019 penilaian pengelolaan arsip menggunakan instrument dari Arsip Nasional RI sehingga yang tercatat sebagai Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku hanya sebanyak 6 Perangkat Daerah dari 31 PD sehingga didapatkan angka sebesar 19,35 persen. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 48,38 persen yakni sebanyak 15 dari 31 Perangkat Daerah yang telah mengelola arsip secara baku.

19. Urusan Kelautan dan Perikanan

Kota Bontang yang merupakan Kota pesisir mempunyai potensi besar dalam produksi perikanan dan hasil laut lainnya. Jumlah produksi ikan dan konsumsi ikan selama tahun 2016 - 2020 cukup tinggi dan terus meningkat.

Jumlah produksi Perikanan Tangkap selama 4 tahun terus meningkat. Namun pada tahun 2020 terjadi penurunan Produksi perikanan Tangkap yaitu sebesar 801,5 Ton, hal ini dikarenakan salah satu dampak dari wabah Pandemi COVID-19.

Jumlah Produksi Perikanan Budidaya mengalami fluktuasi, pada tahun 2017 mengalami kenaikan yang signifikan yaitu sebesar 2971,5 Ton, namun mengalami penurunan sebesar 2.200 ton menjadi 4.189 ton pada tahun 2020. Faktor yang mempengaruhi penurunan kinerja produksi perikanan budidaya antara lain meningkatnya harga pakan tidak diimbangi oleh peningkatan daya beli konsumsi ikan hasil budidaya.

Konsumsi ikan di Kota Bontang selama 3 tahun terakhir ini cenderung meningkat, bahkan pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 20,19 kg.

Tabel 2. 38 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2016-2020

Tahun	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Produksi perikanan Tangkap (ton)	20.150,8	20.773,6	20.925,4	21.137,5	20.336,0
Produksi perikanan Budidaya (ton)	3.417,8	6.389,3	5.396,5	5.629,9	4.189,3
Konsumsi ikan (kg)	-	37,4	34,3	34,3	54,49

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota Bontang Tahun 2020

20. **Urusan Pariwisata**

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pariwisata selama periode 2016 - 2020 dapat dilihat melalui indikator jumlah wisatawan dan jumlah objek wisata yang dikelola.

Secara umum jumlah kunjungan wisatawan di Kota Bontang cenderung meningkat dari Tahun 2016 – 2019, namun upaya pemerintah dalam pencegahan penularan COVID-19 dengan menutup objek wisata mempengaruhi sektor pariwisata dan sektor turunan lainnya yang menyebabkan jumlah kunjungan wisatawan menurun dari 472.205 orang pada tahun 2019 menjadi 215.029 orang pada tahun 2020. Keseriusan pemerintah dalam mengembangkan wisata terlihat dari peningkatan jumlah destinasi pariwisata dalam 5 tahun terakhir menjadi 10 destinasi pariwisata di tahun 2020. Untuk meningkatkan kunjungan dan geliat pariwisata Kota Bontang perlu di tingkatkan promosi wisata dan event-event yang mengadopsi adaptasi kebiasaan baru.

Tabel 2. 39 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pariwisata Tahun 2016-2020

Tahun	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata	103.712	383.868	409.319	472.205	215.029
Meningkatnya Jumlah Destinasi Pariwisata	1	1	1	4	10

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang Tahun 2020

21. **Urusan Pertanian**

Sektor pertanian di Kota Bontang meliputi produksi padi atau bahan pangan utama lokal lainnya, intensifikasi budidaya tanaman

pangan dan holtikultur dan Intensifikasi budidaya peternakan dan Produksi peternakan, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2. 40 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pertanian Tahun 2016-2020

Tahun	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Produksi padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per (ton)	83	258	200	161	161
Intensifikasi budidaya tanaman pangan dan hortikultura	-	274	205,41	200*	200
Intensifikasi budidaya peternakan, Produksi peternakan	-	1.132	1.213	1.332*	1.450

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota Bontang Tahun 2020

Untuk produksi padi atau bahan pangan utama lokal lainnya dan intenfikasi budidaya tanaman pangan dan holtikultur pada dasarnya usaha pertanian di Kota Bontang hanya bersifat musiman dan umumnya dilakukan masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau dengan tujuan untuk memanfaatkan lahan-lahan yang belum terbangun dikawasan perumahan. Usaha tersebut berpindah-pindah karena hanya merupakan pemanfaatan lahan tidur yang belum dipergunakan oleh pemiliknya. Usaha pertanian juga sebagian besar dilakukan warga Kota Bontang di wilayah Kutai Kartanegara dan Kutai Timur. Kondisi ini terlihat dari jumlah produksi padi atau bahan utama lokal lainnya pada periode 2016 – 2020 berkisar antar 80 – 260 ton.

Sedangkan untuk Intensifikasi budidaya peternakan dan Produksi peternakan meningkat selama 4 tahun terakhir hingga mencapai 1.450 ton pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan konsumsi hasil peternakan, seperti telur, ayam potong, daging sapi dan lain-lain.

22. Urusan Perdagangan

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB tanpa migas selama tahun 2016-2021 cenderung meningkat, sebesar 0,77 persen yakni 3,31 persen jika dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 2,54 persen. Pertumbuhan beberapa lapangan usaha secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi arus perdagangan di Kota Bontang.

Dalam pembinaan kapasitas kelompok pedagang, pemerintah memberikan pelatihan dan managemen usaha. Rata – rata cakupan pembinaan kelompok pedagang sebesar 646 pertahun.

Perbandingan capaian kinerja Ekspor Bersih Perdagangan dan Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Non Migas, selama 3 tahun terakhir mengalami penurunan yang sangat kecil yaitu -0,0535 dan - 0,035%. Hal ini disebabkan permintaan SKA terbesar PT. Badak LNG pada tahun 2020 ini turun dari tahun 2019 kontrak pembelian gas cair dari negara Jepang dan Korea banyak yang sudah berakhir.

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan perdagangan selama periode 2016 - 2021 dapat dilihat melalui indikator sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 41 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perdagangan Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Ekspor Bersih Perdagangan	2.786	2,770	2,994	2,257	2,098
Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	616	661	616	670	670
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	2,54	2,52	2,77	3,04	3,31

Sumber : Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Bontang Tahun 2020

23. Urusan Perindustrian

Kontribusi sektor industri memberikan sumbangan terbesar terhadap PDRB Kota Bontang baik dengan migas maupun tanpa migas. Perkembangan layanan pada kawasan industri terlihat dari perkembangan jumlah industri yang ada di Kota Bontang.

Pertumbuhan IKM di Kota Bontang mengalami fluktuasi. Terjadi pertumbuhan sebesar 12,8 persen pada tahun 2018 kondisi ini kemudian menurun secara signifikan menjadi 1,83 persen. Penurunan ini dipicu oleh berkurangnya industri pengolahan terutama industri kayu dan batako, dimana pasokan bahan baku kayu dan tanah liat sulit untuk didapatkan dan tidak berkelanjutan. Tahun 2020 tidak terdapat penambah jumlah unit usaha industri.

Tabel 2. 42 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perindustrian Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase pertumbuhan IKM	5,54	8,42	12,8	1.83	0

Sumber : Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Bontang Tahun 2020

24. Urusan Perencanaan

Kinerja urusan perencanaan diukur dengan indikator sebagai mana disajikan pada tabel 2.59.

Kesesuaian penjabaran program RPJMD kedalam RKPD, dan penjabaran kegiatan RKPD kedalam APBD merupakan tolok ukur penting dalam perencanaan pembangunan yang baik. Kondisi capaian indikator kinerja tersebut untuk Kota Bontang sudah sangat baik. Hal ini mengindikasikan bahwa perencanaan pembangunan Kota Bontang telah sinergi antara RPJMD, RKPD dan APBD.

Tabel 2. 43 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perencanaan Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase penjabaran program RPJMD kedalam program RKPD	79,9	65,84	75,47	73,37	105,88
Persentase penjabaran kegiatan RKPD kedalam APBD	-	-	95,84	95,89	98,71
Tingkat aspirasi masyarakat melalui musrenbang yang diakomodasi dalam RKPD	100	15,50	23,75	24,50	48,00

Sumber : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang Tahun 2020

25. Urusan Keuangan

Indikator kinerja pemerintah Kota Bontang terhadap laporan keuangan sampai dengan tahun 2020 mendapatkan opini BPK dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bontang dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik.

Indikator Prosentase Pengadaan Aset sesuai dengan Kebutuhan menunjukkan bahwa menunjukkan BPKAD selaku Perangkat Daerah konsisten dalam memenuhi kebutuhan asset seluruh Perangkat Daerah di Kota Bontang.

Untuk indikator Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2016 – 2019 meningkat setiap tahunnya dengan kenaikan rata rata 13,82 persen. Namun pada tahun 2020 terjadi penurunan PAD 12,40 persen dari tahun 2019. Hal ini dikarenakan adanya penurunan pendapatan dari pajak dan retribusi daerah seiring dengan perlambatan pertumbuhan perekonomian masyarakat akibat dampak pandemi COVID-19.

Kinerja pembangunan pelayanan urusan keuangan selama periode 2016-2021 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2. 44 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Keuangan Tahun 2016-2020

Tahun	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Prosentase Pengadaan Aset sesuai dengan Kebutuhan	70	75	80	88	100
Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)	150.349.246.779	155.101.868.653	199.690.865.584	218.743.530.945	191.609.479.655

Sumber : Badan Pendapatan Kota Bontang Tahun 2020
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bontang Tahun 2020

26. **Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**

Meningkatnya profesionalitas ASN, capaian kinerja pada tahun 2020 mengalami kenaikan drastis yaitu 33,02 % dari 39,48 % pada tahun 2019. Kenaikan ini disebabkan adanya peningkatan capaian indikator profesionalitas ASN (dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin).

Jumlah pegawai ASN Kota Bontang cenderung menurun selama periode 2016 – 2020. Tercatat jumlah pegawai Bontang tahun 2020 sebanyak 2.825 orang, berkurang sebanyak 469 orang Jika dibandingkan dengan tahun 2016.

Tabel 2. 45 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Meningkatnya profesionalitas ASN	N/A	N/A	N/A	39,48	72,5
Jumlah pegawai tetap	3.294	3.869	2.831	2.924	2.825

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Bontang Tahun 2020

27. **Urusan Penelitian dan Pengembangan**

Penelitian dan Pengembangan memiliki fungsi menyusun kebijakan teknis dan memfasilitasi inovasi untuk mendukung pelaksanaan perencanaan dan pembangunan daerah. Arah kebijakan yang ditetapkan oleh daerah terlebih dahulu didukung oleh kelitbangat. Persentase keberhasilan urusan penelitian dan

pengembangan diukur dengan capaian persentase hasil kelitbang yang ditindaklanjuti sebesar 75 persen dan persentase penerapan inovasi daerah sebesar 93,54 persen pada tahun 2020.

Tabel 2. 46 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Penelitian dan Pengembangan Tahun 2016-2020

Tahun	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase tindak lanjut hasil kelitbangan.	64,29	68,42	80,00	62,50	75,00
Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	19,35	35,48	51,61	54,83	93,54

Sumber : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang Tahun 2020

28. Urusan Pengawasan

Capaian indikator Tingkat maturitas SPIP Kota Bontang mengalami penurunan secara nilai dari tahun sebelumnya tetapi masih konsisten berada pada level 3, dikarenakan adanya perbedaan metode penilaian baru dari BPKP dimana pada tahun sebelumnya hanya pemenuhan data sedangkan pada tahun 2020 BPKP menetapkan penilaian SPIP lebih merinci ke implementasi SPIP.

Kinerja pembangunan pelayanan urusan pengawasan selama periode 2016-2021 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2. 47 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pengawasan Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks rata-rata akuntabilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	-	2 (C)	3 (B)	3 (B)	3 (B)
Rasio temuan BPK yang telah selesai ditindaklanjuti		86,27	87	87,5	93,29
Rasio temuan APIP yang telah selesai ditindaklanjuti		40	40	45	71
Indeks rata-rata akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	2,5 (CC)	2,5 (CC)	3 (B)	3 (B)	3 (B)
Indeks RB Kota Bontang	B	B	B	B	B

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase kasus pengaduan masyarakat dan aparatur yang telah selesai ditindaklanjuti	100	100	100	100	100
Tingkat maturitas SPIP Kota Bontang	2,88	3,71	3,71	3,07	3
Tingkat kapabilitas APIP Kota Bontang	2	3	2	3	3

Sumber : Inspektorat Kota Bontang Tahun 2020

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing merupakan kemampuan sebuah daerah untuk menghasilkan barang dan jasa untuk mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat, Daya saing Kota Bontang dapat dilihat dari aspek kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

A. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah yaitu kemampuan daerah untuk bersaing menyediakan fasilitas dan kemudahan bagi investor dan pelaku ekonomi untuk meningkatkan daya saing daerah.

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Kebutuhan makanan merupakan kebutuhan utama, sehingga kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan tersebut umumnya memang semakin meningkat. Kebutuhan makanan ini mempunyai titik jenuh, sehingga pada tingkat pendapatan yang lebih tinggi pengeluaran akan dialihkan ke kebutuhan lain, oleh karena itu persentase pengeluaran makanan dan non makanan dapat dijadikan sebagai indikator tingkat kesejahteraan penduduk. Besarnya konsumsi untuk makanan menandakan bahwa sebagian besar penduduk masih mementingkan kebutuhan pokok. Jika dilihat dari distribusi pengeluaran konsumsi, pengeluaran untuk konsumsi protein relatif lebih tinggi dibanding dengan untuk konsumsi karbohidrat, hal ini menunjukkan asupan gizi masyarakat Bontang sudah tergolong sangat baik.

Tabel 2. 48 Pengeluaran Konsumsi Pangan Rumah Tangga Per Kapita

No	Kelompok Barang	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
A	Rata-rata Pengeluaran Konsumsi (Ribu Rp)	658.447	760.989	789.837	803.871	899.901

No	Kelompok Barang	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
B	Distribusi Pengeluaran Konsumsi (%)					
1	Padi-padian	9,74	8,39	3,43	3,60	2,47
2	Umbi-umbian	0,74	0,69	0,24	0,26	0,23
3	Ikan / udang / cumi / kerang	10,51	10,81	4,43	4,44	3,52
4	Daging	5,09	5,51	2,01	2,11	1,55
5	Telur dan Susu	7,55	6,96	2,71	2,92	2,32
6	Sayur-sayuran	6,55	7,27	2,5	2,60	2,31
7	Kacang-kacangan	1,82	1,64	0,65	0,75	0,61
8	Buah-buahan	5,16	5,27	2,48	3,11	2,43
9	Minyak dan Lemak	2,06	2,03	0,73	0,77	0,57
10	Bahan Minuman	2,68	2,68	0,95	0,94	0,72
11	Bumbu-bumbuan	2,06	1,97	0,76	0,85	0,66
12	Konsumsi Lainnya	2,00	1,74	0,68	0,73	0,59
13	Makanan dan Minuman Jadi	34,42	37,9	16,01	16,51	16,24
14	Tembakau dan sirih	9,62	7,14	2,54	3,29	2,29
	Jumlah	100,00	100,00	40,10	42,87	36,51

Sumber BPS Kota Bontang Tahun 2020

Tabel 2. 49 Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Rumah Tangga Per Kapita

No	Kelompok Barang	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
A	Rata-rata Pengeluaran Konsumsi (Ribu Rp)	900.960	877.313	1.179.682	1.071.079	1.564.991
B	Distribusi Pengeluaran Konsumsi (%)					
1	Perumahan dan Fasilitas Rumah tangga	51,85	56,81	27,87	27,16	24,38
2	Aneka Barang dan Jasa	32,6	26,67	15,12	14,96	20
3	Pakaian, Alas kaki dan Tutup Kepala	4,48	2,59	3,17	2,76	3,63
4	Barang Tahan Lama	4,89	5,15	6,22	6,08	7,57
5	Pajak, Pungutan dan Asuransi	4,37	8,36	3,81	3,86	5,38

No	Kelompok Barang	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
6	Keperluan Pesta dan Upacara / Kenduri	1,81	0,42	3,72	2,30	2,14
	Jumlah	100	100	59,9	57,13	63,49

Sumber BPS Kota Bontang Tahun 2020

B. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur akan meningkatkan mobilitas manusia dan barang antar daerah dan antara kabupaten/kota, yang meliputi fasilitas transportasi (jalan, jembatan, pelabuhan), fasilitas kelistrikan, fasilitas komunikasi, fasilitas pendidikan, dan fasilitas air bersih. Tersedianya infrastruktur yang memadai merupakan nilai tambah bagi perwujudan pembangunan daerah.

1. Aksesibilitas Daerah

Meski sumber daya alam di Kota Bontang terbatas, namun sektor industri, jasa dan pariwisata sektor utama yang berpotensi untuk dikembangkan di Kota Bontang. Kota Bontang juga merupakan salah satu Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di Provinsi Kalimantan Timur. Ketersediaan sarana yang memadai sangat diperlukan untuk memudahkan aksesibilitas di Kota Bontang, antara lain:

a. Sarana Jalan.

Akses dari dan ke Kota Bontang disisi darat adalah melalui jalan Trans Kalimantan yang saat ini kondisinya relatif kurang baik, namun sebaliknya kondisi jalan di wilayah administrasi Kota Bontang secara umum berada pada kondisi baik. Pada tahun 2020, dari 195,33 km panjang jalan, hanya terdapat sekitar 5,31 km atau 2,72 persen jalan dalam kondisi rusak dan 11,97 km atau 6,13 persen dalam kondisi rusak berat. Kondisi jalan yang rusak sebagian besar berada di Kelurahan Bontang Lestari merupakan fokus aktivitas industri baru sehingga sering dilewati oleh kendaraan besar.

b. Pelabuhan Kota Bontang.

Pelabuhan Loktuan merupakan pelabuhan yang melayani penumpang kapal antar provinsi. Selama tahun 2020, kapal dalam negeri yang bersandar di Pelabuhan Loktuan Kota Bontang sebanyak 2.915 unit, sedangkan kapal luar negeri yang bersandar di Pelabuhan Kota Bontang sebanyak 509 unit, serta kapal rakyat sebanyak 222 unit.

c. Bandara PT. Badak NHL.

Bandara PT. Badak NGL merupakan bandara perintis yang melayani penumpang yang utamanya pegawai perusahaan serta masyarakat umum. Penerbangan dari Bandara PT. Badak NGL

Kota Bontang tahun 2020 sebanyak 110 kedatangan dan 110 keberangkatan, dengan 2.520 orang penumpang berangkat dan 2.802 orang penumpang datang.

- d. Terminal Bus.
Terimal Buk di Kota Bontang merupakan terminal dengan kategori tipe pelayanan tipe C yang melayani arus penumpang dan barang ke Kota Samarinda, Kota Balikpapan dan Kabupaten Kutai Timur.

Tabel 2. 50 Profil Kondisi Jalan di Kota Bontang Tahun 2020

No	Kecamatan		Kondisi Jalan				Total Panjang Jalan (m)
			Baik (m)	Sedang (m)	Rusak Ringan (m)	Rusak Berat (m)	
1	Kecamatan Bontang Barat		33.457,60	640,50	246,90	800,00	35.145,00
2	Kecamatan Bontang Selatan		86.825,69	1.412,78	4.022,70	10.372,83	102.634,00
3	Kecamatan Bontang Utara		55.477,10	236,00	1.044,90	800,00	57.558,00
Total Panjang		(m)	175.760,39	2.289,28	5.314,5	11.972,83	195.337,00
		(km)	175,76	2,29	5,31	11,97	195,33

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang tahun 2020

Banjir masih merupakan salah satu isu utama di Kota Bontang, setiap tahun masih selalu terjadi bencana banjir bahkan pada tahun 2019 merupakan salah satu bencana banjir terparah di Kota Bontang. Bencana banjir terjadi khususnya pada wilayah dataran rendah dan berada di sekitar sepanjang Sungai Bontang dan Sungai Guntung.

Tabel 2. 51 Luas kebanjiran/tergenang

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Luas wilayah tergenang (ha)	-	-	-	1.287,63	924,15

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang Tahun 2020

Tabel 2. 52 Luas Genangan Berdasarkan Lokasi Tahun 2020

NO	WILAYAH	DAS	LUASAN KAWASAN BANJIR (HA)
1	KELURAHAN GUNUNG TELIHAN	BONTANG	59,10
2	KELURAHAN KANAAN	BONTANG	72,10

NO	WILAYAH	DAS	LUASAN KAWASAN BANJIR (HA)
3	KELURAHAN GUNUNG ELAI	BONTANG	31,59
4	KELURAHAN SATIMPO	BONTANG	22,91
5	KELURAHAN API-API	BONTANG	62,85
6	KELURAHAN BONTANG KUALA	BONTANG	668,47
TOTAL DAS BONTANG			917,02
7	KELURAHAN GUNTUNG	GUNTUNG	6,34
TOTAL DAS GUNTUNG			6,34
8	KELURAHAN TANJUNG LAUT	-	0,01
9	KELURAHAN TANJUNG LAUT INDAH	-	0,78
TOTAL			924,15

2. Ketersediaan Air Minum

Pelayanan umum terhadap pemenuhan fasilitas air minum di Kota Bontang dapat dikatakan mengalami peningkatan. Terlihat dari jumlah pelanggan, pemakaian dan penjualan air yang terus meningkat tiap tahunnya, demi memenuhi kebutuhan seluruh warga. Pekerjaan rumah utama terkait pelayanan air bersih terdapat disisi hulu yaitu penyediaan air baku permukaan yang saat ini masih terus diupayakan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kutai Timur. Gambaran pelayanan air minum di Kota Bontang dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2. 53 Perkembangan Banyaknya Pelanggan, Pemakaian & Penjualan Air Minum PDAM

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Pelanggan	18.484	19.540	20.977	22.219	23.131
Pemakaian Air (Liter/detik))	319,87	341,08	335,27	368,08	387,43
Penjualan Air (M3)	8.425.010	8.399.420	8.400.240	8.911.938	9.847.100
Persentase Kapasitas sumur air tanah	63,25	66,74	65,08	62,25	69,78

Sumber : PDAM Kota Bontang 2020

3. Komunikasi dan Informatika

Perkembangan jaringan telekomunikasi juga menunjukkan arah yang positif, terlihat dengan banyaknya satuan sambungan yang dipasarkan kepada masyarakat. Fasilitas telepon seiring dengan perkembangan teknologi untuk jaringan tetap (jaringan telepon lokal, SLI, SLJJ, dan tertutup) mengalami kecenderungan menurun, tetapi untuk jaringan bergerak yakni satelit dan telepon seluler mengalami perkembangan cukup pesat. Seluruh wilayah Kota Bontang saat ini sudah terjangkau oleh jaringan 4G walaupun masih terdapat beberapa *blank spot area* dan belum semua operator selular beroperasi di Kota Bontang. Saat ini Indonesia sudah memulai era 5G yang menawarkan kecepatan akses internet yang hingga 100 kali lipat dari 4G dan Pemerintah Kota Bontang harus mempersiapkan kebijakan untuk mengakselerasi penetrasi 5G.

Tabel 2. 54 Persentase Rumah Tangga Menurut Kepemilikan Telepon Seluler (HP)

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	74,43	74,47	93,73	92,82	92,91
Proporsi individu yang mengakses internet	75,87	74,68	76,14	75,56	77,00

Sumber : BPS Kota Bontang Tahun 2020

4. Perdagangan Barang dan Jasa

Jumlah hotel dan perkembangannya di Kota Bontang relatif stagnan dan tidak berkembang. Hanya terdapat 3 hotel berbintang dan 2 hotel diantaranya merupakan hotel yang dibangun sebagai pelayanan dari sektor industri. Hal ini menunjukkan sektor pariwisata maupun sektor perdagangan dan jasa belum memberikan sumbangsih yang cukup berarti dan belum digarap dengan optimal.

Tabel 2. 55 Jumlah Hotel Menurut Kecamatan dan Klasifikasi diKota Bontang 2020

Kecamatan	Hotel Berbintang					Hotel Non bintang & Akomodasi lainnya	Total
	Bintang 1	Bintang 2	Bintang 3	Bintang 4	Bintang 5		
Bontang Selatan						9	9
Bontang Utara		1	1			12	14

Bontang Barat			1			6	7
Bontang		1	2			27	30

Tabel 2. 56 Perkembangan Jumlah Restoran dan Rumah Makan di Kota Bontang Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Rumah makan / Restoran	173	291	274	292	288

Perkembangan restoran dan rumah makan di Kota Bontang terbilang meningkat dan cukup baik meski terjadi penurunan di tahun 2020. Ketersediaan restoran dan rumah makan menunjukkan kesiapan daerah terhadap potensi investasi dan sebagai potret tumbuhnya sektor pariwisata di Kota Bontang. Jumlah rumah makan di Kota Bontang tahun 2016 sebanyak 173 unit, tahun 2017 sebanyak 291 unit, tahun 2018 sebanyak 274 unit, tahun 2019 meningkat menjadi 292 unit dan tahun 2020 berkurang menjadi 288 unit.

Tabel 2. 57 Perkembangan Jumlah Obyek Wisata di Kota Bontang Tahun 2016 - 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Obyek Wisata					
- Obyek Wisata Alam	-	8	12	7	15
- Obyek Wisata Budaya	-	3	3	3	17
- Obyek Wisata Buatan	-	12	10	10	14

Meski pariwisata alam terbatas, Kota Bontang mampu mengembangkan dan mengoptimalkan objek wisata alam yang ada terutama wisata maritim yang merupakan kearifan lokal Kota Bontang. Hal ini terlihat dari pertumbuhan objek wisata alam menjadi 15 objek wisata sejak tahun 2017. Wisata budaya juga meningkat secara signifikan, dari 3 objek di tahun 2017 menjadi 17 objek wisata di tahun 2020. Sedangkan objek wisata buatan meningkat menjadi 14 objek wisata pada tahun 2020.

Perkembangan jumlah industri di Kota Bontang mengalami fluktuasi nilai setiap tahunnya hingga pada tahun 2020 secara jumlah mengalami penurunan. Penurunan jumlah industri yang signifikan pada tahun 2020 terdapat pada industri makanan dan minuman yang menurun sebanyak 96 industri. Sedangkan industri minuman menurun sebanyak 14 buah. Untuk industri kimia, hasil hutan dan

perkebunan serta industri lainnya mengalami kenaikan meskipun tidak signifikan.

Tabel 2. 58 Perkembangan Jumlah Industri

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Industri					
- Makanan dan Minuman	382	454	525	525	429
- Industri Minuman	189	235	283	283	269
- Industri Kimia	40	39	42	42	45
- Industri Hasil Hutan dan Perkebunan	19	14	17	17	19
- Lainnya	33	33	43	43	48

Sumber : Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Bontang Tahun 2020

Perkembangan jumlah pasar tradisional baik milik pemerintah dan milik swasta dan juga pasar swalayan di Kota Bontang sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 stagnan dan tidak ada penambahan ataupun pengurangan. Untuk jumlah minimarket dari tahun 2016 bertambah sebanyak 17 minimarket hingga tahun 2020, sedangkan untuk pertokoan/warung/kios bertambah sebanyak 13 toko sampai tahun 2020. Perkembangan kota yang semakin pesat mendorong toko-toko untuk berinvestasi di Kota Taman.

Tabel 2. 59 Perkembangan Jumlah Pasar

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pasar Tradisional milik Pemerintah	3	3	3	3	3
Pasar Tradisional milik Swasta	2	2	2	2	2
Pasar Swalayan / Supermarket / Toserba	2	2	2	2	2
Mini Market	206	212	218	222	223
Pertokoan/Warung/Kios	208	214	220	221	221

Sumber : Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Bontang Tahun 2020

C. Fokus Fasilitas Iklim Berinvestasi

Sebagai kota industri, Kota Bontang memiliki peluang investasi yang luas di berbagai sektor. Ketersediaan sarana, prasarana dan kondusifitas wilayah merupakan faktor kunci bagi investor untuk mempertimbangkan berinvestasi di suatu daerah. Secara umum kondisi keamanan Kota Bontang relatif kondusif. Berbagai gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat dapat diatasi oleh aparaturnya pemerintah dan masyarakat dengan baik. Pembinaan keamanan dan

ketertiban masyarakat melibatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungannya.

Pemerintah mendorong tumbuh pesatnya investasi di Kota Bontang dengan kebijakan-kebijakan ramah investasi. Birokrasi pelayanan perijinan yang sederhana dan berbasis online sangat memudahkan dan mempercepat pengurusan perijinan bagi investor. Selain itu, Pemerintah Kota Bontang mengembangkan berbagai terobosan dan inovasi untuk mendukung percepatan perijinan dan investasi antara lain perijinan berbasis online, perijinan jemput bola, integrasi sistem perijinan dengan Perangkat Daerah dengan fungsi terkait, serta regulasi yang menetapkan lama proses ijin.

Tabel 2. 60 Perkembangan Lama Proses Ijin di Kota Bontang Tahun 2016 – 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Lama Proses Ijin (hari)	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bontang Tahun 2020

Perkembangan Pajak dan Retribusi di Kota Bontang tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun karena pendapatan 9 obyek pajak di Kota Bontang yang juga fluktuatif. Pada tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang mempengaruhi beberapa obyek pajak dan hasil retribusi daerah.

Tabel 2. 61 Perkembangan Pajak dan Retribusi di Kota Bontang Tahun 2016 – 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak	71.426.252.746	82.122.896.197	119.410.487.414	116.864.297.801	100.014.196.975
Retribusi Daerah	6.528.480.654	4.596.396.524	3.980.779.128	6.317.525.028	4.648.143.497

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2020

D. Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber daya Manusia yang unggul merupakan aset daerah yang merupakan kunci terciptanya daya saing suatu daerah. Oleh karena itu perhatian pemerintah terhadap SDM harus diprioritaskan secara terus menerus. Rasio ketergantungan (dependency ratio) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang.

Fasilitas Pendidikan Di Kota Bontang Tahun 2016 hingga 2020 tidak mengalami banyak perubahan. Penambahan jumlah fasilitas pendidikan terdapat pada Jumlah PAUD (SPS) swasta yang bertambah sebanyak 3 sekolah dan Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) bertambah sebanyak 5 sekolah. Jumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) pada tahun 2018 mengalami penurunan dan kembali bertambah sebanyak 3 PKBM pada tahun 2019. Sedangkan untuk fasilitas sekolah jenjang lainnya tidak mengalami perubahan jumlah.

Tabel 2. 62 Perkembangan Fasilitas Pendidikan Di Kota Bontang Tahun 2015 – 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah PAUD (SPS)	37	37	37	33	36
Negeri					
Swasta	37	37	37	33	36
Jumlah Taman Kanak-kanak (TK)	55	55	57	50	55
Negeri	3	3	3	3	3
Swasta	52	52	54	47	52
Jumlah RA/BA	11	11	11	11	11
Jumlah Sekolah Dasar (SD)	56	56	56	56	56
Negeri	30	30	30	30	30
Swasta	26	26	26	26	26
Jumlah MI	4	5	5	5	5
Negeri					
Swasta	4	5	5	5	5
Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP)	27	27	27	27	27
Negeri	9	9	9	9	9
Swasta	18	18	18	18	18
Jumlah MTs	6	6	6	6	6
Negeri					
swasta	6	6	6	6	6
Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA)	11	11	11	11	11
Negeri	3	3	3	3	3
Swasta	8	8	8	8	8
Jumlah MA	2	2	2	2	2
Negeri	1	1	1	1	1
Swasta	1	1	1	1	1

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	13	13	14	14	14
Negeri	3	3	4	4	4
Swasta	10	10	10	10	10
Jumlah Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)					
Negeri	1	1	1	1	1
Swasta					
Jumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)					
Negeri					
Swasta	26	26	15	18	18

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Bontang Tahun 2020

Tabel 2. 63 Perkembangan Fasilitas Kesehatan Di Kota Bontang Tahun 2015 – 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Rumah Sakit Umum :					
Rumah Sakit Swasta	4	4	4	4	4
Rumah Sakit Umum Daerah	1	1	1	1	1
Rumah Sakit Umum Pusat	0	0	0	0	0
Rumah Sakit TNI / POLRI	0	0	0	0	0
Rumah Sakit Khusus, terdiri dari :					
Rumah Bersalin (RB) / BKIA	0	0	0	0	0
Puskesmas, terdiri dari :					
Puskesmas Perawatan	0	0	0	0	0
Puskesmas Non Perawatan	6	6	6	6	6
Puskesmas Pembantu	2	2	2	2	2
Posyandu yang ada	115	121	119	119	-
Dokter gigi swasta	2	2	2	2	-

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2020

Perkembangan Fasilitas Kesehatan Di Kota Bontang Tahun 2016 hingga tahun 2020 tidak mengalami penambahan baik untuk rumah

sakit swasta yang berjumlah 4 RS dan rumah sakit umum daerah yang berjumlah 1. Baik untuk Puskesmas Non Perawatan dan Puskesmas Pembantu juga tidak mengalami penambahan.

Rasio ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase rasio ketergantungan, menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Rasio Ketergantungan (Defendency Ratio) di Kota Bontang setiap tahunnya mengalami perubahan yang tidak signifikan. Pada tahun 2019 nilai rasio ketergantungan adalah sebesar 43,50% mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 43,24%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap 100 orang di Kota Bontang yang berusia 15-64 tahun (angkatan kerja) yang dianggap produktif memiliki tanggungan sebanyak 43 hingga 44 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Angka ini mengindikasikan makin kecil angka rasio ini, maka beban ketergantungan atau dukungan ekonomi yang harus diberikan penduduk usia produktif kepada penduduk usia non produktif menjadi lebih ringan.

Tabel 2. 64 Perkembangan Kependudukan Kota Bontang Tahun 2016 – 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Penduduk Usia < 15th (ribu jiwa)	48.143	48.408	50.053	51.264	51.651
Penduduk Usia > 15th & < 65 th (ribu jiwa)	122.730	125.032	125.962	126.563	129.000
Penduduk Usia > 65th (ribu jiwa)	2.897	3.075	3.393	3.791	4.133
Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	17.3770	176.515	179.408	181.618	184.784
Rasio Ketergantungan (%)	41,59	41,18	42,43	43,50	43,24
Rasio Lulusan S1/S2/S3	0,0547	0,0556	0,0573	0,0584	0,0599

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang Tahun 2020

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD Tahun 2020

Evaluasi pelaksanaan Program Tahun 2020 mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program RKPD tahun 2020 dan realisasi RPJMD.

Dalam pelaksanaan APBD tahun 2020, pembangunan daerah dijabarkan dalam 187 program dan terdapat 7 program rutin pada setiap perangkat daerah yang dilaksanakan oleh 31 Perangkat Daerah sehingga secara keseluruhan program 352. Secara keseluruhan pelaksanaan Program dan Kegiatan pembangunan hingga akhir semester ke dua tahun 2020 realisasi target kinerja mencapai 83,57% dengan realisasi keuangan 94,13% atau dari anggaran sebesar Rp. 891.877.782.130,- dapat diserap sebesar Rp.839.502.944.173,-.

Tabel 2.65 Rekapitulasi Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Berdasarkan Perangkat Daerah Tahun 2020

No. Urut	Kode OPD	Perangkat Daerah	Jumlah		Pagu dan Realisasi Anggaran				Rata-rata Capaian Kinerja (%) dan Predikat Kinerja Perangkat Daerah			
			Prog	Keg	Pagu	%	Realisasi	%				
									K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	15	165	96.426.418.700	10,81	66.280.919.396	68,74	66,76	69,69	S	S
2	1.02.01	Dinas Kesehatan Kota Bontang	22	154	83.214.096.549	9,33	79.529.845.642	95,57	87,21	87,27	T	T
3	1.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah	10	30	102.351.511.663	11,48	99.408.673.892	97,12	74,47	80,82	S	T
4	1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	18	125	139.271.823.257	15,62	141.486.923.885	101,59	78,70	95,38	T	ST
5	1.04.01	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	16	77	57.231.850.762	6,42	49.809.174.387	87,03	83,06	90,89	T	T
6	1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja	7	33	5.803.260.965	0,65	5.504.304.524	94,85	66,48	90,12	S	T
7	1.05.02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5	25	5.224.833.967	0,59	4.710.693.071	90,16	95,00	91,19	ST	ST
8	1.05.03	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	7	34	9.168.315.933	1,03	9.760.282.263	106,46	69,70	98,80	S	ST
9	1.05.04	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11	39	3.577.311.330	0,40	3.744.817.201	104,68	81,91	86,90	T	T
10	1.06.01	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	13	48	8.280.982.417	0,93	8.037.239.221	97,06	82,35	92,44	T	ST
11	1.07.01	Dinas Ketenagakerjaan	8	29	6.743.692.700	0,76	6.192.162.044	91,82	75,46	93,90	S	ST
12	1.08.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	16	67	7.796.735.942	0,87	7.589.602.556	97,34	72,03	93,82	S	ST
13	1.11.01	Dinas Lingkungan Hidup	10	44	19.004.993.560	2,13	18.742.994.476	98,62	140,10	88,64	ST	T
14	1.12.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6	29	2.932.515.919	0,33	2.681.967.146	91,46	82,76	92,94	T	ST
15	1.15.01	Dinas Perhubungan	9	45	8.170.278.960	0,92	7.783.504.143	95,27	67,44	96,21	S	ST

No. Urut	Kode OPD	Perangkat Daerah	Jumlah	Pagu dan Realisasi Anggaran	Rata-rata Capaian Kinerja (%) dan Predikat Kinerja Perangkat Daerah	No. Urut	Kode OPD	Perangkat Daerah	Jumlah	Pagu dan Realisasi Anggaran	Rata-rata Capaian Kinerja (%) dan Predikat Kinerja Perangkat Daerah	No. Urut
16	1.16.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	14	54	9.149.451.006	1,03	8.956.872.100	97,90	80,16	95,56	T	ST
17	1.17.01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	17	42	25.423.606.744	2,85	23.391.640.465	92,01	66,50	95,89	S	ST
18	1.18.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8	28	3.942.493.084	0,44	4.194.358.142	106,39	71,41	98,28	S	ST
19	1.19.01	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata	11	46	9.108.048.867	1,02	8.869.828.817	97,38	82,57	97,81	T	ST
20	1.23.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12	44	5.446.591.977	0,61	5.183.407.850	95,17	74,32	95,50	S	ST
21	2.01.01	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	14	48	23.468.026.015	2,63	24.004.407.236	102,29	94,31	96,84	ST	ST
22	3.01.01	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	12	52	6.798.795.230	0,76	5.376.564.028	79,08	88,03	82,56	T	T
23	3.02.01	Badan Pendapatan Daerah	6	32	10.264.302.618	1,15	9.502.722.915	92,58	98,74	87,36	ST	T
24	3.02.02	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	7	61	16.465.604.591	1,85	16.476.467.173	100,07	99,98	91,19	ST	ST
25	3.03.01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9	44	4.421.572.318	0,50	5.334.766.655	120,65	76,81	97,83	T	ST
26	3.05.01	Inspektorat Daerah	8	25	3.759.847.723	0,42	3.594.590.387	95,60	95,20	93,23	ST	ST
27	3.06.01	Sekretariat Daerah	19	108	77.914.329.135	8,74	74.616.586.757	95,77	76,87	94,05	T	ST
28	3.06.02	Sekretariat DPRD	8	49	42.148.755.083	4,73	41.610.800.591	98,72	80,31	73,35	T	S
29	3.07.01	Kecamatan Bontang Utara	12	297	41.436.054.235	4,65	40.467.471.143	97,66	94,57	97,17	ST	ST
30	3.07.02	Kecamatan Bontang Selatan	11	299	37.349.328.916	4,19	36.648.903.106	98,12	94,63	94,62	ST	ST
31	3.07.03	Kecamatan Bontang Barat	11	163	19.582.351.964	2,20	20.010.452.961	102,19	92,94	95,97	ST	ST
J U M L A H			352	2.336	891.877.782.130	100,00	839.502.944.173	94,13	83,57	91,49	T	ST

Tabel. 2.66 Rencana Program Dan Kegiatan Perubahan Tahun Anggaran 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2020 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K		Rp	Rp	K	Rp	
1	2	3	4			5	6		7
1.01 1.01.01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pelayanan administrasi Perkantoran	100	%	17.423.512.87 2	15.605.533.047	88,45	89,57	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01 1.01.01 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur	90	%	572.964.228	558.705.800	100,00	97,51	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01 1.01.01 03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Kedisiplinan Sumber Daya Aparatur	100	%	441.900.000	400.545.970	100,00	90,64	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01 1.01.01 05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Peningkatan Mutu Sumber Daya Aparatur	100	%	268.619.582	258.958.327	100,00	96,40	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01 1.01.01 10	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Informasi Pembangunan Daerah	90	%	502.978.400	501.166.600	100,00	99,64	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01 1.01.01 15	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	Meningkatnya APK PAUD sebesar 95,60%	95.01	%	761.401.400	605.847.909	85,44	79,57	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01 1.01.01 16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	Jumlah ketersediaan ruang kelas SD dan SMP sesuai standar SNP	94	%	34.086.229.69 7	20.808.670.462	87,32	61,05	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01 1.01.01 18	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL	Peningkatan layanan pendidikan nonformal dan Informal	100	%	2.459.082.300	1.964.112.624	89,76	79,87	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01 1.01.01 20	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Peningkatan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	92.16	%	22.487.415.83 4	19.487.079.741	90,00	86,66	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01 1.01.01 22	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	Peningkatan mutu manajemen pelayanan pendidikan	100	%	3.492.758.250	1.027.287.421	61,90	29,41	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2020 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K		Rp	Rp	K	Rp	
1.01 1.01.01 24	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENDIDIKAN	Mewujudkan Bebas Biaya Pendidikan Bagi Seluruh Tingkat Pendidikan Dasar	100	%	4.383.654.713	3.882.346.880	97,83	88,56	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01 1.01.01 26	PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PENDIDIKAN	Peningkatan Mutu Manajemen Pendidikan	100	%	-	-	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01 1.01.01 33	PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSIF	Persentase sekolah piloting project pendidikan inklusif	79.13	%	938.521.432	908.716.432	100,00	96,82	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.02 1.02.01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Menigkatkan Kinerja Aparatur	100	%	12.206.737.36 1	11.558.334.986	100,00	94,69	Dinas Kesehatan Kota Bontang
1.02 1.02.01 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100	%	1.432.320.000	1.204.967.460	94,00	84,13	Dinas Kesehatan Kota Bontang
1.02 1.02.01 05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatkan kapasitas sumber daya Aparatur	100	%	49.350.000	46.670.033	96,08	94,57	Dinas Kesehatan Kota Bontang
1.02 1.02.01 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Meningkatkan Kinerja Aparatur	100	%	155.700.000	155.688.000	100,00	99,99	Dinas Kesehatan Kota Bontang
1.02 1.02.01 10	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Bontang City Carnaval	100	%	-	-	-	-	Dinas Kesehatan Kota Bontang
1.02 1.02.01 15	PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan	100	%	4.176.889.000	4.048.604.110	100,00	96,93	Dinas Kesehatan Kota Bontang
1.02 1.02.01 16	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase sarana kesehatan berizin	100	%	21.209.184.94 9	19.628.336.894	99,11	92,55	Dinas Kesehatan Kota Bontang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2020 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K		Rp	Rp	K	Rp	
1.02 1.02.01 17	PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Obat Layak (%)	100	%	17.990.000	17.934.900	100,00	99,69	Dinas Kesehatan Kota Bontang
1.02 1.02.01 19	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat	80	%	1.319.351.200	1.260.197.376	98,40	95,52	Dinas Kesehatan Kota Bontang
1.02 1.02.01 20	PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	Menurunkan Angka Balita Gizi Kurang	40	balita	132.118.000	124.668.000	96,80	94,36	Dinas Kesehatan Kota Bontang
1.02 1.02.01 21	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	Kelurahan melaksanakan STBM	60	%	537.441.000	449.310.475	88,06	83,60	Dinas Kesehatan Kota Bontang
1.02 1.02.01 22	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR	Insidensi Rate DBD	70 per 100.000	penduduk	3.957.571.600	3.783.076.531	90,00	95,59	Dinas Kesehatan Kota Bontang
1.02 1.02.01 25	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA	Meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP)	85	%	23.683.693.233	21.812.870.300	100,00	92,10	Dinas Kesehatan Kota Bontang
1.02 1.02.01 26	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA	Peningkatan pelayanan kesehatan	80	%	14.232.650.000	11.575.162.191	89,00	81,33	Dinas Kesehatan Kota Bontang
1.02 1.02.01 28	PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN	Persentase capaian indikator Kota Sehat	87	%	65.557.900	53.721.600	91,00	81,95	Dinas Kesehatan Kota Bontang
1.02 1.02.01 32	PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN IBU DAN ANAK	Angka kematian ibu	80	%	364.858.000	350.791.900	95,63	96,14	Dinas Kesehatan Kota Bontang
1.02 1.02.01 33	PROGRAM PENGEMBANGAN MANAJEMEN KESEHATAN	Persentase Terbangunnya Sistem informasi kesehatan terpadu	100	%	737.057.500	589.961.500	83,33	80,04	Dinas Kesehatan Kota Bontang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2020 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K		Rp	Rp	K	Rp	
1.02 1.02.01 37	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH (LABKESDA)	Jumlah Labkesda Tersertifikasi Akreditasi	1	Unit	2.589.839.400	2.339.483.011	100,00	90,33	Dinas Kesehatan Kota Bontang
1.02 1.02.01 38	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN MASALAH KEJIWAAN	Prevalensi Hipertensi	22	%	201.250.000	181.399.000	100,00	90,14	Dinas Kesehatan Kota Bontang
1.02 1.02.01 39	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR DAN RUJUKAN	Persentase FKTP dan FKTL Swasta Terakreditasi	100	%	400.684.000	301.942.375	80,00	75,36	Dinas Kesehatan Kota Bontang
1.02 1.02.01 41	PROGRAM PENINGKATAN SURVEILANS PENYAKIT, IMUNISASI DAN PENANGGULANGAN WABAH BENCANA	Persentase KLB Penyakit Menular dilakukan penyelidikan Epidemiologi < 24 jam	100	%	7.765.894.600	5.701.792.571	89,97	73,42	Dinas Kesehatan Kota Bontang
1.02 1.02.01 42	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan yang mendapat pelatihan sesuai standar	70	%	11.825.000	11.825.000	100,00	100,00	Dinas Kesehatan Kota Bontang
1.02 1.02.02 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran	100	%	7.056.623.875	6.492.638.444	93,62	92,01	Rumah Sakit Umum Daerah
1.02 1.02.02 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Presentase capaian program peningkatan sarana prasarana RS	100	%	5.880.966.600	5.564.381.101	100,00	94,62	Rumah Sakit Umum Daerah
1.02 1.02.02 05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Prosentase Pendidikan dan pelatihan BTCLS	100	%	1.056.450.000	1.051.533.558	100,00	99,53	Rumah Sakit Umum Daerah
1.02 1.02.02 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja RSUD	100	%	1.462.500	-	-	-	Rumah Sakit Umum Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2020 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K		Rp	Rp	K	Rp	
1.02 1.02.02 10	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Pelaksanaan Penyebaran Informasi Pelayanan RSUD	100	%	-	-	-	-	Rumah Sakit Umum Daerah
1.02 1.02.02 11	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	Prosentase Pencapaian Pemeliharaan dan Perlengkapan Jaringan Teknologi Informasi	...	%	-	-	-	-	Rumah Sakit Umum Daerah
1.02 1.02.02 19	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Prosentase Pencapaian publikasi	100	%	841.000.000	838.146.100	100,00	99,66	Rumah Sakit Umum Daerah
1.02 1.02.02 26	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	100	%	17.787.452.56 3	17.661.902.642	99,87	99,29	Rumah Sakit Umum Daerah
1.02 1.02.02 27	PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU- PARU/RUMAH SAKIT MATA	Prosentase pencapaian pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit	100	%	1.354.600.000	922.891.516	82,00	68,13	Rumah Sakit Umum Daerah
1.02 1.02.02 35	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN RUMAH SAKIT BLUD	Skor Survey Kepuasan Masyarakat	Poin A	Poin A	68.000.000.00 0	66.877.180.531	100,00	98,35	Rumah Sakit Umum Daerah
1.02.1.02.02.41	PROGRAM PENINGKATAN SURVEILANS PENYAKIT, IMUNISASI DAN PENANGGULANGAN WABAH BENCANA				1.990.303.900	1.895.956.804	-	95,26	Rumah Sakit Umum Daerah
1.03 1.03.01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	100	%	2.177.791.231	2.044.052.191	100,00	93,86	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2020 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K		Rp	Rp	K	Rp	
1.03 1.03.01 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	1	Unit, 12 Paket	883.578.650	853.879.751	100,00	96,64	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1.03 1.03.01 03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Peningkatan Disiplin Aparatur	100	%	248.870.000	245.964.500	100,00	98,83	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1.03 1.03.01 05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	100	%	216.865.250	215.871.113	100,00	99,54	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1.03 1.03.01 10	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH		100	%	125.000.000	122.832.500	100,00	98,27	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1.03 1.03.01 15	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	Meningkatkan Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	100	%	2.234.018.000	2.149.468.669	100,00	96,22	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1.03 1.03.01 16	PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG	Panjang Saluran	91,15	%	4.418.461.781	4.355.917.691	100,00	98,58	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1.03 1.03.01 17	PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG	Panjang Sungai	17.014	meter	57.595.343.180	53.244.706.360	107,89	92,45	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1.03 1.03.01 18	PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	Meningkatkan Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	91,15	%	23.044.855.679	22.529.088.942	98,30	97,76	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1.03 1.03.01 22	PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI/DATA BASE JALAN DAN JEMBATAN	Tersedianya Sistem Informasi/Data Base Jalan Dan Jembatan	100	%	235.614.400	229.170.800	100,00	97,27	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2020 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K		Rp	Rp	K	Rp	
1.03 1.03.01 28	PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR	Luas Wilayah Kebanjiran	34,28	Ha	8.952.360.850	7.974.405.476	96,05	89,08	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1.03 1.03.01 35	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAH DAERAH	Terbangunnya Gedung/Bangunan Yang Representatif	1	Unit	40.835.755.55 1	40.280.113.046	100,00	98,64	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1.03 1.03.01 36	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG PEMERINTAH DAERAH	Tersedianya Sarana Ibadah yang representatif	100	%	10.300.730.14 4	9.928.945.659	100,00	96,39	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1.03 1.03.01 37	PROGRAM PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN	Meningkatkan Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	91,15	%	2.849.004.638	2.680.973.856	100,00	94,10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1.03 1.03.01 40	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	Jumlah Regulasi/Peraturan Perencanaan Tata Ruang Yang Disusun	2	regulasi	260.950.025	259.965.000	100,00	99,62	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1.03 1.03.01 41	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan RDTR dan Peraturan Zonasi	70	%	-	-		-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1.03 1.04.01 22	PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI/DATA BASE JALAN DAN JEMBATAN	Tersedianya Sistem Informasi/database jalan lingkungan	100	%	109.580.150	103.600.000	100,00	94,54	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.03 1.04.01 38	PROGRAM PENINGKATAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN	Belanja lingkungan permukiman yang layak	100	%	17.476.572.39 6	17.042.061.600	100,00	97,51	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2020 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K		Rp	Rp	K	Rp	
1.04 1.03.01 22	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH	Meningkatnya presentase rumah tinggal bersanitasi	100	%	6.673.793.507	6.426.431.554	98,00	96,29	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1.04 1.04.01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	%	2.216.138.213	2.010.888.378	87,75	90,74	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04 1.04.01 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	%	398.629.000	389.522.000	99,20	97,72	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04 1.04.01 03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya Disiplin Aparatur	100	%	308.640.000	306.700.000	100,00	99,37	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04 1.04.01 05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	%	17.500.000	17.500.000	100,00	100,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04 1.04.01 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100	%	4.500.000	3.750.000	100,00	83,33	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04 1.04.01 10	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Pelaksanaan Bontang City Carnaval	100	%	-	-	-	-	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04 1.04.01 15	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Jumlah titik kawasan kumuh	1	titik/lokasi	2.741.857.279	2.555.774.131	100,00	93,21	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04 1.04.01 16	PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN	Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni	745	unit	51.880.000	43.822.000	-	84,47	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2020 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K		Rp	Rp	K	Rp	
1.04 1.04.01 19	PROGRAM PENATAAN PERMUKIMAN LINGKUNGAN	Jumlah pemukiman kumuh di bantaran sungai	100	%	-	-	-	-	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04 1.04.01 23	PROGRAM PENATAAN PERMUKIMAN KUMUH	Luas kawasan kumuh (M2)	49,284	m2	229.960.000	227.803.850	100,00	99,06	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.05 1.05.01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Penyediaan dana SPDP untuk rakor, konsultasi dan orientasi	100	%	3.619.330.465	3.458.572.324	91,67	95,56	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05 1.05.01 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Memenuhi Sarana dan Prasarana aparatur	1	tahun	947.626.500	867.702.700	100,00	91,57	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05 1.05.01 03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Terpenuhinya pakaian dinas Satpol PP	100	stel	180.400.000	169.400.000	96,05	93,90	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05 1.05.01 05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	15	orang	477.714.000	477.636.500	166,67	99,98	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05 1.05.01 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Laporan keuangan akhir tahun 2019 Satpol PP	10	buku	-	-	-	-	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05 1.05.01 15	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Jumlah daerah rawan gangguan trantibum	1	tahun	440.590.000	333.884.000	80,00	75,78	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05 1.05.01 16	PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	Jumlah daerah rawan pelanggaran Peraturan Daerah dan Produk Hukum Daerah	100	%	198.000.000	197.109.000	100,00	99,55	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05 1.05.02 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	95	%	1.876.242.027	1.781.690.431	99,77	94,96	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2020 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K		Rp	Rp	K	Rp	
1.05 1.05.02 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	95	%	579.778.940	546.689.790	94,44	94,29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05 1.05.02 03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Peningkatan Disiplin Aparatur	95	%	220.500.000	204.792.000	100,00	92,88	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05 1.05.02 05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal	95	%	-	-	-	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05 1.05.02 21	PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA	terwujudnya koordinasi dan kerjasama pemerintah daerah instansi vertikal, pihak perusahaan dan FKDM sekota bontang	95	%	2.398.313.000	2.177.520.850	100,00	90,79	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05 1.05.03 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		100	%	4.731.346.901	4.621.287.604	100,00	97,67	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05 1.05.03 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Terlaksananya Pemeliharaan sarana dan prasarana	100	%	1.545.876.163	1.534.732.672	100,00	99,28	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05 1.05.03 03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya disiplin aparatur	100	%	633.040.000	631.914.960	100,00	99,82	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05 1.05.03 05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya Kapasitas Aparatur yang memahami Tugasnya dengan baik	100	%	-	-	-	-	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05 1.05.03 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Meningkatnya sistem Pelaporan capaian kinerja dan realisasi keuangan	100	%	-	-	-	-	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2020 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K		Rp	Rp	K	Rp	
1.05 1.05.03 10	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya pemahaman masyarakat akan pembangunan sektor penggulangan kebakaran	100	%	10.000.000	9.900.000	100,00	99,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05 1.05.03 18	PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN	Meningkatnya waktu tanggap daerah WMK	100	%	3.025.054.335	2.962.447.027	100,00	97,93	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05 1.05.04 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Pelaksanaan Pelayanan administrasi kantor	100	%	1.458.941.716	1.377.567.870	100,00	94,42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05 1.05.04 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Peningkatan administrasi perkantoran	100	%	336.340.387	329.604.540	100,00	98,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05 1.05.04 03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Peningkatan Disiplin Aparatur	100	%	-	-	-	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05 1.05.04 05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	%	40.219.525	40.219.525	94,59	100,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05 1.05.04 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		60	%	8.493.750	8.362.150	100,00	98,45	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05 1.05.04 09	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	Peningkatan Pelayanan Publik	80	%	-	-	-	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05 1.05.04 10	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Pelaksanaan Informasi Pembangunan Daerah	100	%	-	-	-	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2020 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K		Rp	Rp	K	Rp	
1.05 1.05.04 23	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN PEMBANGUNAN	Jumlah Kegiatan pengembangan wawasan Pembangunan	100	%	24.956.250	23.233.200	100,00	93,10	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05 1.05.04 24	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN		100	%	1.537.939.800	1.487.819.430	98,87	96,74	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05 1.05.04 25	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)		100	%	162.232.625	101.783.700	100,00	62,74	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05 1.05.04 26	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	Jumlah Kegiatan pengembangan wawasan Pembangunan	100	%	413.275.877	376.226.786	100,00	91,04	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05 3.07.01 26	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	Peningkatan Pendidikan Politik di Masyarakat	100	%	268.195.500	260.408.858	100,00	97,10	Kecamatan Bontang Utara
1.05 3.07.02 26	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	Peningkatan Pendidikan Politik di Masyarakat	100	%	300.300.000	293.338.000	100,00	97,68	Kecamatan Bontang Selatan
1.05 3.07.03 26	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	Peningkatan Pendidikan Politik di Masyarakat	100	%	181.475.000	179.584.450	100,00	98,96	Kecamatan Bontang Barat
1.06 1.06.01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya Kinerja Pegawai	100	%	3.228.902.800	3.139.917.357	100,00	97,24	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
1.06 1.06.01 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100	%	931.446.925	925.856.000	100,00	99,40	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
1.06 1.06.01 03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya disiplin dan kinerja aparatur	100	%	433.735.200	424.027.200	100,00	97,76	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2020 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K		Rp	Rp	K	Rp	
1.06 1.06.01 05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100	%	23.900.000	23.253.000	100,00	97,29	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
1.06 1.06.01 10	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Terpublikasinya informasi pembangunan daerah	100	%	175.536.165	175.240.000	100,00	99,83	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
1.06 1.06.01 16	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	Persentase cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	52	%	463.410.600	422.744.577	100,00	91,22	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
1.06 1.06.01 21	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	Optimalnya peran lembaga dalam bidang kesejahteraan sosial	97	%	101.496.500	30.156.000	36,71	29,71	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
1.06 1.06.01 22	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	97	%	2.147.462.930	2.145.297.200	100,00	99,90	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
1.06 1.06.01 23	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Cakupan Penanganan PMKS dan PSKS	98	%	405.290.000	377.750.800	130,90	93,21	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
1.07 1.07.01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase pemenuhan layanan administrasi kantor	100	%	2.784.671.825	2.689.922.794	100,76	96,60	Dinas Ketenagakerjaan
1.07 1.07.01 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase pemenuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana	100	%	1.210.322.000	1.195.813.700	100,00	98,80	Dinas Ketenagakerjaan
1.07 1.07.01 03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Prosentase pemenuhan pakaian aparatur	100	%	124.955.000	123.368.300	100,00	98,73	Dinas Ketenagakerjaan
1.07 1.07.01 05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Prosentase pemenuhan pegawai yang mendapatkan pendidikan & pelatihan	100	%	-	-	-	-	Dinas Ketenagakerjaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2020 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K		Rp	Rp	K	Rp	
1.07 1.07.01 10	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Prosentase penyampaian informasi Pembangunan Daerah	100	%	349.539.000	348.644.000	100,00	99,74	Dinas Ketenagakerjaan
1.07 1.07.01 15	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Prosentase Tenaga Kerja Yang Di Latih	70	%	1.392.611.250	1.359.000.000	100,00	97,59	Dinas Ketenagakerjaan
1.07 1.07.01 16	PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA	Prosentase tenaga kerja lokal yang mendapat fasilitas penempatan dan pemberdayaan tenga kerja	22	%	204.625.000	204.625.000	100,00	100,00	Dinas Ketenagakerjaan
1.07 1.07.01 17	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN	Prosentase peyelesaian perselisihan hubungan industrial	75	%	515.076.825	394.156.550	87,00	76,52	Dinas Ketenagakerjaan
1.08 1.08.01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	%	2.524.665.772	2.367.649.838	122,22	93,78	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
1.08 1.08.01 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100	%	843.686.600	834.099.930	100,00	98,86	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
1.08 1.08.01 03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR		100	%	350.000.000	337.838.300	100,00	96,53	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
1.08 1.08.01 05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	%	415.967.752	411.467.752	100,00	98,92	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
1.08 1.08.01 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tersedianya informasi kinerja pembangunan	100	%	2.175.000	2.175.000	100,00	100,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2020 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K		Rp	Rp	K	Rp	
1.08 1.08.01 15	PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN	Meningkatnya keserasian terhadap kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	100	%	404.720.544	398.665.078	100,00	98,50	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
1.08 1.08.01 16	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK	Meningkatnya keserasian terhadap kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	100	%			-	-	
1.08 1.08.01 17	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Menurunkan angka KDRT dan anak	100	%	407.507.100	370.790.431	100,00	90,99	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
1.08 1.08.01 18	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN	Peningkatan Kapasitas Peran Perempuan	100	%	2.625.000	2.187.500	90,08	83,33	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
1.09 2.01.01 15	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN	Meningkatnya ketersediaan pangan	100	%	520.688.025	514.046.341	100,00	98,72	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
1.10 1.04.01 21	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR DAN SISTEM ADMINISTRASI PERTANAHAN	Lahan untuk kepentingan publik	100	%	929.124.224	768.609.612	89,09	82,72	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.11 1.04.01 24	PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	Terpeliharanya Ruang terbuka Hijau	21,5	%	18.873.221.75 4	12.968.731.882	72,00	68,71	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.11 1.04.01 25	PROGRAM PEMELIHARAAN/PENGEMBANGAN SISTEM KELISTRIKAN DAN PENERANGAN JALAN	Tersedianya dan terpeliharanya Sarana dan prasarana PJU	36,47	%	12.912.677.62 6	12.211.423.275	100,00	94,57	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2020 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K		Rp	Rp	K	Rp	
1.11 1.04.01 28	PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN	Cakupan Pengelolaan Pemakaman Umum	100	%	1.224.045.544	1.158.987.659	100,00	94,69	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.11 1.11.01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	100	%	1.969.481.453	1.770.034.749	335,00	89,87	Dinas Lingkungan Hidup
1.11 1.11.01 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100	%	2.944.791.642	2.823.970.082	100,00	95,90	Dinas Lingkungan Hidup
1.11 1.11.01 03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100	%	118.900.000	114.342.500	98,57	96,17	Dinas Lingkungan Hidup
1.11 1.11.01 05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100	%	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
1.11 1.11.01 15	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGOLAHAN SAMPAH		75	%	13.136.915.27 0	12.708.252.080	100,00	96,74	Dinas Lingkungan Hidup
1.11 1.11.01 16	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah usaha kegiatan yang dibina	34	usaha/ke giatan	781.236.145	704.183.240	94,00	90,14	Dinas Lingkungan Hidup
1.11 1.11.01 17	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	Jumlah lokasi yang dilakukan audit energi	100	%	327.560.000	304.678.500	97,08	93,01	Dinas Lingkungan Hidup
1.11 1.11.01 18	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM	Jumlah sumur pantau yang dipelihara	256,63	Ha	260.971.950	255.797.775	100,00	98,02	Dinas Lingkungan Hidup
1.11 1.11.01 19	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan pelayanan informasi lingkungan hidup	100	%	93.449.900	61.735.550	100,00	66,06	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2020 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K		Rp	Rp	K	Rp	
1.11 1.11.01 20	PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI	Kualitas udara memenuhi baku mutu	100	%	-	-		-	Dinas Lingkungan Hidup
1.12 1.12.01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tesedianya administrasi Perkantoran	100	%	1.542.327.419	1.382.961.576	100,00	89,67	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.12 1.12.01 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100	%	435.266.000	402.801.720	96,00	92,54	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.12 1.12.01 03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya kedisiplinan Aparatur	100	%	35.392.500	35.392.500	100,00	100,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.12 1.12.01 05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Penigkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	100	%	-	-	-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.12 1.12.01 10	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Terpublikasinya informasi pembangunan daerah	100	%	160.000.000	159.145.000	100,00	99,47	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.12 1.12.01 15	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Kependudukan	100	%	769.530.000	701.666.350	100,00	91,18	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.13 1.06.01 15	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT	Peningkatan Keberdayaan MAsyarakat Melalui PKK	100	%	202.020.125	172.677.100	100,00	85,48	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
1.13 1.06.01 24	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan	100	%	72.410.000	72.410.000	100,00	100,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
1.13 1.06.01 26	PROGRAM PENINGKATAN PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA	Tersedianya SDM Pemanfaat TTG	100	%	125.882.572	124.879.987	100,00	99,20	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2020 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K		Rp	Rp	K	Rp	
1.13 1.06.01 27	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT	Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat	87	%	3.150.000	3.030.000	100,00	96,19	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
1.14 1.08.01 15	PROGRAM KELUARGA BERENCANA	Pelayanan KIE	100	%	2.087.712.500	1.900.296.651	96,03	91,02	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
1.14 1.08.01 16	PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA	Meningkatnya Pemahaman remaja tentang TRIAD KRR	100	%	-	-	-	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
1.14 1.08.01 17	PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman calon dan peserta KB tentang KB	100	%	94.892.000	91.460.726	100,00	96,38	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
1.14 1.08.01 18	PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI	Keluarga Pra Sejahtera Dan Sejahtera 1	100	%	766.975.884	723.332.550	98,90	94,31	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
1.14 1.08.01 19	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN IBU, BAYI DAN ANAK MELALUI KELOMPOK KEGIATAN DI MASYARAKAT	Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	100	%	24.125.000	24.125.000	100,00	100,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
1.14 1.08.01 20	PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN DAN INFORMASI KONSELING KRR	Meningkatnya Kualitas kelompok PIK Remaja	100	%	105.207.000	99.763.800	96,05	94,83	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
1.14 1.08.01 22	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN INFORMASI TENTANG PENGASUHAN DAN PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK	Rasio rata - rata jumlah anak dalam keluarga	100	%	-	-	-	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2020 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K		Rp	Rp	K	Rp	
1.14 1.08.01 24	PROGRAM PENGEMBANGAN MODEL OPERASIONAL BKB-POSYANDU-PADU	Terlaksananya pembinaan saka kencana	100	%	25.750.000	25.750.000	100,00	100,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
1.15 1.15.01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kelancaran administrasi perkantoran	100	%	4.113.257.039	3.968.114.857	100,00	96,47	Dinas Perhubungan
1.15 1.15.01 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja aparatur dinas	100	%	757.960.600	688.350.660	100,00	90,82	Dinas Perhubungan
1.15 1.15.01 05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur	100	%	848.358.871	845.598.871	-	99,67	Dinas Perhubungan
1.15 1.15.01 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase peningkatan pengembangan sisitem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	%	4.194.000	4.194.000	100,00	100,00	Dinas Perhubungan
1.15 1.15.01 15	PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN	Cakupan ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan	87,5	%	205.868.350	201.256.410	-	97,76	Dinas Perhubungan
1.15 1.15.01 16	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ	Berfungsinya APILL dengan baik	100	%	593.560.000	587.934.500	100,00	99,05	Dinas Perhubungan
1.15 1.15.01 17	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN		100	%	12.900.000	12.270.000	100,00	95,12	Dinas Perhubungan
1.15 1.15.01 19	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS		100	%	751.080.000	746.127.252	100,00	99,34	Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2020 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K		Rp	Rp	K	Rp	
1.15 1.15.01 20	PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR	Meningkatnya kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	100	%	799.955.000	729.657.593	100,00	91,21	Dinas Perhubungan
1.16 1.16.01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan untuk Administrasi Perkantoran	100	%	2.528.968.814	2.519.701.256	98,96	99,63	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.16 1.16.01 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Layak Fungsi	100	%	714.199.275	713.344.550	100,00	99,88	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.16 1.16.01 03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur Dalam Berpakaian Dinas	100	%	299.933.400	299.521.500	100,00	99,86	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.16 1.16.01 05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Aparatur yang Memenuhi Standar Kompetensi/Kualifikasi Pada Unit Kerjanya	100	%	-	-	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.16 1.16.01 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat Pemenuhan Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Sesuai Aturan dan Tepat Waktu)	100	%	4.297.500	4.177.000	100,00	97,20	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.16 1.16.01 09	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	Hasil Pemeringkatan Keterbukaan Informatika Publik	89,7	%	-	-	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.16 1.16.01 10	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Hasil Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik	89,7	%	-	-	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2020 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K		Rp	Rp	K	Rp	
1.16 1.16.01 11	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	Indeks Pemantik	3,45	%	729.117.895	716.779.764	100,00	98,31	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.16 1.16.01 15	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASA	Hasil Pemeringkatan Keterbukaan Informatika Publik	89,7	%	1.413.557.900	1.389.138.622	100,00	98,27	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.16 1.16.01 22	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	Indeks Pemantik	3,45	%	2.560.105.860	2.543.884.362	100,00	99,37	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.16 1.16.01 23	PROGRAM DISEMINASI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Hasil Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik	89,7	%	278.500.000	264.926.500	100,00	95,13	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.16 3.06.01 18	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MASS MEDIA	Terpublikasinya informasi pembangunan daerah	100	%	723.218.950	708.708.639	100,00	97,99	Sekretariat Daerah
1.17 1.17.01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	%	7.558.304.556	7.399.170.972	100,00	97,89	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
1.17 1.17.01 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	%	386.970.800	383.744.800	100,00	99,17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
1.17 1.17.01 03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Peningkatan Disiplin Aparatur	100	%	-	-	-	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
1.17 1.17.01 05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	%	-	-	-	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2020 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K		Rp	Rp	K	Rp	
1.17 1.17.01 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat Pemenuhan Penyampaian Laporan Kinerja dan Keuangan OPD (Sesuai Aturan dan Tepat Waktu)	100	%	1.000.000	1.000.000	100,00	100,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
1.17 1.17.01 16	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH	Berkembangnya Volume Usaha Pelaku Mikro (Milyar)	95	%	-	-	-	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
1.17 1.17.01 17	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH	Volume Usaha Pelaku Mikro (Milyar)	25	%	-	-	-	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
1.17 1.17.01 18	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	Meningkatnya Kesadaran Berkoperasi Dikalangan Siswa SLTP dan SMA/ SMK	50	%	428.158.000	404.711.300	100,00	94,52	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
1.17 1.17.01 19	PROGRAM PENINGKATAN KELEMBAGAAN KOPERASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI UMKM	Terlaksananya Pemeringkatan Koperasi di Kota Bontang	45	Koperasi	-	-	-	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
1.17 1.17.01 24	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	Meningkatnya Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah	50	org	-	-	-	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
1.17 1.17.01 25	PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI	Meningkatnya Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah	50	org	-	-	-	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
1.17 1.17.01 26	PROGRAM PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI	Tersusunnya Kajian Rencana Pembangunan Industri Kota Bontang 2017 - 2035	...	%	-	-	-	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2020 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K		Rp	Rp	K	Rp	
1.18 1.18.01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	100	%	2.508.664.084	2.404.970.556	90,85	95,87	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.18 1.18.01 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100	%	220.880.600	219.332.315	100,00	99,30	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.18 1.18.01 03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Keseragaman aparatur DPM&PTSP	100	%	201.237.500	200.541.500	100,00	99,65	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.18 1.18.01 05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Penigkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	100	%	546.135.300	546.135.300	100,00	100,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.18 1.18.01 09	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		100	%	-	-	-	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.18 1.18.01 10	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Pelaksanaan Pameran Pembangunan dalam rangka HUT Kota Bontang	2	investor	-	-	-	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.18 1.18.01 11	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	Meningkatnya investor PMDN/PMA	3	hari	306.281.000	304.469.900	100,00	99,41	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.18 1.18.01 16	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI	Meningkatnya investor PMDN /PMA	100	%	520.842.000	518.908.571	100,00	99,63	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.19 1.19.01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Kelancaran Pelayaan Adminitrasi Perkantoran	100	%	3.237.494.117	3.154.472.629	98,54	97,44	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2020 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K		Rp	Rp	K	Rp	
1.19 1.19.01 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	77	%	1.583.125.400	1.562.321.950	100,00	98,69	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
1.19 1.19.01 03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya Disiplin Aparatur Pegawai	100	%	298.960.900	296.734.500	100,00	99,26	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
1.19 1.19.01 05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Peningkatan kinerja aparatur PNS dan Non PNS dalam melaksanakan tupoksinya	77	%	-	-	-	-	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
1.19 1.19.01 10	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah	77	%	99.991.900	99.598.000	100,00	99,61	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
1.19 1.19.01 15	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA	berkembangnya Potensi dan kreatifitas Pemuda	80	%	-	-	-	-	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
1.19 1.19.01 16	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	Meningkatnya Jumlah Peran Serta Kepemudaan	5	OKP	469.156.400	438.590.430	96,00	93,48	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
1.19 1.19.01 20	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA	Meningkatkannya Prestasi Olahraga	70	medali	1.444.545.750	1.403.586.480	100,00	97,16	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
1.19 1.19.01 21	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Sarana Dan Prasarana Olahraga terpelihara/terbangun	6	sarpras	1.375.960.300	1.365.403.413	100,00	99,23	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
1.20 1.16.01 15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI DAN STATISTIK	Hasil Pemingkatan Keterbukaan Informatika Publik	89,7	%	70.817.150	70.758.851	100,00	99,92	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.21 1.16.01 15	PROGRAM PENGEMBANGAN PERSANDIAN	Indeks Pemantik	3,45	%	95.792.125	95.269.900	100,00	99,45	Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2020 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K		Rp	Rp	K	Rp	
1.21 1.16.01 16	PROGRAM PENGAMANAN INFORMATIKA PEMERINTAH DAERAH	Indeks Pemantik	3,45	%	538.883.172	339.369.795	100,00	62,98	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.22 1.01.01 16	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	Persentase Pengelolaan Kekayaan Budaya	100	%	343.000.000	265.498.183	89,20	77,40	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.22 1.01.01 17	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	Persentase Pengelolaan Keragaman Budaya	100	%	31.250.000	6.450.000	-	20,64	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.23 1.23.01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran	100	%	3.115.598.519	2.985.993.631	110,08	95,84	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.23 1.23.01 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100	%	586.517.458	583.181.439	110,26	99,43	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.23 1.23.01 03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya Kedisiplinan Aparatur	100	%	70.453.000	69.082.500	100,00	98,05	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.23 1.23.01 05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	%	-	-	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.23 1.23.01 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Peningkatan laporan capaian keuangan Perangkat Daerah	...	%	-	-	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.23 1.23.01 10	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Terpublikasinya informasi pembangunan daerah	100	%	-	-	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.23 1.23.01 21	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah	222.264	Kunjungan	476.742.000	435.505.950	95,00	91,35	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2020 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K		Rp	Rp	K	Rp	
1.24 1.23.01 15	PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN	Jumlah data arsip	100	%	37.587.000	37.060.000	140,00	98,60	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.24 1.23.01 16	PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH	Keamanan Dokumen /arsip daerah	100	%	543.249.000	523.739.430	100,00	96,41	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.24 1.23.01 17	PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN	Data perbaikan administrasi kearsipan di Instansi Pemerintah yang dilakukan monitoring	100	%	186.000.000	183.770.000	96,88	98,80	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.24 1.23.01 18	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI	Layanan Informasi Arsip Yang tersedia	100	%	385.398.450	365.074.900	100,00	94,73	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.24 1.23.01 19	PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASANA KEARSIPAN	Pemenuhan Ruang Depo untuk Arsip Daerah	100	%	-	-	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.01 2.01.01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		100	%	3.578.851.541	3.556.868.845	100,00	99,39	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
2.01 2.01.01 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya Kinerja Aparatur SKPD	1	tahun	719.892.800	711.256.950	100,00	98,80	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
2.01 2.01.01 03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR		100	%	260.078.650	258.965.300	100,00	99,57	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
2.01 2.01.01 05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Tercapainya peningkatan SDM ASN	100	%	-	-	-	-	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2020 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K		Rp	Rp	K	Rp	
2.01 2.01.01 10	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Terdapatnya Publikasi ke media online	1	Tahun	399.000.000	391.657.200	100,00	98,16	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
2.01 2.01.01 20	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN	Jumlah Produksi Ikan (Ton)	16.482	ton	5.138.081.065	5.117.431.792	96,43	99,60	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
2.01 2.01.01 21	PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP		...	unit	11.899.143.12 8	10.437.582.935	100,00	87,72	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
2.02 1.19.01 15	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	Meningkatkan Pemasaran Industri Pariwisata Melalui Promosi Pariwisata Daerah	432.586	kunjunga n	282.045.000	259.772.140	100,00	92,10	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
2.02 1.19.01 16	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	Meningkatnya Fasilitas Sarana dan Prasarana Pariwisata Yang Memadai	35		522.671.500	516.349.275	100,00	98,79	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
2.03 2.01.01 15	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI	Meningkatnya ketrampilan petani	250	petani	570.277.325	473.045.517	100,00	82,95	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
2.03 2.01.01 18	PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN	Meningkatnya penerapan teknologi tepat guna	100	%	18.296.250	17.655.000	100,00	96,50	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
2.03 2.01.01 19	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN	Kelompok tani penerima bantuan	25	Petani	489.833.800	485.755.880	101,67	99,17	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
2.03 2.01.01 21	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK	Terselenggaranya pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit ternak	100	%	465.300.250	462.493.454	100,00	99,40	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2020 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K		Rp	Rp	K	Rp	
2.03 2.01.01 22	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN	Meningkatnya ketersediaan ternak	100	%	1.112.665.200	1.111.201.697	100,00	99,87	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
2.03 2.01.01 23	PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN	Meningkatnya produksi peternakan	1	tahun	469.111.950	466.446.325	100,00	99,43	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
2.06 1.03.01 20	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERDAGANGAN	Jumlah sarana dan Prasarana perdagangan yang representatif	1	unit	28.046.368.60 6	28.037.176.606	100,00	99,97	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
2.06 1.17.01 15	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	Cakupan pengawasan UTP	100	%	532.681.663	518.259.663	100,00	97,29	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
2.06 1.17.01 17	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR	Meningkatnya Nilai Ekspor 0,1% Tahun	100	%	742.141.500	742.141.500	100,00	100,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
2.06 1.17.01 18	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Banyaknya Pelaku Usaha Yang Menjual Produk Di Tingkat Provinsi dan Nasional	1	paket banguna n	13.424.557.72 5	12.748.675.930	166,67	94,97	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
2.06 1.17.01 19	PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN	Terbinanya Pedagang Kreatif Lapangan	214	pedagan g	1.178.840.000	970.119.000	93,46	82,29	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
2.06 1.17.01 20	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERDAGANGAN	Tersedianya sarana dan prasarana perdagangan yang representatif	100	%	224.795.000	223.817.300	100,00	99,57	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
3.01 3.01.01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran	100	%	2.224.709.709	2.171.581.394	97,53	97,61	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2020 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K		Rp	Rp	K	Rp	
3.01 3.01.01 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase sarana prasarana dalam kondisi baik	100	%	932.482.240	892.447.682	100,00	95,71	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
3.01 3.01.01 03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Tingkat kedisiplinan aparatur	100	%	156.940.200	156.940.200	100,00	100,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
3.01 3.01.01 05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis	50	%	10.000.000	10.000.000	100,00	100,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
3.01 3.01.01 10	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase informasi/produk perencanaan Bapelitbang yang dipublikasikan	100	%	3.800.000	200.000	50,00	5,26	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
3.01 3.01.01 18	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Ketersediaan dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD	1;1;1	dokumen	473.003.600	395.787.500	92,00	83,68	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
3.01 3.01.01 19	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	Persentase capaian kinerja sasaran pembangunan daerah/sasaran RPJMD bidang ekonomi	100	%	40.293.125	40.268.250	100,00	99,94	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
3.01 3.01.01 20	PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA	Persentase capaian kinerja sasaran pembangunan daerah/sasaran RPJMD bidang Pengembangan SDM, Pemerintahan dan Aparatur	100	%	155.891.375	151.110.062	100,00	96,93	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
3.01 3.01.01 23	PROGRAM EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan daerah	100	%	135.774.150	123.206.500	100,00	90,74	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2020 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K		Rp	Rp	K	Rp	
3.01 3.01.01 24	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH	Ketersediaan pranata tata ruang kota dan wilayah	25	%	138.841.787	136.266.040	100,00	98,14	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
3.01 3.01.01 25	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM	Ketersediaan pranata perencanaan pengembangan infrastruktur prasarana wilayah dan sumber daya alam	100	%	1.422.793.700	1.382.567.050	100,00	97,17	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
3.02 3.02.01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terbayarnya rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100	%	4.528.455.118	4.355.883.734	98,04	96,19	Badan Pendapatan Daerah
3.02 3.02.01 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnta Sarana dan Prasarana Aparatur	100	%	1.139.219.000	1.050.049.709	97,42	92,17	Badan Pendapatan Daerah
3.02 3.02.01 03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran	100	%	272.540.000	270.590.000	100,00	99,28	Badan Pendapatan Daerah
3.02 3.02.01 05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Penigkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	100	%	187.500.000	131.411.378	100,00	70,09	Badan Pendapatan Daerah
3.02 3.02.01 10	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Terpublikasinya informasi pembangunan daerah	100	%	1.097.300.000	1.051.659.283	100,00	95,84	Badan Pendapatan Daerah
3.02 3.02.01 15	PROGRAM PENINGKATAN PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	20,59	%	2.979.288.500	2.643.128.811	100,00	88,72	Badan Pendapatan Daerah
3.02 3.02.02 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran	100	%	7.109.503.359	6.902.103.954	152,19	97,08	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2020 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K		Rp	Rp	K	Rp	
3.02 3.02.02 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100	%	2.526.096.400	2.509.525.150	113,64	99,34	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3.02 3.02.02 03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR		100	%	205.696.000	205.273.500	100,00	99,79	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3.02 3.02.02 05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Penigkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	100	%	-	-	-	-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3.02 3.02.02 10	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH		100	%	325.150.714	297.394.741	100,00	91,46	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3.02 3.02.02 16	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Peningkatan Akuntabilitas kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	100	%	6.585.530.780	6.092.925.628	92,31	92,52	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3.02 3.02.02 17	PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN INFORMASI KEKAYAAN/ASET DAERAH	Ketersediaan data aset yang akurat	100	%	657.043.750	469.244.200	89,04	71,42	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3.03 3.03.01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase layanan kebutuhan perkantoran yang terpenuhi	100	%	1.168.174.816	1.156.063.208	98,61	98,96	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3.03 3.03.01 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase aset Perangkat Daerah yang layak pakai	100	%	753.018.200	733.703.600	100,00	97,44	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3.03 3.03.01 03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase pengadaan pakaian sesuai ketentuan	100	%	-	-		-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2020 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp		Rp	K	Rp	
3.03 3.03.01 05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase kelulusan peserta diklat	100	%	2.280.000	2.280.000	-	100,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3.03 3.03.01 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Nilai akuntabilitas kinerja	BB	BB	-	-		-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3.03 3.03.01 10	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Terpublikasinya informasi pembangunan daerah	92	%	-	-		-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3.03 3.03.01 16	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase kelulusan peserta diklat	100	%	1.650.143.894	1.638.442.094	100,00	99,29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3.03 3.03.01 17	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	Pemenuhan kebutuhan pegawai	25	%	1.852.072.146	1.800.317.753	100,00	97,21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3.04 3.01.01 15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	Ketersediaan pranata perencanaan pengembangan infrastruktur prasarana wilayah dan sumber daya alam	96	%	143.773.610	115.257.450	93,00	80,17	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
3.05 3.05.01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran	100	%	1.003.033.744	951.781.381	98,74	94,89	Inspektorat Daerah
3.05 3.05.01 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Peningkatan sarana prasarana aparatur	100	%	772.492.783	760.792.440	100,00	98,49	Inspektorat Daerah
3.05 3.05.01 03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Daerah	100	%	67.080.000	63.800.000	100,00	95,11	Inspektorat Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2020 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K		Rp	Rp	K	Rp	
3.05 3.05.01 15	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	Indeks rata-rata akuntabilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Skor B	Skor B	1.115.922.699	1.070.287.227	95,92	95,91	Inspektorat Daerah
3.05 3.05.01 16	PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN	Persentase APIP yang memenuhi Standar Kompetensi yang dipersyaratkan	100	%	300.080.000	276.254.929	100,00	92,06	Inspektorat Daerah
3.05 3.05.01 17	PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN	Persentase pemenuhan kebutuhan terhadap sistem yang mendukung pelaksanaan tugas pengawasan daerah berbasis teknologi informasi komunikasi (TIK)	80	%	100.000.000	99.330.000	100,00	99,33	Inspektorat Daerah
3.05 3.05.01 18	PROGRAM PENGINTENSIFIKASIAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	Persentase kasus pengaduan masyarakat yang telah selesai ditindaklanjuti	100	%	351.823.497	342.063.692	100,00	97,23	Inspektorat Daerah
3.05 3.05.01 19	PROGRAM PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAERAH (SPIP)	Tingkat maturitas SPIP Kota Bontang	level 3	level 3	249.415.000	225.750.000	100,00	90,51	Inspektorat Daerah
3.06 3.03.01 25	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI)	Persentase keikutsertaan ASN dalam kegiatan HUT Korpri	100	%	4.000.000	3.960.000	100,00	99,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3.06 3.06.01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	%	31.326.370.15 9	29.702.309.151	99,94	94,82	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2020 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K		Rp	Rp	K	Rp	
3.06 3.06.01 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	80	%	13.794.882.681	12.544.222.385	99,78	90,93	Sekretariat Daerah
3.06 3.06.01 03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya kedisiplinan Aparatur	100	%	230.000.000	191.400.000	100,00	83,22	Sekretariat Daerah
3.06 3.06.01 05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Penigkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	100	%	76.139.316	73.386.996	100,00	96,39	Sekretariat Daerah
3.06 3.06.01 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat Pemenuh Penyampaian Laporan Kinerja dan Keuangan SKPD (Sesuai aturan dan tepat waktu)	100	%	-	-	-	-	Sekretariat Daerah
3.06 3.06.01 09	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	Tingkat pelayanan publik yang efektif dan efisien	100	%	772.745.120	741.513.200	100,00	95,96	Sekretariat Daerah
3.06 3.06.01 10	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Terpublikasinya informasi pembangunan Daerah	100	%	-	-	-	-	Sekretariat Daerah
3.06 3.06.01 15	PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN	Meningkatnya kerjasama pembangunan	100	%	24.465.000	24.140.000	100,00	98,67	Sekretariat Daerah
3.06 3.06.01 17	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	Terlayaninya kegiatan kunjungan kerja Pimpinan daerah dan penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/daerah/tokoh masyarakat	100	%	1.066.261.886	1.043.068.549	99,10	97,82	Sekretariat Daerah
3.06 3.06.01 18	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH	Mingkatnya kerjasama antar pemerintah daerah	100	%	127.750.000	127.607.180	100,00	99,89	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2020 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K		Rp	Rp	K	Rp	
3.06 3.06.01 19	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Meningkatnya penataan peraturan perundan- undangan	100	%	904.919.000	850.385.400	97,08	93,97	Sekretariat Daerah
3.06 3.06.01 22	PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	Nilai LPPD	100	%	151.687.000	148.372.100	99,10	97,81	Sekretariat Daerah
3.06 3.06.01 28	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA DAN PELAYANAN SARANA PERIBADATAN	Cakupan layanan dan pembinaan kegiatan keagamaan	100	%	26.278.465.13 4	22.788.266.110	94,08	86,72	Sekretariat Daerah
3.06 3.06.01 29	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan	100	%	233.158.450	221.679.320	99,60	95,08	Sekretariat Daerah
3.06 3.06.01 30	PROGRAM KOORDINASI PERUMUSAN DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN EKONOMI	Meningkatnya UKM	100	%	311.843.437	308.390.800	100,00	98,89	Sekretariat Daerah
3.06 3.06.01 31	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	Cakupan pembinaan kesejahteraan sosial masyarakat	100	%	3.144.813.050	3.014.078.927	98,20	95,84	Sekretariat Daerah
3.06 3.06.01 32	PROGRAM PENGUATAN WAWASAN PEMBANGUNAN	Cakupan penyelenggaraan peringatan hari-hari besar nasional dan daerah	100	%	568.351.250	535.601.250	100,00	94,24	Sekretariat Daerah
3.06 3.06.01 34	PROGRAM PENGEMBANGAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase fasilitasi pengadaan barang dan jasa	100	%	1.675.659.646	1.593.456.750	100,00	95,09	Sekretariat Daerah
3.06 3.06.02 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	%	17.269.646.43 2	15.961.693.677	97,11	92,43	Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2020 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K		Rp	Rp	K	Rp	
3.06 3.06.02 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	%	3.145.949.775	2.838.576.034	100,00	90,23	Sekretariat DPRD
3.06 3.06.02 03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Peningkatan Disiplin Aparatur	100	%	1.055.680.406	1.025.852.250	100,00	97,17	Sekretariat DPRD
3.06 3.06.02 05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	%	801.030.000	636.020.000	100,63	79,40	Sekretariat DPRD
3.06 3.06.02 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	100	%	-	-	-	-	Sekretariat DPRD
3.06 3.06.02 09	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		100	%	100.300.000	-	-	-	Sekretariat DPRD
3.06 3.06.02 10	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Terpublikasikannya informasi pembangunan daerah	100	%	4.232.841.900	4.085.812.350	100,00	96,53	Sekretariat DPRD
3.06 3.06.02 16	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat	100	%	18.518.015.000	17.062.846.280	94,12	92,14	Sekretariat DPRD
3.07 3.07.01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	%	13.856.371.844	13.620.524.841	99,26	98,30	Kecamatan Bontang Utara
3.07 3.07.01 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	100	%	3.077.847.800	3.024.906.900	100,00	98,28	Kecamatan Bontang Utara
3.07 3.07.01 03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatkan disiplin dan kinerja aparatur	100	%	181.280.000	181.280.000	100,00	100,00	Kecamatan Bontang Utara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2020 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K		Rp	Rp	K	Rp	
3.07 3.07.01 05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	100	%	133.935.000	133.796.416	100,00	99,90	Kecamatan Bontang Utara
3.07 3.07.01 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Nilai SAKIP	100	%	4.680.000	4.680.000	100,00	100,00	Kecamatan Bontang Utara
3.07 3.07.01 09	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	Tingkat pelayanan publik yang efektif dan efisien	100	%	-	-	-	-	Kecamatan Bontang Utara
3.07 3.07.01 10	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Terpublikasinya informasi pembangunan daerah	100	%	935.000.000	926.600.000	100,00	99,10	Kecamatan Bontang Utara
3.07 3.07.01 16	PROGRAM FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN/KELURAHAN	Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan kecamatan kelurahan	85	%	308.736.000	308.530.000	100,00	99,93	Kecamatan Bontang Utara
3.07 3.07.01 19	PROGRAM FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan	80	%	9.094.109.775	8.929.533.508	100,00	98,19	Kecamatan Bontang Utara
3.07 3.07.01 20	PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SARANA/PRASARANA DAN LINGKUNGAN	Meningkatnya capaian realisasi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan	75	%	1.125.791.500	912.604.280	94,07	81,06	Kecamatan Bontang Utara
3.07 3.07.01 21	PROGRAM FASILITASI PARTISIPASI MASYARAKAT	Meningkatnya peran serta warga dalam memelihara sarana dan lingkungan RT	100	%	12.676.737.46 6	12.289.274.595	99,51	96,94	Kecamatan Bontang Utara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2020 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K		Rp	Rp	K	Rp	
3.07 3.07.02 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran	80	%	10.141.000.71 8	9.786.713.073	100,00	96,51	Kecamatan Bontang Selatan
3.07 3.07.02 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya capaian realisasi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan	100	%	2.051.625.963	1.946.680.060	100,00	94,88	Kecamatan Bontang Selatan
3.07 3.07.02 03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya disiplin dan kinerja aparatur	85	%	309.097.800	295.172.000	100,00	95,49	Kecamatan Bontang Selatan
3.07 3.07.02 05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	80	%	4.500.000	4.500.000	100,00	100,00	Kecamatan Bontang Selatan
3.07 3.07.02 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Nilai SAKIP	67	(B)	8.500.000	8.500.000	100,00	100,00	Kecamatan Bontang Selatan
3.07 3.07.02 10	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat Penyampaian informasi Pembangunan	80	%	791.700.000	779.050.000	100,00	98,40	Kecamatan Bontang Selatan
3.07 3.07.02 16	PROGRAM FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN/KELURAHAN	Meningkatnya Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan	80	%	140.472.500	138.404.000	100,00	98,53	Kecamatan Bontang Selatan
3.07 3.07.02 19	PROGRAM FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Peningkatan Fasilitas Partisipasi Masyarakat	80	%	8.929.131.845	8.604.506.016	100,00	96,36	Kecamatan Bontang Selatan
3.07 3.07.02 20	PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SARANA/PRASARANA DAN LINGKUNGAN	Meningkatnya Efektivitas sarana/prasarana dan lingkungan	75	%	454.079.750	449.740.259	100,00	99,04	Kecamatan Bontang Selatan
3.07 3.07.02 21	PROGRAM FASILITASI PARTISIPASI MASYARAKAT	Meningkatnya Peran Serta Warga Dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT	100	%	15.528.712.66 3	14.649.676.782	100,00	94,34	Kecamatan Bontang Selatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2020 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K		Rp	Rp	K	Rp	
3.07 3.07.03 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	%	9.375.337.348	9.059.893.613	97,13	96,64	Kecamatan Bontang Barat
3.07 3.07.03 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100	%	919.944.854	910.410.046	98,10	98,96	Kecamatan Bontang Barat
3.07 3.07.03 03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya disiplin dan kinerja aparatur	100	%	-	-	-	-	Kecamatan Bontang Barat
3.07 3.07.03 05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	100	%	-	-	-	-	Kecamatan Bontang Barat
3.07 3.07.03 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat pemenuhan penyampaian laporan kinerja dan keuangan SKPD (sesuai aturan dan tepat waktu)	100	%	9.485.000	9.485.000	100,00	100,00	Kecamatan Bontang Barat
3.07 3.07.03 10	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Terpublikasinya informasi pembangunan daerah	100	%	53.500.000	49.474.700	100,00	92,48	Kecamatan Bontang Barat
3.07 3.07.03 16	PROGRAM FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN/KELURAHAN	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	100	%	206.636.156	105.521.125	77,78	51,07	Kecamatan Bontang Barat
3.07 3.07.03 19	PROGRAM FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan	100	%	3.894.652.327	3.762.301.990	100,00	96,60	Kecamatan Bontang Barat
3.07 3.07.03 20	PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SARANA/PRASARANA DAN LINGKUNGAN	Meningkatnya capaian realisasi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan	100	%	245.227.500	244.696.100	100,00	99,78	Kecamatan Bontang Barat
3.07 3.07.03 21	PROGRAM FASILITASI PARTISIPASI MASYARAKAT	Meningkatnya Peran Serta Warga Dalam Memelihara Sarana dan Lingkungan RT	100	%	5.850.630.000	5.753.646.457	100,00	98,34	Kecamatan Bontang Barat

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1 Permasalahan Pencapaian Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Rencana pelaksanaan pembangunan Kota Bontang Tahun 2022 yang merupakan tahun pertama penjabaran RPJMD tahun 2021-2026, secara umum masih dihadapkan pada permasalahan Pandemi Covid 19 yang belum dapat diyakini bahwa dapat dikendalikan atau semakin diturunkan potensi penularannya dimasyarakat. Sejumlah indikator maro menunjukkan bagaimana dampak covid 19 pada berbagai sektor kehidupan masyarakat dan dampaknya sangat luas dan signifikan. kinerja sektor ekonomi signifikan terdampak ditunjukkan oleh kontraksi tingkat pertumbuhan, sektor sosial terdampak dengan meningkatnya angka pengangguran dan angka kemiskinan.

Dalam rangka pelaksanaan prioritas pembangunan tersebut dan mengacu kepada hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan hingga tahun 2020 dan perkiraan tahun 2021, telah diidentifikasi sejumlah permasalahan prioritas yang harus menjadi perhatian dan menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas pembangunan tahun 2022. Adapun rangkuman permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

- A. Prioritas Peningkatan kualitas Pendidikan untuk semua
 - 1. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas belum secara adaptif meningkat sesuai dengan dinamika perkembangan teknologi informasi;
 - 2. Ketidakpastian pola penyelenggaraan Pendidikan sehubungan dengan pandemic covid 19;
 - 3. Evaluasi penyelenggaraan Pendidikan online selama tahun 2020;
 - 4. Upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan Pendidikan belum secara optimal didukung oleh penyediaan prasarana gedung dan sarana Pendidikan secara seimbang.
 - 5. Masih belum meratanya kualitas penyelenggaraan pendidikan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
 - 6. Keterkaitan sistem pendidikan baik pendidikan formal maupun nonformal dengan ketenagakerjaan belum dikembangkan secara optimal;
 - 7. Keseimbangan antara pendidikan berbasis teknologi informasi dan pendidikan karakter belum menjadi fokus isu dalam perbaikan sistem pendidikan;
- B. Prioritas Peningkatan pelayanan kesehatan berkualitas untuk semua
 - 1. Kesiapan instansi pelayanan Kesehatan dalam pengendalian dan penanganan wabah/pandemi global;
 - 2. Belum optimalnya upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif;
 - 3. Mutu layanan kesehatan belum sepenuhnya sesuai dengan standar nasional;

4. Perilaku budaya hidup bersih dan sehat di kalangan masyarakat menuju derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik belum berkembang;
 5. Perkembangan metode dan teknologi medis belum diikuti dengan peningkatan sarana dan prasarana alat kesehatan terkait dan profesionalisme pelayanan kesehatan, serta ketercukupan jumlah tenaga-tenaga medis dan spesialis serta paramedis, bidan, ahli gizi, dan ahli sanitasi;
 6. Sistem Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) bagi masyarakat belum optimal.
- C. Prioritas Menurunkan pengangguran dan kemiskinan
1. Upaya penanggulangan kemiskinan belum terintegrasi secara optimal dengan melibatkan peran Lembaga sosial dan dunia usaha;
 2. Ptnsi meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan pengangguran akibat pandemic covid 19.
- D. Prioritas Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman
1. Belum memadainya sanitasi permukiman diatas laut
 2. Belum optimalnya penataan kawasan pemukiman kumuh.
 3. Partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam penataan lingkungan permukiman belum optimal
- E. Prioritas Peningkatan Kualitas Lingkungan hidup
1. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan pemberdayaan masyarakat untuk peduli terhadap pengelolaan sampah secara mandiri.
 2. Tekanan alih fungsi lahan dari fungsi lindung ke peruntukan budidaya yang menimbulkan dampak terhadap kelestarian lingkungan.
 3. Kawasan pesisir dan laut khususnya hutan mangrove dan ekosistem terumbu karang akan semakin terdegradasi seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat dan industri pada kawasan pesisir dan laut.
 4. Kota Bontang merupakan daerah yang rawan potensi banjir dan bahaya kekeringan;
 5. Semakin meningkatnya aktivitas industri membawa konsekwensi pada potensi penurunan kualitas udara karena meningkatnya sumber emisi gas rumah kaca, emisi gas buang sumber bergerak dan tidak bergerak dan air.
 6. Semakin meningkatnya aktivitas industri juga membawa konsekwensi pada potensi acaman bencana industri.
- F. Prioritas Peningkatan akses pelayanan bersih

1. Layanan air bersih masih perlu ditingkatnya baik dari aspek kualitas dan kapasitas
 2. Sumber daya air tanah masih menjadi satu-satunya sumber pemenuhan kebutuhan layanan air bersih;
 3. Peningkatan penyediaan sumber air baku belum memadai untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk;
 4. Tingginya konversi lahan menjadi lahan terbangun yang berpotensi mengurangi ketersediaan air
- G. Peningkatan pertumbuhan ekonomi non migas
1. Revitalisasi ekonomi masyarakat yang terdampak pandemic covid 19, sangat tergantung dari kemampuan dalam menurunkan/mengendalikan penyebaran covid 19;
 2. Kesiapan dan dukungan pengembangan digitalisasi ekonomi;
 3. Belum optimalnya peran sektor UMKM dalam perekonomian Kota Bontang
 4. Belum optimalnya pengembangan sektor perikanan
 5. Belum optimalnya pengembangan daya tarik wisata pesisir dan laut serta pemanfaatan potensi keragaman budaya masyarakat;
- H. Prioritas Peningkatkan daya saing ekonomi
1. Belum tumbuhnya investasi secara memadai pada sektor-sektor ekonomi lokal
 2. Rendahnya daya saing investasi sektor perikanan
 3. Belum tumbuhnya sektor industri diluar industri basis
- I. Prioritas Peningkatan daya dukung infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi daerah
1. Masih terdapat kawasan yang belum bebas banjir;
 2. Sistem DAS belum tertata secara menyeluruh;
 3. Pelayanan infrastruktur bandar udara masih sangat terbatas karena merupakan pelayanan terbatas perusahaan;
 4. Peran pelabuhan dalam menyediakan layanan angkutan orang dan barang masih belum berfungsi sesuai yang diharapkan, hal ini berimplikasi pada masih rendahnya perkembangan ekonomi dari jasa maritim.

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah hingga tahun 2018 dan pelaksanaan tahun 2019 telah mencakup program-program prioritas pembangunan dalam rangka mencapai sasaran sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD. Mengacu hasil evaluasi pelaksanaan urusan, pelaksanaan pembangunan pada masing-masing urusan pada tahun 2019 perlu memperhatikan permasalahan prioritas sebagai berikut:

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Urusan Wajib Pendidikan

- Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pendidikan belum secara optimal mengarah pada upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan;
- Standarisasi sarana dan prasarana sekolah belum optimal;
- Alokasi anggaran pendidikan untuk peningkatan dan rehabilitasi gedung dan prasarana/sarana sekolah relatif terbatas;
- Evaluasi dan pengawasan pelaksanaan proses belajar dan mengajar belum dilaksanakan secara optimal;
- Pengelolaan data dan informasi pendidikan masih perlu ditingkatkan;
- Masih terdapat sekolah yang melaksanakan proses belajar-mengajar dalam dua rombongan belajar;
- Pengelolaan dana BOS belum optimal;
- Program pendidikan non formal dan keaksaraan perlu ditingkatkan;
- Belum mantapnya kualitas tenaga pendidik.
- Minat dan budaya baca belum menunjukkan peningkatan.

2. Urusan Wajib Kesehatan

- Pemanfaatan dana kapitasi belum optimal dalam mendukung pelayanan puskesmas;
- Belum optimalnya upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif.
- Meningkatnya ancaman penyakit yang disebabkan oleh perilaku dan gaya hidup.
- Belum tersedianya layanan khusus laboratorium kesehatan
- Masih adanya potensi ancaman penyakit menular.
- Masih relatif terbatasnya daya tampung Rumah Sakit untuk layanan rawat inap.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Relatif terbatasnya alokasi anggaran untuk pemenuhan infrastruktur kota;
- Penentuan skala prioritas kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar belum direncanakan dengan baik;
- Masih terdapat penyusunan perencanaan pembangunan infrastruktur yang memerlukan reviu;
- Masih terdapat sejumlah perencanaan pembangunan infrastruktur yang belum direalisasikan secara fisik karena belum tersedianya lahan;
- Manajemen data pembangunan infrastruktur belum optimal;
- Pembangunan infrastruktur penanggulangan banjir masih dilaksanakan secara parsial;
- Pengelolaan sarana IPAL yang telah terbangun belum optimal;

- Belum tersedianya peraturan pelaksanaan perijinan pemanfaatan ruang dan pelaksanaan insentif dan disinsentif sebagai instrumen penataan ruang di daerah karena belum ada pedoman teknis dari Kementerian ATR
 - Belum adanya PPNS Penataan Ruang sebagai instrumen pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang di daerah.
4. Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- Pelaksanaan program penataan kawasan kumuh belum optimal;
 - Bangunan Rusunawa belum dilengkapi sarana pendukung untuk siap ditempati;
 - Terbatasnya alokasi anggaran untuk kebutuhan infrastruktur dasar lingkungan permukiman;
 - Pembangunan infrastruktur lingkungan permukiman belum direncanakan dengan baik, khususnya terkait penentuan skala prioritasnya;
 - Aspek pengawasan pelaksanaan pembangunan infrastruktur lingkungan perlu ditingkatkan;
 - Pelibatan masyarakat dalam perawatan infrastruktur dasar lingkungan permukiman perlu ditingkatkan;
 - Penataan ruang terbuka hijau (taman median jalan, taman kota, dan TPU) masih perlu ditingkatkan;
 - Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan akan lahan makam.
 - Belum memadainya sanitasi permukiman diatas laut
5. Urusan Wajib Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- Partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan perlu ditingkatkan;
 - Relatif terbatasnya sarana dan prasarana Satpol PP;
 - Sarana dan prasarana pemadam kebakaran membutuhkan pembaruan;
 - Kerjasama penanganan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dengan pihak perusahaan perlu ditingkatkan.
6. Urusan Wajib Sosial
- Jangkauan, mutu dan akses pelayanan sosial dasar masih kurang;
 - Sistem jaminan sosial masyarakat yang berkelanjutan belum berkembang maksimal;
 - Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) masih belum optimal;
 - Pendekatan penanganan masalah sosial yang hanya bersifat rutinitas, sehingga penanganan PMKS tidak dapat tuntas dan belum berkelanjutan serta kurangnya keterpaduan antar program /kegiatan;

- Pola-pola penanganan dan pelayanan sosial penduduk lanjut usia, didukung prasarana yang mencukupi dan berkualitas, serta dengan mendorong kemandirian dan memberikan peluang bagi masyarakat untuk berperan nyata dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial belum berjalan seperti yang diharapkan.
- Program-program penanggulangan kemiskinan belum optimal mengintervensi penurunan kemiskinan;

B. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Urusan Wajib Tenaga Kerja
 - Tingkat pengangguran masih tinggi dan potensi mengalami peningkatan sebagai dampak pandemi covid 19;
 - Banyaknya pencari kerja yang kurang mempunyai ketrampilan yang memadai, untuk mengisi lowongan kerja yang tersedia
 - Belum optimalnya dukungan untuk pelatihan bagi tenaga kerja dan pelatihan kewirausahaan;
2. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - Pengarusutamaan gender dalam perumusan peraturan perundang-undangan, kelembagaan, dan kebijakan anggaran masih kurang;
 - Belum optimalnya peran Forum Anak sebagai wadah fasilitasi partisipasi anak dalam penentuan kebijakan publik;
 - Belum semua pemangku kepentingan memahami Pengarusutamaan Gender sebagai sebuah strategi pembangunan;
3. Urusan Wajib Pangan
 - Tingginya ketergantungan Kota Bontang terhadap pasokan pangan dari daerah lain;
 - Program-program menuju ketahanan pangan daerah masih sangat terbatas;
 - Promosi pentingnya konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman perlu ditingkatkan.
4. Urusan Wajib Pertanahan
 - Manajemen dan perencanaan pengadaan lahan untuk pembangunan belum dilaksanakan dengan baik;
 - Belum maksimalnya pemanfaatan lahan yang telah dikuasai pemerintah untuk mendukung kebutuhan pembangunan infrastruktur layanan publik;
 - Belum optimalnya sertifikasi lahan-lahan milik pemerintah;
 - Masih tingginya potensi sengketa kepemilikan lahan.
5. Urusan Wajib Lingkungan Hidup
 - Penangan sampah masih sangat fokus pada pengumpulan dan pengangkutan.
 - Terbatasnya armada angkutan pengangkutan sampah

- Program-program untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pengolahan, pemilahan, dan penggunaan kembali sampah belum optimal.
 - Kurangnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat di dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - Belum optimalnya penerapan peraturan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 - Belum optimalnya program-program dalam rangka pengendalian dan pengawasan pencemaran udara.
6. Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
- Inisiatif masyarakat masih kurang dalam mengurus administrasi kependudukan termasuk dalam rangka pencapaian target KTP elektronik.
 - Sarana layanan kependudukan perlu pembaruan.
7. Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Pelaksanaan program-program KB masih belum optimal dan lebih bersifat rutinitas;
 - Pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga belum optimal;
 - Manajemen data terkait pelayanan KB masih perlu ditingkatkan.
8. Urusan Wajib Perhubungan
- Belum optimalnya pengembangan pelayananan transportasi umum;
 - Belum teredainya Gedung dan peralatan uji KIR;
 - Masih kurangnya prasarana kelengkapan jalan guna mendukung kelancaran dan keamanan pengguna jalan;
 - Belum optimalnya pendapatan retribusi parkir tepi jalan umum;
 - Masih terbatasnya sarana dan prasarana pelabuhan loktuhan.
9. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika
- Layanan jaringan internet untuk aktivitas perkantoran belum optimal;
 - Peran PPID dalam rangka tertibnya pengelola informasi dan dokumentasi belum sepenuhnya mendapatkan dukungan dari Perangkat Daerah sebagai PPID pembantu;
 - Pengembangan konsep-konsep layanan *smart city* masih terkendala oleh penggunaan aplikasi/sistem informasi dari pengembang yang berbeda-beda sehingga sulit untuk membangun interkoneksi.
 - Penyediaan infrastruktur layanan teknologi informasi masih perlu ditingkatkan.
10. Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- Revitalisasi sektor UMKM belum efektif;
- Daya saing produk UMKM dan pemanfaatan media teknologi informasi belum efektif;
- Penggunaan bahan baku lokal belum optimal;
- Sistem pengembangan industri/usaha mikro, kecil dan menengah belum komprehensif dan berkelanjutan;
- Belum optimalnya peningkatan kualitas produk-produk UMKM;
- Belum terbangunnya jaringan produksi dan pemasaran produk-produk UMKM;
- Kemampuan teknologi IKM masih kurang
- Kurangnya jiwa kewirausahaan pelaku usaha dalam meningkatkan produk dan usahanya;
- Peran BLUD dana bergulir masih terhambat oleh status kelembagaan yang belum jelas menyebabkan program dana bergulir tidak dapat direalisasikan.
- Belum memadainya pengelolaan data dan informasi tentang UMKM dan perkembangannya.
- Belum jelasnya arah pengembangan sektor UMKM.

11. Urusan Wajib Penanaman Modal

- Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur perizinan;
- Pemberian insentif dan kemudahan investasi belum efektif menarik investasi;
- Belum optimalnya kualitas kelembagaan dan pelayanan investasi;
- Daya dukung peluang-peluang investasi unggulan, terutama kesiapan lahan, belum siap;
- Optimalisasi dan inovasi promosi belum maksimal;
- Peningkatan daya saing investasi melalui dukungan infrastruktur pendukung masih kurang

12. Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga

- Program-program pembinaan kepemudaan belum optimal dan masih bersifat rutinitas;
- Belum maksimalnya Sarana prasarana pendukung untuk pelaksanaan tugas di bidang kepemudaan, dan olahraga baik secara kualitas maupun kuantitas.
- Terbatasnya kemampuan anggaran dalam mendukung pembinaan olah raga berprestasi;
- Pemanfaatan dan pemeliharaan sarana olah raga milik pemerintah belum optimal;

13. Urusan Wajib Statistik

- Belum terintegrasinya data-data pembangunan
- Kurangnya fasilitas data

- Pengelolaan data oleh perangkat daerah belum dilaksanakan secara baik dan tersistem;
 - Terbatasnya SDM yang secara khusus bertugas mengelola data;
 - Belum tersedianya pedoman pengelolaan data;
 - Koordinasi antar perangkat daerah dalam kebijakan pengelolaan data belum optimal.
14. **Urusan Wajib Kebudayaan**
- Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, dan kehidupan seni yang masih lekat dalam kehidupan masyarakat;
 - Pembinaan generasi penerus untuk seni dan budaya lokal perlu ditingkatkan;
 - Belum optimalnya pengelolaan budaya sebagai aset yang sangat berharga untuk menjadi daya tarik yang khas untuk mengundang kunjungan dan perhatian dari luar daerah;
15. **Urusan Wajib Perpustakaan**
- Belum optimalnya program-program promosi budaya baca;
 - Sarana dan prasarana perpustakaan perlu ditingkatkan;
 - Belum optimalnya layanan perpustakaan dan terbatasnya koleksi buku;
 - Belum optimalnya kerjasama pengelolaan pojok baca.
16. **Urusan Wajib Kearsipan**
- Masih minimnya pemahaman tatakelola arsip yang baik pada masing-masing perangkat daerah;
 - Belum optimalnya peran program pembinaan kearsipan;
 - Koordinasi tatakelola dan penyimpanan arsip belum optimal;
 - Belum tersedianya pengelola arsip yang terampil pada masing-masing SKPD;
 - Relatif terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan dan penyimpanan arsip.
 - Terobosan dalam pengembangan digitaly arsip perlu ditingkatkan.
 -

C. Urusan Pilihan

1. **Urusan Pilihan Pertanian**
- Belum berkembangnya pola pertanian perkotaan dengan didukung pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian melalui pola pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan;
 - Kualitas SDM dan kelembagaan pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan petani masih kurang;
 - Semakin terbatasnya lahan pertanian
2. **Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan**

- Belum optimalnya peran Provinsi Kalimantan Timur dalam Pengembangan dan pemanfaatan potensi perikanan dan kelautan sebagaimana kewenangan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23.
 - Produksi perikanan melalui optimalisasi perikanan budidaya dan peningkatan pengembangan perikanan tangkap belum optimal;
 - Belum optimalnya peran TPI dan PPI dalam meningkatkan pemasaran hasil perikanan;
 - Pemanfaatan teknologi untuk peningkatan daya saing serta penguatan pemasaran belum optimal;
 - Masih dibutuhkannya konservasi, rehabilitasi, pemanfaatan, dan pengkayaan sumberdaya serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan dengan didukung optimalisasi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.
 - Belum tumbuhnya investasi pada sektor perikanan-kelautan dan jasa maritim
3. Urusan Pilihan Pariwisata
- Revitalisasi sektor pariwisata akibat dampak pandemic covid 19;
 - Fasilitas dan kualitas prasarana obyek wisata masih kurang lengkap;
 - Belum optimalnya pengembangan daya tarik wisata berbasis budaya;
 - Belum berkembangnya kerjasama manajemen pengelolaan dan promosi pariwisata baik pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha di bidang pariwisata;
 - Kurang berkembangnya investasi di bidang pariwisata;
4. Perdagangan
- Jaringan pemasaran dan pemberian fasilitas masih kurang mendukung;
 - Kesadaran produsen dan konsumen tentang tertib niaga dan perlindungan konsumen masih kurang;
 - Terbatasnya pelaku usaha UMKM yang berorientasi ekspor;
 - Pembangunan sarana pasar masih terkendala anggaran.
5. Urusan Pilihan Perindustrian
- Daya saing produk UMKM belum kuat;
 - Penggunaan bahan baku lokal belum optimal;
 - Sistem pengembangan industri/usaha mikro, kecil dan menengah belum komprehensif dan berkelanjutan;
 - Kemampuan teknologi IKM masih kurang

2.4 Inovasi Daerah

Pemerintah Kota Bontang senantiasa berupaya tiada henti untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang prima bagi masyarakatnya. Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan mengedepankan inovasi daerah sebagai instrumen atau *tool* untuk akselerasi pembangunan. Inovasi unggulan Kota Bontang tahun 2021 adalah **Peta Rawan Bencana Per RT (PERAWAN RT)** yang diinisiasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang.

1. Latar Belakang Inovasi

Pra bencana merupakan sebuah tahapan pencegahan dan kesiapsiagaan dengan tujuan menyusun atau melakukan pemetaan terhadap potensi – potensi bencana di suatu wilayah, sehingga dapat meminimalisir terjadinya bencana atau mengurangi dampak dari bencana yang terjadi serta dapat mempersiapkan segala potensi atau sumber daya, baik dari segi peralatan sampai dengan sumber daya manusia dalam hal kesiapsiagaan terhadap bencana. Saat bencana atau tanggap darurat yang merupakan keadaan bencana sedang terjadi, hal- hal yang di persiapkan adalah penilaian terhadap dampak bencana, penyelamatan atau evakuasi terhadap korban bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, posko tanggap darurat, sampai dengan tempat pengungsian bagi korban bencana. Pasca bencana merupakan keadaan pemulihan akibat bencana guna bangkitnya seluruh aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah bencana.

Latar belakang munculnya inovasi Peta Rawan Bencana Per RT (PERAWAN RT) antara lain karena potensi bencana yang ada di Kota Bontang cukup beragam seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, kebakaran permukiman, angin putting beliung, wabah penyakit, bencana sosial, gagal teknologi, dan lain-lain; sering terjadinya salah komunikasi dalam penanganan tanggap darurat; penanganan bencana yang tidak efektif dan efisien; minimnya informasi tentang potensi bencana apa saja yang dapat terjadi di tingkat RT; minimnya keterlibatan masyarakat dalam membantu penanganan kebencanaan, serta arah dan proses pembangunan tidak sinergis dan tidak sinkron dengan penyelesaian potensi-potensi bencana yang ada di suatu daerah.

Seluruh permasalahan diatas dapat diminimalisir dengan adanya inovasi PERAWAN RT. Penanggulangan bencana betul-betul dirumuskan sedemikian rupa berdasarkan dari survei langsung di lokasi bencana yang dipetakan beserta dengan solusinya yang menyesuaikan kondisi kebutuhan . Dan dari inovasi ini juga, dengan sendirinya akan terbagi peran serta dari masyarakat dalam mendeteksi, mengantisipasi dan menangani bencana; tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah teknis terkait menjadi lebih jelas; mengurangi intensitas bencana dan meminimalisir dampak kejadian bencana; meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan seluruh elemen dalam menghadapi ancaman bahaya

2. Tujuan dan Manfaat Inovasi

Rencana penanggulangan bencana di suatu daerah merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Hal ini diperjelas lagi dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana.

Maka dengan adanya inovasi Peta Rawan Bencana per RT ini dapat mencerminkan salah satu wujud dari upaya Pemerintah Kota Bontang dalam penanggulangan bencana.

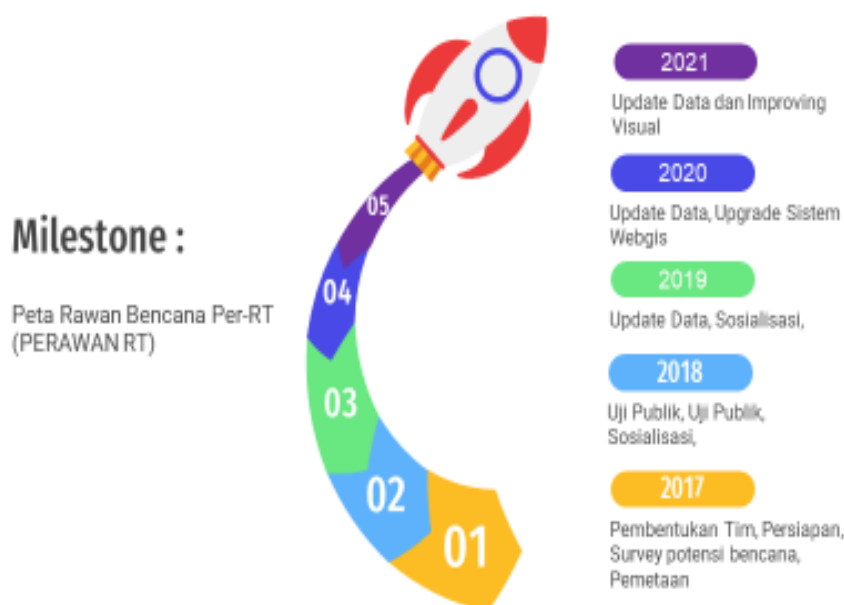
Adapun tujuan dari inovasi ini adalah :

- a. Mengetahui tingkat ancaman dan tingkat kerentanan bencana yang ada di Kota Bontang;
- b. Merumuskan strategi pengurangan risiko bencana pada wilayah yang berpotensi bencana;
- c. Terwujudnya pembangunan Kota Bontang yang tepat sasaran.

Sedangkan manfaat dari inivasi PERAWAN RT antar lain sebagai berikut:

- a. Manfaat akademik: sebagai bahan informasi dalam pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan sehubungan dengan strategi pengurangan risiko kebencanaan;
- b. Manfaat praktis: sebagai sumber informasi yang akurat bagi pemerintah; sumber informasi bagi investor dalam penanaman modal/investasi di Kota Bontang; sumber informasi bagi LSM dan masyarakat dalam penyusunan strategi pengurangan risiko bencana. Data peta rawan bencana dapat dijadikan referensi dalam usulan rembug warga, musrenbang terkait penanggulangan bencana; Efektifitas dan efisiensi dalam rangka pembangunan Kota Bontang; Mendorong minat masyarakat untuk lebih memahami karakteristik bencana di wilayahnya;

3. Milestone Inovasi (Rancang Bangun Inovasi)



Gambar 2. 32 Milestone Inovasi PERAWAN RT

Sementara ini data peta rawan bencana yang disam-paikan bersifat umum sam-pai kepada tingkat kelura-han/kecamatan, sehingga BPBD Kota Bontang menya-jikan sebuah data peta rawan bencana yang ber-basis RT.

Berikut tahapan Inovasi Peta Rawan Bencana per RT :

1. Pengumpulan data dan informasi
Prosedur pengumpulan data dan informasi yang dilaksanakan oleh Seksi Pengumpul Data dan Informasi bersumber dari tim survei di lapangan yang melaksanakan kegiatan pemantauan daerah rawan bencana (patroli) ke tiap – tiap RT. Adapun data dan informasi yang dimaksud yaitu :
 - a. Form / blangko pendataan yang telah divisum oleh pengurus RT setempat;
 - b. Hasil dokumentasi pelaksanaan kegiatan.
2. Pengolahan data dan informasi
Setelah data dan informasi terkumpul, maka berkas tersebut diserahkan kepada Seksi Pengolah Data dan Informasi untuk disusun dalam bentuk laporan pelaksanaan kegiatan dan menyusun jenis – jenis potesi bencana tiap – tiap RT.
Selanjutnya dokumen tersebut ditelaah oleh Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan Kepala Pelaksana BPBD.
3. Penyajian Informasi
Penyajian Informasi dilaksanakan oleh Seksi Penyajian Data dan Informasi dengan prosedur sebagai berikut :
 - a. Seksi Pengolah Data dan Informasi menyerahkan bahan dokumen paling lambat 1 hari setelah bahan tersebut ditelaah dan diseleksi kepada Seksi Penyajian Data dan Informasi;

- b. Bahan dokumen tersebut diolah Seksi Penyajian Data dan Informasi menjadi sebuah peta rawan bencana per – RT dalam bentuk :
- Hardcopy, yaitu dokumen peta rawan bencana per – RT;
 - Softcopy, yaitu peta rawan bencana dalam bentuk dokumen pdf dan presentasi. Presentasi yang disusun memuat peta kelurahan, klasifikasi potensi bencana, RT yang berpotensi bencana, dokumentasi potensi bencana tiap – tiap RT.
4. Uji publik peta rawan bencana per – RT
Peta rawan bencana per – RT yang telah disusun, kemudian dilakukan uji publik kepada Kecamatan, Kelurahan, Ketua RT setempat, Organisasi masyarakat dan perwakilan masyarakat (tokoh masyarakat, tokoh agama, dll). Dan akan dievaluasi dan update secara berkala.
5. Pelayanan Informasi
Pelayanan Informasi dilaksanakan dengan prosedur :
- 1) Pemangku Kepentingan yang datang ke kantor harus mengisi buku tamu;
 - 2) Pemangku Kepentingan yang memerlukan data dan informasi peta rawan bencana per – RT akan disajikan dalam bentuk slide presentasi oleh Seksi Penyajian Data dan Informasi.
6. Pelayanan Aduan
Untuk pemangku kepentingan yang ingin menyampaikan aduan atas pelayanan Peta Rawan Bencana Per – RT (PERAWAN RT) BPBD dapat menggunakan :
- 1) Kotak saran
 - 2) Media Sosial BPBD yaitu, IG : @bpbd_bontang; Twitter : @bpbd_bontang;
FB : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang
 - 3) E-mail : bpbd_bontang@yahoo.com atau bpbdbontang@gmail.com
Telepon : (0548) 3036524

Bentuk Inovasi Peta Rawan Bencana per RT berupa :

1. Sistem Digital (Soft Copy), dengan memanfaatkan program , Power point, dan Microsoft Excell
2. Tersedia dalam bentuk peta manual/dokumen (Hard Copy).

Unsur Kebaruan :

1. Jika Peta rawan bencana dibangun hanya sampai dengan tingkat Kecamatan, maka Inovasi Peta Rawan Bencana per RT ini dibangun sampai pada tingkat RT, sehingga diperoleh data primer secara menyeluruh.
2. Pembangunan peta ini tanpa menggunakan anggaran karena tidak menggunakan tenaga ahli dalam penyusunan peta. Pembangunan peta rawan bencana per RT memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di BPBD dan selanjutnya dalam penyusunannya diperoleh informasi dari tokoh masyarakat, ketua RT dan masyarakat setempat yang mengerti seluk-beluk kondisi wilayah tempat tinggalnya.

3. Pembaharuan data dilaksanakan minimal 1 tahun sekali, atau pada saat terjadi kebencanaan dengan melakukan survey langsung.

Stakeholders yang menerima manfaat inovasi :

1. Internal :

BPBD Kota Bontang, sebagai informasi awal bagi tim BPBD untuk mengambil langkah-langkah efisien dalam penanganan kebencanaan;

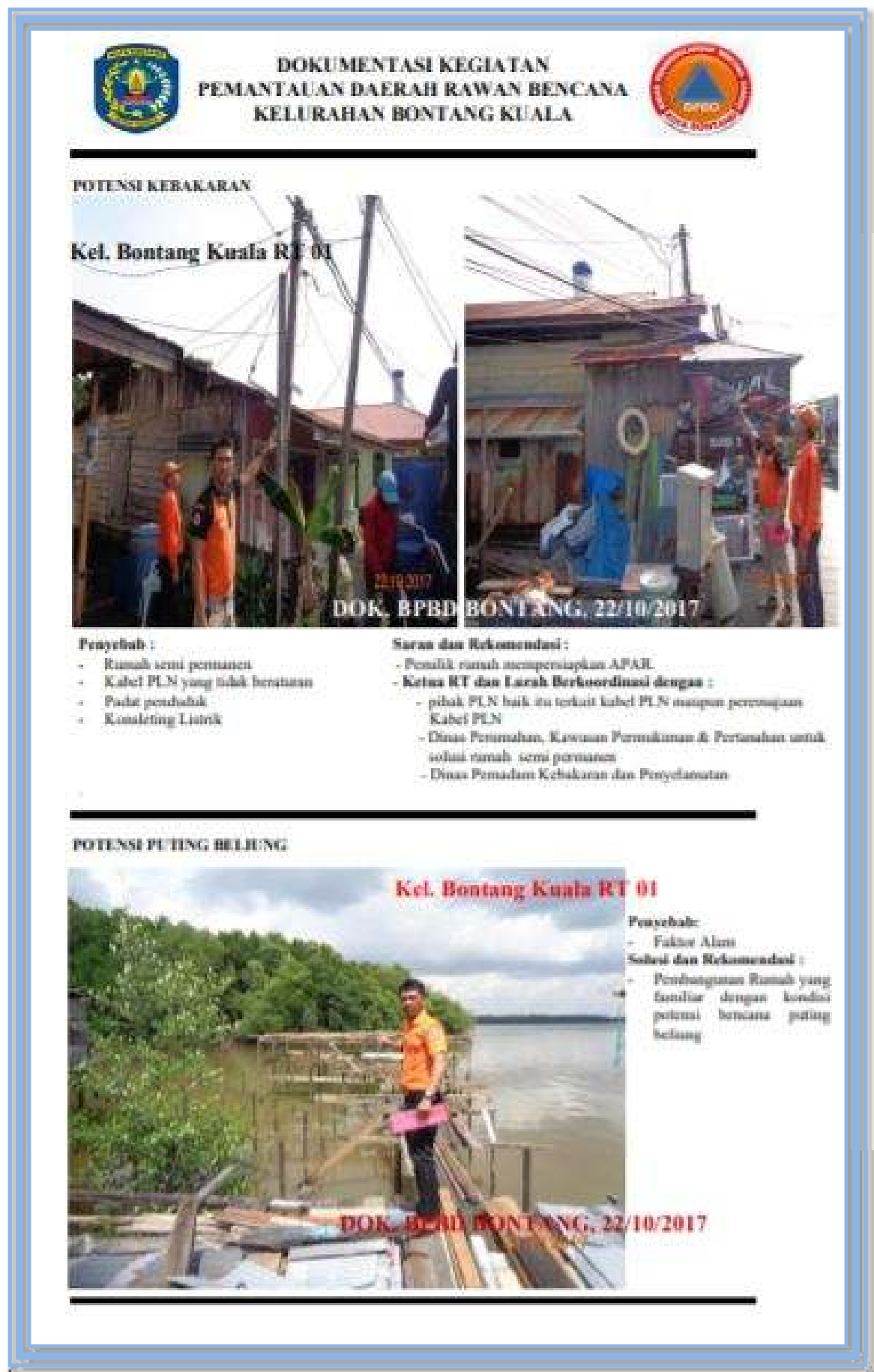
2. Eksternal :

- a. Masyarakat, sebagai informasi awal bagi masyarakat tentang potensi bencana yang ada di wilayahnya.
- b. Pemerintah, sebagai informasi awal dalam penyusunan rencana pembangunan.
- c. Investor dan Perusahaan, landasan dasar untuk menentukan lokasi penanaman modal

b. Hasil Inovasi

Hasil dari Inovasi PeRawan RT (Peta Rawan Bencana Per RT) ini antara lain :

1. Terpetakannya Potensi bencana yang ada di Kota Bontang yaitu : Banjir (banjir kiriman, banjir tadah hujan, dan banjir rob); Kebakaran Hutan dan Lahan; Kebakaran pemukiman; Tanah Longsor; Angin Putting Beliung; Kecelakaan Transportasi; Wabah penyakit; Bencana sosial; Gagal Teknologi; Bahaya Binatang Buas; Lain-lain (Rumah Roboh, Jembatan Roboh, Tiang listrik, Pohon tumbang).



Gambar 2. 33 Dokumentasi Kegiatan Inovasi PERAWAN RT



Gambar 2. 34 Peta Potensi Bencana Per RT

2. Terpetakannya lokasi rawan bencana sampai pada tingkat RT yang berjumlah 499 RT di 3 Kecamatan yang ada di Kota Bontang, Peta Rawan Bencana Per-RT dapat diakses melalui link <https://petakita-bontangkota.hub.arcgis.com/>



Gambar 2. 35 Peta Geospasial Potensi Bencana Per RT

3. Terpetakannya mitigasi yang akan dilakukan oleh tim BPBD dan tim terkait dalam penanggulangan bencana. Sehingga efisiensi dan repon time penanganan bencana dapat tercapai.

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Penanggulangan Pandemi Covid 19 dan seluruh kebijakan terkait, masih menjadi permasalahan utama dalam rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan Daerah tahun 2022. Hampir seluruh indikator makro menunjukkan capaian yang menurun baik dalam lingkup nasional maupun daerah sebagai dampak dari penyebaran Covid 19. Oleh karena itu, kebijakan pemulihan ekonomi menjadi salah satu agenda utama dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah tahun 2022. Sesuai dengan prioritas RKP tahun 2022 “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” ditetapkan 7 prioritas nasional:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Sejalan dengan prioritas nasional tersebut, dalam arahan kebijakan penyusunan RKPD tahun 2022 tema pembangunan Kota Bontang menetapkan tema “Revitalisasi sektor-sektor ekonomi dan Pelayanan Dasar”. Tema pembangunan tersebut memberikan arahan pembangunan tahun 2022 dengan menekankan pada upaya pemulihan ekonomi dan perlunya prioritas perbaikan pelayanan dasar bagi masyarakat yang terdampak signifikan selama tahun 2020 dan masih belum efektifnya penanggulangan Pandemi Covid 19 selama tahun 2021.

Arah kebijakan pembangunan tersebut didasari oleh realisasi sejumlah indikator makro daerah tahun 2020 yang menunjukkan penurunan capaian sebagai akibat dari penyebaran Pandemi Covid 19 yang cukup *massive* dan berdampak luas pada berbagai aspek kehidupan masyarakat baik sosial maupun ekonomi.

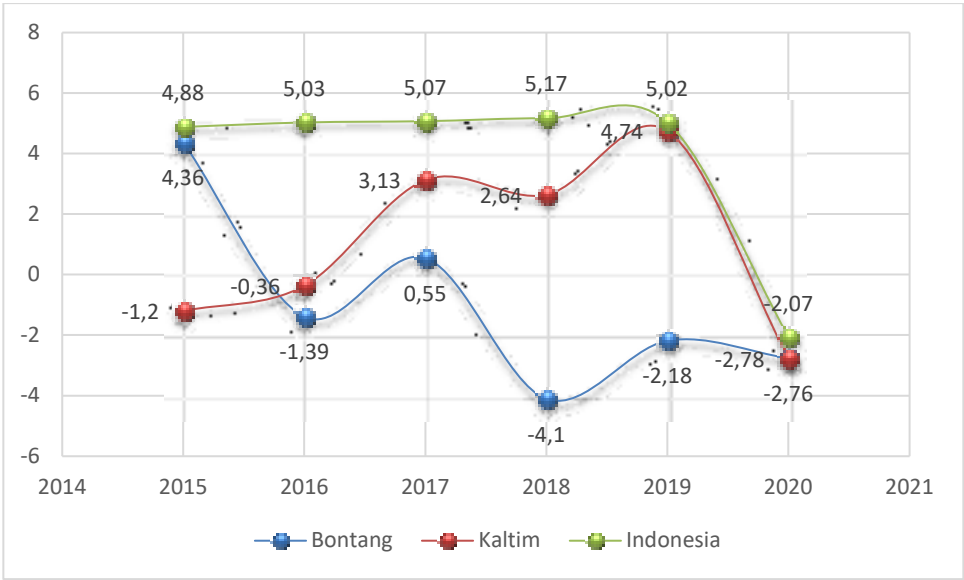
3.1.1 Perkembangan Ekonomi Kota Bontang

A. Pertumbuhan Ekonomi

Perkembangan perekonomian Kota Bontang secara aggregate pada setiap tahunnya tidak dapat dipisahkan dari perkembangan perekonomian baik lingkup nasional maupun global. Kebijakan ekonomi nasional yang

ditempuh oleh Pemerintah Pusat melalui kebijakan sektor moneter, kebijakan fiskal maupun kebijakan terkait penataan dan pengaturan sektor riil memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap dinamika perkembangan ekonomi Kota Bontang. Oleh karena itu arah kebijakan ekonomi Kota Bontang disusun dengan sepenuhnya memperhatikan arah kebijakan ekonomi secara nasional dan perkembangan perekonomian global.

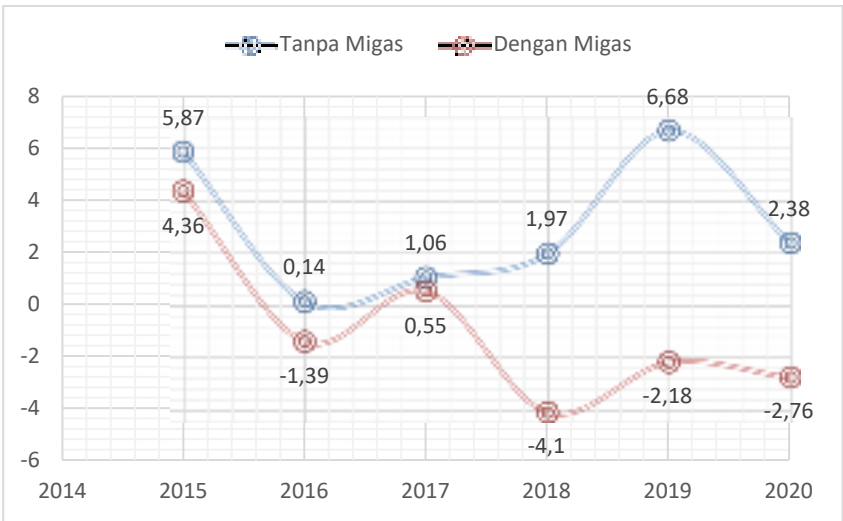
Perekonomian Kota Bontang hingga tahun 2020 masih menunjukkan penurunan secara aggregate dengan tingkat pertumbuhan yang kembali menunjukkan penurunan menjadi -2,76%. Tingkat pertumbuhan ini masih lebih baik dari tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur yang juga mengalami penurunan menjadi -2,85%.



Sumber: BPS Kota Bontang 2021 (diolah)

Gambar 3. 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bontang, Prov. Kaltim dan Indonesia Tahun 2015-2020

Dengan mengeluarkan peran sektor migas dari struktur perekonomian Kota Bontang, pertumbuhan ekonomi Kota Bontang mengalami kontraksi cukup signifikan dari 6,68% pada tahun 2019, menjadi 2,18% pada tahun 2020. Kontraksi pertumbuhan ekonomi baik migas dan non migas ini secara umum merupakan dampak tekanan penyebaran Pandemi Covid-19 yang ditindaklanjuti dengan berbagai pembatasan pergerakan orang sebagai Langkah menghambat penyebaran dan penularan yang lebih cepat dan *massive*.



Sumber: BPS Kota Bontang 2021 (diolah)

Gambar 3. 2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bontang
Tahun 2015-2020

Membandingkan tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Bontang dalam lingkup regional Kalimantan Timur, laju pertumbuhan ekonomi Kota Bontang, khususnya sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 menjadi yang terendah diantara Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur. Situasi tahun 2020 menunjukan situasi yang cukup berubah dimana hampir seluruh Kabupaten/Kota mengalami penurunan tingkat pertumbuhan bahkan tumbuh negatif. Tekanan akibat penyebaran Pandemi Covid 19 berdampak pada seluruh kabupaten/kota.

Tabel 3. 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota
Kalimantan Timur Tahun 2015-2019

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Paser	-4.98	1.17	3.68	3.88	-2,77
Kutai Barat	-0.83	3.64	5.04	5.58	-2,92
Kutai Kartanegara	-1.97	1.63	2.12	3.77	-4,44
Kutai Timur	-1.08	3.28	2.34	7.97	-3,21
Berau	-1.70	3.01	2.05	5.55	-3,25
PPU	-0.47	2.44	1.24	2.52	-2,34
Mahakam Ulu	3.41	4.29	5.40	5.44	-0,26
Balikpapan	4.92	3.84	4.95	4.78	-0,69
Samarinda	0.56	3.85	4.94	4.97	-1,71
Bontang	-1.39	0.55	-4.10	-2.18	-2,76
Kalimantan Timur	-1.20	-0.38	3.13	2.67	-2.85

Sumber: BPS Kaltim 2021

B. Produk Domestik Regional Bruto

Kinerja perekonomian suatu wilayah salah satunya dapat dilihat dari seberapa besar nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan produksi yang dihasilkan oleh suatu masyarakat dalam kurun waktu satu tahun yang berada di daerah atau regional tertentu. Berdasarkan

jenis lapangan usaha, PDRB Kota Bontang hingga tahun 2020 masih didominasi oleh lapangan usaha/ sektor Industri Pengolahan dengan kontribusi rata-rata mencapai ±80%. Nilai PDRB berdasarkan harga berlaku mencapai Rp.56,56 Triliun, sedangkan berdasarkan harga konstan Rp.39,31 Triliun. Dengan mengeluarkan peran Migas dalam struktur PDRB Kota Bontang, Nilai PDRB Kota Bontang menjadi Rp.32,28 Triliun pada harga berlaku dan Rp.20,51 Triliun dengan perhitungan harga konstan. Perkembangan PDRB Kota Bontang ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 3. 2 PDRB Kota Bontang 2015-2020

Tahun	Dengan Migas (Milyar Rp.)		Tanpa Migas (Milyar Rp.)	
	Harga Berlaku	Harga Konstan	Harga Berlaku	Harga Konstan
2015	58.600,86	43.437,18	24.029,91	18.199,27
2016	55.239,31	42.835,51	24.819,93	18.224,16
2017	58.885,68	43.073,06	25.928,13	18.416,96
2018	58.948,51	41.306,73	27.968,08	18.778,98
2019	58.479,36	40.406,23	31.187,50	20.033,47
2020	56.555,44	39.309,21	32.284,80	20.511,46

Sumber: Bontang Dalam Angka 2021

PDRB Kota Bontang dengan perhitungan per Kapita pada tahun 2020 mencapai Rp.312.145.420,00 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai Rp.312.145.420,00. Sebaliknya dengan tidak memasukkan peran migas, PDRB per Kapita Tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi Rp.178.188.880,00 dari tahun 2019 yang mencapai Rp.175.484.728,09. Perkembangan PDRB Per Kapita Kota Bontang sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 3 PDRB Per Kapita Kota Bontang 2015-2019

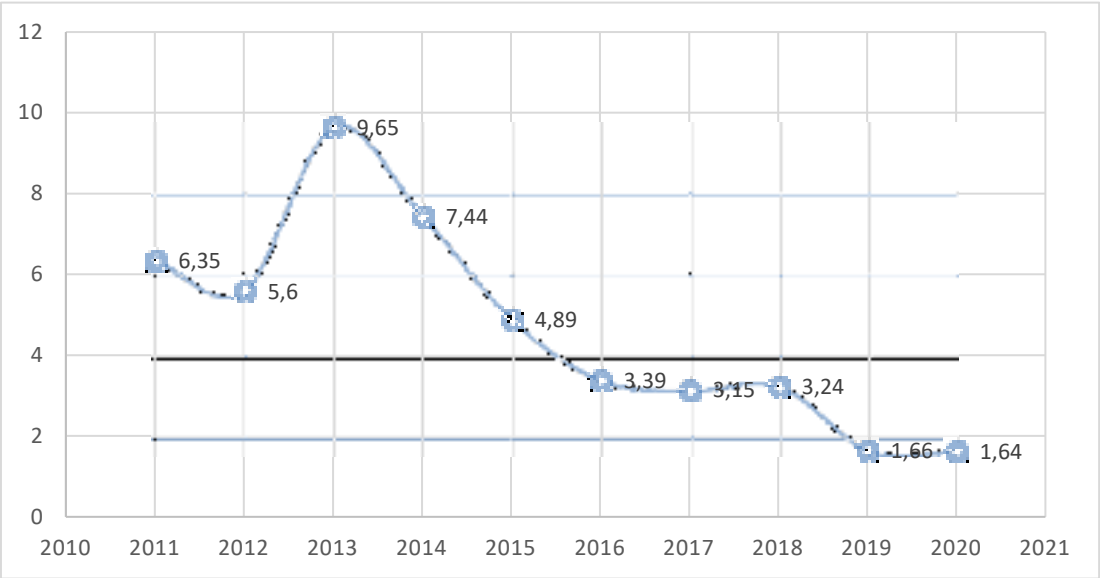
Tahun	Dengan Migas		Tanpa Migas	
	Harga Berlaku	Harga Konstan	Harga Berlaku	Harga Konstan
2015	358.796.854,41	265.953.881,38	147.128.518,47	111.429.092,40
2016	331.035.960,45	256.702.957,51	148.739.893,71	109.213.006,70
2017	345.145.845,14	252.463.536,63	151.972.177,21	107.947.085,31
2018	338.383.899,09	237.114.264,10	160.546.008,77	107.797.551,94
2019	329.049.655,47	227.356.354,38	175.484.728,09	112.723.610,80
2020	312.145.420,00		178.188.880,00	

Sumber: Bontang Dalam Angka 2021

C. Inflasi

Kota Bontang belum menjadi Kota yang dihitung secara khusus tingkat inflasinya, oleh karena itu pengukuran tingkat inflasinya mengacu pada perhitungan tingkat inflasi Provinsi Kaltim. Pada tahun 2020 tingkat inflasi *year on year* Kaltim mencapai 1,64. Tingkat inflasi tersebut lebih

rendah dari tahun-tahun sebelumnya dengan tingkat inflasi lebih tinggi dari 3 persen.



Gambar 3. 3 Perkembangan Inflasi Kaltim

D. Angka Pengangguran

Angka pengangguran di Kota Bontang secara persentase masih menjadi yang tertinggi diantara kabupaten/kota di Kalimantan Timur. Pada tahun 2020 tingkat pengangguran terbuka di Kota Bontang masih mencapai 9,46 persen. Angka pengangguran tesebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yang masih mencapai 9,16 persen. Peningkatan angka pengangguran ini juga merupakan bagian dari dampak Pandemi Covid 19 yang menyebabkan banyak sektor-sektor ekonomi mengalami penurunan karena adanya kebijakan pembatasan pergerakan orang, dan berbagai pembatasan terhadap berbagai aktivitas ekonomi yang menyebabkan kerumunan orang.

Dibandingkan secara regional kab/kota se Kalimantan Timur Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bontang menjadi yang tertinggi dan lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Kaltim.

Tabel 3. 4 Angka Pengangguran Kab/Kota Provinsi Kalimantan Timur 2017-2019

Kab/Kota	2017	2018	2019	2020
Paser	5.54	4,84	4.55	4,52
Kutai Barat	5.87	4.86	5.08	4,97
Kutai Kartanegara	5.72	5.96	5.98	5,70
Kutai Timur	4.61	5.93	5.53	5,45
Berau	6.45	5.62	5.08	5,08
PPU	4.75	4.76	6.26	6,22
Mahakam Ulu	9.05	4.17	3.69	3,49
Balikpapan	10.39	9.52	7.29	9,00
Samarinda	6.19	6.16	5.87	8,42
Bontang	12.44	9.61	9.19	9,46
Kalimantan Timur	6.91	6.60	6.09	6,87

Sumber: Publikasi BPS Tahun 2021

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Bontang yang mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi pada tahun 2020 mencapai 69,24 persen mengalami peningkatan dibandingkan dengan TPAK tahun 2019 sebesar 68,36 persen dan lebih tinggi dari TPAK Provinsi yang mencapai 65,50 persen. Dibandingkan dengan Kota Samarinda dan Balikpapan, TPAK Kota Bontang relatif lebih tinggi dan masih mampu mengalami peningkatan meskipun dalam kondisi ekonomi tertekan akibat dampak penyebaran covid 19. Sebaliknya Kota Samarinda dan Balikpapan mengalami penurunan TPAK.

Tabel 3. 5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kab/Kota Provinsi Kalimantan Timur 2015-2019

Kabupaten/Kota	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (Persen)					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Paser	65.17	-	62.15	67.22	66.43	67,88
Kutai Barat	66.89	-	66.01	71.65	67.29	71,02
Kutai Kartanegara	60.07	-	62.95	64.36	66.07	61,98
Kutai Timur	59.89	-	66.75	69.40	69.23	68,96
Berau	66.07	-	66	67.85	67.11	67,40
PPU	63.63	-	61	64.81	64.45	69,04
Mahakam Ulu	76.31	-	77.12	79	70.55	76,22
Balikpapan	62.50	-	63.38	64.33	66.13	62,90
Samarinda	60.82	-	63.05	61.32	65.40	65,16
Bontang	68.84	-	64.52	65.16	68.36	69,24
Kalimantan Timur	62.39	67.79	63.75	64.99	66.44	65,50

Sumber: Publikasi BPS Tahun 2021

E. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan pembangunan Kota Bontang yang masih sangat memerlukan penanganan serius Pemerintah Kota Bontang. Penduduk miskin Kota Bontang sampai dengan tahun 2020 mencapai 4,38 persen, sedikit mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 4,22 persen. Peningkatan ini sama seperti capaian indikator makro lainnya yang juga mengalami penurunan kinerja yang merupakan dampak dari pandemi covid 19. Selama lima tahun terakhir tingkat kemiskinan menunjukkan tren penurunan dari 5,06 persen pada tahun 2015 menjadi 4,38 persen pada tahun 2020. Persentase kemiskinan ini lebih rendah dari rata-rata tingkat kemiskinan Provinsi Kaltim dan Nasional.

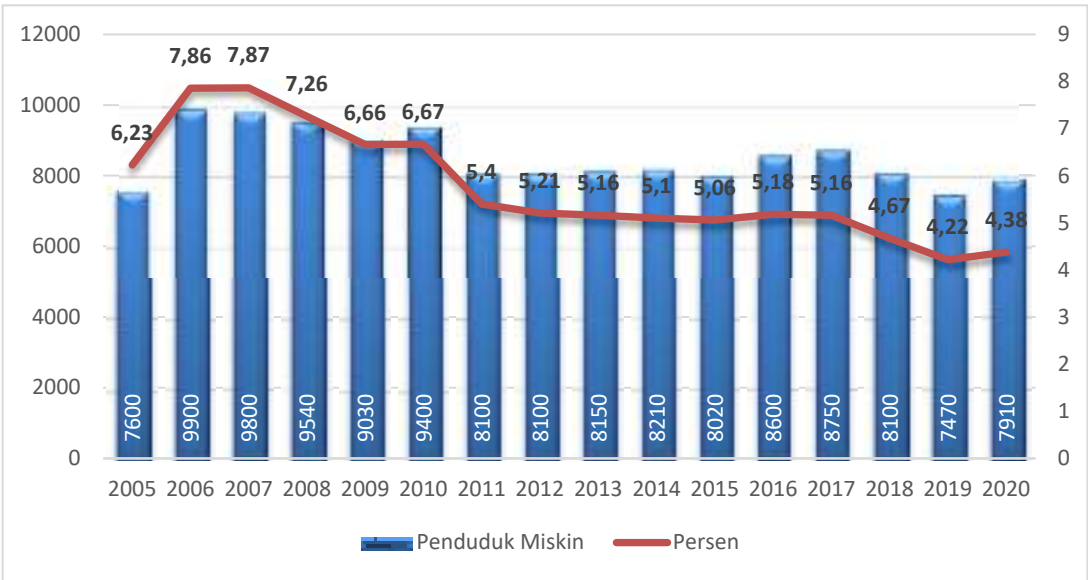
Tabel 3. 6 Tingkat Kemiskinan Kab/Kota Provinsi Kaltim 2015-2020

Kabupaten/Kota	Penduduk Miskin (Persen)					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Paser	8.76	8.68	9.28	9.03	8.95	9,23
Kutai Barat	8.33	8.65	8.72	9.15	9.09	9,29
Kutai Kartanegara	7.99	7.63	7.57	7.41	7.20	7,31
Kutai Timur	9.31	9.16	9.29	9.22	9.48	9,55
Berau	5.33	5.37	5.41	5.04	5.04	5,19

Kabupaten/Kota	Penduduk Miskin (Persen)					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PPU	7.92	7.49	7.63	7.40	7.18	7,36
Mahakam Ulu	10.50	10.65	11.29	11.62	11.25	11,44
Balikpapan	2.91	2.81	2.82	2.64	2.42	2,57
Samarinda	4.82	4.72	4.77	4.59	4.59	4,76
Bontang	5.06	5.18	5.16	4.67	4.22	4,38
Kalimantan Timur	6.23	6.11	6.19	6.03	5.94	6,10

Sumber: Publikasi BPS Tahun 2021

Berdasarkan jumlah jiwa, penduduk miskin Kota Bontang pada tahun 2020 mencapai 7.910 jiwa, mengalami peningkatan dari 7.470 jiwa pada tahun 2019. Berdasarkan jumlah jiwa penduduk miskin, peningkatan ini menggambarkan penambahan baru jumlah penduduk miskin pada tahun 2020. Penduduk yang dikategorikan menjadi miskin ini dapat disimpulkan sebagai mereka yang memang rentan secara ekonomi, sehingga kebijakan pembatasan sehubungan dengan upaya menghambat laju penyebaran Covid 19 langsung berdampak pada penurunan pendapatan kelompok yang kategori rentan tersebut.



Sumber: BPS Kota Bontang Tahun 2021

Gambar 3. 4 Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Kota Bontang Tahun 2005-2020

Karakteristik kemiskinan di Kota Bontang adalah kemiskinan perkotaan dimana sebagian besar penduduk miskin adalah mereka yang bekerja pada sektor informal. Migrasi penduduk merupakan salah satu faktor yang berdampak pada relatif lambatnya penurunan jumlah penduduk miskin dalam kurun waktu 15 tahun terakhir. Terbatasnya keterampilan para migran yang datang ke Kota Bontang menyebabkan kemampuan bersaing menjadi sangat lemah dan pada akhirnya menyebabkan pengangguran dan kemiskinan baru. Pandemi covid 19 menyebabkan tekanan signifikan terhadap produktivitas ekonomi semakin membatasi ruang-ruang masyarakat pada sektor informal yang rentan tersebut untuk mendapatkan pendapatan dan menyebabkan Sebagian mereka menjadi lebih miskin dari sebelumnya.

Ditinjau dari aspek tingkat Kedalaman Kemiskinan P1 yang mengukur gab pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan, maka kedalaman kemiskinan di Kota Bontang pada tahun 2020 menunjukkan gab yang sedikit melebar dengan Indeks yang membesar menjadi 0,540 dari 0,420 pada tahun 2019. Membandingkan dengan Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur, indeks P1 Kota Bontang menjadi yang terrendah kedua setelah Balikpapan.

Tabel 3. 7 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kab/Kota Provinsi Kaltim 2015-2019

Kabupaten/Kota	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Paser	1,070	1,480	1,320	1,220	1,570	1,040
Kutai Barat	1,420	1,560	0,910	1,190	1,480	1,230
Kutai Kartanegara	1,120	1,160	1,500	0,950	0,950	0,910
Kutai Timur	1,220	2,050	1,260	1,490	1,900	2,020
Berau	0,890	0,970	0,490	0,570	0,660	0,700
PPU	1,160	1,040	1,110	1,180	1,000	0,870
Mahakam Ulu	1,890	2,570	0,990	0,330	1,940	1,460
Balikpapan	0,220	0,300	0,240	0,670	0,260	0,380
Samarinda	0,650	0,800	0,680	0,490	0,570	0,720
Bontang	0,640	0,840	0,920	0,930	0,420	0,540
Kalimantan Timur	0,900	1,040	0,890	0,850	0,910	1,020

Sumber: Publikasi BPS Tahun 2020

Selanjutnya berdasarkan Indeks Keparahan Kemiskinan yang menunjukkan seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin, pada tahun 2020 juga menunjukkan peningkatan dengan indeks yang sedikit meningkat menjadi 0,090 dari 0,080 pada tahun 2019., Indeks Keparahan Kemiskinan P2 Kota Bontang pada tahun 2020 meskipun sedikit mengalami peningkatan, namun dalam lingkup kabupaten/Kota di Kalimantan Timur menjadi yang terendah.

Tabel 3. 8 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kab/Kota Provinsi Kaltim 2015-2019

Kabupaten/Kota	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menurut Kabupaten/Kota					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Paser	0,290	0,430	0,270	0,310	0,400	0,210
Kutai Barat	0,410	0,370	0,160	0,260	0,410	0,280
Kutai Kartanegara	0,250	0,280	0,440	0,200	0,190	0,160
Kutai Timur	0,280	0,650	0,250	0,410	0,550	0,630
Berau	0,270	0,230	0,070	0,110	0,120	0,170
PPU	0,240	0,220	0,240	0,380	0,280	0,170
Mahakam Ulu	0,470	0,960	0,190	0,020	0,550	0,290
Balikpapan	0,030	0,050	0,030	0,260	0,060	0,120
Samarinda	0,120	0,210	0,130	0,090	0,110	0,210
Bontang	0,130	0,200	0,250	0,260	0,080	0,090
Kalimantan Timur	0,220	0,280	0,210	0,200	0,210	0,240

Sumber: Publikasi BPS Tahun 2021

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2023

Tantangan utama perekonomian Kota Bontang mendatang, khususnya tahun 2022, diperkirakan masih dihadapkan pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang melambat baik karena faktor lokal, perkembangan ekonomi nasional maupun perekonomian global akibat ketidakpastian penurunan kasus penularan pandemi Covid-19. Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan pembangunan ekonomi nasional tahun 2022 yang menetapkan prioritas pada pemulihan ekonomi diharapkan dapat dilaksanakan secara efektif, sehingga mampu memberikan keyakinan akan terjadinya perbaikan/pemulihan perekonomian dengan dampak yang lebih merata menjangkau ke daerah-daerah yang terdampak cukup signifikan oleh pandemic covid 19.

Perkembangan penularan covid 19 secara nasional yang masih menunjukkan peningkatan hingga awal Juni 2021, semakin mengindikasikan ketidakpastian prospek perkembangan ekonomi pada tahun 2022. Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesian ditargetkan dapat tumbuh mencapai 4,8%, namun pencapaian tersebut sangat tergantung kemampuan pemerintah menanggulangi pandemi covid 19 pada tahun 2021.

Dalam rangka menunjang pencapaian target pertumbuhan tersebut, dalam kebijakannya, Pemerintah Pusat berupaya melakukan percepatan implementasi vaksinasi COVID-19 yang diharapkan dapat mendukung *new normal*, menekan penyebaran COVID-19 sehingga memberikan dampak terhadap pemulihan ekonomi secara nasional dan menstimulasi kembali perekonomian di Kota Bontang.

Kebijakan Pemerintah Pusat dengan mengambil langkah cepat dengan memberikan stimulus baik dari sisi fiskal maupun moneter dan keuangan diharapkan dapat dilaksanakan secara efektif, sehingga dari sisi fiskal, memberikan stimulus yang besar untuk memperkuat sistem kesehatan serta memberikan bantalan ekonomi bagi kelompok masyarakat dan industri yang terdampak. Dari sisi moneter dan keuangan, bank telah menetapkan kebijakan moneter yang akomodatif dengan menggunakan beberapa saluran untuk menyuntikkan likuiditas ke perekonomian. Otoritas keuangan juga menyusun stimulus untuk mendukung industri serta UMKM melalui *rediscount* kredit.

Pendekatan kebijakan ekonomi tersebut diharapkan akan mampu memberikan stimulasi yang efektif, khususya untuk pemulihan sektor-sektor produktif masyarakat yang harus berjibaku dengan melemahnya permintaan pasar akibat berbagai kebijakan pembatasan sebagai upaya pencegahan penyebaran covid 19.

Dalam rangka mendukung dan membangun keselarasan prioritas pembangunan ekonomi Kota Bontang dengan kebijakan pembangunan ekonomi nasional tahun 2022, tantangan dan sekaligus menjadi fokus utama pembangunan ekonomi Kota Bontang pada tahun 2022 adalah menstimulasi peningkatan daya beli masyarakat dengan mendorong dan

pemulihan sektor-sektor ekonomi masyarakat, investasi dan lapangan kerja, dengan secara bersamaan melaksanakan revitalisasi pelayanan dasar masyarakat.

Sebagai wilayah yang perekonomiannya sangat dominan sektor industri pengolahan migas dan industri kimia, prospek pertumbuhan ekonomi masih sangat ditentukan oleh dinamika perkembangan sektor utama tersebut. Oleh karena itu faktor pengaruh seperti perkembangan perekonomian nasional maupun global sangat menentukan realisasi tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Bontang. Sejalan dengan perkiran terjadinya perbaikan ekonomi global dan target kembali tumbuhnya perekonomian nasional seiring dengan meningkatnya efektivitas penanggulangan pandemi covid-19, maka tingkat pertumbuhan ekonomi dan sejumlah indikator makro Kota Bontang tahun 2022 diproyeksikan sebagai berikut:

Tabel 3. 9 Target Indikator Makro Tahun 2022

No	Indikator	Target 2022
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	
	- Dengan Migas (%)	2,0 – 3,0
	- Tanpa Migas (%)	3,0 - 4,2
2	PDRB per Kapita (Juta)	321,5
3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	80,57
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	9,0
5	Tingkat Kemiskinan (%)	3,98
6	Rasio Gini (indeks)	0,375

Sehubungan dengan penetapan target indikator makro tersebut, prioritas kebijakan yang diupayakan, khususnya dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemic Covid-19 adalah menstimulasi tumbuhnya sektor-sektor ekonomi masyarakat yang secara langsung berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat.

Dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2022 yang merupakan tahun pertama RPJMD periode 2021-2026, tantangan utama terkait dengan perkembangan perekonomian Kota Bontang adalah bahwa perekonomian Kota Bontang masih sangat rentan terhadap perubahan-perubahan faktor eksternal, hal ini merupakan konsekuensi dari masih sangat kentatnya peran sektor industri yang berbasis pada pasar global.

Berdasarkan penelaahan dan analisis terhadap indikator makro perekonomian Kota Bontang dan mempertimbangkan tantangan dan prospeknya hingga tahun perencanaan serta memperhatikan sasaran kebijakan pembangunan ekonomi sebagaimana dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, kebijakan pembangunan pemerintah provinsi dan nasional, maka dirumuskan beberapa hal terkait sebagai berikut:

a. Tantangan

Meperhatikan tren pertumbuhan ekonomi Kota Bontang tahun 2015 – 2020 dan dinamika perkembangan ekonomi nasional yang masih dibayangi

oleh ketidakpastian akibat pandemi covid-19, dapat dirumuskan tantangan dalam rangka pelaksanaan pembangunan ekonomi Kota Bontang tahun 2022 dan 2023 sebagai berikut:

1. Ketidakpastian akan semakin menurunnya penyebaran Pandemi Covid-19 masih menjadi faktor utama yang sangat menentukan potensi perbaikan produktivitas sektor-sektor ekonomi baik dalam lingkup global, nasional dan daerah;
2. Sebagai daerah dengan peran besar ekonomi dari sektor industri pengolahan dan basis industri migas dan kimia, perekonomian Kota Bontang masih sangat rentan dipengaruhi oleh perkembangan dan fluktuasi perekonomian global. Oleh karena itu faktor pemulihan dari beberapa negara besar dalam perekonomian, seperti China dan Amerika Serikat, akan membuat harga komoditas mengalami peningkatan yang sangat kuat. Namun situasi ideal tersebut dapat terjadi sebaliknya jika kejadian luar biasa terkait penanggulangan penyebaran virus COVID-19, mengakibatkan perubahan kebijakan baik di Pusat, Provinsi sampai dengan Kabupaten/Kota.
3. Potensi masih akan peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan jika berbagai program pemulihan ekonomi pada tahun 2021 tidak berlangsung efektif mampu meningkatkan kembali sektor-sektor produktif masyarakat;
4. Investasi yang bertumbuh tidak berdampak signifikan terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja. Sektor-sektor utama investasi masih terpusat pada sektor padat modal yang membutuhkan skill dan kualifikasi tenaga kerja yang tinggi dengan jumlah yang terbatas;
5. Jumlah penduduk dengan komposisi usia produktif yang terus membesar dibandingkan dengan usia non produktif merupakan tantangan bagi penyediaan lapangan pekerjaan, Keberadaan bonus demografi ini merupakan peluang untuk pengembangan perekonomian sekaligus tantangan dalam hal penyediaan sarana prasarana dasar kehidupan masyarakat yang memadai secara kuantitas dan kualitas, ditengah kapasitas fiskal yang diperkirakan masih relative terbatas dibandingkan dengan peningkatan kebutuhan pembangunan dan layanan publik; dan
6. Pengembangan sektor pariwisata menjadi salah satu prioritas dalam rangka mendorong tumbuhnya sektor-sektor UMKM dan sektor jasa terkait disamping masih belum optimal, tantangannya adalah tekanan ketidakpastian efektivitas penanganan pandemic covid 19.

b. Prospek Perekonomian Daerah tahun 2022 dan 2023,

Menperhatikan tren realisasi pertumbuhan ekonomi Kota Bontang hingga tahun 2020 dan gambaran tantangan dalam rangka pelaksanaan kebijakan pembangunan ekonomi serta memperhatikan proyeksi

perkembangan ekonomi nasional dan kebijakan pembangunan nasional serta arah kebijakan pembangunan Provinsi Kaltim tahun 2022, maka prospek perkembangan ekonomi Kota Bontang tahun 2022 dan 2023 adalah sebagai berikut:

1. Prioritas pembangunan nasional yang memberikan fokus pada pemulihan ekonomi diharapkan dapat berlangsung efektif dalam menstimulasi perbaikan perekonomian nasional dan mendorong perbaikan perekonomian daerah melalui pemberian stimulus fiskal yang memadai bagi pengembangan sektor UMKM;
2. Telah mulai beroperasinya beberapa industri baru, salah satunya industri pengolahan CPO diharapkan dapat menjadi salah satu stimulus bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan sekaligus dapat mendorong tumbuhnya investasi industri terkait lainnya;
3. Pada sektor perdagangan, investasi pembangunan Mall di Kota Bontang yang dalam tahap konstruksi diharapkan dapat juga beroperasi pada tahun 2022;
4. Pemerintah Kota Bontang menetapkan prioritas pengembangan sektor UMKM dan pengembangan pariwisata sebagai salah satu sasaran dalam rangka pemulihan ekonomi;
5. Relaksasi kebijakan penanggulangan covid 19 seiring dengan menurunan kasus-kasus penularan covid-19 diharapkan dapat kembali mendorong peningkatan sektor-sektor perdagangan dan jasa yang turut kembali bergairah didorong oleh potensi peningkatan aktivitas sektor-sektor ekonomi masyarakat.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah sebagai salah satu kewenangan yang diserahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah menjadi salah satu instrumen penting untuk medesain dan mengarahkan kebijakan pembangunan daerah untuk meningkatkan kemandirian, kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu efektifitas pengelolaan keuangan daerah sebagai instrument fiskal daerah akan sangat berdampak pada pencapaian target-target dari pelaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk melakukan peran yang lebih aktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam bidang keuangan daerah. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan daerah, terbatasnya sumber-sumber penerimaan keuangan menuntut pemerintah daerah untuk menggali potensi sumber pendanaan diluar APBD antara lain pendanaan melalui APBN, APBD Provinsi, dana kemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab social lingkungan perusahaan dan

program kemitraan serta bina lingkungan di Pemerintah Kota Bontang yang semuanya merupakan potensi sumber pendanaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

Kebijakan keuangan daerah harus dirumuskan secara tepat dan akurat berdasarkan analisis perkembangan ekonomi daerah. Selain itu, agar dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat digunakan secara efektif dan efisien, maka diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan arah kebijakan keuangan yang tepat, diharapkan kondisi keuangan daerah juga akan semakin kondusif untuk mendukung berbagai kegiatan pembangunan. Kebijakan keuangan daerah di Kota Bontang pada tahun 2022 secara umum diarahkan:

2. Menjamin ketersediaan dana untuk membiayai program dan kegiatan prioritas, melalui kebijakan pendapatan tahun 2022 yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan yang berkelanjutan (*sustained*), serta menumbuhkan iklim usaha dan investasi yang kondusif.
3. Kebijakan belanja pada APBD Kota Bontang digunakan sepenuhnya untuk mendukung kebijakan dan program prioritas, sesuai dengan sasaran dan prioritas pembangunan tahun 2022.
4. Kebijakan pembiayaan tahun 2022 diarahkan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah melalui penguatan investasi Pemerintah Daerah,

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan perencanaan anggaran pendapatan Kota Bontang dalam RKPD tahun 2022 mengacu kepada kebijakan keuangan daerah dalam Rancangan Awal RPJMD Tahun 2021-2026. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam penetapan target anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2021 juga disesuaikan dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal pada Pemerintah Daerah. Kondisi eksternal khususnya menyangkut perkembangan kondisi perekonomian nasional pada tahun berjalan dan yang akan datang. Oleh karena itu, berbagai langkah antisipatif dan solusi bagi peningkatan serta penetapan target pendapatan daerah di tahun 2022 didukung dengan beberapa asumsi dalam penetapan target pendapatan daerah sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun, anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah;
2. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil;
3. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, telah dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak Daerah dalam satu tahun anggaran. Selain itu, diuraikan pula bahwa Pendapatan Daerah dikelompokkan atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Kebijakan pendapatan daerah pada tahun 2022 diarahkan melalui upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah sebagai pencerminan kesungguhan Pemerintah Daerah mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan potensial daerah dan dana perimbangan untuk mewujudkan otonomi dan kemandirian daerah yang didasarkan pada optimalisasi potensi daerah.

Dalam rangka optimalisasi pencapaian target perencanaan pendapatan daerah tahun 2022, selanjutnya dirumuskan arah kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang mencakup:

1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:
 - a. Dalam merencanakan target pendapatan daerah dari kelompok Pendapatan Asli Daerah ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, tahun berjalan, potensi, dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi terhadap masing-masing jenis penerimaan, obyek penerimaan serta rincian obyek penerimaan;
 - b. Dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah, pemerintahan daerah tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat, Upaya peningkatan pendapatan asli daerah dapat ditempuh dengan meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan;
 - c. Ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah, terutama pajak yang memiliki potensi besar seperti PBB, BPHTB dan Pajak Reklame;
 - d. Meningkatkan potensi penerimaan pajak dan retribusi melalui evaluasi dan revisi secara berkala terhadap peraturan daerah pajak dan retribusi terutama yang menyangkut penyesuaian tarif;
 - e. Mengembangkan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah;

- f. Mengefektifkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah yakni PDAM; Perusda Aneka Usaha Jasa; termasuk di dalamnya BPR/BKK untuk memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah;
 - g. Menyelenggarakan pelayanan prima melalui pengadaan sarana dan prasarana yang dapat memberikan kenyamanan dan keamanan serta pelayanan yang cepat dan sederhana dengan didukung oleh teknologi informasi yang memadai.
2. Kebijakan Dana Transfer
Upaya meningkatkan penerimaan dana Transfer baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi dilakukan dengan meningkatkan koordinasi, khususnya dalam penyiapan data dan informasi sebagai prasyarat penyaluran data transfer. Kebijakan penting lainnya juga adalah menyiapkan penyusunan program dan kegiatan yang akan diusulkan melalui pendanaan khusus dan Bantuan Keuangan Provinsi secara tepat, selaras dan lengkap sesuai prioritas pembangunan Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Selanjutnya upaya meningkatkan pendapatan transfer juga dilakukan dengan meningkatkan capaian-capaian kinerja pembangunan daerah untuk mendapatkan alokasi tambahan dari APBN sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
 3. Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Dilaksanakan dengan melakukan identifikasi potensi-potensi pendapatan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah.

3.2.2 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam struktur Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), karena besaran pendapatan akan menentukan kemampuan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, Kebijakan pendapatan daerah diarahkan pada optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang selama ini menjadi sumber pendapatan asli daerah, serta tetap berupaya melakukan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan baru dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada di wilayah Kota Bontang,

Mengacu pada kinerja perekonomian daerah Kota Bontang yang diperkirakan akan kembali mengalami pertumbuhan dan kinerja pendapatan daerah tiga tahun terakhir yakni tahun 2018-2020, maka proyeksi pendapatan daerah tahun 2022 dan tahun 2023 diperkirakan mengalami peningkatan meskipun relatif belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan pendanaan pembangunan.

Realisasi Pendapatan daerah pada tahun 2020 dengan tidak memasukkan realisasi pendapatan DAK, Bantuan Provinsi, dan alokasi BOS, masih mencapai Rp.1.368.030.510.999,06, mengalami peningkatan dibandingkan realisasi tahun 2019 yang mencapai Rp.1.339.670.098.485,28 atau mengalami peningkatan 2,12 persen. Dalam penetapan APBD Kota Bontang tahun 2021 penerimaan pendapatan daerah ditetapkan menurun

dibanding tahun 2020. Target pendapatan daerah dalam APBD tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp.1.110.081.645.040,00 atau menurun 18,86% persen dibandingkan realisasi pendapatan tahun 2020. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penetapan pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak pada tahun 2021 yang mengalami penurunan 34,6 persen dibandingkan realisasi tahun 2020.

Dengan asumsi akan terjadi peraian indikator makro ekonomi pada tahun 2022, yang dipicu oleh perkiraan tren membaiknya ekonomi global yang ditunjukkan oleh semakin menurunnya kasus-kasus penularan pandemi covid-19 pada tahun 2021, perekonomian nasional diharapkan dapat kembali tumbuh seiring dengan peningkatan volume perdagangan dan perbaikan harga-harga komoditas. Perbaikan kinerja sektor eksternal ini dapat menjadi tumpuan peningkatan sisi investasi dan ekspor. Berdasarkan prospek perbaikan indikator makro ekonomi tersebut maka hal ini menjadi pijakan untuk memproyeksikan penerimaan pendapatan yang meningkat untuk tahun 2022.

Berdasarkan tren perkembangan realisasi sumber-sumber pendapatan daerah khususnya tahun 2018-2020, maka proyeksi pendapatan tahun 2022 diperkirakan akan mengalami peningkatan 5,77% dibandingkan dengan penetapan APBD tahun 2021. Sumber utama peningkatan pendapatan daerah, sebagian besar masih ditopang oleh peningkatan penerimaan Dana Transfer baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Provinsi Kaltim. Sedangkan sumber PAD dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diproyeksikan meningkat mencapai 3,23% dan 1,24%.

Mengacu pada proyeksi peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah tersebut dan seiring dengan asumsi akan kembali terjadi perbaikan perekonomian nasional dan provinsi Kaltim pada tahun 2021 dan tahun 2022, maka dalam rangka kerangka pendanaan untuk penyusunan RKPD tahun 2022 diproyeksikan Pendapatan Daerah sebesar Rp.1.255.027.289.366,00. Proyeksi ini tidak memasukkan perkiraan pendapatan Dana Transfer Khusus, Dana Insentif Daerah, Bantuan Keuangan Provinsi Kaltim dan Dana BOS. Gambaran lengkap proyeksi pendapatan ditampilkan sebagaimana tabel 3.10

Tabel 3. 10 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Bontang 2019-2023

Uraian	Realisasi		Target	Target	Target
	2019	2020	2021	2022	2023
PENDAPATAN DAERAH					
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	218.743.530.945,00	199.808.704.887,27	195.066.668.000,00	201.375.311.000,00	208.004.220.000,00
Pajak Daerah	116.864.297.801,00	100.014.196.975,55	99.335.000.000,00	104.780.133.000,00	110.523.740.000,00
Kontribusi Daerah	6.331.946.328,00	4.648.143.497,25	4.381.528.900,00	4.323.926.000,00	4.267.080.000,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	4.504.282.490,00	2.561.257.068,55	3.531.668.000,00	3.367.571.000,00	3.211.090.000,00
Lain-lain PAD yang Sah	91.043.004.326,00	92.585.107.345,92	87.818.471.100,00	88.903.681.000,00	90.002.300.000,00
PENDAPATAN TRANSFER	1.117.916.552.929,00	1.163.649.968.072,00	913.514.977.040,00	1.051.151.978.366,00	1.088.443.500.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	931.563.131.351,00	979.622.966.824,00	724.001.670.040,00	852.018.006.366,00	869.200.470.000,00
Dana Perimbangan	931.563.131.351,00	979.622.966.824,00	724.001.670.040,00	852.018.006.366,00	869.200.470.000,00
Dana Transfer umum	931.563.131.351,00	979.622.966.824,00	724.001.670.040,00	852.018.006.366,00	869.200.470.000,00
Dana Bagi Hasil (DBH)	698.202.723.351,00	749.843.978.824,00	490.546.994.040,00	625.781.220.066,00	638.100.240.000,00
Dana Alokasi umum (DAU)	233.360.408.000,00	229.778.988.000,00	233.454.676.000,00	226.236.786.300,00	231.100.220.000,00
Dana Transfer Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan Fisik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan Non Fisik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	186.353.421.578,00	184.027.001.248,00	189.513.307.000,00	199.133.972.000,00	219.243.000.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3.010.014.611,28	4.571.838.039,79	1.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
Pendapatan Hibah	3.010.014.611,28	4.571.838.039,79	1.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
Jumlah Pendapatan	1.339.670.098.485,28	1.368.030.510.999,06	1.110.081.645.040,00	1.255.027.289.366,00	1.298.947.730.000,00

RKPD KOTA BONTANG TAHUN 2022

Secara keseluruhan proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2022 dalam RKPD akan sekaligus sama dengan proyeksi RPJMD tahun 2021-2026 untuk tahun 2022.

3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, telah dijelaskan bahwa Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban Daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja Daerah dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tersebut dikelompokkan ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.

Arah kebijakan belanja tahun 2022 yang merupakan tahun pertama dari periode RPJMD 2021-2026 dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, dijelaskan bahwa penyusunan RKPD tahun 2022 disamping mengacu pada arah kebijakan RPJPD periode lima tahun berkenaan, juga harus sudah mengakomodasi kebijakan-kebijakan yang menjadi arahan dalam visi dan misi kepala daerah terpilih menginyat RKPD tahun 2022 akan terlebih dahulu ditetapkan baru kemudian RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka kebijakan belanja daerah tahun 2022 secara umum akan disesuaikan dengan penjabaran visi pembangunan **“Terwujudnya Kota Bontang yang Lebih Hebat dan Beradab”**.

Prioritas kebijakan belanja daerah diarahkan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta penyelenggaraan urusan pendukung urusan pemerintahan dengan sasaran utama melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum. Oleh karena itu kebijakan belanja daerah tahun 2022 disusun dengan prioritas sebagai berikut:

1. Diarahkan untuk menjamin pelaksanaan dan pencapaian sasaran SPM urusan wajib pelayanan dasar dan sekaligus mengimplementasikan visi dan misi yang sejalan dengan fokus pada memperbaiki kualitas dan kuantitas pelayanan publik;
2. Memberikan prioritas yang cukup untuk program pembangunan dalam rangka pemulihan ekonomi dan penanganan pandemi covid-19;
3. Menjamin terlaksananya Prioritas Pembangunan Kota Bontang Tahun 2022;
4. Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan dasar pada masyarakat;
5. Belanja Daerah yang dianggarkan juga untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

6. Meningkatkan efesiensi pengeluaran daerah dengan berorientasi pada kinerja dan kepentingan pelayanan publik untuk mengeliminasi sumber ketidakefesiencyan keuangan daerah,
7. Memenuhi alokasi belanja daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mendukung kebijakan pemerintah pusat yakni anggaran Pendidikan 20%, anggaran Kesehatan 10%, anggaran APIP 0,75% dan belanja infrastruktur 25%.

Dalam rangka mendukung kebijakan belanja daerah dan permasalahan pembangunan prioritas yang membutuhkan penanganan, serta perhitungan perkiraan penerimaan pendapatan daerah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka alokasi anggaran belanja daerah tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp.1.274,090,952,000,-. Dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja daerah tahun 2021, jumlah belanja daerah tersebut mengalami penurunan sebesar -3,01%. Dari besaran alokasi belanja daerah tersebut tidak termasuk Belanja yang bersumber dari proyeksi penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK), Bantuan Keuangan Provinsi dan alokasi anggaran BOS dan DID. Ketiga alokasi belanja tersebut pada prinsipnya telah ditentukan peruntukannya. Dengan demikian tidak dapat digunakan untuk alokasi belanja daerah lainnya.

1	2	3	4	5	6	7
1,1	Belanja Operasi	1.073.751.081.610,83	1.056.646.869.126,84	1.135.950.145.791,00	1.098.090.952.000,00	1.118.500.000.000,00
1,1,1	Belanja Pegawai	490.537.293.794,95	501.023.768.383,00	582.342.264.961,00	531.355.434.304,00	542.000.000.000,00
1,1,2	Belanja Barang dan Jasa	558.867.142.672,88	510.489.477.225,84	533.418.586.673,00	531.355.434.304,00	560.000.000.000,00
1,1,3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
1,1,4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
1,1,5	Belanja Hibah	17.999.916.155,00	44.227.697.894,00	20.189.294.157	15.000.000.000,00	16.000.000.000,00
1,1,6	Belanja Bantuan Sosial	619.935.699,00	234.946.274,00	-	250.000.000,00	500.000.000,00
1,2	Belanja Modal	5.726.793.289,00	670.979.350,00	-	250.936.337.366,00	254.447.734.000,00
1,2,1	Belanja Tanah	483.778.011.568,00	336.342.840.626,00	170.833.945.579,00	-	-
1,2,2	Belanja Peralatan dan Mesin	829.268.705,00	-	41.136.861.923,00	-	-
1,2,3	Belanja Bangunan dan Gedung	99.696.797.431,00	-	53.104.046.206,00	-	-
1,2,4	Belanja Jalan	207.795.104.593,00	-	68.230.227.537,00	-	-
1,2,5	Belanja Irigasi dan Jaringan	166.454.620.927,00	-	1.794.029.913,00	-	-
1,2,6	Belanja Aset Tetap Lainnya	997.477.565,00	-	6.568.780.000,00	-	-
1,3	Belanja Tidak Terduga	8.004.742.347,00	-	-	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00
1,4	Belanja Transfer	169.990.650,00	56.080.902.759,00	6.800.656.605,00	-	
1,4,1	Belanja Bagi Hasil	169.990.650,00	56.080.902.759,00	6.800.656.605,00	-	
1,4,2	Belanja Bantuan Keuangan	0	0	0		
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1,1 +1,2+1,3+1,4)		1.557.699.083.828,83	1.449.070.612.511,84	1.313.584.747.975,00	1.355.027.289.366,00	1.378.947.734.000,00

3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah yaitu semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berjalan maupun tahun-tahun anggaran sebelumnya, Pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit anggaran yang terjadi maupun untuk memanfaatkan surplus anggaran,

Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah,

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah,

Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal,

Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir, proyeksi/target tahun rencana serta 1 (satu) tahun setelah tahun rencana dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan dalam bentuk tabel dengan format sebagai berikut:

Tabel 3. 12 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2019-2023

NO	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Proyeksi/Target Tahun 2021	Proyeksi/Target Tahun 2022	Proyeksi/Target Tahun 2023
(1)	(2)		(7)			
3,1	Penerimaan pembiayaan	257.728.040.488,69	181.577.970.753,62	65.000.000.000,00	100.000.000.000,00	115.000.000.000,00
3,1,1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA)	257.728.040.488,69	181.577.970.753,62	65.000.000.000,00	100.000.000.000,00	115.000.000.000,00
3,1,2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
3,1,3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0	0	0	0	0
3,1,4	Penerimaan pinjaman daerah	0	0	0	0	0
3,1,5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	0	0	0	0	0
3,1,6	Penerimaan piutang daerah	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	257.728.040.488,69	181.577.970.753,62	65.000.000.000,00	100.000.000.000,00	115.000.000.000,00
3,2	Pengeluaran pembiayaan	0	0	0	0	0

NO	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Proyeksi/Target Tahun 2021	Proyeksi/Target Tahun 2022	Proyeksi/Target Tahun 2023
(1)	(2)		(7)			
3,2,1	Pembentukan dana cadangan	0	0	0	0	0
3,2,2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	0	0	0	0	25.000.000.000,00
3,2,3	Pembayaran pokok utang	0	0	0	0	0
3,2,4	Pemberian pinjaman daerah	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0	0	0	0	25.000.000.000,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	257.728.040.488,69	181.577.970.753,62	65.000.000.000,00	100.000.000.000,00	90.000.000.000,00

Penerimaan pembiayaan tahun 2022 seluruhnya diperkirakan diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2021 yang diproyeksikan mencapai Rp.100.000.000.000,- atau 7,61% dari total APBD, Adapun perkiraan SiLPA tersebut bersumber dari:

Tabel 3. 13. Proyeksi/Target SiLPA Tahun 2021

No	Sumber-Sumber SiLPA	Jumlah	Persen Terhadap APBD 2020
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	100,000,000,000,0	7,61%
1,1	Pelampauan penerimaan PAD	7.802.666.720,0	4,0%
1,2	Pelampauan penerimaan Transfer Pemerintah Pusat	39.820.091.852,2	5,5%
1,3	Pelampauan penerimaan Transfer Provinsi Kaltim	5.685.399.210,0	3,0%
1,4	Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya	46.691.842.217,8	3,6%

Mengingat belum adanya rencana alokasi untuk Penyertaan Modal Investasi yang telah ditetapkan dengan Perda, maka seluruh penerimaan pembiayaan tersebut merupakan Jumlah Pembiayaan Netto yang digunakan untuk menutup defisit antara pendapatan dan belanja daerah.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Perencanaan pembangunan tahun 2022 dalam periode pembangunan jangka menengah 2021-2026 merupakan tahun pertama pembangunan jangka menengah periode tahun 2021-2026. Sebagai perencanaan pembangunan tahun pertama RPJMD tahun 2021-2026, RKPD Kota Bontang tahun 2022 akan ditetapkan mendahului penetapan Peraturan Daerah RPJMD Kota Bontang periode tahun 2021-2026. Namun demikian sesuai dengan Permendagri Nomor 17 tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 dijelaskan bahwa disamping mengacu pada RPJPD, mengacu juga pada visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam rangka merumuskan prioritas pembangunan daerah tahun 2022, telah dilakukan penyesuaian dengan arah kebijakan dan program prioritas kepala daerah terpilih yang telah dituangkan dalam Rancangan Awal RPJMD tahun 2021-2026.

Dalam perspektif Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bontang periode tahun 2005-2025, tahun 2022 merupakan bagian tahapan lima tahun ke IV (2020-2024). Periode ke-empat tersebut merupakan Tahapan Pemantapan terhadap capaian tahapan pembangunan pada tiga periode sebelumnya. Beberapa tujuan dan sasaran pokok pembangunan yang menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan adalah mencakup:

- b. Pemantapan kualitas SDM ditujukan untuk peningkatan daya saing sumber daya manusia, dengan sasaran;
 - Pemantapan kesadaran kesehatan masyarakat yang tinggi;
 - Peran pemuda dan perempuan semakin mapan dalam pembangunan;
 - Pemantapan daya saing tenaga kerja dengan produktivitas kerja tinggi;
 - Tumbuhnya kewirausahaan mandiri.
- c. Pemantapan Kualitas Tata Pemerintahan
Penyelenggaraan pemerintahan ditujukan untuk memastikan bahwa kualitas pelayanan pemerintahan semakin efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Sasaran utamanya adalah:
 - Pemantapan pelayanan perijinan dan investasi;
 - Pemantapan SDM Aparatur;
 - Pemantapan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan perkembangan
- d. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan prasarana dasar.
Peningkatan kualitas lingkungan hidup bertujuan untuk pemantapan penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan sasaran utamanya adalah sebagai berikut:

- Pemantapan pengolahan sampah berkelanjutan;
 - Pelestarian dan konservasi ekosistem semakin baik dan terintegrasi;
 - Pemanfaatan sumber daya alam yang ramah dan berkelanjutan;
 - Sarana dan prasarana permukiman/hunian yang layak dan asri dan bebas permukiman kumuh.
 - Pengembangan wilayah permukiman sejalan dengan daya dukung ruang dan sesuai dengan tata ruang.
- e. Pembangunan struktur ekonomi maritime dengan tetap menjaga keseimbangan industri migas dan kimia. Adapun sasaran utamanya adalah:
- Mendorong pertumbuhan sektor non migas dan sektor maritim agar semakin mantap dan stabil;
 - Memperkuat keterkaitan antara sektor maritime, migas, non migas dan sektor perdagangan;
 - Stabilisasi dan pemantapan peran koperasi dan usaha kecil dan menengah (UKM);
 - Pemantapan pengembangan pertanian perkotaan, kelembagaan pertanian, jaringan kerja produksi-pemasaran-pengolahan lanjutan terhadap hasil-hasil perkebunan dan pertanian;
 - Stabilisasi sektor perikanan dengan;
 - Pengembangan wisata laut dan pesisir;
 - Pemantapan kualitas infrastruktur dan sarana penunjang perdagangan;
 - Pemantapan investasi di sektor industri non migas.

Memperhatikan garis besar tujuan dan sasaran RPJPD sebagai panduan penyusunan prioritas pembangunan periode RPJMD 2021-2026 dalam rangka mewujudkan **visi “Terwujudnya Kota Bontang yang Lebih Hebat dan Beradab”**, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022 masih memberikan porsi yang memadai untuk dapat menyelesaikan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah dengan arah dan kebijakan pembangunan yang diejawantahkan melalui tiga misi pembangunan daerah sebagai berikut:

- 1) Kota Bontang HARMONI melalui pemantapan dan sinergi dan kolaborasi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan;
- 2) Kota Bontang yang BERKELANJUTAN, layak huni, cerdas dan berwawasan lingkungan melalui pemantapan ekonomi, sosial budaya, dan infrastruktur serta pelestarian lingkungan hidup;
- 3) Kota Bontang yang BERDAYA SAING dan SEJAHTERA melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Berdasarkan ketiga misi pembangunan tersebut dapat dimaknai bahwa prioritas pembangunan periode 2021-2026 menekankan prioritas penanganan aspek pembangunan tatakelola pemerintahan, aspek pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan yang berkelanjutan, aspek pembangunan sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu telah ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan yang harus dicapai sebagaimana tabel 4.1 berikut:

Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Tahun 2022

Misi Pembangunan	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2022	Satuan
1. Kota Bontang yang <i>HARMONI</i> melalui pemantapan sinergi dan kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pembangunan	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang harmoni, bersih, adil, Amanah, dan Bertanggung Jawab	Indeks Kepemimpinan Daerah			75	Nilai
			1. Terciptanya Penyelenggaraan tata pemerintahan yang efektif, efisien, transparan,	Nilai LPPD	Tinggi	Predikat
				Opini BPK	WTP	predikat
				Indeks SPBE	2,8	Nilai
			2. Terwujudnya pelayanan publik yang prima	IKM	BAIK	predikat
			3. Meningkatnya kondusifitas wilayah	Persentase penurunan konflik dan pelanggaran	Menurun	Persen
2. Kota Bontang yang <i>BERKELANJUTAN</i> Yang Layak Huni, Cerdas dan Berwawasan Lingkungan melalui Pemantapan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Infrastruktur serta Pelestarian lingkungan Hidup	1. Terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan	Indeks kota berwawasan lingkungan			75,02	Nilai
			1. Meningkatnya kualitas fisik perkotaan yang layak dan maju	Indeks kualitas perkotaan	81,02	indeks
			2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang lestari	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,01	indeks
	2. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah berbasis potensi dan keragaman sosial budaya masyarakat yang merata dan inklusif	Pertumbuhan Ekonomi Sektor Non Migas	1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi lokal	Pertumbuhan Ekonomi sektor industri pengolahan non migas	3,802	Persen
				Pertumbuhan ekonomi perdagangan dan jasa	5,13	Persen
				Indeks Gini	0,375	Indeks
			2. Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata dan kebudayaan	Jumlah kunjungan wisatawan	19.7555	Orang
			3. Meningkatnya daya saing investasi daerah	Pertumbuhan nilai insvestasi	-1,2	Persen
			4. Menguatnya peran perempuan dan pemuda dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	86,9	Indeks
				Tingkat partisipasi pemuda dalam pembangunan	7,34	Persen
3. Kota Bontang yang <i>BERDAYA SAING</i> dan <i>SEJAHTERA</i> melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	1. Meningkatnya sumberdaya manusia yang berkualitas, unggul mandiri,dan berakhlak	Indek Pembangunan Manusia (IPM)	1. Meningkatnya kualitas fisik perkotaan yang layak dan maju	Angka harapan lama sekolah	13,3	Angka
				Rata-rata lama sekolah	10,91	Angka
			2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia harapan	74,44	Angka
				Persentase balita stunting	18,4	Persen
	2. Meningkatnya taraf hidup masyarakat	Angka Kemiskinan	Meningkatnya tenaga kerja berkualitas, unggul dan berdaya saing	Tingkat Pengangguran	9	Persen
				Persentase PMKS	Menurun	

Tabel 4. 2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

RPJMD 2021-2026		
Ara	Strate	Arah
Ing HARMONI melalui pemantapan dan sinergi dan kolaborasi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan		
dnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang harmoni, bersih, adil, Amanah, dan Bertanggung Jawab		
Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan	1. Peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintahan	1.1 Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian
		1.2 Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang
		1.3 Optimalisasi potensi pendapatan daerah
		1.4 Meningkatkan profesionalitas dan kinerja ASN
		1.5 Optimalisasi Pengawasan dan Pengendalian Pem
		1.6 Meningkatkan implementasi smart government
	2. Penguatan sinergitas dan harmoni dalam pembangunan	2.1 Mengembangkan program-program pembangunan antar stakeholder
		2.2 Meningkatkan partisipasipasi masyarakat dalam
Pelayanan publik	Pengembangan inovasi layanan publik.	1.1 Mengembangkan layanan publik yang cerdas.
Efektivitas dan kondusifitas	Pemantapan keamanan dan ketertiban masyarakat dan pencegahan konflik sosial	1.1 Mendorong peran aktif masyarakat dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban
		1.2 Meningkatkan kerukunan, Persatuan dan kerjasama masyarakat
Ing BERKELANJUTAN, layak huni, cerdas dan berwawasan lingkungan melalui pemantapan ekonomi, sosial budaya, dan infrastruktur		
dnya pembangunan yang berwawasan lingkungan		
Kualitas fisik lingkungan yang layak dan maju	1. Optimalisasi penanggulangan banjir dan bencana lainnya	1.1 Menyinerigikan dan mengoordinasikan program penanganan banjir serta bencana lainnya)
		1.2 Mengintegrasikan penanganan drainase perkotaan, jalan dan drainase lingkungan
		1.3 Mengoptimalkan penataan sungai dan bantaran sungai
		1.4 Membangun dan mengembangkan infrastruktur penanganan banjir
	2. Peningkatan akses hunian perkotaan yang layak dan terjangkau.	2.1 Mengoptimalkan penataan kawasan permukiman
		2.2 Menyediakan perumahan beserta PSU yang terjangkau
	3. Pemenuhan standar pelayanan perkotaan	3.1 Meningkatkan akses air minum yang layak dan terjangkau
		3.2 Meningkatkan akses air limbah domestik yang terjangkau
		3.3 Meningkatkan akses pengelolaan persampahan
		3.4 Meningkatkan penataan infrastruktur transportasi
Kualitas lingkungan hidup yang lestari	1. Peningkatan kualitas air dan udara	3.5 Meningkatkan keandalan sarana dan prasarana transportasi
		3.6 Meningkatkan pelayanan fasilitas umum perkotaan
		1.1 Mengoptimalkan pengendalian dan pengawasan kualitas lingkungan
		1.2 Meningkatkan kesadaran masyarakat/ dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup

RKPD KOTA BONTANG TAHUN 2022

RPJMD 2021-2026		
Ara	Strate	Arah
	2. Penurunan perubahan tutupan lahan dari hutan sekunder dan hutan mangrove menjadi lahan terbangun	2.1 Meningkatkan kinerja perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas 2.2 Meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau
Meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah berbasis potensi dan keragaman sosial budaya masyarakat yang merata dan inklusif		
pertumbuhan	1. Pengembangan potensi sektor-sektor ekonomi produktif masyarakat	1.1 Meningkatkan produk-produk unggulan dan ketahanan pangan daerah.
		1.2 Memperkuat kerjasama antara BUMD dengan dunia usaha
		1.3 Mengembangkan sektor-sektor ekonomi kreatif dan digitalisasi ekonomi
	2. Peningkatan sektor perdagangan dan industri	2.1 Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan 2.2 Peningkatan dan pemulihan Produktivitas IKM, MSME dan UMKM
pemanfaatan wisata dan	1. Pengembangan potensi ekonomi sektor pariwisata	1.1 Peningkatan destinasi dan promosi wisata 1.2 Pembangunan jejaring pariwisata daerah
		2.1 Peningkatan pembinaan kebudayaan dan kesenian daerah
	2. Pengembangan potensi keragaman budaya masyarakat.	2.2 Pelestarian dan Peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan daerah
		2.3 Peningkatan pembinaan kesenian daerah
a investasi	Pemantapan iklim investasi yang kondusif	1.1 Penyediaan regulasi dan kebijakan yang pro investasi
peran pemuda dalam	1. Peningkatan peran kepemudaan	1.1 Meningkatkan pembinaan kepemudaan pada kegiatan keagamaan, ekonomi, keolahragaan, kesenian dan kebudayaan
	2. Peningkatan pemberdayaan masyarakat yang responsif gender	2.1 Mengoptimalkan program pemberdayaan respon
yang yang BERDAYA SAING dan SEJAHTERA melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia		
katnya sumberdaya manusia yang berkualitas, unggul mandiri, dan berakhlak mulia		
a akses layanan kesehatan dan kesehatan itas	1. Peningkatan Mutu Pendidikan	1.1 Peningkatan Kuantitas dan kualitas pendidikan dan kependidikan 1.2 Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan
		2.1 Memfasilitasi pembinaan kehidupan beragama dan sarana dan prasarana peribadatan
	2. Pemantapan kehidupan masyarakat yang harmoni dan berakhlak mulia	3.1 Memperluas akses layanan perpustakaan dan literasi
	3. Peningkatan dan pengembangan budaya literasi	4.1 Meningkatkan sistem pelayanan kesehatan melalui jaminan layanan universal health coverage pengendalian kesehatan masyarakat, pengendalian penyakit dan kedaruratan kesehatan masyarakat
		4.2 Meningkatkan kualitas SDM kesehatan

RPJMD 2021-2026		
Ara	Strate	Arah
		4.3 Meningkatkan akses layanan keluarga berencana
	5. Penguatan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat	5.1 Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan pola makan
		5.2 Mengoptimalkan gerakan masyarakat hidup sehat
katnya taraf hidup masyarakat		
tenaga kerja unggul dan berdaya	1. Pembinaan dan Pengembangan tenaga kerja terampil dan ~~berdaya saing~~	1.1 Meningkatkan jaringan dan layanan ketenagakerjaan
	2. Optimalisasi dan Perluasan pemenuhan kesempatan kerja	2.1 Meningkatkan pelatihan tenaga kerja sesuai dengan pasar kerja
efektifitas dan kemiskinan	1. Peningkatan program pemberdayaan masyarakat bagi penduduk miskin	1.1 Mengembangkan Kelompok Usaha Masyarakat bagi penduduk miskin
	2. Peningkatan layanan dan perlindungan sosial bagi PMKS dan penduduk miskin	2.1 Memberikan layanan bantuan sosial bagi PMKS dan penduduk miskin
		2.2 Meningkatkan akurasi pendataan penduduk miskin sebagai dasar penyusunan rencana strategis penanggulangan kemiskinan

4.2 Prioritas Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah adalah bagian integral dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional. Oleh karena itu penyusunan prioritas pembangunan daerah harus mampu menjamin dan mendukung kebijakan pembangunan nasional. Sejalan dengan pemahaman tersebut, prioritas pembangunan Kota Bontang tahun 2022 disamping mengacu pada pencapaian sasaran pembangunan RPJPD dan arahan visi dan misi pembangunan tahun 2021-2026, secara vertikal juga harus mejadi bagian dan mendukung pencapaian prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dan Prioritas Pembangunan Nasional. Prioritas pembangunan daerah tahun 2022 dirumuskan sebagai berikut:

- 1. Pemulihan ekonomi dan pelayanan dasar masyarakat
- 2. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kota dan layanan publik
- 3. Peningkatan daya dukung lingkungan, sumber daya air dan pengendalian banjir
- 4. Peningkatan SDM unggul dan akses layanan Kesehatan berkualitas
- 5. Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan kesejahteraan sosial masyarakat
- 6. Penguatan peran sektor-sektor ekonomi unggulan daerah
- 7. Peningkatan tata Kelola pemerintahan yang akuntabel, harmoni dan partisipatif

Penetapan prioritas pembangunan daerah tahun 2022 memperhatikan arah kebijakan pembangunan baik nasional maupun pemerintah provinsi. Dalam RKP tahun 2022 menetapkan tema pembangunan **“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Reformasi Struktural”**. Keselarasan arah kebijakan pembangunan tahun 2022 antara prioritas pembangunan Kota Bontang dengan prioritas pembangunan RKP dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Keselarasan Arah Kebijakan Pembangunan RKPD Kota Bontang dengan RKP Tahun 2022

RKP Tahun 2022	RKPD Kota Bontang Tahun 2022
Tema	
“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”	”Revitaisasi sektor-sektor ekonomi dan Pelayanan Dasar”
Prioritas Nasional /Prioritas Pembangunan	
1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Penguatan peran sektor-sektor ekonomi unggulan daerah
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Pemulihan ekonomi dan pelayanan dasar masyarakat Jumlah kunjungan wisata
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan SDM unggul dan akses layanan Kesehatan berkualitas Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan kesejahteraan sosial masyarakat

RKP Tahun 2022	RKPD Kota Bontang Tahun 2022
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Peningkatan tata Kelola pemerintahan yang akuntabel, harmoni dan partisipatif
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kota dan layanan publik
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	Peningkatan daya dukung lingkungan, sumber daya air dan pengendalian banjir
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayan publik	Peningkatan tata Kelola pemerintahan yang akuntabel, harmoni dan partisipatif

Selanjutnya dalam lingkup regional Kalimantan Timur, perencanaan pembangunan tahun 2022 mengusung tema “Reformasi Struktural dan Penguatan Daya Saing Daerah Dalam Rangka Menyambut IKN”. Tema pembangunan tersebut dijabarkan ke dalam enam prioritas pembangunan daerah:

1. Peningkatan Ketahanan Kesehatan Masyarakat Serta Reformasi Sistem Pendidikan Keterampilan Yang Mendukung Daya Saing SDM
2. Penguatan Pelaku Dan Lembaga Ekonomi Kerakyatan Dalam Rangka Peningkatan Daya Beli Masyarakat
3. Peningkatan Kemudahan Bernvestasi Di Sektor Pengelolaan Sumber Daya Alam Terbaru Dalam Rangka Penguatan Ekspor Komoditi Unggulan
4. Penguatan Konektifitas Antara Daerah, Kawasan Dan IKN
5. Percepatan Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik Dan
6. Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Menelaah arah kebijakan pembangunan Provinsi Kaltim, Kota Bontang sebagai bagian integral dari wilayah regional Kaltim harus mampu menyusun arah kebijakan pembangunan yang dapat menjamin terwujudnya sinergitas antara sasaran pembangunan kedua entitas wilayah dan pemerintahan tersebut. Untuk itu dalam rangka penyusunan rencana pembangunan tahun 2022, upaya untuk meningkatkan keselarasan dilaksanakan dengan merumuskan prioritas pembangunan dengan memperhatikan arahan kebijakan pembangunan provinsi Kaltim Tahun 2022.

Tabel 4. 4 Keselarasan Arah Kebijakan Pembangunan RKPD Bontang dengan RKPD Provinsi Kaltim Tahun 2022

RKPD Provinsi Tahun 2021	RKPD Kota Bontang Tahun 2021
	Tema
“Menumbuhkan Industri Hilir yang Mendukung Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kawasan”	”Revitaisasi sektor-sektor ekonomi dan Pelayanan Dasar”
Prioritas Pembangunan	
1. Peningkatan Ketahanan Kesehatan Masyarakat Serta Reformasi Sistem Pendidikan Keterampilan Yang Mendukung Daya Saing SDM	1. Peningkatan SDM unggul dan akses layanan Kesehatan berkualitas.
2. Penguatan Pelaku dan Lembaga Ekonomi Kerakyatan Dalam Rangka Peningkatan Daya Beli Masyarakat	2. Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan kesejahteraan sosial masyarakat
3. Peningkatan Kemudahan Bernvestasi Di Sektor Pengelolaan Sumber Daya Alam Terbarukan Dalam Rangka Penguatan Ekspor Komoditi Unggulan	3. Pemulihan ekonomi dan pelayanan dasar masyarakat
4. Penguatan Konektifitas Antara Daerah, Kawasan Dan IKN	4. Penguatan peran sektor-sektor ekonomi unggulan daerah
5. Percepatan Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik	5. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kota dan layanan publik
6. Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	6. Peningkatan daya dukung lingkungan, sumber daya air dan pengendalian banjir
	7. Peningkatan tata Kelola pemerintahan yang akuntabel, harmoni dan partisipatif

Perumusan prioritas pembangunan juga memperhatikan dan melalui proses penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Rancangan Awal RKPD mencakup penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten/Kota. Berdasarkan ketentuan tersebut, penetapan prioritas pembangunan tahun 2022 juga merupakan hasil dari proses penelaahan terhadap pokok-pokok pikiran DPRD Kota Bontang.

Penetapan prioritas pembangunan ini akan menjadi arus utama dalam menentukan program-program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2022. Implementasi program-program pembangunan yang secara operasional akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan pembangunan oleh Perangkat Daerah menjadi ujung tombak dalam menentukan tercapainya sasaran pembangunan Kota Bontang. Dengan keselarasan antara prioritas pembangunan Kota Bontang dengan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional, maka tercapainya

sasaran-sasaran pembangunan Kota Bontang akan mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Sejalan dengan penetapan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2022, selanjutnya ditetapkan program-program prioritas yang akan diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan pembangunan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD. Implementasi dari program-program prioritas ini diharapkan dapat mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan sesuai indikator kinerja yang ditetapkan untuk dicapai pada tahun 2022. Relevansi antara pencapaian sasaran, prioritas pembangunan dan program prioritas tahun 2022 disajikan dalam matrik berikut:

Tabel 4. 5 Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Kota Bontang Tahun 2022

No	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Capaian Tahun 2022	Perangkat daerah penanggung jawab
1	Peningkatan SDM unggul dan akses layanan Kesehatan berkualitas	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar Formal dan Non Formal		DISDIKBUD
			SD (Paket setara SD)	103,45	DISDIKBUD
			SMP (Paket setara SMP)	102,66	DISDIKBUD
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4		DISDIKBUD
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal	100%	DISDIKBUD
		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Pendidikan dasar, PAUD dan non formal yang memiliki ijin	100%	DISDIKBUD
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka kematian ibu	100/100ribu kelahiran hidup	DINKES
			cakupan kepesertaan JKN	100%	DINKES
			Ketersediaan obat esensial (%)	100%	DINKES
			Tercapainya Standard Pelayanan Minimal (SPM)di RSUD	114 (75%)	RSUD
			Tercapainya Akreditasi Paripurna untuk RS (mempertahankan status akreditasi paripurna)	16 BAB	RSUD
			Angka kematian bayi	12	
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER	Persentase tenaga Kesehatan berizin	100%	DINKES

No	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Capaian Tahun 2022	Perangkat daerah penanggung jawab
		DAYA MANUSIA KESEHATAN			
2	Peningkatan daya dukung lingkungan, sumber daya air dan pengendalian banjir	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana Produksi Obat, Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Berizin	100%	DINKES
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	persentase Penerapan 5 kluster kebijakan GERMAS di Kelurahan (Peningkatan Aktivitas Fisik, Peningkatan PHBS, Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi, Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit, Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup)	35%	DINKES & RSUD
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah pemustaka perpustakaan daerah	35.000 Org dan 27 perpustakaan	DPK
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase kapasitas unit embung/ penampung air/sumur air tanah/air baku	87%	DPUPR
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk berakses air minum layak	75,15%	DPUPR
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase kapasitas TPA/TPST/SPA/ TPS-3R/TPS	51%	DPUPR
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	95,50	DPUPR
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik	92,02%	DPUPR
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup	75%	DLH
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kesesuaian tata ruang	75%	DPUPR
		PROGRAM PENGENDALIAN	Cakupan pengendalian	93%	DLH

No	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Capaian Tahun 2022	Perangkat daerah penanggung jawab
		PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup		
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Cakupan pengelolaan Kehati	7%	DLH
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pengendalian bahan berbahaya & beracun dan limbah bahan berbahaya & beracun	100%	DLH
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Tingkat ketaatan usaha/ kegiatan terhadap izin lingkungan atau PPLH	4%	DLH
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan kapasitas diklat dan penyuluhan	20%	DLH
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase masyarakat/ lembaga masyarakat/ dunia usaha/ dunia pendidikan/ filantropi yg memiliki kinerja baik dlm PPLH	20%	DLH
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan penanganan kasus lingkungan hidup	20%	DLH
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah	99%	DLH
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung yg memenuhi persyaratan teknis	8,38%	DPUPR
3	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kota dan layanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan dalam kondisi baik	90%	DPUPR
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat	77%	DPUPR
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi	0%	DPKPP

No	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Capaian Tahun 2022	Perangkat daerah penanggung jawab
			korban bencana kabupaten/kota		
			Persentase fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah	0%	DPKPP
			Persentase ketersediaan rumah	30,55%	DPKPP
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yg ditangani	0%	DPKPP
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase rumah tidak layak huni di luar kawasan kumuh	0,12%	DPKPP
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase PSU jalan lingkungan dalam kondisi baik	91,65%	DPKPP
			Persentase PSU drainase lingkungan dalam kondisi baik	91,84%	DPKPP
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Pengaduan Sengketa tanah yang ditangani	100%	DPKPP
		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang diselesaikan	25%	DPKPP
		PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase Tanah Negara yang dimanfaatkan sesuai izin	20%	DPKPP
		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase kenaikan rata-rata NJOP Tanah		DPKPP
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan lalu lintas & angkutan jalan	100%	DISHUB
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	80%	DPKP

No	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Capaian Tahun 2022	Perangkat daerah penanggung jawab
4	Penguatan peran sektor-sektor ekonomi unggulan daerah	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Pertumbuhan KSP/USP yang mempunyai izin usaha simpan pinjam	19,74%	DKUKMP
5	Pemulihan ekonomi dan pelayanan dasar masyarakat	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase kopraasi yang patuh terhadap regulasi perkoperasian	8,97%	DKUKMP
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Percentase jumlah KSP/USP yang dinilai kesehatannya	7,50%	DKUKMP
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	persentase kapasitas kelembagaan koperasi	19,23%	DKUKMP
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Peningkatan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	0,34%	DKUKMP
			Pertumbuhan Pelaku Usaha Mikro yang bermitra dg pasar rental modern	1,38%	DKUKMP
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha Mikro	10%	DKUKMP
			Pertumbuhan Pelaku Usaha Mikro yang mengikuti Pelatihan	2%	DKUKMP
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Nilai Realisasi Investasi	4.150.000	DPMPPTSP
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Peningkatan Jumlah Investor	2	DPMPPTSP
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai IKM	87.50	DPMPPTSP
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Prosentase Ketaatan Perusahaan Terhadap Aturan Penanaman Modal	37,50	DPMPPTSP
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase ketersediaan data perizinan	100	DPMPPTSP
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Presentase objek daya tarik wisata yang representatif	60%	DISPOPAR
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah kunjungan wisata	197,555	DISPOPAR
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN	persentase pengembangan dan perlindungan pelaku ekonomi kreatif	30%	DISPOPAR

No	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Capaian Tahun 2022	Perangkat daerah penanggung jawab
		PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Presentase Sumber daya pariwisata yang di kembangkan	40%	DISPOPAR
			Presentase Sumber daya Ekraf yang di kembangkan		DISPOPAR
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budidaya	100%	DKP3
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan pangan utama	87	DKP3
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase ketersediaan energi dan protein perkapita	100%	DKP3
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan segar asal tumbuhan	100%	DKP3
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Presentase implementasi kebijakan bidang perekonomian	100%	SETDA
6	Peningkatan tata Kelola pemerintahan yang akuntabel, harmoni dan partisipatif	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase implementasi kebijakan reformasi birokrasi	100%	SETDA
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase cakupan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berbasis risiko	70%	INSPEKTORAT
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1. Tingkat Pemenuhan Kebijakan Pengawasan	100%	INSPEKTORAT
			2. Perangkat daerah dengan kinerja RB baik	65 PD	INSPEKTORAT
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	SATPOL PP
			Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	75%	SATPOL PP
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI	Prosentase masyarakat yang mengikuti penguatan	36,1	KESBANGPOL

No	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Capaian Tahun 2022	Perangkat daerah penanggung jawab
		PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	ideologi pancasila dan karakter kebangsaan		
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase peran partai politik dan lembaga pendidikan dalam pendidikan politik	61	KESBANGPOL
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	50	KESBANGPOL
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Peningkatan pembinaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	73	KESBANGPOL
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penanganan Konflik	100	KESBANGPOL
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan sesuai SOP	95%	KECAMATAN SELATAN
			Cakupan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	95%	KECAMATAN SELATAN
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat.	100	KECAMATAN SELATAN
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penanganan gangguan Trantibum	100	KECAMATAN SELATAN
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum	100%	KECAMATAN SELATAN
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan sesuai SOP	95%	KECAMATAN BONTANG UTARA
			Cakupan tugas penyelenggaraan	95%	KECAMATAN BONTANG UTARA

No	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Capaian Tahun 2022	Perangkat daerah penanggung jawab
			pemerintahan yang dilaksanakan		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat.	100	KECAMATAN BONTANG UTARA
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penanganan gangguan Trantibum	100	KECAMATAN BONTANG UTARA
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum	100	KECAMATAN BONTANG UTARA
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan sesuai SOP	100	KECAMATAN BONTANG BARAT
			Cakupan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan		KECAMATAN BONTANG BARAT
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat.	100	KECAMATAN BONTANG BARAT
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penanganan gangguan Trantibum	100	KECAMATAN BONTANG BARAT
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum	100	KECAMATAN BONTANG BARAT
7	Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan kesejahteraan sosial masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase LKK dan LAK yang aktif	100%	DSPM
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam/sosial yang terlayani	100%	DSPM
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Presentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	100%	DSPM
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan rehabilitasi sosial	100%	DSPM
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100%	DSPM

No	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Capaian Tahun 2022	Perangkat daerah penanggung jawab
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase capaian verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha	7,09	DISNAKER
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Cakupan pencari kerja terlatih		DISNAKER
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja lokal yang ditempatkan	19,4	DISNAKER
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase implementasi kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100%	SETDA
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	47,78%	DPPKB
			Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD	0,37%	DPPKB

BAB V.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

Sebagaimana telah dijabarkan pada Bab IV, prioritas pembangunan Kota Bontang tahun 2022 secara operasional akan dijabarkan melalui program dan kegiatan yang merupakan muatan utama pada Bab ini. Mengingat bahwa kebutuhan belanja pembangunan selalu melampaui kemampuan pendanaan yang tercermin dari perkiraan pendapatan daerah, maka program dan kegiatan yang dijabarkan di dalam Bab V ini merupakan hasil seleksi dan prioritas pembangunan berdasarkan Rencana Strategis Perangkat Daerah, aspirasi masyarakat yang dihimpun dalam pelaksanaan Musrenbang, kondisi sosial politik dan ekonomi, memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan hingga tahun 2020 dan penelaahan terhadap pokok-pokok pikiran DPRD Kota Bontang.

Dalam rangka membangun keselarasan dengan kebijakan pembangunan nasional dan mendukung pencapaian kebijakan pembangunan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022, penyusunan RKPD telah melalui proses penyelarasan dan memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana dijabarkan dalam Rancangan RKP tahun 2022. Demikian pula halnya dengan arah kebijakan pembangunan provinsi Kaltim Tahun 2022.

Untuk mendukung pencapaian target-target pembangunan Nasional, Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kota Bontang tahun 2022, melalui rancangan program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) diusulkan anggaran sebesar Rp.1.355.027.289.366,00, tidak termasuk alokasi program dan kegiatan sumber Dana Alokasi Khusus, Bantuan Keuangan Provinsi, dan Dana BOS. Ketiga alokasi belanja tersebut pada prinsipnya telah ditentukan peruntukannya. Dengan demikian tidak dapat digunakan untuk alokasi belanja daerah lainnya

Adapun rincian anggaran terhadap program dan kegiatan yang diprioritaskan pada masing-masing Perangkat Daerah yang disertai perkiraan maju dapat disampaikan sebagai berikut:

Tabel 5. 1REKAPITULASI PAGU INDIKATIF PERANGKAT DAERAH RKPD
TAHUN 2022 KOTA BONTANG

No	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	210.013.442.934,00
2	Dinas Kesehatan	132.159.531.232,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada	136.500.000.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	171.627.250.000,00
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	51.157.400.000,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	13.730.000.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.000.000.000,00
8	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	18.000.000.000,00
9	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	15.700.000.000,00
10	Dinas Ketenagakerjaan	8.850.000.000,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	9.000.000.000,00
12	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	26.196.779.000,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	41.605.150.000,00
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.000.000.000,00
15	Dinas Perhubungan	18.030.000.000,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	21.965.000.000,00
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	28.611.995.000,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	11.400.000.000,00
19	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata	23.397.215.200,00
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	9.700.000.000,00
21	Sekretariat Daerah	109.053.000.000,00
22	Sekretariat DPRD	68.680.171.000,00
23	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	15.000.000.000,00
24	Badan Pendapatan Daerah	17.000.000.000,00
25	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	23.500.000.000,00
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	16.700.000.000,00
27	Inspektorat Daerah	10.000.000.000,00
28	Kecamatan Bontang Utara	45.533.380.000,00

Tabel 5. 1REKAPITULASI PAGU INDIKATIF PERANGKAT DAERAH RKPD
TAHUN 2022 KOTA BONTANG

No	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif
29	Kecamatan Bontang Selatan	45.604.985.000,00
30	Kecamatan Bontang Barat	29.531.990.000,00
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11.780.000.000,00
Total		1.355.027.289.366,00

RENCANA PROGRAM, DAN SUB KEGIATAN BELANJA LANGSUNG PERANGKAT DAERAH PADA RKPD KOTA BONTANG TAHUN 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				194,694,878,997	199,095,224,783	
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah		170,729,667,717	166,404,224,783	
1	1	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				155,334,667,717	150,351,224,783	
1	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Anggaran 8M	1 Paket	155,334,667,717	150,351,224,783	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				300,000,000	350,000,000	
1	1	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	350 orang	300,000,000	350,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				1,850,000,000	1,915,000,000	
1	1	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			150,000,000	155,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bahan logistik yang di adakan	1 tahun	200,000,000	210,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rapat-rapat dalam dan luar daerah	1 tahun	1,500,000,000	1,550,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0	0	
1	1	1	02.07	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12,375,000,000	12,896,000,000	
1	1	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Materai yang tersedia	1500 lembar	15,000,000	16,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			280,000,000	290,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			80,000,000	90,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12,000,000,000	12,500,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				870,000,000	892,000,000	
1	1	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah kendaraan dinas /operasional	38 unit	20,000,000	22,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	1	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			850,000,000	870,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar Formal dan Non Formal SD & SMP	100%	23,460,211,280	32,121,000,000	
1	1	2	02.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				9,177,712,259	14,000,000,000	
1	1	2	02.01	2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ruang kelas yang di bangun	1 sekolah	0	4,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	02.01	6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana yang di bangun	1 sekolah	1,175,000,000	250,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	02.01	8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ruang yang di rehabilitasi	2 sekolah	800,000,000	1,250,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	02.01	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			980,000,000	650,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	02.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah mebel yang di adakan	4 sekolah	500,000,000	550,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	02.01	17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1,900,000,000	1,950,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	02.01	18	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			200,000,000	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	02.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah siswa yang menerima biaya personil	1 tahun	377,712,259	1,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	02.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pelaksanaan perlombaan pendidikan dasar	4 lomba	145,000,000	550,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	02.01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			3,000,000,000	3,500,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	02.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sekolah yang memenuhi standar, jumlah lembaga yang berkerjasama di bidang pendidikan	5 sekolah	100,000,000	300,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	02.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				10,382,499,021	10,861,000,000	
1	1	2	02.02	2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Ruang kelas	1 sekolah	1,000,000,000	2,100,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	02.02	4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	02.02	10	Pembangunan Fasilitas Parkir				0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	02.02	11	Pembangunan Kantin Sekolah				0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	1	2	02.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			460,000,000	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	02.02	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah gedung yang di rehab.	2 sekolah	309,436,063	400,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	02.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			200,000,000	250,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	02.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana yang rehabilitasi	3 sekolah	700,000,000	650,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	02.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah mebel yang tersedia	3 sekolah	200,000,000	250,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	02.02	28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah siswa yang mendapatkan perlengkapan	1 tahun	1,500,000,000	1,550,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	02.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah peserta didik yang menerima peleyanan.	1 tahun	513,062,958	6,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	02.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pelaksanaan kegiatan lomba	4 lomba	250,000,000	255,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	02.02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima insentif	1 tahun	5,000,000,000	5,100,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	02.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan	1 tahun	250,000,000	300,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	02.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				3,650,000,000	7,110,000,000	
1	1	2	02.03	3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ruangan yang direhab	1 tahun	150,000,000	650,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	02.03	4	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ruang yang di rehabilitasi	1 sekolah	0	610,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	02.03	9	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah siswa yang mendapatkan pelengkapan	1 tahun	1,500,000,000	1,550,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	02.03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			2,000,000,000	4,300,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	02.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				250,000,000	150,000,000	
1	1	2	02.04	2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pemb.sarana dan prasana yg terbangun	1 sekolah	250,000,000	150,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	4			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4	54,70%	300,000,000	320,000,000	
1	1	4	02.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan				300,000,000	320,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						
1	1	4	02.01	1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			150,000,000	160,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	4	02.01	2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			150,000,000	160,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	5			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN		Persentase Pendidikan dasar, PAUD dan non formal yang memiliki ijin	100%	205,000,000	250,000,000	
1	1	5	02.02		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				205,000,000	250,000,000	
1	1	5	02.02	1	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah lembaga Paud yang mendapat izin	1 tahun	205,000,000	250,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				5,965,000,000	8,150,000,000	
2	22	2			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		Persentase pelestarian budaya	100%	5,665,000,000	7,450,000,000	
2	22	2	02.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				185,000,000	1,150,000,000	
2	22	2	02.01	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Objek budaya yang di kembangkan	3 objek budaya	185,000,000	1,150,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	2	02.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				480,000,000	300,000,000	
2	22	2	02.02	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	alat musik tradisional budaya kediri Jumlah Objek budaya yang di kembangkan	1 Paket 3 lembaga	480,000,000	300,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	2	02.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota				5,000,000,000	6,000,000,000	
2	22	2	02.03	3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sarana adat yang di bangun	1 lembaga adat	5,000,000,000	6,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		Persentase peningkatan penyelenggaraan kegiatan kesenian	100%	300,000,000	700,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	22	3	02.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				300,000,000	700,000,000	
2	22	3	02.01	3	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			300,000,000	700,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				280,992,767	285,992,767	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar Formal dan Non Formal SD & SMP	100%	280,992,767	285,992,767	
1	1	2	02.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				280,992,767	285,992,767	
1	1	2	02.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kelurahan	jumlah peserta didik yang menerima pelayanan	1 tahun	280,992,767	285,992,767	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	02.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah yang mendapatkan pelayanan	1 tahun	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				246,974,110	250,000,000	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar Formal dan Non Formal SD & SMP	100%	246,974,110	250,000,000	
1	1	2	02.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				246,974,110	250,000,000	
1	1	2	02.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kelurahan	Jumlah peserta didik yang menerima pelayanan	1 tahun	246,974,110	250,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	02.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah peserta didik yang menerima pelayanan	1 tahun	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				324,959,980	350,000,000	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar Formal dan Non Formal SD & SMP	100%	324,959,980	350,000,000	
1	1	2	02.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				324,959,980	350,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	1	2	02.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kelurahan	Jumlah peserta didik yang menerima pelayanan	1 tahun	324,959,980	350,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	02.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah peserta didik yang menerima pelayanan	1 tahun	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				271,594,903	280,000,000	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar Formal dan Non Formal SD & SMP	100%	271,594,903	280,000,000	
1	1	2	02.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				271,594,903	280,000,000	
1	1	2	02.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kelurahan	Jumlah peserta didik yang menerima pelayanan	1 tahun	271,594,903	280,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	02.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah peserta didik yang menerima pelayanan	1 tahun	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				300,399,819	320,000,000	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar Formal dan Non Formal SD & SMP	100%	300,399,819	320,000,000	
1	1	2	02.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				300,399,819	320,000,000	
1	1	2	02.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kelurahan	jumlah peserta didik yang menerima pelayanan	1 tahun	300,399,819	320,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	02.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah peserta didik yang menerima pelayanan	1 tahun	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				183,975,000	185,000,000	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar Formal dan Non Formal SD & SMP	100%	183,975,000	185,000,000	
1	1	2	02.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				183,975,000	185,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	1	2	02.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kelurahan	Jumlah peserta didik yang menerima pelayanan	1 tahun	183,975,000	185,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	02.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kelurahan	Jumlah peserta didik yang menerima pelayanan	1 tahun	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				281,045,432	285,000,000	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar Formal dan Non Formal SD & SMP	100%	281,045,432	285,000,000	
1	1	2	02.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				281,045,432	285,000,000	
1	1	2	02.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kelurahan	Jumlah peserta didik yang menerima pelayanan	1 tahun	281,045,432	285,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	02.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kelurahan	Jumlah peserta didik yang menerima pelayanan	1 tahun	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				290,798,736	295,798,736	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar Formal dan Non Formal SD & SMP	100%	290,798,736	295,798,736	
1	1	2	02.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				290,798,736	295,798,736	
1	1	2	02.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kelurahan	Jumlah peserta didik yang menerima pelayanan	1 tahun	290,798,736	295,798,736	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	02.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kelurahan	Jumlah peserta didik yang menerima pelayanan	1 tahun	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				210,799,315	215,799,315	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar Formal dan Non Formal SD & SMP	100%	210,799,315	215,799,315	
1	1	2	02.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				210,799,315	215,799,315	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	1	2	02.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kelurahan	Jumlah peserta didik yang menerima pelayanan	1 tahun	210,799,315	215,799,315	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	02.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kelurahan	Jumlah peserta didik yang menerima pelayanan	1 tahun	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				216,975,268	220,975,268	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar Formal dan Non Formal SD & SMP	100%	216,975,268	220,975,268	
1	1	2	02.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				216,975,268	220,975,268	
1	1	2	02.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			216,975,268	220,975,268	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	02.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kelurahan	Jumlah peserta didik yang menerima pelayanan	1 tahun	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				133,979,528	133,979,528	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar Formal dan Non Formal SD & SMP	100%	133,979,528	133,979,528	
1	1	2	02.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				133,979,528	133,979,528	
1	1	2	02.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kelurahan	Jumlah peserta didik yang menerima pelayanan	1 tahun	133,979,528	133,979,528	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	02.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kelurahan	Jumlah peserta didik yang menerima pelayanan	1 tahun	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				253,489,734	260,489,734	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar Formal dan Non Formal SD & SMP	100%	253,489,734	260,489,734	
1	1	2	02.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				253,489,734	260,489,734	
1	1	2	02.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah peserta didik yang menerima pelayanan	1 tahun	253,489,734	260,489,734	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	1	2	02.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah peserta didik yang menerima pelayanan	1 tahun	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				304,969,810	310,969,810	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar Formal dan Non Formal SD & SMP	100%	304,969,810	310,969,810	
1	1	2	02.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				304,969,810	310,969,810	
1	1	2	02.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah peserta didik yang menerima pelayanan	1 tahun	304,969,810	310,969,810	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	02.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah peserta didik yang menerima pelayanan	1 tahun	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				230,459,712	235,000,000	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar Formal dan Non Formal SD & SMP	100%	230,459,712	235,000,000	
1	1	2	02.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				230,459,712	235,000,000	
1	1	2	02.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah peserta didik yang menerima pelayanan	1 tahun	230,459,712	235,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	02.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				210,585,931	220,000,000	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar Formal dan Non Formal SD & SMP	100%	210,585,931	220,000,000	
1	1	2	02.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				210,585,931	220,000,000	
1	1	2	02.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah peserta didik yang menerima pelayanan	1 tahun	210,585,931	220,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	02.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah peserta didik yang menerima pelayanan	1 tahun	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				194,741,459	196,000,000	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar Formal dan Non Formal SD & SMP	100%	194,741,459	196,000,000	
1	1	2	02.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				194,741,459	196,000,000	
1	1	2	02.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			194,741,459	196,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	02.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah peserta didik yang menerima pelayanan	1 tahun	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				226,258,496	230,258,496	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar Formal dan Non Formal SD & SMP	100%	226,258,496	230,258,496	
1	1	2	02.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				226,258,496	230,258,496	
1	1	2	02.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah peserta didik yang menerima pelayanan	1 tahun	226,258,496	230,258,496	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	02.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah kendaraan dinas/operasional	1 tahun	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				133,484,879	135,000,000	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar Formal dan Non Formal SD & SMP	100%	133,484,879	135,000,000	
1	1	2	02.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				133,484,879	135,000,000	
1	1	2	02.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah siswa yang menerima biaya personil	1 tahun	133,484,879	135,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	02.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah peserta didik yang menerima pelayanan	1 tahun	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				271,469,853	280,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar Formal dan Non Formal SD & SMP	100%	271,469,853	280,000,000	
1	1	2	02.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				271,469,853	280,000,000	
1	1	2	02.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	jumlah siswa yang menerima biaya personil	1 tahun	271,469,853	280,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	02.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah peserta didik yang menerima pelayanan	1 tahun	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				191,799,535	200,000,000	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar Formal dan Non Formal SD & SMP	100%	191,799,535	200,000,000	
1	1	2	02.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				191,799,535	200,000,000	
1	1	2	02.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	jumlah siswa yang menerima biaya personil	1 tahun	191,799,535	200,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	02.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah peserta didik yang menerima pelayanan	1 tahun	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				226,999,895	230,000,000	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar Formal dan Non Formal SD & SMP	100%	226,999,895	230,000,000	
1	1	2	02.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				226,999,895	230,000,000	
1	1	2	02.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	jumlah siswa yang menerima biaya personil	1 tahun	226,999,895	230,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	02.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah peserta didik yang menerima pelayanan	1 tahun	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				210,999,760	220,000,000	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar Formal dan Non Formal SD & SMP	100%	210,999,760	220,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	1	2	02.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				210,999,760	220,000,000	
1	1	2	02.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			210,999,760	220,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	02.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah peserta didik yang menerima pelayanan	1 tahun	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				207,994,845	210,000,000	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar Formal dan Non Formal SD & SMP	100%	207,994,845	210,000,000	
1	1	2	02.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				207,994,845	210,000,000	
1	1	2	02.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	jumlah siswa yang menerima pelayanan	1 Tahun	207,994,845	210,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	02.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah peserta didik yang menerima pelayanan	1 tahun	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				63,976,445	65,000,000	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar Formal dan Non Formal SD & SMP	100%	63,976,445	65,000,000	
1	1	2	02.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				63,976,445	65,000,000	
1	1	2	02.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah peserta didik yang menerima pelayanan	1 tahun	63,976,445	65,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	02.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah peserta didik yang menerima pelayanan	1 tahun	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				42,000,000	43,000,000	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar Formal dan Non Formal SD & SMP	100%	42,000,000	43,000,000	
1	1	2	02.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				42,000,000	43,000,000	
1	1	2	02.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	jumlah peserta didik yang menerima pelayanan	1 tahun	42,000,000	43,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	1	2	02.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah peserta didik yang menerima pelayanan	1 tahun	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				104,000,000	105,000,000	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar Formal dan Non Formal SD & SMP	100%	104,000,000	105,000,000	
1	1	2	02.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				104,000,000	105,000,000	
1	1	2	02.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah peserta didik yang menerima pelayanan	1 tahun	104,000,000	105,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	02.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah peserta didik yang menerima pelayanan	1 tahun	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				184,999,895	190,000,000	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar Formal dan Non Formal SD & SMP	100%	184,999,895	190,000,000	
1	1	2	02.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				184,999,895	190,000,000	
1	1	2	02.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah peserta didik yang menerima pelayanan	1 tahun	184,999,895	190,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	02.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Bontang, Bontang Barat, Semua Kelurahan	Jumlah peserta didik yang menerima pelayanan	1 tahun	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				129,965,000	135,000,000	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar Formal dan Non Formal SD & SMP	100%	129,965,000	135,000,000	
1	1	2	02.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				129,965,000	135,000,000	
1	1	2	02.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah peserta didik yang menerima pelayanan	1 tahun	129,965,000	135,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	02.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Bontang, Bontang Barat, Semua Kelurahan	Jumlah peserta didik yang menerima pelayanan	1 Tahun	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				192,344,987	190,000,000	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar Formal dan Non Formal SD & SMP	100%	192,344,987	190,000,000	
1	1	2	02.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				192,344,987	190,000,000	
1	1	2	02.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Bontang, Bontang Barat, Semua Kelurahan	Jumlah peserta didik yang menerima pelayanan	1 tahun	192,344,987	190,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	02.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Bontang, Bontang Barat, Semua Kelurahan	Jumlah peserta didik yang menerima pelayanan	1 Tahun	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				243,199,995	250,000,000	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar Formal dan Non Formal SD & SMP	100%	243,199,995	250,000,000	
1	1	2	02.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				243,199,995	250,000,000	
1	1	2	02.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Bontang, Bontang Barat, Semua Kelurahan	Jumlah peserta didik yang menerima pelayanan	1 tahun	243,199,995	250,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	02.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Bontang, Bontang Barat, Semua Kelurahan	Jumlah peserta didik yang menerima pelayanan	1 Tahun	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				450,999,910	462,000,000	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar Formal dan Non Formal SD & SMP	100%	450,999,910	462,000,000	
1	1	2	02.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				450,999,910	462,000,000	
1	1	2	02.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			450,999,910	462,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	02.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah peserta didik yang menerima pelayanan	1 tahun	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				487,199,603	490,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar Formal dan Non Formal SD & SMP	100%	487,199,603	490,000,000	
1	1	2	02.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				487,199,603	490,000,000	
1	1	2	02.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah peserta didik yang menerima pelayanan	1 tahun	487,199,603	490,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	02.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah peserta didik yang menerima pelayanan	1 Tahun	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				361,800,487	365,000,000	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar Formal dan Non Formal SD & SMP	100%	361,800,487	365,000,000	
1	1	2	02.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				361,800,487	365,000,000	
1	1	2	02.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah peserta didik yang menerima pelayanan	1 tahun	361,800,487	365,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	02.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah peserta didik yang menerima pelayanan	1 tahun	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				323,999,720	350,000,000	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar Formal dan Non Formal SD & SMP	100%	323,999,720	350,000,000	
1	1	2	02.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				323,999,720	350,000,000	
1	1	2	02.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah peserta didik yang menerima pelayanan	1 tahun	323,999,720	350,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	02.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah peserta didik yang menerima pelayanan	1 tahun	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				371,997,141	380,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar Formal dan Non Formal SD & SMP	100%	371,997,141	380,000,000	
1	1	2	02.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				371,997,141	380,000,000	
1	1	2	02.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah peserta didik yang menerima pelayanan	1 tahun	371,997,141	380,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	02.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah peserta didik yang menerima pelayanan	1 tahun	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				160,792,006	170,000,000	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar Formal dan Non Formal SD & SMP	100%	160,792,006	170,000,000	
1	1	2	02.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				160,792,006	170,000,000	
1	1	2	02.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah peserta didik yang menerima pelayanan	1 tahun	160,792,006	170,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	02.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah peserta didik yang menerima pelayanan	1 tahun	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				247,187,611	250,000,000	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar Formal dan Non Formal SD & SMP	100%	247,187,611	250,000,000	
1	1	2	02.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				247,187,611	250,000,000	
1	1	2	02.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah peserta didik yang menerima pelayanan	1 tahun	247,187,611	250,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	02.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah peserta didik yang menerima pelayanan	1 tahun	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				247,187,611	270,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar Formal dan Non Formal SD & SMP	100%	247,187,611	270,000,000	
1	1	2	02.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				247,187,611	270,000,000	
1	1	2	02.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah peserta didik yang menerima pelayanan	1 tahun	247,187,611	270,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	02.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah peserta didik yang menerima pelayanan	1 tahun	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				189,399,848	200,000,000	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar Formal dan Non Formal SD & SMP	100%	189,399,848	200,000,000	
1	1	2	02.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				189,399,848	200,000,000	
1	1	2	02.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah peserta didik yang menerima pelayanan	1 tahun	189,399,848	200,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	02.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah peserta didik yang menerima pelayanan	1 tahun	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				112,764,911	115,000,000	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar Formal dan Non Formal SD & SMP	100%	112,764,911	115,000,000	
1	1	2	02.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				112,764,911	115,000,000	
1	1	2	02.03	11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kelurahan	Jumlah peserta didik yang menerima pelayanan	1 tahun	112,764,911	115,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				34,000,000	35,000,000	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar	100%	34,000,000	35,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Formal dan Non Formal SD & SMP				
1	1	2	02.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				34,000,000	35,000,000	
1	1	2	02.03	11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			34,000,000	35,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
TOTAL									210,013,442,934	216,860,488,437	

RENCANA PROGRAM, DAN SUB KEGIATAN BELANJA LANGSUNG PERANGKAT DAERAH PADA RKPD KOTA BONTANG TAHUN 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				120,934,531,232	147,621,541,232	
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah ,Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah (RSUD)	100%	57,314,531,232	58,277,541,232	
1	2	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				120,000,000	144,000,000	
1	2	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			80,000,000	96,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			30,000,000	36,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			10,000,000	12,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				44,576,731,232	44,614,181,232	
1	2	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	gaji ASN	12 bulan	44,569,181,232	44,569,181,232	Dinas Kesehatan
1	2	1	02.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	36,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	02.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			5,050,000	6,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	02.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			2,500,000	3,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0	100,000,000	
1	2	1	02.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	tersedianya pakaian dinas	100 stel	0	100,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				840,000,000	1,304,000,000	
1	2	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			30,000,000	36,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	tersedianya peralatan kantor	10 jenis	200,000,000	400,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	tersedianya logistik kantor	1 tahun	150,000,000	200,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			100,000,000	120,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah media cetak	1 media	30,000,000	48,000,000	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah koordinasi konsultasi	50 kali	330,000,000	500,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				650,000,000	820,000,000	
1	2	1	02.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	mobil dinas kepala dinas	1 unit	400,000,000	400,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	02.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah mobil operasional diadakan	1 unit	200,000,000	300,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	tersedianya mebeleir	1 unit	50,000,000	120,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				10,060,000,000	10,074,000,000	
1	2	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			60,000,000	74,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	gaji non pns	245 orang	10,000,000,000	10,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,067,800,000	1,221,360,000	
1	2	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	tersedianya bbm dan pemeliharaan kendaraan dinas	1 tahun	800,000,000	900,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	02.09	5	Pemeliharaan Mebel	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			50,000,000	60,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			144,500,000	173,400,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			73,300,000	87,960,000	Dinas Kesehatan
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Angka kematian ibu, Cakupan kepesertaan JKN, Ketersediaan obat esensial (%), Angka kematian bayi	35%	62,220,000,000	87,314,000,000	
1	2	2	02.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				14,370,000,000	32,564,000,000	
1	2	2	02.01	1	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan Rumah sakit beserta sarana dan prasarana pendukung	70%	2,000,000,000	15,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	02.01	2	Pembangunan Puskesmas	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Puskesmas pembantu di bangun	2 unit	4,500,000,000	5,400,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	02.01	3	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Fasilitas kesehatan lainnya di bangun	1 unit	0	2,400,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	02.01	6	Pengembangan Puskesmas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Puskesmas yang dilakukan pengembangan	1 unit	120,000,000	144,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	02.01	9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah puskesmas di rehab	0 unit	0	720,000,000	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	2	02.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			150,000,000	0	Dinas Kesehatan
1	2	2	02.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	pengadaan sarana fasilitas kesehatan posyandu kel api-api rt 30 posyandu selambai	1 tahun 1 paket 1 paket	650,000,000	600,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	02.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	alat kesehatan	1 tahun	850,000,000	1,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	02.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah obat dan vaksin yang diadakan	95%	3,500,000,000	4,200,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	02.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	tersedianya BMHP	1 tahun	2,000,000,000	2,200,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	02.01	19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	pemeliharaan fasilitas kesehatan	1 tahun	300,000,000	300,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	02.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			300,000,000	600,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	02.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				46,850,000,000	53,500,000,000	
1	2	2	02.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	K4	100%	400,000,000	600,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	02.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Capaian SPM ibu bersalin	100%	200,000,000	400,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	02.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	capaian SPM bayi baru lahir	100%	250,000,000	500,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	02.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	capaian SPM balita	100%	250,000,000	300,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	02.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			500,000,000	600,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	02.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Capaian SPM usia produktif	100%	500,000,000	600,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	02.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			150,000,000	180,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	02.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	cakupan SPM	100%	200,000,000	360,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	02.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			250,000,000	255,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	02.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			250,000,000	255,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	02.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Capaian SPM TB	100%	300,000,000	500,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	02.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Capaian SPM HIV	100%	350,000,000	400,000,000	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	2	02.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			4,000,000,000	4,800,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	02.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	operasional tim covid dan vaksinasi	1 tahun	9,000,000,000	9,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	02.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			500,000,000	600,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	02.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah puskesmas melaksanakan kesehatan kerja	6 puskesmas	100,000,000	240,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	02.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	TTU memenuhi syarat	85%	400,000,000	600,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	02.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	tersedianya media promosi kesehatan	100%	200,000,000	300,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	02.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			150,000,000	180,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	02.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	terlaksananya moniroting penyakit wabah	100%	100,000,000	130,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	02.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			200,000,000	240,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	02.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	penurunan DBD	100	700,000,000	1,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	02.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	terlaksananya pelayanan kesehatan peserta JKN di Puskesmas	1 Tahun	27,000,000,000	30,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	02.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			500,000,000	600,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	02.02	31	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	penelitian tentang waolfbachia	1 tahun	0	360,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	02.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			250,000,000	300,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	02.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	KLB ditangani kurang dari 24 jam	100%	150,000,000	200,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	02.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi				500,000,000	600,000,000	
1	2	2	02.03	1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			100,000,000	120,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	02.03	2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			250,000,000	300,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	02.03	3	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			150,000,000	180,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	02.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				500,000,000	650,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	2	02.04	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	RS berizin	100%	50,000,000	80,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	02.04	3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	FKTP swasta terakreditasi	50%	100,000,000	220,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	02.04	4	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	spgdt	100%	350,000,000	350,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase tenaga Kesehatan berizin	100%	650,000,000	780,000,000	
1	2	3	02.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota				50,000,000	60,000,000	
1	2	3	02.01	2	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	pembinaan tenaga kesehatan	2 kali	50,000,000	60,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	3	02.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				100,000,000	120,000,000	
1	2	3	02.02	3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			100,000,000	120,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	3	02.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				500,000,000	600,000,000	
1	2	3	02.03	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			500,000,000	600,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	4			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		Persentase sarana Produksi Obat, Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Berizin	100%	350,000,000	490,000,000	
1	2	4	02.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				100,000,000	100,000,000	
1	2	4	02.01	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	apotek dan toko obat berizin	100%	100,000,000	100,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	4	02.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				50,000,000	150,000,000	
1	2	4	02.03	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	terlaksananya pembinaan PIRT	70%	50,000,000	150,000,000	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga						
1	2	4	02.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				150,000,000	180,000,000	
1	2	4	02.04	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			150,000,000	180,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	4	02.05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				50,000,000	60,000,000	
1	2	4	02.05	1	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			50,000,000	60,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase Penerapan 5 kluster kebijakan GERMAS di Kelurahan (Peningkatan Aktivitas Fisik, Peningkatan PHBS, Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi, Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit, Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup)		400,000,000	760,000,000	
1	2	5	02.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100,000,000	200,000,000	
1	2	5	02.01	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah pemberdayaan masyarakat	4 lokus	100,000,000	200,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	5	02.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100,000,000	260,000,000	
1	2	5	02.02	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	kampanye gerakan hidup bersih sehat	2 kali	100,000,000	260,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	5	02.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				200,000,000	300,000,000	
1	2	5	02.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	terlaksananya bimtek UKBM	2 kali	200,000,000	300,000,000	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1,975,000,000	2,100,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Angka kematian ibu, Cakupan kepesertaan JKN,Ketersediaan obat esensial (%),Angka kematian bayi		1,975,000,000	2,100,000,000	
1	2	2	02.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1,975,000,000	2,100,000,000	
1	2	2	02.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1,500,000,000	1,600,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	02.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	terlaksananya pelayanan kesehatan di puskesmas	95%	475,000,000	500,000,000	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1,900,000,000	2,150,000,000	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Angka kematian ibu, Cakupan kepesertaan JKN,Ketersediaan obat esensial (%),Angka kematian bayi		1,900,000,000	2,150,000,000	
1	2	2	02.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1,900,000,000	2,150,000,000	
1	2	2	02.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1,500,000,000	1,600,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	02.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	terlaksananya pelayanan kesehatan di puskesmas	95%	400,000,000	550,000,000	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1,900,000,000	2,150,000,000	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Angka kematian ibu, Cakupan kepesertaan JKN,Ketersediaan obat esensial (%),Angka kematian bayi		1,900,000,000	2,150,000,000	
1	2	2	02.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1,900,000,000	2,150,000,000	
1	2	2	02.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1,500,000,000	1,600,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	02.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	terlaksananya pelayanan kesehatan di puskesmas	95%	400,000,000	550,000,000	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1,900,000,000	2,150,000,000	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Angka kematian ibu, Cakupan kepesertaan JKN,Ketersediaan obat esensial (%),Angka kematian bayi		1,900,000,000	2,150,000,000	
1	2	2	02.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1,900,000,000	2,150,000,000	
1	2	2	02.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1,500,000,000	1,600,000,000	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	2	02.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	terlaksananya pelayanan kesehatan di puskesmas	95%	400,000,000	550,000,000	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1,750,000,000	1,850,000,000	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Angka kematian ibu, Cakupan kepesertaan JKN,Ketersediaan obat esensial (%),Angka kematian bayi		1,750,000,000	1,850,000,000	
1	2	2	02.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1,750,000,000	1,850,000,000	
1	2	2	02.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1,200,000,000	1,300,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	02.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	terlaksananya pelayanan kesehatan di puskesmas	95%	550,000,000	550,000,000	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1,000,000,000	1,100,000,000	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Angka kematian ibu, Cakupan kepesertaan JKN,Ketersediaan obat esensial (%),Angka kematian bayi		1,000,000,000	1,100,000,000	
1	2	2	02.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1,000,000,000	1,100,000,000	
1	2	2	02.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			500,000,000	550,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	02.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			500,000,000	550,000,000	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				800,000,000	850,000,000	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Angka kematian ibu, Cakupan kepesertaan JKN,Ketersediaan obat esensial (%),Angka kematian bayi		800,000,000	850,000,000	
1	2	2	02.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				800,000,000	850,000,000	
1	2	2	02.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			800,000,000	850,000,000	Dinas Kesehatan
TOTAL									132,159,531,232	159,971,541,232	

RENCANA PROGRAM, DAN SUB KEGIATAN BELANJA LANGSUNG PERANGKAT DAERAH PADA RKPD KOTA BONTANG TAHUN 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				136,500,000,000	183,331,863,144	
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah (RSUD)		130,165,200,000	147,815,900,000	
1	2	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1,080,893	6,900,000	
1	2	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	Tersedianya Dokumen PErencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	480,893	1,200,000	Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada
1	2	1	02.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	Tersedianya Dokumen RKA RSUD Taman Husada Bontang	2 Dokumen	100	1,500,000	Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada
1	2	1	02.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	Tersedianya Dokumen RKA-Perubahan RSUD Taman Husada Bontang	2 Dokumen	100	1,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada
1	2	1	02.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	Tersedianya Dokumen DPA RSUD Taman Husada Bontang	2 Dokumen	100	1,500,000	Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada
1	2	1	02.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	Tersedianya Dokumen DPA Perubahan RSUD Taman Husada Bontang	2 Dokumen	100	1,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada
1	2	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	Tersedianya Dokumen LPPD RSUD Taman Husada Bontang	1 Dokumen	100	200	Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada
1	2	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	Tersedianya Dokumen LAKIP RSUD Taman Husada Bontang	2 Dokumen	100	500	Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada
1	2	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				69,385,519,107	72,910,000,000	
1	2	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Pegawai RSUD Taman Husada Bontang	12 Bulan	68,577,319,107	72,100,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada
1	2	1	02.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	Tersedianya Tenaga Administrasi Pelaksana Tugas ASN RSUD Taman Husada Bontang	12 Bulan	808,200,000	810,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada
1	2	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				2,000,000	288,000,000	
1	2	1	02.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	Tersedianya Pakaian Dinas Hari-hari Tertentu	660 Stel	1,000,000	163,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada
1	2	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	1,000,000	125,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada
1	2	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				6,300,000	1,805,000,000	
1	2	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	Jenis Peralatan dan Perlengkapan Pendukung Pelayanan yang tersedia	10 Jenis	1,000,000	900,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	Jenis Bahan Logistik Kantor yang tersedia	5 Jenis	100	200,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada
1	2	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	100 Jenis	100	200,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada
1	2	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	Jumlah Tamu yang terfasilitasi	10 Orang	100	5,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada
1	2	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	Jumlah Pegawai yang melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	112 OK	5,000,000	500,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada
1	2	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,100,000	840,000,000	
1	2	1	02.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	Tersedianya Kendaraan Dinas/ Operasional Dokter Spesialis RSUD Taman Husada Bontang	2 Unit	1,000,000	600,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada
1	2	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	Tersedianya Meubeler Pelayanan dan Pendukung Pelayanan RSUD Taman Husada Bontang	10 Jenis	100	240,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada
1	2	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2,520,100,000	3,501,000,000	
1	2	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	Biaya Post dan Benda Post/ Materai yang tersedia	12 Bulan	100	1,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada
1	2	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	Tersedianya Komunikasi, Internet, Sumber Daya Listrik RSUD Taman Husada Bontang	9 Bulan	2,520,000,000	3,500,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada
1	2	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				249,100,000	465,000,000	
1	2	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional RSUD Taman Husada Bontang	74 Unit	100	45,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada
1	2	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional RSUD Taman Husada Bontang	74 Unit	47,900,000	70,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada
1	2	1	02.09	5	Pemeliharaan Mebel	Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	Jenis Meubeler yang terpelihara	5 Jenis	100	50,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada
1	2	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	Jenis Alat dan Mesin yang dipelihara	2 Jenis	1,000,000	100,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada
1	2	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	Jumlah Gedung yang dipelihara (Pengecatan Gedung RSUD)	1 Bangunan	200,000,000	200,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada
1	2	1	02.10		Peningkatan Pelayanan BLUD				58,000,000,000	68,000,000,000	
1	2	1	02.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	Lancarnya Operasional Pelayanan dan Pendukung Pelayanan RS-BLUD	12 Bulan	58,000,000,000	68,000,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Tercapainya Standard Pelayanan Minimal (SPM)di RSUD, Tercapainya Akreditasi Paripurna untuk RS (mempertahankan status akreditasi paripurna)		6,333,700,000	34,915,963,144	
1	2	2	02.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				6,333,600,000	34,815,963,144	
1	2	2	02.01	1	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	Tersedianya Gedung 5 lantai Klinik Rawat Jalan Baru RSUD Taman Husada Bontang	1 Bangunan	1,000,000	14,000,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada
1	2	2	02.01	8	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	Jumlah Bangunan Gedung RSUD Taman Husada yang dipelihara	2 Bangunan	500	350,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada
1	2	2	02.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	Jenis Prasarana Fasilitas Kesehatan RS tersedia	5 Jenis	1,000,000	500,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada
1	2	2	02.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	Tersedianya Alat Kesehatan RSUD Taman Husada Bontang	22 Jenis	6,309,000,000	18,665,963,144	Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada
1	2	2	02.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	Jenis Bahan Habis Pakai yang tersedia	10 Jenis	100	50,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada
1	2	2	02.01	19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	Terpeliharanya Prasarana Pendukung Fasilitas Pelayanan RSUD Taman Husada Bontang	12 Bulan	21,000,000	850,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada
1	2	2	02.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	Jenis Alat Kesehatan/ alat penunjang medik yang terpelihara	10 Jenis	1,000,000	400,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada
1	2	2	02.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi				100	100,000,000	
1	2	2	02.03	3	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	Jenis Perangkat SIM Pelayanan dan Internet RSUD Taman Husada Bontang	1 Paket	100	100,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase tenaga Kesehatan berizin		1,000,000	500,000,000	
1	2	3	02.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1,000,000	500,000,000	
1	2	3	02.03	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	Jumlah Tenaga Medik/ Paramedik yang mengikuti Pengembangan Mutu dan Kompetensi SDM Kesehatan	40 orang	1,000,000	500,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase Penerapan 5 kluster kebijakan GERMAS di Kelurahan (Peningkatan Aktivitas Fisik, Peningkatan PHBS, Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi, Peningkatan		100	100,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit, Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup)				
1	2	5	02.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100	100,000,000	
1	2	5	02.02	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	Terlaksananya Kegiatan Promosi Kesehatan dan GHBS	1 Kegiatan	100	100,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada
TOTAL									136,500,000,000	183,331,863,144	

RENCANA PROGRAM, DAN SUB KEGIATAN BELANJA LANGSUNG PERANGKAT DAERAH PADA RKPD KOTA BONTANG TAHUN 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				171,497,250,000	189,641,891,392	
1	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	21,654,015,000	23,802,836,000	
1	3	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				16,507,130,000	17,508,130,000	
1	3	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai ASN	80 Orang	16,504,130,000	17,504,130,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	3	1	02.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dokumen Laporan Keuangan	1 Dokumen	3,000,000	4,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	3	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				350,000,000	400,000,000	
1	3	1	02.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	3	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Diklat Teknis dan Non Teknis	40 Orang	350,000,000	400,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	3	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				1,696,179,000	2,410,000,000	
1	3	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan instalasi listrik yang tersedia	9 Jenis	7,000,000	8,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	3	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Alat tulis Kantor Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40 Jenis 9 Jenis	250,000,000	400,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	3	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah alat kebersihan dan sembako	14 Jenis	78,910,000	80,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	3	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Barang cetak, penggandaan, spanduk	15 Jenis	90,240,000	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	3	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bahan bacaan	4 Jenis	20,000,000	22,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Perjalanan Dinas Pegawai Tersedia	12 Bulan	1,100,029,000	1,500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	3	1	02.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penataan Arsip Dinamis	1 Kegiatan	150,000,000	300,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	3	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				577,000,000	650,000,000	
1	3	1	02.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2	1 Unit 1 Unit	360,000,000	400,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	3	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pengadaan Mebel	4 Jenis	100,000,000	150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	3	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pengadaan Peralatan	3 Unit	117,000,000	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	3	1	02.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			130,000,000	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	3	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,871,296,000	2,022,296,000	
1	3	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Materai 10.000	1000 Buah	10,000,000	11,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	3	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jasa sumber daya air, listrik dan internet IPAL Sekota Bontang	12 bulan	300,000,000	350,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	3	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tenaga Kontrak	35 Orang	1,561,296,000	1,661,296,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	3	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				652,410,000	812,410,000	
1	3	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Roda 2, Roda 4, Truk, dan Alat Berat	31 Unit	550,000,000	600,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	3	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pemeliharaan Peralatan Mesin	4 jenis	70,000,000	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	3	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pemeliharaan/Sarana Prasarana Gedung Kantor	1 Jenis	32,410,000	112,410,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	3	2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Persentase kapasitas unit embung/ penampung air/sumur air tanah/air baku, Persentase kapasitas aliran sungai , Persentase daya tampung danau/folder/kolam retensi	87%, 92,02%, 82,90%	22,757,000,000	22,492,000,000	
1	3	2	02.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				22,657,000,000	22,492,000,000	
1	3	2	02.01	1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dokumen perencanaan teknis Dokumen study lingkungan	1 dokumen 2 dokumen	300,000,000	300,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	3	2	02.01	2	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	3	2	02.01	3	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dokumen Masterplant Banjir Dokumen Perencanaan Teknis	1 Dokumen 2 Dokumen	1,852,000,000	1,852,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	3	2	02.01	9	Pembangunan Tanggul Sungai	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang turap sungai Pendampingan Kejaksaaan	620 meter 1 Kegiatan	19,415,000,000	19,200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	3	2	02.01	10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	3	2	02.01	11	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	3	2	02.01	14	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	3	2	02.01	24	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tanggul sungai yang di rehabilitasi	10 Meter	100,000,000	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	2	02.01	25	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bangunan perkuatan tebing yang ditingkatkan	10 meter	130,000,000	130,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	3	2	02.01	35	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	3	2	02.01	45	Revitalisasi Danau	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Galian normalisasi danau	300 kubik	50,000,000	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	3	2	02.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Gaji Helper Gaji operator Gaji Wakar galian endapan sungai yang di normalisasi	1 orang/tahun 1 orang/tahun 2 orang/tahun 6000 kubik	760,000,000	760,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	3	2	02.01	47	Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	3	2	02.01	53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	3	2	02.01	65	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sungai yang terpelihara	100 meter	50,000,000	50,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	3	2	02.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				100,000,000	0	
1	3	2	02.02	3	Pembangunan Bendung Irigasi	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			100,000,000	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	3	3			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		Persentase penduduk berakses air minum layak	86,10%	6,848,502,536	300,000,000	
1	3	3	02.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				6,848,502,536	300,000,000	
1	3	3	02.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dokumen Lingkungan Dokumen Perencanaan Studi LARAP	2 Dokumen 4 Dokumen 1 Dokumen	2,650,000,000	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	3	02.01	2	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	terpenuhinya pengawasan kegiatan air minum	1 paket	100,000,000	300,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	3	3	02.01	3	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendampingan Kejaksaaan Pengadaan Lahan Terbangunnya Sumur Dalam	1 kegiatan 5000 m2 3 Unit	2,684,002,536	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	3	3	02.01	4	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terbangunnya Reverse Osmosis (RO) di Pulau-pulau	3 Unit	100,000,000	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	3	3	02.01	5	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatnya akses layanan air bersih untuk masyarakat Terpenuhinya kebutuhan air minum Terpenuhinya rehabilitasi pipa distribusi air minum	4000 meter 97 sambungan rumah 500 meter	614,500,000	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	3	3	02.01	7	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatnya akses layanan air bersih untuk masyarakat Pembangunan Jaringan Pipa Air Bersih Penambahan Jaringan pipa air minum	4000 meter 385 meter 200 meter	300,000,000	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	3	3	02.01	8	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpeliharanya Sistem Penyediaan Air Bersih	1 Unit	200,000,000	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	3	3	02.01	15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang saluran air pembuangan	30 Meter	100,000,000	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	3	3	02.01	19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatnya akses layanan air bersih di Pulau-pulau	2000 meter	100,000,000	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	3	4			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		Persentase kapasitas TPA/TPST/SPA/ TPS-3R/TPS	51%	795,000,000	0	
1	3	4	02.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota				795,000,000	0	
1	3	4	02.01	3	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bangunan fasilitas pengelolaan persampahan Dokumen Perencanaan Pengadaan Lahan	1 Unit 1 Dokumen 72 m2	200,000,000	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4	02.01	5	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya sarana prasarana Gudang/Bank Sampah Terpenuhinya sarana prasarana mobil pick up Terpenuhinya sarana prasarana Motor Sampah Terpenuhinya sarana prasarana Motor Sampah	1 Unit 1 unit 2 unit 2 Unit	595,000,000	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	3	5			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		Persentase rumah tangga yg memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	95,50%	4,066,707,392	3,646,707,392	
1	3	5	02.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				4,066,707,392	3,646,707,392	
1	3	5	02.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dokumen pemantauan lingkungan IPAL	5 Dokumen	100,000,000	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	3	5	02.01	2	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	3	5	02.01	3	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	3	5	02.01	4	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	3	5	02.01	5	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan kualitas pengelolaan IPAL Kawasan	5 Unit	2,000,000,000	2,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
							Terlaksananya Pembangunan Gedung UPT ALD (Lanjutan) Terlaksananya peningkatan pengelolaan IPAL Komunal	1 Unit 1 Unit			
1	3	5	02.01	6	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya akses sanitasi layak	1 Unit	100,000,000	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	3	5	02.01	7	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	3	5	02.01	8	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sosialisasi	6 Kelurahan	100,000,000	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	5	02.01	9	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	3	5	02.01	10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Limbah Domestik Peralatan Pengambilan Sample Uji Kualitas Air Limbah IPAL dan IPLT Peralatan Pengambilan Sample Uji Kualitas Air Limbah Sumur Pantau IPLT Terpenuhinya Operasional UPT Air Limbah Domestik Uji Laboratorium Air Limbah IPAL Uji Laboratorium Air Limbah IPLT	18 Orang 84 Paket 4 Paket 1 Tahun 12 Bulan 12 Bulan	1,101,707,392	1,131,707,392	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
							Uji Laboratorium Air Limbah Sumur Pantau IPLT	4 Paket			
1	3	5	02.01	11	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			100,000,000	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	3	5	02.01	12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatnya presentase penduduk berakses sanitasi layak Pendampingan Kejaksaaan	375 SR 1 kegiatan	100,000,000	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	3	5	02.01	13	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan Pelayanan Lumpur Tinja Terpenuhinya Pemeliharaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	1 Unit 2 Unit	265,000,000	285,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	3	5	02.01	16	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan kualitas pengelolaan IPLT Bontang Lestari	1 Unit	200,000,000	230,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	3	6			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik	92,02%	4,840,000,000	4,310,000,000	
1	3	6	02.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				4,840,000,000	4,310,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	6	02.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DED Sistem Drainase Perkotaan Dokumen Perencanaan Teknis	1 Dokumen 2 Dokumen	200,000,000	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	3	6	02.01	3	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dokumen Pengawasan Teknis	10 Dokumen	180,000,000	180,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	3	6	02.01	5	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendampingan Kejaksaaan Terbangunnya saluran drainase	1 Kegiatan 75 meter	800,000,000	800,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	3	6	02.01	6	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Saluran Drainase yang ditingkatkan	10 Meter	250,000,000	800,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	3	6	02.01	7	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendampingan Kejaksaaan Saluran drainase yang di rehabilitasi	1 Kegiatan 150 meter	1,500,000,000	1,500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	3	6	02.01	8	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	pengadaan lahan	1 paket	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	3	6	02.01	9	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pintu Air yang terpelihara	6 buah	500,000,000	300,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
							sedimen drainase yang di normalisasi	1000 kubik			
1	3	6	02.01	10	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dokumen Pengawasan Teknis	2 Dokumen	910,000,000	30,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	3	6	02.01	12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	3	6	02.01	13	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Saluran Drainase Lingkungan yang ditingkatkan	40 meter	200,000,000	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	3	6	02.01	14	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Saluran Drainase Lingkungan yang di rehabilitasi	50 meter	200,000,000	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	3	6	02.01	15	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Lingkungan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Gorong-gorong / Box Culvert Lingkungan	1 Buah	50,000,000	50,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	6	02.01	16	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	50,000,000	50,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	3	7			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN				0	0	
1	3	7	02.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				0	0	
1	3	7	02.01	1	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	3	8			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		Persentase bangunan gedung yg memenuhi persyaratan teknis	59,02%	72,698,654,536	70,530,000,000	
1	3	8	02.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung				72,698,654,536	70,530,000,000	
1	3	8	02.01	1	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Operasional Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1 Dokumen	500,000,000	530,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	3	8	02.01	2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bantuan Instansi vertikal Dokumen Perencanaan	1 paket 2 dokumen	65,334,000,000	60,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
							Jumlah Gedung Kantor Terbangun Sarana Ibadah Sarana Pendukung Terbangun	8 unit 1 unit 1 unit			
1	3	8	02.01	5	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	3	8	02.01	12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bangunan Gedung Daerah Yang di Rehab Sarana Prasarana Pendukung Yang di Rehab	12 unit 2 Unit	6,864,654,536	10,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	3	9			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		Persentase sempadan sungai yang tertata		0	0	
1	3	9	02.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota				0	0	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	9	02.01	3	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dokumen Lingkungan Hidup Dokumen Perencanaan Jumlah Gedung Kantor Terbangun Sarana Pendukung Terbangun	0 Dokumen 0 Dokumen 0 Unit 0 Unit	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	3	9	02.01	4	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bangunan Yang di Rehabilitasi	11 unit	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	3	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		Persentase jalan dalam kondisi baik, Persentase drainase jalan dalam kondisi baik	90%, 92,80%	35,398,752,536	62,000,000,000	
1	3	10	02.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				35,398,752,536	62,000,000,000	
1	3	10	02.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Master Plan Jalan Kota Bontang	1 Dokumen	1,000,000,000	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	3	10	02.01	4	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penguatan Database Jalan Kota Bontang Penguatan Database Jembatan Kota Bontang	1 Dokumen 1 Dokumen	700,000,000	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	3	10	02.01	5	Pembangunan Jalan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang jalan kondisi baik	2000 meter	10,577,040,000	50,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	3	10	02.01	8	Rekonstruksi Jalan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang jalan dalam kondisi baik	1300 m	11,558,472,536	12,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	3	10	02.01	9	Rehabilitasi Jalan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang jalan dalam kondisi baik	677 m	2,790,000,000	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	3	10	02.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang jalan dalam kondisi baik	610 m	2,973,240,000	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	3	10	02.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang jalan dalam kondisi baik	600 m	2,000,000,000	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	3	10	02.01	12	Pembangunan Jembatan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jembatan dalam kondisi baik	1 titik	3,500,000,000	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	10	02.01	16	Penggantian Jembatan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			100,000,000	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	3	10	02.01	20	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jembatan yang terpelihara	1 Unit	200,000,000	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	3	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		Persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat	77%	621,270,000	640,000,000	
1	3	11	02.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi				198,777,500	200,000,000	
1	3	11	02.01	6	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta Sosialisasi	70 Orang	198,777,500	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	3	11	02.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi				422,492,500	440,000,000	
1	3	11	02.04	1	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peserta Sosialisasi	75 Orang	20,000,000	30,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	3	11	02.04	3	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta Sosialisasi	170 Orang	402,492,500	410,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	3	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		Persentase kesesuaian tata ruang	88,60%	1,817,348,000	1,920,348,000	
1	3	12	02.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota				1,467,658,000	1,527,658,000	
1	3	12	02.01	1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Kota Bontang	1 Dokumen	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	3	12	02.01	2	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Kota Bontang	1 Dokumen	1,147,558,000	1,187,558,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	3	12	02.01	3	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peraturan Daerah Raperwali pendukung dalam Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Kota	1 Dokumen 1 Dokumen	145,100,000	145,100,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	3	12	02.01	4	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sosialisasi Pengendalian Bangunan dan Ruang Kota	500 Orang	175,000,000	195,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	3	12	02.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				249,690,000	272,690,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	12	02.03	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Site Plan Kawasan Non Perumahan Jumlah Surat Kesesuaian Tata Ruang Kota yang diterbitkan	10 Site Plan 100 SKTR	149,690,000	152,690,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	3	12	02.03	2	Sistem Informasi Penataan Ruang	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pengembangan Web Sistem Informasi Tata Ruang (SIMTARU)	1 Sistem Informasi	100,000,000	120,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	3	12	02.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				100,000,000	120,000,000	
1	3	12	02.04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
1	3	12	02.04	4	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Frekuensi rapat TKPRD Jumlah Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan	12 Kali 10 izin	100,000,000	120,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
TOTAL									171,627,250,000	189,641,891,392	

RENCANA PROGRAM, DAN SUB KEGIATAN BELANJA LANGSUNG PERANGKAT DAERAH PADA RKPD KOTA BONTANG TAHUN 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1	4				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				45,518,854,507	1,500,000	
1	4	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	12,540,765,366	1,500,000	
1	4	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				77,269,870	0	
1	4	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			55,770,368	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	4	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			20,749,502	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	4	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			750	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	4	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8,739,538,572	1,500,000	
1	4	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			8,736,538,572	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	4	1	02.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1,500,000	750	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	4	1	02.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			750	750	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	4	1	02.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			750	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	4	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				346,840,000	0	
1	4	1	02.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			241,840,000	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	4	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			105,000,000	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	4	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				1,089,685,094	0	
1	4	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			280,070,782	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	4	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			164,860,089	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	4	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			56,010,823	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	4	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			33,264,000	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	4	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			555,479,400	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	4	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,199,591,680	0	
1	4	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			6,000,000	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	4	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			30,000,000	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	4	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1,163,591,680	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	4	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,087,840,150	0	
1	4	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			809,176,400	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	4	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			278,663,750	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota, Persentase fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah, Persentase ketersediaan rumah	30,55%	2,522,960,000	0	
1	4	2	02.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				560,000,000	0	
1	4	2	02.01	1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			140,000,000	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	4	2	02.01	2	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			140,000,000	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	4	2	02.01	5	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			140,000,000	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	4	2	02.01	6	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			140,000,000	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	4	2	02.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				1,962,960,000	0	
1	4	2	02.03	1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			831,480,000	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	4	2	02.03	2	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			300,000,000	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	4	2	02.03	4	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			831,480,000	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	4	3			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yg ditangani	0%	10,944,529,141	0	
1	4	3	02.01		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman				100,000,000	0	
1	4	3	02.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			100,000,000	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	4	3	02.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha				500,000,000	0	
1	4	3	02.02	1	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			250,000,000	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	4	3	02.02	8	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			250,000,000	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	4	3	02.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha				10,344,529,141	0	
1	4	3	02.03	1	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			3,400,000,000	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	4	3	02.03	2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	rumah yang diperbaiki	103 unit	3,321,075,000	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	4	3	02.03	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			100,000,000	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	4	3	02.03	6	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			3,523,454,141	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	4	4			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		Persentase rumah tidak layak huni di luar kawasan kumuh	0,12%	1,515,000,000	0	
1	4	4	02.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota				1,515,000,000	0	
1	4	4	02.01	1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1,515,000,000	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	4	5			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		Persentase PSU jalan lingkungan dalam kondisi baik, Persentase PSU drainase lingkungan dalam kondisi baik	91,65%, 91,84%	17,865,600,000	0	
1	4	5	02.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				17,865,600,000	0	
1	4	5	02.01	1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1,600,000,000	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	4	5	02.01	2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			16,015,600,000	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	4	5	02.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			250,000,000	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	4	6			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				130,000,000	0	
1	4	6	02.01		Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil				130,000,000	0	
1	4	6	02.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			130,000,000	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				1,301,892,008	0	
2	10	4			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		Persentase Pengaduan Sengketa tanah yang ditangani	100%	624,655,379	0	
2	10	4	02.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota				624,655,379	0	
2	10	4	02.01	1	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			435,855,009	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	10	4	02.01	2	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			188,800,370	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	10	5			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN		Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang diselesaikan	25%	570,642,748	0	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	10	5	02.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				570,642,748	0	
2	10	5	02.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			570,642,748	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	10	9			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH				106,593,881	0	
2	10	9	02.01		Penerbitan Izin Membuka Tanah				106,593,881	0	
2	10	9	02.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			106,593,881	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		Persentase kenaikan rata-rata NJOP Tanah	10%	0	0	
2	10	10	02.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota				0	0	
2	10	10	02.01	2	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1	4				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				4,336,653,485	0	
1	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota, Persentase fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah, Persentase ketersediaan rumah	30,55%	4,336,653,485	0	
1	4	2	02.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				4,336,653,485	0	
1	4	2	02.05	1	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			3,563,177,635	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	4	2	02.05	2	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			773,475,850	0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
TOTAL									51,157,400,000	1,500,000	

RENCANA PROGRAM, DAN SUB KEGIATAN BELANJA LANGSUNG PERANGKAT DAERAH PADA RKPD KOTA BONTANG TAHUN 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1	5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				13,730,000,000	15,780,000,000	
1	5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Presentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah (Satpol PP)	100%	11,234,000,000	12,980,000,000	
1	5	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5,974,000,000	7,000,000,000	
1	5	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ASN	40 orang	5,974,000,000	7,000,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				350,000,000	420,000,000	
1	5	1	02.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pakaian yang diterima	101 stel	200,000,000	220,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan	20 orang	150,000,000	200,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				1,300,000,000	1,620,000,000	
1	5	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah paket pengadaan	1 paket	50,000,000	100,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah paket pengadaan	3 paket	350,000,000	400,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah paket pengadaan	2 paket	150,000,000	220,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			250,000,000	300,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			500,000,000	600,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3,010,000,000	3,270,000,000	
1	5	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah materai	1000 lembar	10,000,000	20,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah tagihan air, listrik, internet dan telepon	12 bulan	200,000,000	250,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah tkd	61 orang	2,800,000,000	3,000,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				600,000,000	670,000,000	
1	5	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah paket pengadaan	2 paket	500,000,000	520,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	5	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah paket pengadaan	2 paket	100,000,000	150,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	2			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan, Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%, 75%	2,496,000,000	2,800,000,000	
1	5	2	02.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				2,446,000,000	2,400,000,000	
1	5	2	02.01	1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah jenis kegiatan pencegahan gangguan trantibum	7 jenis	450,000,000	300,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	2	02.01	2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			650,000,000	500,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	2	02.01	3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	150,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	2	02.01	4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	penyediaan peralatan dan perlengkapan petugas dalmas	1 paket	380,000,000	200,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	2	02.01	5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	120 orang	416,000,000	270,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	2	02.01	7	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	200,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	2	02.01	8	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah jenis sarana prasarana	1 jenis	550,000,000	430,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	2	02.01	9	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	150,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	2	02.01	10	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	200,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	2	02.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota				50,000,000	200,000,000	
1	5	2	02.02	1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	2	02.02	2	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	100,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	2	02.02	3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kasus Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	15 jenis	50,000,000	100,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	5	2	02.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota				0	200,000,000	
1	5	2	02.03	1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	200,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
TOTAL									13,730,000,000	15,780,000,000	

RENCANA PROGRAM, DAN SUB KEGIATAN BELANJA LANGSUNG PERANGKAT DAERAH PADA RKPD KOTA BONTANG TAHUN 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1	5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				6,000,000,000	6,260,000,000	
1	5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Presentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah (BPBD)	100%	5,108,402,159	5,453,000,000	
1	5	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				92,500,000	95,000,000	
1	5	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dokumen Renstra	1 Dokumen	92,500,000	95,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2,810,000,000	3,000,000,000	
1	5	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	gaji ASN	1 tahun	2,810,000,000	3,000,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				110,797,268	150,000,000	
1	5	1	02.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	kaos Lapangan Katelpak Pakaian Dinas Lapangan (PDL2) Sepatu PDL	42 buah 42 stel 42 stel 42 pasang	110,797,268	150,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				433,304,891	474,000,000	
1	5	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	peralatan Listrik dan Elektronika	6 jenis	7,104,891	7,500,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			170,000,000	200,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	alat tulis kantor belanja cetak belanja penggandaan	55 jenis 4 jenis 15030 lembar	76,200,000	76,500,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			180,000,000	190,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				911,800,000	924,000,000	
1	5	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			5,100,000	6,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	5	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	pembayaran rekening telpon,Pulsa,air, listrik, TV kabel, dan Internet	1 tahun	116,700,000	118,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	tersedianya tenaga administrasi kantor	1 tahun	790,000,000	800,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				750,000,000	810,000,000	
1	5	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			740,000,000	790,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			10,000,000	20,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		Persentase warga negara di kawasan rawan bencana dan menjadi korban bencana yang memperoleh layanan kebencanaan	100%	891,597,841	807,000,000	
1	5	3	02.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				11,000,000	12,000,000	
1	5	3	02.01	2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah peserta penyuluhan	350 orang	11,000,000	12,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	02.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				572,097,841	475,000,000	
1	5	3	02.02	2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah peserta pelatihan	1200 orang	73,000,000	75,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	02.02	6	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	frekuensi pemantauan destinasi wisata yang memiliki resiko bencana	164 kali	499,097,841	400,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
							Jumlah bangunan yang diinspeksi sarana kebencanaan Jumlah kawasan rawan bencana yang dipantau Patroli Karhutla	20 lokasi 50 lokasi 20 kali			
1	5	3	02.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				308,500,000	320,000,000	
1	5	3	02.03	3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah kejadian	7 kejadian	60,000,000	70,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	02.03	4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah kejadian	80 kejadian	248,500,000	250,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
TOTAL									6,000,000,000	6,260,000,000	

RENCANA PROGRAM, DAN SUB KEGIATAN BELANJA LANGSUNG PERANGKAT DAERAH PADA RKPD KOTA BONTANG TAHUN 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1	5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				18,000,000,000	19,954,007,396	
1	5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Presentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah (DPKP)	100%	14,806,636,366	17,260,914,996	
1	5	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3,712,500	175,000,000	
1	5	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Renja, RKA dan DPA SKPD	6 Dokumen	3,135,000	150,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	5	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Kinerja Instansi Pemerintah	1 Dokumen	577,5	25,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	5	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7,026,443,722	7,232,708,176	
1	5	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang	7,025,618,722	7,230,208,176	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	5	1	02.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Tersusun Jumlah Dokumen Laporan Semester dan Prognosis Tersusun	1 Dokumen 1 Dokumen	825	2,500,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	5	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				735,143,106	650,000,000	
1	5	1	02.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pengadaan Pakaian PDH, PDU, Sepatu, Atribut Pengadaan pakaian PDL dan Atribut Pengadaan Pakaian Wearpack Pengadaan Sepatu Lapangan (PDL)	4 Jenis 2 paket 181 Lembar 140 Pasang	735,143,106	650,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	5	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				597,066,138	1,192,905,950	
1	5	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			15,000,000	25,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	5	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Logistik Kantor Tersedia	14 Jenis	165,106,228	624,905,950	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	5	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			183,729,910	200,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	5	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			5,000,000	10,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	5	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Fasilitas Tamu	4 Kali	4,800,000	10,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	5	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rapat dan Koordinasi Terlaksana	29 Kali	223,430,000	323,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	5	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5,400,155,550	6,419,742,070	
1	5	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Materai 10.000 Tersedia	1000 Lembar	6,000,000	6,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	5	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedia	12 Bulan	262,400,000	300,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	5	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Administrasi Honor Tenaga Kontrak Daerah (TKD)	10 Bulan	5,131,755,550	6,113,742,070	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	5	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,044,115,350	1,590,558,800	
1	5	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam	38 unit	680,300,350	1,010,558,800	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	5	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perizinan Kendaraan Dinas Operasional (STNK)	30 Unit	27,200,000	30,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	5	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pemeliharaan AC Jumlah Sewa Pos Pemadam	40 Kali 1 Unit	305,970,000	300,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	5	1	02.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	45 kali	30,645,000	250,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	5	4			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		Persentase Capaian Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	80%	3,193,363,634	2,693,092,400	
1	5	4	02.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya				3,071,287,134	2,446,092,400	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						
1	5	4	02.01	1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peta Relawan Kebakaran	1 Dokumen	750	6,500,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	5	4	02.01	2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Frekuensi Operasional Pemadaman	12 Bulan	373,750,000	695,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	5	4	02.01	3	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Frekuensi Operasional Penyelamatan dan Evakuasi Korban Pengadaan Helm Rescue	12 Bulan 121 Buah	413,149,936	650,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	5	4	02.01	6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Gardu dan Rumah Penyimpanan Pompa Pembangunan Tower Sistem Komunikasi Kebakaran Tahap II Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran (Nozzel) Pengadaan Fire Helmet Pengadaan Fire Jacket 3 Layer Pengadaan Garasi Speed Boat Pengadaan Mesin Pompa Portable Pengadaan Motor Roda 3 Pengadaan Pompa Terapung Pengadaan Radio HT Pengadaan Selat Pemadam Pengadaan Gergaji Mesin (Chain Saw)	1 unit 1 paket 2 Jenis 43 Buah 43 Stel 1 Paket 2 Unit 1 Paket 2 Set 1 Paket 14 Roll 4 Jenis	2,268,637,198	744,592,400	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	5	4	02.01	7	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Petugas Mengikuti Diklat Teknis	2 Orang	15,000,000	350,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	5	4	02.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran				53,693,550	137,000,000	
1	5	4	02.02	1	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bangunan yang Terdata	60 Unit	10,000,000	30,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	5	4	02.02	2	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung di Inspeksi	40 Unit	43,693,550	107,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	5	4	02.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran				68,382,950	110,000,000	
1	5	4	02.04	1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Sosialisasi	360 Orang	30,000,000	50,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	5	4	02.04	2	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Relawan yang di Bina	8 Balakar	38,382,950	60,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
TOTAL									18,000,000,000	19,954,007,396	

RENCANA PROGRAM, DAN SUB KEGIATAN BELANJA LANGSUNG PERANGKAT DAERAH PADA RKPD KOTA BONTANG TAHUN 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1	6				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				15,245,000,000	16,785,690,900	
1	6	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	11,511,538,000	12,525,691,000	
1	6	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7,831,717,407	8,750,000,000	
1	6	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai ASN	32 orang	7,831,717,407	8,750,000,000	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
1	6	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				76,016,000	100,620,000	
1	6	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	12 orang	76,016,000	100,620,000	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
1	6	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				749,504,945	843,710,000	
1	6	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8 jenis	90,064,538	105,900,000	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
1	6	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Jenis Bahan Logistik	5 Jenis	56,842,298	62,530,000	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
1	6	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Jenis Barang Cetak	4 Jenis	22,981,820	25,280,000	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
1	6	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah	60 Kali	579,616,289	650,000,000	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
1	6	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				500,000,000	0	
1	6	1	02.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kendaraan operasional eselon 2	1 unit	500,000,000	0	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
1	6	1	02.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0	0	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
1	6	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,986,289,648	2,260,050,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	6	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah surat yang terkirim	10 kali	5,500,000	6,050,000	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
1	6	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pelaksanaan jasa komunikasi sumber daya air, listrik, internet	12 bulan	48,480,000	54,000,000	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
1	6	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai TKD DSPM	63 Orang	1,932,309,648	2,200,000,000	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
1	6	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				368,010,000	571,311,000	
1	6	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas	37 Unit	340,160,000	387,176,000	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
1	6	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21 Jenis	27,850,000	34,135,000	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
1	6	1	02.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Baru	Jumlah sapras yang di rehab	1 unit	0	150,000,000	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
1	6	2			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	100%	210,000,000	239,999,900	
1	6	2	02.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				210,000,000	239,999,900	
1	6	2	02.03	1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat	63 Orang	37,951,000	41,746,000	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
1	6	2	02.03	2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah koordinator daerah (Korda) dan Jumlah TKSK	4 Orang	54,839,000	60,322,900	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
1	6	2	02.03	4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah PSKS	30 lembaga	80,220,000	88,242,000	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
1	6	2	02.03	5	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Anggota Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	133 Orang	36,990,000	49,689,000	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
1	6	4			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan rehabilitasi sosial	100%	2,659,462,000	2,978,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	6	4	02.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				2,528,462,000	2,649,900,000	
1	6	4	02.01	1	Penyediaan Permakanan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Permakanan Jumlah penerima bantuan (Rentang Kasih)	90 Orang 1 Paket	2,200,540,000	2,220,594,000	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
1	6	4	02.01	2	Penyediaan Sandang	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pemenuhan Sandang Klien	100 Persen	0	0	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
1	6	4	02.01	3	Penyediaan Alat Bantu	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kebutuhan Dasar Berupa Alat Bantu yang Tersedia	8 Jenis	152,922,000	168,214,200	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
1	6	4	02.01	4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Reunifikasi dan Rujukan	40 Orang	75,000,000	126,091,800	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
1	6	4	02.01	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah penerima Bantuan Sosial Terencana / UEP	8 orang	50,000,000	65,000,000	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
1	6	4	02.01	6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pemenuhan Bimbingan Sosial Kepada Keluarga	100 Persen	0	0	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
1	6	4	02.01	7	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pemenuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	100 Persen	0	0	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
1	6	4	02.01	8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	100 Persen	0	0	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
1	6	4	02.01	9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	6	0	0	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
1	6	4	02.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pemberian Layanan Kedaruratan	15 orang	0	0	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
1	6	4	02.01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	10 Orang	0	0	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
1	6	4	02.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pemenuhan Layanan Rujukan	100 Persen	50,000,000	70,000,000	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	6	4	02.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial				131,000,000	328,100,000	
1	6	4	02.02	1	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	5 Orang	0	11,000,000	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
1	6	4	02.02	2	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pemberian Layanan Kedaruratan	15 Orang	0	22,000,000	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
1	6	4	02.02	3	Penyediaan Permakanan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Penyediaan Permakanan	12 Orang	20,000,000	22,000,000	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
1	6	4	02.02	4	Penyediaan Sandang	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Penyediaan Sandang	12 orang	20,000,000	22,000,000	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
1	6	4	02.02	5	Penyediaan Alat Bantu	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Penyediaan Alat Bantu	12 orang	0	22,000,000	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
1	6	4	02.02	6	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Perbekalan Kesehatan Di Luar Panti	40 Orang	41,000,000	45,100,000	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
1	6	4	02.02	7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	12 Orang	0	22,000,000	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
1	6	4	02.02	8	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penandang Masalah Kesejahteraan Sosial	12 Orang	0	22,000,000	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
1	6	4	02.02	9	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	20 orang	0	11,000,000	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
1	6	4	02.02	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Klien	10 orang	0	11,000,000	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
1	6	4	02.02	12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelayanan Reunifikasi Keluarga	24 orang	30,000,000	51,000,000	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
1	6	4	02.02	13	Pemberian Layanan Rujukan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pemberian Layanan Rujukan	12 orang	20,000,000	45,000,000	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
1	6	4	02.02	14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Mitra Kerjasama dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial	5 Lembaga	0	22,000,000	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	6	5			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100%	534,000,000	624,000,000	
1	6	5	02.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				534,000,000	624,000,000	
1	6	5	02.02	1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah DTKS yang di verifikasi dan validasi	8815 Rumah Tangga	250,000,000	350,000,000	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
1	6	5	02.02	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data KPM Program Sembako yang dikelola	4480 KPM	206,000,000	150,000,000	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
1	6	5	02.02	3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)	16 orang	78,000,000	102,000,000	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
1	6	5	02.02	4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	30 orang	0	22,000,000	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
1	6	6			PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Persentase korban bencana alam/sosial yang terlayani	100%	330,000,000	418,000,000	
1	6	6	02.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				270,000,000	332,000,000	
1	6	6	02.01	1	Penyediaan Makanan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan kebutuhan dasar berupa permakanan	1000 orang	250,000,000	310,000,000	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
1	6	6	02.01	2	Penyediaan Sandang	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan kebutuhan dasar berupa sandang	400 orang	20,000,000	22,000,000	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
1	6	6	02.01	3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana Pengungsian yang disediakan	2 unit	0	0	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
1	6	6	02.01	4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	30 orang	0	0	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
1	6	6	02.01	5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pelayanan Pelayanan Psikososial	125 orang	0	0	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
1	6	6	02.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota				60,000,000	86,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	6	6	02.02	1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Relawan	33 orang	0	0	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
1	6	6	02.02	2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Anggota TAGANA	33 Orang	60,000,000	86,000,000	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				455,000,000	767,500,000	
2	13	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		Persentase LKK dan LAK yang aktif	100%	455,000,000	767,500,000	
2	13	5	02.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota				455,000,000	767,500,000	
2	13	5	02.01	3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	4 Lembaga	65,000,000	82,500,000	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
2	13	5	02.01	4	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan	4 Lembaga	65,000,000	82,500,000	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
2	13	5	02.01	6	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Fasilitasi SDM Posyantek	2 kegiatan	125,000,000	137,500,000	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
2	13	5	02.01	9	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Anggota Tim Penggerak PKK Kota Bontang	50 orang	200,000,000	465,000,000	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
TOTAL									15,700,000,000	17,553,190,900	

RENCANA PROGRAM, DAN SUB KEGIATAN BELANJA LANGSUNG PERANGKAT DAERAH PADA RKPD KOTA BONTANG TAHUN 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
2	7				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				8,850,000,000	9,722,835,541	
2	7	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	7,871,800,000	8,482,835,541	
2	7	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5,947,079,883	6,244,433,877	
2	7	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			5,947,079,883	6,244,433,877	Dinas Ketenagakerjaan
2	7	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				20,000,000	50,000,000	
2	7	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			20,000,000	50,000,000	Dinas Ketenagakerjaan
2	7	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				333,876,000	425,000,000	
2	7	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Alat Tulis Kantor jumlah bahan kebersihan kantor yang tersedia	25 jenis 5 jenis	35,000,000	60,000,000	Dinas Ketenagakerjaan
2	7	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			40,700,000	50,000,000	Dinas Ketenagakerjaan
2	7	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			35,000,000	45,000,000	Dinas Ketenagakerjaan
2	7	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			223,176,000	270,000,000	Dinas Ketenagakerjaan
2	7	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,494,361,600	1,573,401,664	
2	7	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			4,000,000	4,000,000	Dinas Ketenagakerjaan
2	7	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			48,000,000	52,800,000	Dinas Ketenagakerjaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	7	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1,442,361,600	1,516,601,664	Dinas Ketenagakerjaan
2	7	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				76,482,517	190,000,000	
2	7	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah bbm tersedia Jumlah pajak kendaraan yang terbayar	7643 liter 12 unit	72,497,550	160,000,000	Dinas Ketenagakerjaan
2	7	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			3,984,967	30,000,000	Dinas Ketenagakerjaan
2	7	3			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Persentase produktifitas tenaga kerja, Persentase pencari kerja yang dilatih	1,61%	710,000,000	800,000,000	
2	7	3	02.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi				710,000,000	800,000,000	
2	7	3	02.01	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			710,000,000	800,000,000	Dinas Ketenagakerjaan
2	7	4			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Persentase pencari kerja yang ditempatkan	19,4	47,000,000	100,000,000	
2	7	4	02.01		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota				35,000,000	100,000,000	
2	7	4	02.01	3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			35,000,000	100,000,000	Dinas Ketenagakerjaan
2	7	4	02.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja				12,000,000	0	
2	7	4	02.03	1	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12,000,000	0	Dinas Ketenagakerjaan
2	7	5			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Angka sengketa pengusaha pekerja pertahun	7,09	221,200,000	340,000,000	
2	7	5	02.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota				221,200,000	340,000,000	
2	7	5	02.02	1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			150,000,000	180,000,000	Dinas Ketenagakerjaan
2	7	5	02.02	2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			9,000,000	50,000,000	Dinas Ketenagakerjaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	7	5	02.02	4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			62,200,000	110,000,000	Dinas Ketenagakerjaan
TOTAL									8,850,000,000	9,722,835,541	

RENCANA PROGRAM, DAN SUB KEGIATAN BELANJA LANGSUNG PERANGKAT DAERAH PADA RKPD KOTA BONTANG TAHUN 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
2	8				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				8,550,375,000	14,745,978,838	
2	8	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	7,452,902,700	13,482,856,200	
2	8	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0	0	
2	8	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
2	8	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5,650,750,000	11,650,750,000	
2	8	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta	30 Orang	5,650,000,000	5,650,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
2	8	1	02.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			750	6,000,750,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
2	8	1	02.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
2	8	1	02.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
2	8	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0	0	
2	8	1	02.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
2	8	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				252,346,500	277,300,000	
2	8	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			35,000,000	35,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
2	8	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
2	8	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			46,5	25,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
2	8	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			217,300,000	217,300,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
2	8	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,203,272,000	1,208,272,000	
2	8	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Materai	500 Lembar	5,000,000	5,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	8	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
2	8	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1,198,272,000	1,203,272,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
2	8	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				346,534,200	346,534,200	
2	8	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
2	8	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			316,534,200	316,534,200	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
2	8	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan kantor yang diservis	45 unit	30,000,000	30,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
2	8	2			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD	47,78 & 0,375	407,200,000	410,000,000	
2	8	2	02.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota				407,200,000	410,000,000	
2	8	2	02.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang dikoordinasikan	31 OPD	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
2	8	2	02.01	3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Program Kegiatan Responsif Gender	31 Orang	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
2	8	2	02.01	4	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peserta yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	31 Peserta	407,200,000	410,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
2	8	3			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Persentase tertanganinya Kasus Kekerasan terhadap Perempuan	100%	277,030,000	352,030,000	
2	8	3	02.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				81,330,000	103,830,000	
2	8	3	02.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sosialisasi terkait perlindungan perempuan dan kampanye Hari Anti Kekerasan	24 Kali	81,330,000	103,830,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
2	8	3	02.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota				95,700,000	118,200,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	8	3	02.02	1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penyediaan Layanan Pengaduan (UPTD)	1 UPTD	95,700,000	118,200,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
2	8	3	02.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100,000,000	130,000,000	
2	8	3	02.03	4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah jejaring lembaga penyedia layanan	1 Lembaga	100,000,000	130,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
2	8	4			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		Persentase Layanan Pembelajaran Keluarga	20%	202,940,000	233,234,000	
2	8	4	02.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0	0	
2	8	4	02.01	3	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Acara DWP (Acara HUT) Jumlah Peserta Pelatihan Jumlah Peserta Sosialisasi	1 Kali 30 Orang 100 Orang	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
2	8	4	02.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				100,000,000	120,000,000	
2	8	4	02.02	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			100,000,000	120,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
2	8	4	02.03		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				102,940,000	113,234,000	
2	8	4	02.03	1	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pasangan Catin & Keluarga	15 Catin	102,940,000	113,234,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
2	8	5			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		Cakupan data gender dan anak terpadu	100%	0	0	
2	8	5	02.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0	0	
2	8	5	02.01	1	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
2	8	6			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Predikat Kota Layak Anak	Nindya	95,302,300	141,358,638	
2	8	6	02.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				95,302,300	141,358,638	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	8	6	02.01	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			95,302,300	109,597,645	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
2	8	6	02.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	31,760,993	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
2	8	6	02.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				0	0	
2	8	6	02.02	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
2	8	7			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Persentase Layanan Anak yang memerlukan perlindungan khusus	100%	115,000,000	126,500,000	
2	8	7	02.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				25,000,000	27,500,000	
2	8	7	02.01	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			25,000,000	27,500,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
2	8	7	02.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				90,000,000	99,000,000	
2	8	7	02.02	1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			90,000,000	99,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
2	8	7	02.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0	0	
2	8	7	02.03	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				449,625,000	388,900,000	
2	14	2			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		Rata-rata jumlah anak per keluarga	2	165,900,000	165,900,000	
2	14	2	02.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk				75,900,000	75,900,000	
2	14	2	02.01	2	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			75,900,000	75,900,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	14	2	02.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				90,000,000	90,000,000	
2	14	2	02.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
2	14	2	02.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
2	14	2	02.02	14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			90,000,000	90,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
2	14	3			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		Rasio Akseptor KB	70%	60,725,000	0	
2	14	3	02.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)				0	0	
2	14	3	02.02	3	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
2	14	3	02.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota				60,725,000	0	
2	14	3	02.03	2	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
2	14	3	02.03	3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			60,725,000	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
2	14	3	02.03	4	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
2	14	3	02.03	6	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
2	14	3	02.03	8	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
2	14	3	02.03	9	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
2	14	3	02.03	10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
2	14	3	02.03	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
2	14	3	02.03	13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
2	14	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		Persentase pemberdayaan	70%	223,000,000	223,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							kelompok kegiatan bangga kencana				
2	14	4	02.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				148,000,000	148,000,000	
2	14	4	02.01	2	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			148,000,000	148,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
2	14	4	02.01	3	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
2	14	4	02.01	4	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
2	14	4	02.01	5	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
2	14	4	02.01	7	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
2	14	4	02.01	8	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
2	14	4	02.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				75,000,000	75,000,000	
2	14	4	02.02	1	Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
2	14	4	02.02	2	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			75,000,000	75,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
TOTAL									9,000,000,000	15,134,878,838	

RENCANA PROGRAM, DAN SUB KEGIATAN BELANJA LANGSUNG PERANGKAT DAERAH PADA RKPD KOTA BONTANG TAHUN 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
2	9				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				12,878,195,054	16,152,000,000	
2	9	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	11,189,406,005	14,402,000,000	
2	9	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7,994,899,124	10,000,000,000	
2	9	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			7,994,899,124	10,000,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
2	9	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				396,364,521	752,000,000	
2	9	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	150,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
2	9	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			11,000,000	150,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
2	9	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			87,834,180	150,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
2	9	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1,716,000	2,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
2	9	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Makan Rapat	1 paket	295,814,341	300,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
2	9	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				600,000,000	0	
2	9	1	02.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	pematangan lahan (urugan) BBI pembangunan pagar lingkungan BBI	1 Paket 1 paket	600,000,000	0	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
2	9	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2,287,142,360	3,035,000,000	
2	9	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			13,720,000	20,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
2	9	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			11,400,000	15,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
2	9	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			2,262,022,360	3,000,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
2	9	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				511,000,000	615,000,000	
2	9	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			500,000,000	600,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	9	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			11,000,000	15,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
2	9	3			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		Skor Pola Pangan Harapan (PPH Konsumsi)	87	1,525,864,110	1,450,000,000	
2	9	3	02.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan				147,892,976	200,000,000	
2	9	3	02.01	1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			147,892,976	200,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
2	9	3	02.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota				544,418,994	600,000,000	
2	9	3	02.02	3	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			544,418,994	600,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
2	9	3	02.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi				833,552,140	650,000,000	
2	9	3	02.04	1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Prasarana Perkantoran	1 paket	352,201,750	250,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
2	9	3	02.04	2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pengadaan pakaian lapangan	1 paket	481,350,390	400,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
2	9	4			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		Persentase ketersediaan energi dan protein perkapita	100%	74,934,449	150,000,000	
2	9	4	02.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan				74,934,449	150,000,000	
2	9	4	02.01	1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			74,934,449	150,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
2	9	5			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		Persentase Pengawasan Keamanan Pangan segar asal tumbuhan	100%	87,990,490	150,000,000	
2	9	5	02.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota				87,990,490	150,000,000	
2	9	5	02.01	5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			87,990,490	150,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				9,044,752,370	2,766,500,000	
3	25	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	11,000,000	30,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	25	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				11,000,000	30,000,000	
3	25	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			11,000,000	30,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
3	25	3			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		Produksi perikanan tangkap	100%	6,634,600,000	1,686,500,000	
3	25	3	02.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota				5,077,905,000	1,486,500,000	
3	25	3	02.01	2	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Alat bantu penangkapan ikan row material rumpon Jaring nelayan Kapal Penangkap ikan Penunjang Penangkapan ikan Prasarana kapal Prasarana Rumpon Row material alat tangkap gill net	1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket	5,077,905,000	1,486,500,000	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
							Row Material Alat tangkappurse seine Tempat Penjemuran ikan selambai	1 paket 1 paket			
3	25	3	02.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota				1,556,695,000	200,000,000	
3	25	3	02.02	1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Diklat perikanan Kompotensi nelayan Mesin 13 pk	1 paket 1 paket 1 paket	1,356,695,000	200,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
							Prasarana penangkapan ikan putih	1 paket			
3	25	3	02.02	2	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil				200,000,000	0	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
3	25	4			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		Produksi perikanan budidaya	100%	1,779,772,370	350,000,000	
3	25	4	02.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil				1,079,772,370	150,000,000	
3	25	4	02.02	1	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	bak fiber glass Induk Ikan dan BBI Prasarana Produksi BBI	1 paket 1 paket 1 paket	986,940,100	0	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	25	4	02.02	4	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			92,832,270	150,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
3	25	4	02.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan				700,000,000	200,000,000	
3	25	4	02.04	2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jasa konsultasi pengawasan pematangan lahan (urugan) jasa konsultasi perencanaan pematangan lahan (Urugan) mesin stempel speddboat	1 Paket 1 Paket 1 paket 1 paket	650,000,000	100,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
3	25	4	02.04	5	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			50,000,000	100,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
3	25	6			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		Persentase peningkatan produktifitas pengelolaan hasil perikanan	30%	619,380,000	700,000,000	
3	25	6	02.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil				69,380,000	150,000,000	
3	25	6	02.02	1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			69,380,000	150,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
3	25	6	02.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota				550,000,000	550,000,000	
3	25	6	02.03	2	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cold Box HDPE	1 paket	550,000,000	550,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
							Mesin Produksi ES mini Pengadaan Pakaian Batik	1 paket 1 paket			
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				3,329,831,576	2,300,000,000	
3	27	2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Persentase pemenuhan sarana pertanian	40%	1,508,874,000	1,200,000,000	
3	27	2	02.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				125,000,000	200,000,000	
3	27	2	02.01	1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			125,000,000	200,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	27	2	02.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota				275,000,000	300,000,000	
3	27	2	02.05	5	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan SDM Penyuluh Peternakan	1 paket	275,000,000	300,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
3	27	2	02.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain				1,108,874,000	700,000,000	
3	27	2	02.06	1	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bibit itik	1 paket	1,108,874,000	700,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
							Bibit ternak (Demplo peternakan)	1 paket			
							Bibit ternak kerbau	1 paket			
3	27	3			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Persentase pemenuhan prasarana pertanian unit pelayanan	100%	855,000,000	0	
3	27	3	02.02		Pembangunan Prasarana Pertanian				855,000,000	0	
3	27	3	02.02	9	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pembuatan Parkiran dan Kanopi Puskesmas Pembuatan Kandang Ayam Potong Pembuatan Kandang sementara Ternak Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perencanaan dan pengawasan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket	855,000,000	0	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
3	27	4			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		Cakupan wilayah pengendalian kesehatan hewan	100%	504,736,698	600,000,000	
3	27	4	02.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota				318,986,698	400,000,000	
3	27	4	02.01	1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			318,986,698	400,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
3	27	4	02.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota				185,750,000	200,000,000	
3	27	4	02.02	1	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			185,750,000	200,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	27	5			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		Cakupan wilayah yang terkendali dari bencana pertanian	100%	99,678,894	150,000,000	
3	27	5	02.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota				99,678,894	150,000,000	
3	27	5	02.01	1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			99,678,894	150,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
3	27	7			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan pertanian	100%	361,541,984	350,000,000	
3	27	7	02.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				361,541,984	350,000,000	
3	27	7	02.01	2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan Penyuluh Pertanian	1 paket	267,496,991	250,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
3	27	7	02.01	3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Taman Hidroponik	1 paket	94,044,993	100,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				164,000,000	0	
3	25	3			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		Produksi perikanan tangkap	100%	164,000,000	0	
3	25	3	02.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				164,000,000	0	
3	25	3	02.03	2	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			164,000,000	0	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				180,000,000	200,000,000	
3	27	3			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Persentase pemenuhan prasarana pertanian unit pelayanan	100%	180,000,000	200,000,000	
3	27	3	02.02		Pembangunan Prasarana Pertanian				180,000,000	200,000,000	
3	27	3	02.02	7	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pakaian Lapangan RPH	1 paket	180,000,000	200,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
TOTAL									26,196,779,000	21,418,500,000	

RENCANA PROGRAM, DAN SUB KEGIATAN BELANJA LANGSUNG PERANGKAT DAERAH PADA RKPD KOTA BONTANG TAHUN 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				41,605,150,000	48,529,670,000	
2	11	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	14,154,000,000	14,582,170,000	
2	11	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1,830,000	2,000,000	
2	11	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1,830,000	2,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				10,002,000,000	10,500,000,000	
2	11	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Gaji dan Tunjangan yang Dibayarkan	12 bulan	10,000,000,000	10,500,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	02.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan Keuangan akhir taahun	5 buku	2,000,000	0	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				120,000,000	100,000,000	
2	11	1	02.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			30,000,000	0	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	25 orang	90,000,000	100,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				995,000,000	945,000,000	
2	11	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	11 jenis	300,000,000	250,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				100,000,000	100,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Barang cetakan dan peenggandaan	4 jenis	30,000,000	30,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			565,000,000	565,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				955,170,000	955,170,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	11	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah materai yang disediakan Jumlah surat yang terkirim	517 lembar 12 bulan	5,170,000	5,170,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pembayaran tagihan air Pembayaran tagihan internet Pembayaran tagihan listrik	12 bulan 12 bulan 12 bulan	100,000,000	100,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah TKD yang tersedia Tagihan BPJS yang bayar	19 orang 12 bulan	850,000,000	850,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2,080,000,000	2,080,000,000	
2	11	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1,800,000,000	1,800,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			100,000,000	100,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	02.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			180,000,000	180,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	2			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup	75%	300,375,000	0	
2	11	2	02.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota				150,000,000	0	
2	11	2	02.01	1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dokumen RPPL	1 dokumen	150,000,000	0	Dinas Lingkungan Hidup
							Dokumen RPP Mutu Air	1 dokumen			
2	11	2	02.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota		Jumlah penyelenggaraan KLHS	1 kali	150,375,000	0	
2	11	2	02.02	1	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah dokumen KLHS RDTR	1 dokumen	150,375,000	0	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	3			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		Cakupan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	93%	531,569,871	825,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	11	3	02.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				431,569,871	725,000,000	
2	11	3	02.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah titik pantau kualitas air,udara dan tanah Pemeliharaan rumah apung kapal Pemeliharaan speed boat	134 titik 1 tahun 1 tahun	304,299,000	475,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	3	02.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Laporan Emisi GRK Surveiutupan lahan	3 laporan 1 tahun	20,000,000	50,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	3	02.01	3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DED Laboratorium Lingkungan Jumlah bahan dan alat lab Pemeliharaan alat lab	1 dokumen 10 jenis 1 tahun	107,270,871	200,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	3	02.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				100,000,000	100,000,000	
2	11	3	02.03	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bibit pohon yg disediakan	80 bibit	100,000,000	100,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	4			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		Cakupan pengelolaan Kehati	7%	12,302,505,129	15,575,000,000	
2	11	4	02.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		Prosentase penanganan RTH	100%	12,302,505,129	15,575,000,000	
2	11	4	02.01	1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dokumen Rencana Induk Pengelolaan (RIP) KEHATI	1 dokumen	100,000,000	0	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	4	02.01	4	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dokumen inventarisasi RTH DLH Jumlah sapras tersedia Pembangunan taman Rehabilitasi RTH	1 dok 6 jenis 1 paket 1 ha/tahun	12,130,505,129	15,500,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
							RTH yang dikelola	25 RTH			
2	11	4	02.01	5	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan KEHATI	1 dokumen	50,000,000	20,000,000	Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	11	4	02.01	6	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bimtek pengelolaan KEHATI	2 kali	20,000,000	40,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	4	02.01	7	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana	1 paket	2,000,000	15,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	5			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		Persentase pengendalian bahan berbahaya & beracun dan limbah bahan berbahaya & beracun	100%	1,200,000	1,500,000	
2	11	5	02.01		Penyimpanan Sementara Limbah B3				1,200,000	1,500,000	
2	11	5	02.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan Fasilitasi Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3	1 laporan	1,200,000	1,500,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		Tingkat ketaatan usaha/ kegiatan terhadap izin lingkungan atau PPLH	4%	15,500,000	70,000,000	
2	11	6	02.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Ketaatan pelaku usaha	100%	15,500,000	70,000,000	
2	11	6	02.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pelaku usaha difasilitasi untuk penilaian dokumen lingkungan	15 pelaku usaha	10,000,000	40,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
							Tersedianya Dokumen Status Lingkungan Hidup (SLHD)	1 dokumen			
2	11	6	02.01	3	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang berijin	25 usaha/keg	2,500,000	15,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	6	02.01	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Usaha dan atau Kegiatan yang diawasi	25 usaha/kegiatan	3,000,000	15,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	8			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Cakupan kapasitas diklat dan penyuluhan	20%	153,000,000	428,000,000	
2	11	8	02.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				153,000,000	428,000,000	
2	11	8	02.01	1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah peserta pelatihan Adiwiyata	75 orang	103,000,000	103,000,000	Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	11	8	02.01	2	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Komunitas Peduli Lingkungan yang Dibina	3 komunitas	20,000,000	25,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	8	02.01	3	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah peserta pelatihan	60 orang	30,000,000	300,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	9			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Persentase masyarakat/ lembaga masyarakat/ dunia usaha/ dunia pendidikan/ filantropi yang memiliki kinerja baik dalam PPLH	20%	120,000,000	68,000,000	
2	11	9	02.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				120,000,000	68,000,000	
2	11	9	02.01	1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah penghargaan yang diterima	26 penghargaan	120,000,000	68,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		Cakupan penanganan kasus	20%	65,000,000	75,000,000	
2	11	10	02.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota				65,000,000	75,000,000	
2	11	10	02.01	1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	12 kasus	50,000,000	50,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	10	02.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kasus yang diselesaikan	6 kasus	15,000,000	25,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Persentase pengelolaan sampah	99%	13,962,000,000	16,905,000,000	
2	11	11	02.01		Pengelolaan Sampah		prosentase penanganan sampah	73%	13,962,000,000	16,905,000,000	
2	11	11	02.01	2	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah sampah yang tereduksi	10479 ton	232,000,000	600,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	02.01	3	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah sampah yang tertangani	29423 ton	12,905,000,000	15,000,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	02.01	4	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah kelompok masyarakat yang mengelola sampah secara mandiri berbasis komunitas	11 komas	100,000,000	280,000,000	Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	11	11	02.01	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pertemuan per tahun	1 kali	25,000,000	25,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	02.01	7	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tutupan sel aktif per tahun	2 sel aktif	700,000,000	1,000,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
TOTAL									41,605,150,000	48,529,670,000	

RENCANA PROGRAM, DAN SUB KEGIATAN BELANJA LANGSUNG PERANGKAT DAERAH PADA RKPD KOTA BONTANG TAHUN 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				9,000,000,000	69,000,000	
2	12	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Presentase Pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	8,845,000,000	11,500,000	
2	12	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5,000,000	0	
2	12	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah renstra	1 buku	5,000,000	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6,695,432,436	0	
2	12	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah ASN penerima gaji dan Tunjangan	38 orang	6,695,432,436	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				60,000,000	11,500,000	
2	12	1	02.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah pegawai yang memakai seragam kerja	55 orang	50,000,000	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah pegawai yang mengikuti diklat	10 orang	10,000,000	11,500,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				523,250,236	0	
2	12	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	4 jenis	5,070,995	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	9 paket	200,000,000	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	paket makanan dan minuman	3 paket	25,083,013	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah barang cetakan dan penggandaan	3 paket	89,164,228	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah perjalanan dinas yang terlaksana	30 orang/kegiatan	203,932,000	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				216,924,138	0	
2	12	1	02.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpenuhi	2 unit	160,366,634	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	12	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah meubelair yang terpenuhi	4 jenis	53,250,000	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	02.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah apar yang siap pakai	7 buah	3,307,504	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,021,478,400	0	
2	12	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah surat yang terkirim dan materi yang tersedia	12 bulan	18,000,000	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah tagihan listrik, air, telepon, internet dan tv kabel	12 bulan	229,200,000	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlahTKD dan jasa kebersihan yang tersedia	12 bulan	774,278,400	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				322,914,790	0	
2	12	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	18 unit	219,491,600	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah kendaraan dinas/operasional yang bayar pajak, bea dan perijinan	19 unit	11,900,000	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	9 item	49,404,300	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah gedung yang dipelihara	4 gedung	42,118,890	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	2			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		Rasio penduduk berKTP per satuan Penduduk, Cakupan penerbitan KTP	0,99 & 99%	50,000,000	0	
2	12	2	02.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk				20,000,000	0	
2	12	2	02.01	2	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah wajib KTP	99%	10,000,000	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	2	02.01	4	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah kegiatan peningkatan pendaftaran penduduk	1 kegiatan	10,000,000	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	2	02.02		Penataan Pendaftaran Penduduk				10,000,000	0	
2	12	2	02.02	2	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah blangko KIA	12.000 keping	10,000,000	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	2	02.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				10,000,000	0	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	12	2	02.03	1	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah kegiatan koordinasi	1 kegiatan	10,000,000	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	2	02.04		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				10,000,000	0	
2	12	2	02.04	3	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah bimtek	3 kali	10,000,000	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	3			PROGRAM PENCATATAN SIPIL		Rasio bayi berakte kelahiran, Rasio pasangan berakte nikah, Cakupan penerbitan akta kelahiran	0,96, 0,80, 96%	55,000,000	57,500,000	
2	12	3	02.01		Pelayanan Pencatatan Sipil				35,000,000	57,500,000	
2	12	3	02.01	2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah kegiatan	4 jenis	25,000,000	57,500,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	3	02.01	5	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah buku	21 buku	10,000,000	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	3	02.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				10,000,000	0	
2	12	3	02.02	1	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah kegiatan koordinasi	3 kegiatan	10,000,000	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	3	02.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				10,000,000	0	
2	12	3	02.03	4	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah bimtek	13 kali	10,000,000	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	4			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		Cakupan pengelolaan informasi Adminduk	100%	40,000,000	0	
2	12	4	02.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan				20,000,000	0	
2	12	4	02.01	1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah laporan pengolahan dan penyajian data	2 kali	10,000,000	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	4	02.01	2	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah lembaga pemanfaatan data	3 perjanjian kerjasama	10,000,000	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	4	02.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				10,000,000	0	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	12	4	02.03	5	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	4 kali sosialisasi	10,000,000	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	4	02.04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				10,000,000	0	
2	12	4	02.04	3	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah bimtek	4 kali	10,000,000	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	5			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		Persentase penyampaian data profil kependudukan	100%	10,000,000	0	
2	12	5	02.01		Penyusunan Profil Kependudukan				10,000,000	0	
2	12	5	02.01	2	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah profil kependudukan	1 buku profil	10,000,000	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
TOTAL									9,000,000,000	69,000,000	

RENCANA PROGRAM, DAN SUB KEGIATAN BELANJA LANGSUNG PERANGKAT DAERAH PADA RKPD KOTA BONTANG TAHUN 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				18,030,000,000	17,420,000,000	
2	15	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	12,274,405,850	12,794,405,850	
2	15	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5,393,190	5,393,190	
2	15	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1,349,700	1,349,700	Dinas Perhubungan
2	15	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan			4,043,490	4,043,490	Dinas Perhubungan
2	15	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7,889,063,509	7,889,063,509	
2	15	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNS	46 Orang	7,885,013,419	7,885,013,419	Dinas Perhubungan
2	15	1	02.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan			1,350,690	1,350,690	Dinas Perhubungan
2	15	1	02.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan	Jumlah dokumen	1 Dokumen	1,349,700	1,349,700	Dinas Perhubungan
2	15	1	02.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1,349,700	1,349,700	Dinas Perhubungan
2	15	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				200,000,000	400,000,000	
2	15	1	02.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan	Pengadaan pakaian dinas beserta atributnya	110 Orang	0	0	Dinas Perhubungan
2	15	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan	Meningkatnya kapasitas SDM dan pelayanan kepada Masyarakat	1 kegiatan	200,000,000	400,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				714,023,648	1,004,023,648	
2	15	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan	Jumlah komponen listrik/penerangan yang disediakan	1 tahun	5,461,697	5,461,697	Dinas Perhubungan
2	15	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1 tahun	100,000,000	150,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	1 tahun	108,377,584	108,377,584	Dinas Perhubungan
2	15	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia	1 tahun	100,184,367	140,184,367	Dinas Perhubungan
2	15	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	1 tahun	400,000,000	600,000,000	Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	15	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0	0	
2	15	1	02.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	1 Mobil	0	0	Dinas Perhubungan
2	15	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2,754,528,000	2,754,528,000	
2	15	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan	Jumlah surat yang terkirim	1 tahun	6,500,000	6,500,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan	Tersedianya jaringan komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 tahun	244,900,000	244,900,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan	Terwujudnya pelayanan yang optimal	1 tahun	2,503,128,000	2,503,128,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				711,397,503	741,397,503	
2	15	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan	Terpeliharanya kendaraan dinas	1 tahun	600,000,000	600,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan	Terwujudnya pemeliharaan gedung kantor yang aman nyaman dan sehat	1 tahun	100,897,503	122,897,503	Dinas Perhubungan
2	15	1	02.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan	tersedianya sistem pengamanan geedung kantor	1 tahun	10,500,000	18,500,000	Dinas Perhubungan
2	15	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Persentase pelaksanaan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	100%	5,755,594,150	4,625,594,150	
2	15	2	02.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				5,655,594,150	4,525,594,150	
2	15	2	02.02	2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan	Tersedianya fasilitas penerangan jalan	20 Lokasi	2,055,594,150	325,594,150	Dinas Perhubungan
2	15	2	02.02	3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan	Pengecatan median jalan, trotoar	1 kegiatan	200,000,000	200,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	2	02.02	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan	Bayar Listrik dan Gaji Pemeliharaan APILL Pemeliharaan Warning Light	1 tahun 15 lokasi 11 lokasi	3,400,000,000	4,000,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	2	02.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C				0	0	
2	15	2	02.03	1	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan	Jumlah kajian pembangunan terminal penumpang tipe C	1 Dokumen	0	0	Dinas Perhubungan
2	15	2	02.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir				0	0	
2	15	2	02.04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan	Penataan titik parkir, frekuensi parkir,frekuensi sosialisasi melalui media	3 Kegiatan	0	0	Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	15	2	02.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				0	0	
2	15	2	02.05	1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan	Pembangunan gedung uji, penyusunan dokumen pendukung pembangunan gedung uji	2 Kegiatan	0	0	Dinas Perhubungan
2	15	2	02.05	4	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan	Tersedianya bukti lulus uji	1 tahun	0	0	Dinas Perhubungan
2	15	2	02.05	7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan	Jumlah alat uji kendaraan bermotor yang dipelihara	1 tahun	0	0	Dinas Perhubungan
2	15	2	02.05	8	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan	Frekuensi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor	1 tahun	0	0	Dinas Perhubungan
2	15	2	02.05	9	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan	Terif retribusi PKB	1 tahun	0	0	Dinas Perhubungan
2	15	2	02.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				0	0	
2	15	2	02.06	1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan	Master Plan	1 Dokumen	0	0	Dinas Perhubungan
2	15	2	02.06	4	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan	Terciptanya pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten/kota yang lebih efektif	1 tahun	0	0	Dinas Perhubungan
2	15	2	02.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan				100,000,000	100,000,000	
2	15	2	02.08	2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan	Terlaksananya inspeksi audit dan pemantauan unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor	1 tahun	0	0	Dinas Perhubungan
2	15	2	02.08	5	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan	Peningkatan taat uji berkala kendaraan bermotor Terlaksananya inspeksi audit dan pemantauan sistem manajemen angkutan umum	1 tahun 1 tahun	100,000,000	100,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	2	02.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				0	0	
2	15	2	02.09	2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan	Frekuensi monitoring jasa angkutan barang	1 tahun	0	0	Dinas Perhubungan
2	15	2	02.11		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				0	0	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	15	2	02.11	2	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan	Jumlah peserta sosialisasi	1 tahun	0	0	Dinas Perhubungan
2	15	3			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		Persentase meningkatnya keselamatan pelayaran kapal angkutan penyebrangan	100%	0	0	
2	15	3	02.01		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota				0	0	
2	15	3	02.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan	Pengawasan pelaksanaan izin usaha angkutan laut	1 tahun	0	0	Dinas Perhubungan
2	15	3	02.06		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota				0	0	
2	15	3	02.06	2	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan	Pesrta sosialisasi	1 tahun	0	0	Dinas Perhubungan
2	15	3	02.11		Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau				0	0	
2	15	3	02.11	1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan	Penyusunan dokumen rencana induk dan daerah lingkungan kerja (DLKR) daerah lingkungan kepentingan (DLKP) Pelabuhan pengumpan lokal	1 tahun	0	0	Dinas Perhubungan
TOTAL									18,030,000,000	17,420,000,000	

RENCANA PROGRAM, DAN SUB KEGIATAN BELANJA LANGSUNG PERANGKAT DAERAH PADA RKPD KOTA BONTANG TAHUN 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				21,569,210,344	19,259,631,380	
2	16	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	10,849,860,678	10,926,683,005	
2	16	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				46,524,500	51,176,950	
2	16	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang Tersusun	1 Dokumen	46,524,500	51,176,950	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun	7,368,865,611	8,105,752,171	
2	16	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Dibayarkan	32 Orang/Bulan	7,360,133,403	8,096,146,743	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	02.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan yang Tersusun	1 Dokumen	5,213,104	5,734,414	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	02.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelaporan yang Tersusun	1 Dokumen	3,519,104	3,871,014	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	234,758,000	61,722,100	
2	16	1	02.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Pakaian Dinas yang Disediakan	32 Stel	134,758,000	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Diklat yang Diikuti	1 Kali	100,000,000	61,722,100	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				1,093,338,085	1,024,019,854	
2	16	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	1 Jenis	3,299,487	3,629,436	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia	1 Jenis	236,594,436	260,253,880	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bahan Logistik yang Tersedia	1 Jenis	170,138,096	187,151,905	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Tersedia	1 Jenis	51,035,621	56,139,183	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Tersedia	1 Jenis	8,431,500	9,274,650	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang Diikuti	1 Kali	623,838,945	507,570,800	Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	16	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				500,000,000	60,000,000	
2	16	1	02.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas yang Diadakan	2 Unit	500,000,000	60,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,050,412,880	1,155,454,168	
2	16	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Materai yang Tersedia	1 Lembar	4,290,000	4,719,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Jasa Komunikasi yang Terbayarkan	1 Bulan	6,600,000	7,260,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gaji Non PNS yang Dibayarkan	23 Orang/Bulan	1,039,522,880	1,143,475,168	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				555,961,602	468,557,762	
2	16	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang DIsediakan	1 Bulan	295,688,800	325,257,680	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Bulan	9,350,000	10,285,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Terpelihara	1 Bulan	50,000,000	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara	1 Bulan	200,922,802	133,015,082	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	2			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi	81,00%	1,690,041,853	1,258,057,739	
2	16	2	02.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Terkelolanya Informasi dan Komunikasi Publik Kota Bontang	12 Bulan	1,690,041,853	1,258,057,739	
2	16	2	02.01	2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Monitoring Opini dan Aspirasi Publik yang Dilakukan	1 Kali	26,244,903	28,869,394	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	2	02.01	4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Konten dan Perencanaan Komunikasi Publik	5 Media	221,121,296	243,233,426	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	2	02.01	5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Media Komunikasi Publik	3 Media	145,862,300	50,448,530	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	2	02.01	6	Pelayanan Informasi Publik	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah tenaga pengelola pelayanan informasi publik	3 Orang	136,823,113	150,505,424	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	2	02.01	7	Layanan Hubungan Media	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kerjasama media	24 Media	825,000,000	306,511,700	Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	16	2	02.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah diklat yang diikuti	10 Diklat	50,000,000	55,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	2	02.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kelompok informasi masyarakat yang dibina	3 Kelompok	284,990,241	423,489,265	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	3			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	80,00%	9,029,307,813	7,074,890,636	
2	16	3	02.02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Perangkat Daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo dan Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	100 Persen	9,029,307,813	7,074,890,636	
2	16	3	02.02	1	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Frekuensi pengawasan ketatalaksanaan e-government	10 Kali	260,852,090	286,937,299	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	3	02.02	3	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Frekuensi pengelolaan infrastruktur pusat data dan jaringan internet	12 Bulan	7,218,278,925	5,740,106,818	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	3	02.02	4	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah PD yang terkoneksi intranet	3 OPD	640,000,000	288,652,041	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	3	02.02	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Frekuensi koordinasi dan sinkronisasi yang dilakukan	2 Kali	150,000,000	44,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	3	02.02	6	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Frekuensi koordinasi dan sinkronisasi yang dilakukan	2 Kali	150,000,000	44,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	3	02.02	7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah aplikasi yang divalidasi dan dikembangkan	58 Kali	411,354,240	452,489,664	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	3	02.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah diklat yang diikuti	5 Diklat	198,822,558	218,704,814	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				198,822,558	218,704,814	
2	20	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	81,00%	198,822,558	218,704,814	
2	20	2	02.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				198,822,558	218,704,814	
2	20	2	02.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Frekuensi koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	12 Bulan	154,286,858	169,715,544	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	20	2	02.01	6	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	TFrekuensi Otorisasi Statistik sektoral di Daerah	1 Bulan	44,535,700	48,989,270	Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				196,967,098	216,663,808	
2	21	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Tingkat keamanan informasi pemerintah	I	196,967,098	216,663,808	
2	21	2	02.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				196,967,098	216,663,808	
2	21	2	02.01	2	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sarana penunjang keamanan informasi pemda	2 Jenis	132,556,599	145,812,259	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	21	2	02.01	4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah layanan keamanan informasi pemda	2 Jenis	64,410,499	70,851,549	Dinas Komunikasi dan Informatika
TOTAL									21,965,000,000	19,695,000,002	

RENCANA PROGRAM, DAN SUB KEGIATAN BELANJA LANGSUNG PERANGKAT DAERAH PADA RKPD KOTA BONTANG TAHUN 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				11,400,000,000	13,287,500,000	
2	18	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah (DPMPSTP)	100%	10,020,461,949	11,007,500,000	
2	18	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7,840,578,349	8,000,000,000	
2	18	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Baru	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan selama 1 Tahun	40 ASN	7,840,578,349	8,000,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				30,000,000	50,000,000	
2	18	1	02.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Baru	Jumlah pakaian khusus beserta keengkapannya	112 stel/pcs	0	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Baru	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	40 orang	30,000,000	50,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				335,000,000	625,000,000	
2	18	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Baru	Jumlah jenis ATK yang tersedia Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	50 jenis 8 jenis	100,000,000	150,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Baru	Jumlah jenis bahan logistik/sembako yang tersedia Jumlah makan dan minum yang tersedia	14 jenis 2.5 kotak	75,000,000	100,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Baru	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan	8 jenis	60,000,000	75,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Baru	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	50 Kali	100,000,000	300,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,376,450,000	1,757,500,000	
2	18	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Baru	Jumlah materai yang tersedia	750 Lembar	7,000,000	7,500,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Baru	Jumlah bulan jasa komunikasi sumber daya air, listrik dan internet	12 bulan	472,200,000	500,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Baru	Jumlah tenaga administrasi/teknis kantor yang tersedia	23 orang	897,250,000	1,250,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
							Jumlah tenaga kebersihan yang tersedia	3 orang			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	18	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				438,433,600	575,000,000	
2	18	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Baru	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	23 unit	263,433,600	275,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Baru	Jumlah peralatan gedung kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor	28 unit 28 unit	75,000,000	150,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Baru	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 paket	100,000,000	150,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	2			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Nilai Realisasi Investasi	4.150.000,00	330,000,000	680,000,000	
2	18	2	02.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				175,000,000	380,000,000	
2	18	2	02.01	1	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Baru	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penanaman modal	450 Peserta	175,000,000	300,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	2	02.01	2	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Baru	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan evaluasi	2 Laporan	0	80,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	2	02.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				155,000,000	300,000,000	
2	18	2	02.02	1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Baru	Jumlah dokumen review RUPM yang dibuat	1 dokumen	80,000,000	100,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	2	02.02	2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Baru	Jumlah dokumen peta potensi investasi	1 dokumen/peta	75,000,000	200,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	3			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Peningkatan Jumlah Investor	2	356,850,650	500,000,000	
2	18	3	02.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				356,850,650	500,000,000	
2	18	3	02.01	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Baru	Jumlah media promosi	3 media	356,850,650	500,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	4			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Nilai IKM	87.50.00	327,566,401	400,000,000	
2	18	4	02.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				327,566,401	400,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	18	4	02.01	1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Baru	Jumlah layanan yang terintegrasi	1000 Layanan	50,000,000	75,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	4	02.01	2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Baru	Jumlah dokumen SKM yang diterbitkan	1 dokumen	77,750,000	100,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	4	02.01	3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Baru	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi Jumlah laporan penyelesaian penanganan pengaduan	5 laporan monev 5 Laporan pengaduan	199,816,401	225,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	4	02.01	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Baru	Jumlah perusahaan yang memperoleh insentif kemudahan	50 perusahaan	0	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	5			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Prosentase Ketaatan Perusahaan Terhadap Aturan Penanaman Modal	37,5	190,121,000	400,000,000	
2	18	5	02.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				190,121,000	400,000,000	
2	18	5	02.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Baru	Jumlah LKPM yang dilaporkan perusahaan secara daring (online)	40 LKPM	90,121,000	200,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	5	02.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Baru	Jumlah perusahaan yang dibina	400 Perusahaan	100,000,000	200,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	5	02.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Baru	Jumlah perusahaan yang diawasi	40 Perusahaan	0	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	6			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Persentase ketersediaan data perizinan	100	175,000,000	300,000,000	
2	18	6	02.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				175,000,000	300,000,000	
2	18	6	02.01	1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Baru	Jumlah data yang diolah/disajikan	1500 Data	175,000,000	300,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
TOTAL									11,400,000,000	13,287,500,000	

RENCANA PROGRAM, DAN SUB KEGIATAN BELANJA LANGSUNG PERANGKAT DAERAH PADA RKPD KOTA BONTANG TAHUN 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				18,563,500,000	27,685,500,000	
2	19	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan daerah	100%	11,958,500,000	12,090,500,000	
2	19	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100,000,000	125,000,000	
2	19	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut	Jumlah Laporan Kinerja Yang Di Evaluasi	2 Laporan	100,000,000	125,000,000	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
2	19	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6,483,000,000	7,008,500,000	
2	19	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut	Jumlah Gaji dan Tunjangan Pegawai Yang Terbayar	35 ASN	6,475,500,000	7,000,000,000	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
2	19	1	02.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut	Jumlah Laporan Yang tersusun	5 Laporan	5,000,000	6,000,000	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
2	19	1	02.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Yang tersusun	5 Laporan	2,500,000	2,500,000	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
2	19	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				150,000,000	0	
2	19	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut	Jumlah ASN Dan TKD Yang Mengikuti Pelatihan	12 Orang	150,000,000	0	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
2	19	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				880,000,000	945,000,000	
2	19	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Jenis Barang yang Diadakan	9 Jenis	350,000,000	400,000,000	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
2	19	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Jenis Yang Diadakan	20 Jenis	90,000,000	95,000,000	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
2	19	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Barang Cetak yang Doadakan	8 Jenis	40,000,000	50,000,000	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
2	19	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	400,000,000	400,000,000	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
2	19	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				520,000,000	0	
2	19	1	02.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas yang Diadakan	1 Unit	520,000,000	0	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
2	19	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut			0	0	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
2	19	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3,205,500,000	3,312,000,000	
2	19	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Materai yang diadakan	10000 Lembar	10,000,000	12,000,000	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	19	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, Listrik dan Internet	12 Bulan	550,000,000	600,000,000	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
2	19	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut	Jumlah Gaji TKD yang Terbayar Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang di Adakan Jumlah Kota Makanan yang di adakan	57 TKD 35 Jenis 1200 Kotak	2,645,500,000	2,700,000,000	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
2	19	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				620,000,000	700,000,000	
2	19	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	26 Unit	320,000,000	325,000,000	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
2	19	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang dipelihara	10 Jenis	150,000,000	175,000,000	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
2	19	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	1 Gedung	150,000,000	200,000,000	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
2	19	2			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		Presentase pembinaan dan pengembangan kapasitas daya saing organisasi kepemudaan (OKP)	100%	3,070,000,000	3,230,000,000	
2	19	2	02.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota				2,400,000,000	2,430,000,000	
2	19	2	02.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut	jumlah Peserta Upacara yang mengikuti	500 Peserta	65,000,000	80,000,000	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
2	19	2	02.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut	Jumlah Peserta Jambore Pemuda Jumlah Peserta Public Speaking	30 Orang 100 Orang	360,000,000	250,000,000	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
2	19	2	02.01	7	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut	Jumlah Pemuda Dan Organisasi Yang Berjasa/Berprestasi	90 Orang	150,000,000	200,000,000	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
2	19	2	02.01	8	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut	Jumlah Calon Anggota Paskibraka Yang Di Bina	45 Paskibra	1,825,000,000	1,900,000,000	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
							Jumlah Pelajar Kota Bontang Yang Mengikuti Seleksi Paskibraka Jumlah Pemuda Yang Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan	300 Pelajar 50 Orang			
2	19	2	02.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				670,000,000	800,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	19	2	02.02	2	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut	Jumlah Organisasi KNPI Yang Di Bina Jumlah Peserta Jambore Pemuda	40 Organisasi 30 Orang	670,000,000	800,000,000	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
2	19	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		Persentase atlit yang berprestasi	29,06	3,435,000,000	12,215,000,000	
2	19	3	02.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				1,050,000,000	2,500,000,000	
2	19	3	02.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana Dan Prasarana Olahraga Yang Terpelihara Jumlah sarana yang dibangun	5 Lokasi 1 Lokasi	1,050,000,000	2,500,000,000	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
2	19	3	02.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1,600,000,000	1,700,000,000	
2	19	3	02.02	1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut	Jumlah Atlit yang mengikuti Jumlah Atlit yang Mengikuti Jumlah Kegiatan Multievent Yang Dilaksanakan Jumlah Turnamen yang diperlombakan	15 Orang 1 Tim 5 Kegiatan 3 Jenis	800,000,000	300,000,000	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
2	19	3	02.02	2	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan	1 Kegiatan	300,000,000	900,000,000	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
2	19	3	02.02	3	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut	Jumlah Atlit NPC Yang mengikuti Kejuaraan Jumlah Atlit Yang Di Bina	50 Atlit 1500 Atlit	500,000,000	500,000,000	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
2	19	3	02.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi				435,000,000	240,000,000	
2	19	3	02.03	3	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut	Jumlah Atlit yang di Bina (hiba Koni, Seleksi/ tc dan Pelatihan) Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan	3 Kegiatan 20 Orang	300,000,000	70,000,000	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
2	19	3	02.03	4	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut	Jumlah Atlit Yang Memperoleh Mendali	320 Mendali	75,000,000	90,000,000	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
2	19	3	02.03	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut	Data dan Indormasi Sektoral Olahraga Yang Tersedia	1 Laporan	60,000,000	80,000,000	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
2	19	3	02.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga				200,000,000	7,000,000,000	
2	19	3	02.04	2	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut	Jumlah Organisasi Olahraga	54 Organisasi	200,000,000	7,000,000,000	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
2	19	3	02.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi				150,000,000	775,000,000	
2	19	3	02.05	2	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut	Jumlah Cabang Olahraga Rekreasi	2 Kegiatan	50,000,000	75,000,000	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	19	3	02.05	3	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut			50,000,000	200,000,000	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
2	19	3	02.05	4	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut	Jumlah Kegiatan yang Dilaksanakan	2 Kegiatan	50,000,000	500,000,000	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
2	19	4			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		Persentase pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan	100%	100,000,000	150,000,000	
2	19	4	02.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan				100,000,000	150,000,000	
2	19	4	02.01	5	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan	1 Kegiatan	100,000,000	150,000,000	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				4,833,715,200	6,565,000,000	
3	26	2			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		Presentase objek daya tarik wisata yang representatif	0,6	2,333,715,200	2,805,000,000	
3	26	2	02.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				0	0	
3	26	2	02.01	3	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut	Bangunan parkir jalan cafe kapal	1 paket	0	0	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
3	26	2	02.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				2,127,215,200	2,230,000,000	
3	26	2	02.02	1	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut	Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata yang Ditetapkan	1 ODTW	30,000,000	30,000,000	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
3	26	2	02.02	4	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pariwisata yang Terpelihara	3 Sarana	1,997,215,200	2,000,000,000	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
3	26	2	02.02	6	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut	Pembinaan Mitra Parwisata	1 Kegiatan	100,000,000	200,000,000	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
3	26	2	02.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				206,500,000	575,000,000	
3	26	2	02.03	4	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut	Jumlah Sarana Dan Prasarana Pariwisata Yang Di Bangun	2 Paket	156,500,000	500,000,000	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
3	26	2	02.03	5	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut	Jumlah Destinasi Pariwisata Yang Di Monitoring	3 ODTW	50,000,000	75,000,000	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
3	26	3			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		Jumlah kunjungan wisata	197.555	300,000,000	600,000,000	
3	26	3	02.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				300,000,000	600,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	26	3	02.01	2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut	Jumlah Pameran yang di Laksanakan	1 Kegiatan	300,000,000	600,000,000	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
3	26	4			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL		Persentase pengembangan dan perlindungan pelaku ekonomi kreatif	0,3	150,000,000	700,000,000	
3	26	4	02.01		Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota				150,000,000	700,000,000	
3	26	4	02.01	1	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut	Jumlah Perlengkapan Dan Peralatan Sarana Poduksi	7 Jenis	150,000,000	700,000,000	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
3	26	5			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		Presentase Sumber daya pariwisata yang di kembangkan, Presentase Sumber daya Ekraf yang di kembangkan	0,4	2,050,000,000	2,460,000,000	
3	26	5	02.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar				2,050,000,000	2,460,000,000	
3	26	5	02.01	1	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut	Jumlah Pelatihan Bagi Kalangan Muda	18 Pelatihan	250,000,000	300,000,000	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
3	26	5	02.01	2	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut	Bontang Pagelaran Seni Jumlah Pendampingan, Monitoring Kunjungan Lapangan Bagi Pelaku Jasa Pekan Wisata Budaya dan Kuliner Sayembara Topi Adat Khas Bontang	20 Kegiatan 18 Pendampingan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	1,600,000,000	1,000,000,000	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
3	26	5	02.01	4	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut	Jumlah Sertifikat Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	30 Orang	50,000,000	60,000,000	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
3	26	5	02.01	5	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut	Jumlah Karya Video Klip Karya Seni Jumlah Pementasana Yang Dilaksanakan	12 Video 36 Event	50,000,000	500,000,000	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
3	26	5	02.01	6	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut	Jumlah Kegiatan Pameran / Expo Ekraf muda dan lintas Komunikasi)	2 Kegiatan	100,000,000	600,000,000	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
TOTAL									23,397,215,200	34,250,500,000	

RENCANA PROGRAM, DAN SUB KEGIATAN BELANJA LANGSUNG PERANGKAT DAERAH PADA RKPD KOTA BONTANG TAHUN 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
4	1				SEKRETARIAT DAERAH				109,053,000,000	606,305,608	
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah, Presentase implementasi kebijakan reformasi birokrasi	100%	67,893,823,316	0	
4	1	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				148,500,000	0	
4	1	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan	3 Dokumen	148,500,000	0	Sekretariat Daerah
4	1	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen	0	0	Sekretariat Daerah
4	1	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				24,478,090,749	0	
4	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	Jumlah PNS	244 orang	24,478,090,749	0	Sekretariat Daerah
4	1	1	02.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari			0	0	Sekretariat Daerah
4	1	1	02.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari			0	0	Sekretariat Daerah
4	1	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				59,800,000	0	
4	1	1	02.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari			11,360,000	0	Sekretariat Daerah
4	1	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis/ fungsional	24 orang	48,440,000	0	Sekretariat Daerah
4	1	1	02.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	Jumlah kegiatan sosialisasi yang difasilitasi	5 kali	0	0	Sekretariat Daerah
4	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				6,250,415,537	0	
4	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	Jumlah jenis komponen instalasi listrik	32 jenis	69,587,180	0	Sekretariat Daerah
4	1	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	2500000000	49 jenis	990,618,323	0	Sekretariat Daerah
4	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	Jumlah jenis logistik yang disediakan	25 jenis	145,479,514	0	Sekretariat Daerah
4	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	Tingkat Pemenuhan layanan Administrasi Umum	11 jenis	24,898,020	0	Sekretariat Daerah
4	1	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	4 jenis	0	0	Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
4	1	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	Jumlah Tamu Yang Difasilitasi	3 Jenis	320,000,000	0	Sekretariat Daerah
4	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	350 kali	4,699,832,500	0	Sekretariat Daerah
4	1	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				50,000,000	0	
4	1	1	02.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan	2 unit	0	0	Sekretariat Daerah
4	1	1	02.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	6 unit	0	0	Sekretariat Daerah
4	1	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	Jumlah jenis Meubelair	10 jenis	50,000,000	0	Sekretariat Daerah
4	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				26,134,088,320	0	
4	1	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	Jumlah Surat yang dikirim	10 Paket	2,295,000	0	Sekretariat Daerah
4	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	Jumlah gedung yang difasilitasi layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 Tahun	4,706,200,000	0	Sekretariat Daerah
4	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	Jumlah tenaga kebersihan, keamanan dan Tenaga Non PNS	297 Orang	21,425,593,320	0	Sekretariat Daerah
4	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3,520,064,989	0	
4	1	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	Jumlah Mobil Jabatan yang dilakukan pemeliharaan	2 Unit	597,067,999	0	Sekretariat Daerah
4	1	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang memenuhi perizinan	155 Unit	1,349,816,990	0	Sekretariat Daerah
4	1	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	10 Jenis	922,430,000	0	Sekretariat Daerah
4	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara Jumlah jenis peralatan rumah jabatan/dinas yang dipelihara	15 Jenis 15 Jenis	650,750,000	0	Sekretariat Daerah
4	1	1	02.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				987,209,930	0	
4	1	1	02.11	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	Gaji Kepala Daerah dan wakil	12 Bulan	823,209,930	0	Sekretariat Daerah
4	1	1	02.11	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	20 Stel	164,000,000	0	Sekretariat Daerah
4	1	1	02.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah				2,385,601,144	0	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
4	1	1	02.12	1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	Jumlah jenis pengadaan peralatan rumah jabatan	15 Jenis	1,407,472,981	0	Sekretariat Daerah
4	1	1	02.12	2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	Jumlah jenis pengadaan peralatan rumah jabatan	15 Jenis	978,128,163	0	Sekretariat Daerah
4	1	1	02.13		Penataan Organisasi				516,405,650	0	
4	1	1	02.13	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	Jumlah kegiatan pengelolaan kelembagaan dan anjab	6 Kegiatan	120,139,500	0	Sekretariat Daerah
4	1	1	02.13	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	Jumlah kegiatan fasilitasi pelayanan publik dan tatalaksana	4 Kegiatan	260,008,000	0	Sekretariat Daerah
4	1	1	02.13	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	Jumlah kegiatan peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	3 Kegiatan	136,258,150	0	Sekretariat Daerah
4	1	1	02.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				3,363,646,997	0	
4	1	1	02.14	1	Fasilitasi Keprotokolan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	Jumlah Koordinasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya	290 Kegiatan	1,931,672,500	0	Sekretariat Daerah
4	1	1	02.14	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	Jumlah pertemuan antara pimpinan / wakil pimpinan daerah dengan unsur-unsur pimpinan daerah, stakeholders dan masyarakat	6 Kegiatan	431,974,497	0	Sekretariat Daerah
4	1	1	02.14	3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	Jumlah kegiatan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah yang didokumentasikan	480 Kegiatan	1,000,000,000	0	Sekretariat Daerah
4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		Persentase implementasi kebijakan bidang pemerintahan, Persentase implementasi kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	100%	39,668,326,925	606,305,608	
4	1	2	02.01		Administrasi Tata Pemerintahan				763,313,608	606,305,608	
4	1	2	02.01	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi penataan administrasi pemerintahan	2 Kegiatan	157,008,000	0	Sekretariat Daerah
4	1	2	02.01	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	Fasilitasi Administri kewilayahan	2 kegiatan	444,166,415	444,166,415	Sekretariat Daerah
							Pelaksanaan rangkaian perayaan HUT RI, HUT Provinsi, HUT OTDA dan HUT Kota	4 Kegiatan			
4	1	2	02.01	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	Bimtek/Sosialisasi Peraturan Pemerintah Dokumen LPPD yang disusun Dokumen SPM yang di susun	40 Orang 1 Dokumen 1 Dokumen	162,139,193	162,139,193	Sekretariat Daerah
4	1	2	02.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				37,249,383,317	0	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
4	1	2	02.02	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	Jumlah Kegiatan Hari-hari Besar keagamaan Jumlah kegiatan Keagamaan Jumlah Operasional Rumah Ibadah yang difasilitasi Jumlah penggiat agama yang difasilitasi	10 Kegiatan 5 Kegiatan 286 Rumah Ibadah 2223 Orang	28,787,383,317	0	Sekretariat Daerah
4	1	2	02.02	2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	Jumlah kegiatan kesmas Jumlah Komisioner dan Administrasi BAZ Jumlah pembinaan UKS	3 kegiatan 6 Orang 40 Sekolah	50,000,000	0	Sekretariat Daerah
4	1	2	02.02	3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	Jumlah Penerima Beasiswa Jumlah Penerima Hibah Jumlah Sewa Asrama	500 Orang 25 Penerima hibah 12 Asrama	8,412,000,000	0	Sekretariat Daerah
4	1	2	02.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum				1,169,630,000	0	
4	1	2	02.03	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	Bimtek Penyusunan Produk Hukum Daerah Jumlah Produk Hukum Daerah yang dievaluasi Jumlah produk hukum daerah yang diharmonisasi dan difasilitasi	1 Kegiatan 30 Produk Hukum Daerah 22 Perwali dan Raperda	203,780,000	0	Sekretariat Daerah
4	1	2	02.03	2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	Jumlah Penanganan perkara perdata, TUN, Pidana Khusus, dan Laporan Aksi HAM serta peduli HAM	3 Perkara	945,000,000	0	Sekretariat Daerah
4	1	2	02.03	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	Jumlah produk hukum daerah yang terdokumentasi dan terpublikasi tahun 2019 dan tahun 2020	75 Buku	20,850,000	0	Sekretariat Daerah
4	1	2	02.04		Fasilitasi Kerjasama Daerah				486,000,000	0	
4	1	2	02.04	1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	Jumlah kegiatan APEKSI	5 Kali	336,000,000	0	Sekretariat Daerah
4	1	2	02.04	3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	Jumlah kerjasama pembangunan	10 MOU dan PKS	150,000,000	0	Sekretariat Daerah
4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Presentase implementasi kebijakan bidang perekonomian, Presentase implementasi kebijakan bidang pembangunan	100%	1,490,849,759	0	
4	1	3	02.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				400,708,200	0	
4	1	3	02.01	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	Jumlah pengendalian perekonomian yang dilaksanakan	4 Kegiatan	82,950,200	0	Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
4	1	3	02.01	3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	Bahan kebijakan ekonomi mikro yang disusun	1 Dokumen	119,816,000	0	Sekretariat Daerah
4	1	3	02.01	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	Jumlah pengawasan dan pengelolaan terhadap BLUD	3 Kegiatan	0	0	Sekretariat Daerah
4	1	3	02.01	5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	Jumlah pengawasan dan pengelolaan terhadap BUMD	9 Kegiatan	197,942,000	0	Sekretariat Daerah
4	1	3	02.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan				224,511,496	0	
4	1	3	02.02	1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	Jumlah Program	1 Program	79,625,497	0	Sekretariat Daerah
4	1	3	02.02	2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	Jumlah Laporan hasil pengendalian evaluasi	4 Kegiatan	62,651,999	0	Sekretariat Daerah
4	1	3	02.02	3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan Pembangunan	4 Dokumen	82,234,000	0	Sekretariat Daerah
4	1	3	02.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				659,632,018	0	
4	1	3	02.03	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	Jumlah paket pengadaan barang dan jasa	5 Kegiatan	544,864,587	0	Sekretariat Daerah
4	1	3	02.03	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	Jumlah data pengadaan	200 Paket	89,032,313	0	Sekretariat Daerah
4	1	3	02.03	3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/ Jasa	2 Kegiatan	25,735,118	0	Sekretariat Daerah
4	1	3	02.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam				205,998,045	0	
4	1	3	02.04	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	Jumlah laporan kegiatan koordinasi sinkronisasi dan evaluasi kebijakan, kehutanan, kelautan dan perikanan	4 laporan	38,137,500	0	Sekretariat Daerah
4	1	3	02.04	2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	Jumlah laporan kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup	4 Laporan	60,760,545	0	Sekretariat Daerah
4	1	3	02.04	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	Jumlah laporan kegiatan, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan energi dan air dan terpublikasi tahun 2019 dan tahun 2020	4 Laporan	107,100,000	0	Sekretariat Daerah
TOTAL									109,053,000,000	606,305,608	

RENCANA PROGRAM, DAN SUB KEGIATAN BELANJA LANGSUNG PERANGKAT DAERAH PADA RKPD KOTA BONTANG TAHUN 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
4	2				SEKRETARIAT DPRD				68,680,171,000	23,062,132,727	
4	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	45,314,852,250	23,062,132,727	
4	2	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				343,998,219	0	
4	2	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari			240,715,719	0	Sekretariat DPRD
4	2	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari			2,272,500	0	Sekretariat DPRD
4	2	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari			101,010,000	0	Sekretariat DPRD
4	2	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9,987,728,182	0	
4	2	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari			9,981,060,682	0	Sekretariat DPRD
4	2	1	02.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari			2,272,500	0	Sekretariat DPRD
4	2	1	02.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari			2,272,500	0	Sekretariat DPRD
4	2	1	02.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari			2,122,500	0	Sekretariat DPRD
4	2	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1,852,841,000	0	
4	2	1	02.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari			151,570,000	0	Sekretariat DPRD
4	2	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	Jumlah peserta	150 Orang	1,605,171,000	0	Sekretariat DPRD
4	2	1	02.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari			96,100,000	0	Sekretariat DPRD
4	2	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				5,293,504,946	1,000,000,000	
4	2	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari			40,000,000	0	Sekretariat DPRD
4	2	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	12 jenis	580,000,000	1,000,000,000	Sekretariat DPRD
4	2	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari			5,082,000	0	Sekretariat DPRD
4	2	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	Jumlah jenis logistik	2 Jenis	407,546,446	0	Sekretariat DPRD
4	2	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari			675,000,000	0	Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
4	2	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari			145,876,500	0	Sekretariat DPRD
4	2	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	Jumlah makanan dan minuman Jumlah makanan prasmanan Jumlah perjalanan dinas dalam daerah Jumlah perjalanan dinas luar daerah	12400 Kotak 500 Porsi 500 Kali 100 Kali	3,440,000,000	0	Sekretariat DPRD
4	2	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1,658,013,744	0	
4	2	1	02.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari			738,013,744	0	Sekretariat DPRD
4	2	1	02.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari			0	0	Sekretariat DPRD
4	2	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	Jumlah pengadaan mebel	4 Paket	690,000,000	0	Sekretariat DPRD
4	2	1	02.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari			230,000,000	0	Sekretariat DPRD
4	2	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5,021,964,219	0	
4	2	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari			18,000,000	0	Sekretariat DPRD
4	2	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari			1,650,000,000	0	Sekretariat DPRD
4	2	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari			353,964,219	0	Sekretariat DPRD
4	2	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari			3,000,000,000	0	Sekretariat DPRD
4	2	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3,085,185,713	0	
4	2	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari			393,872,000	0	Sekretariat DPRD
4	2	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari			590,343,500	0	Sekretariat DPRD
4	2	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi	5 Paket	1,050,970,213	0	Sekretariat DPRD
4	2	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari			550,000,000	0	Sekretariat DPRD
4	2	1	02.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari			500,000,000	0	Sekretariat DPRD
4	2	1	02.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				16,592,592,727	22,062,132,727	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
4	2	1	02.15	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	Jumlah Anggota DPRD	25 Orang	16,212,132,727	21,712,132,727	Sekretariat DPRD
4	2	1	02.15	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari			304,450,000	350,000,000	Sekretariat DPRD
4	2	1	02.15	3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari			76,010,000	0	Sekretariat DPRD
4	2	1	02.16		Layanan Administrasi DPRD				1,479,023,500	0	
4	2	1	02.16	1	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari			194,743,500	0	Sekretariat DPRD
4	2	1	02.16	3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari			1,084,280,000	0	Sekretariat DPRD
4	2	1	02.16	4	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kebutuhan rumah tangga	3 jenis	200,000,000	0	Sekretariat DPRD
4	2	2			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		Cakupan layanan tugas fungsi anggaran, Cakupan layanan tugas fungsi legislasi, Cakupan layanan tugas fungsi pengawasan	100%	23,365,318,750	0	
4	2	2	02.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD				1,407,857,500	0	
4	2	2	02.01	1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari			94,875,000	0	Sekretariat DPRD
4	2	2	02.01	2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari			86,072,500	0	Sekretariat DPRD
4	2	2	02.01	3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari			12,650,000	0	Sekretariat DPRD
4	2	2	02.01	4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari			1,201,610,000	0	Sekretariat DPRD
4	2	2	02.01	5	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari			12,650,000	0	Sekretariat DPRD
4	2	2	02.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran				245,000,000	0	
4	2	2	02.02	1	Pembahasan KUA dan PPAS	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari			65,000,000	0	Sekretariat DPRD
4	2	2	02.02	3	Pembahasan APBD	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari			65,000,000	0	Sekretariat DPRD
4	2	2	02.02	4	Pembahasan APBD Perubahan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari			65,000,000	0	Sekretariat DPRD
4	2	2	02.02	6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari			50,000,000	0	Sekretariat DPRD
4	2	2	02.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan				205,518,750	0	
4	2	2	02.03	1	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari			31,625,000	0	Sekretariat DPRD
4	2	2	02.03	2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari			61,625,000	0	Sekretariat DPRD
4	2	2	02.03	3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari			31,625,000	0	Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
4	2	2	02.03	4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari			31,625,000	0	Sekretariat DPRD
4	2	2	02.03	5	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari			31,625,000	0	Sekretariat DPRD
4	2	2	02.03	6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari			4,743,750	0	Sekretariat DPRD
4	2	2	02.03	7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari			12,650,000	0	Sekretariat DPRD
4	2	2	02.04		Peningkatan Kapasitas DPRD				7,541,955,000	0	
4	2	2	02.04	2	Bimbingan Teknis DPRD	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari			526,610,000	0	Sekretariat DPRD
4	2	2	02.04	3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	Jumlah publikasi	100 Kali	5,836,300,000	0	Sekretariat DPRD
4	2	2	02.04	4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari			774,985,000	0	Sekretariat DPRD
4	2	2	02.04	5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari			404,060,000	0	Sekretariat DPRD
4	2	2	02.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				1,359,487,500	0	
4	2	2	02.05	2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari			9,487,500	0	Sekretariat DPRD
4	2	2	02.05	3	Pelaksanaan Reses	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari			1,350,000,000	0	Sekretariat DPRD
4	2	2	02.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD				2,530,000	0	
4	2	2	02.06	2	Pengawasan Kode Etik DPRD	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari			2,530,000	0	Sekretariat DPRD
4	2	2	02.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah				25,300,000	0	
4	2	2	02.07	1	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari			9,487,500	0	Sekretariat DPRD
4	2	2	02.07	2	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari			15,812,500	0	Sekretariat DPRD
4	2	2	02.08		Fasilitasi Tugas DPRD				12,577,670,000	0	
4	2	2	02.08	1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	Jumlah perjalanan dinas	900 Kali	12,577,670,000	0	Sekretariat DPRD
TOTAL									68,680,171,000	23,062,132,727	

RENCANA PROGRAM, DAN SUB KEGIATAN BELANJA LANGSUNG PERANGKAT DAERAH PADA RKPD KOTA BONTANG TAHUN 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
5	1				PERENCANAAN				11,982,500,000	12,518,000,000	
5	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	10,759,000,000	11,097,500,000	
5	1	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Pegawai yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	51 pegawai	7,350,000,000	7,500,000,000	
5	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ASN	35 orang	7,350,000,000	7,500,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
5	1	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah pegawai yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian	51 pegawai	225,000,000	142,500,000	
5	1	1	02.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	3 pasang	180,000,000	75,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
5	1	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis/ fungsional	10 orang	45,000,000	67,500,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
5	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyediaan Administrasi Umum yang sesuai fungsi	100%	1,730,000,000	1,930,000,000	
5	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah jenis komponen instalasi listrik	5 jenis	5,000,000	5,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
5	1	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor	30 jenis	440,000,000	550,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
5	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah jenis logistik yang disediakan	11 jenis	60,000,000	65,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
5	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah jenis Barang Cetak yang Diadakan	8 jenis	85,000,000	90,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
5	1	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah tamu yang berkunjung	150 orang	15,000,000	20,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
5	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	200 kali	1,125,000,000	1,200,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
5	1	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah	1 jenis	300,000,000	300,000,000	
5	1	1	02.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	300,000,000	300,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
5	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 jenis	669,000,000	710,000,000	
5	1	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah materai yang di adakan	900 buah	9,000,000	10,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
5	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gaji TKD yang Terbayar	16 orang	660,000,000	700,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
5	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis Barang yang Milik Daerah yang di Pelihara	6 jenis	485,000,000	515,000,000	
5	1	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan Jumlah kendaraan dinas/operasional yang memenuhi perizinan	25 unit 30 unit	450,000,000	475,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
5	1	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	4 jenis	35,000,000	40,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
5	1	2			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Tingkat Realisasi Kinerja perencanaan pembangunan daerah	82%	895,400,000	992,500,000	
5	1	2	02.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Jumlah dokumen perencanaan yang disusun Jumlah komponen masyarakat yang ikut serta dalam proses perencanaan Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir di dalam RKPD	3 dokumen 17 komponen 92 usulan	548,800,000	597,500,000	
5	1	2	02.01	2	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah peserta koordinasi penelaahan dokumen	100 orang	15,675,000	17,500,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
5	1	2	02.01	3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Laporan pelaksanaan konsultasi publik	1 dokumen	11,500,000	15,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
5	1	2	02.01	4	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah perangkat daerah	31 Perangkat Daerah	17,500,000	20,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
5	1	2	02.01	5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah peserta	300 orang	121,125,000	135,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
5	1	2	02.01	6	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kecamatan	3 Kecamatan	8,000,000	10,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
5	1	2	02.01	7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan	3 dokumen	375,000,000	400,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
5	1	2	02.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah data dan informasi	3200 data	141,500,000	175,000,000	
5	1	2	02.02	1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data dan Informasi	3200 data	50,000,000	75,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
5	1	2	02.02	2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data dan Informasi	3200 data	21,000,000	25,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
5	1	2	02.02	3	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah data dan informasi	3200 data	70,500,000	75,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
5	1	2	02.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah dokumen capaian pembangunan Jumlah dokumen yang dievaluasi	2 dokumen 7 dokumen	205,100,000	220,000,000	
5	1	2	02.03	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan yang dievaluasi	2 dokumen	75,100,000	80,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
5	1	2	02.03	2	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah jenis Program/Kegiatan terkait SPM	5 SPM	45,000,000	50,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
5	1	2	02.03	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	2 dokumen	85,000,000	90,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
5	1	3			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Implementasi perencanaan dalam penganggaran	90%	328,100,000	428,000,000	
5	1	3	02.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Jumlah Perangkat Daerah yang dikoordinir	21 perangkat daerah	135,000,000	175,000,000	
5	1	3	02.01	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang dikoordinir dalam penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	12 Perangkat Daerah	20,000,000	25,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
5	1	3	02.01	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang diasistensi	12 Perangkat Daerah	20,000,000	25,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
5	1	3	02.01	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring	12 Perangkat Daerah	20,000,000	25,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
5	1	3	02.01	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah urusan pemerintahan yang disenerjikan dan diharmonisasikan	10 urusan	15,000,000	20,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
5	1	3	02.01	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang diakomodir dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah	9 Perangkat Daerah	15,000,000	20,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
5	1	3	02.01	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang di Asistensi	9 Perangkat Daerah	15,000,000	20,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
5	1	3	02.01	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang di Monitoring	9 Perangkat Daerah	15,000,000	20,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
5	1	3	02.01	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah urusan pemerintahan yang disenerjikan dan diharmonisasikan	13 urusan	15,000,000	20,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
5	1	3	02.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Jumlah Perangkat Daerah yang dikoordinir	6 perangkat daerah	68,000,000	100,000,000	
5	1	3	02.02	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang diakomodir dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah	4 Perangkat Daerah	12,000,000	15,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
5	1	3	02.02	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang diasistensi	4 Perangkat Daerah	12,000,000	15,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
5	1	3	02.02	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring	4 Perangkat Daerah	12,000,000	15,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
5	1	3	02.02	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah urusan pemerintahan yang disenerjikan dan diharmonisasikan	7 urusan	12,000,000	15,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
5	1	3	02.02	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang diakomodir dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah	2 Perangkat Daerah	5,000,000	10,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
5	1	3	02.02	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang diasistensi	2 Perangkat Daerah	5,000,000	10,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
5	1	3	02.02	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring	2 Perangkat Daerah	5,000,000	10,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
5	1	3	02.02	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah urusan pemerintahan yang disenerjikan dan diharmonisasikan	4 urusan	5,000,000	10,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
5	1	3	02.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Jumlah Perangkat Daerah yang dikoordinir	8 perangkat daerah	125,100,000	153,000,000	
5	1	3	02.03	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang diakomodir dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah	4 Perangkat Daerah	16,100,000	18,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
5	1	3	02.03	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang di Asistensi	4 Perangkat Daerah	10,000,000	15,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
5	1	3	02.03	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang di Monitoring	4 Perangkat Daerah	13,000,000	15,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
5	1	3	02.03	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah urusan pemerintahan yang disenerjikan dan diharmonisasikan	3 urusan	25,000,000	30,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
5	1	3	02.03	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang diakomodir dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah	4 Perangkat Daerah	12,000,000	15,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
5	1	3	02.03	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang di Asistensi	4 Perangkat Daerah	12,000,000	15,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
5	1	3	02.03	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang di Monitoring	4 Perangkat Daerah	12,000,000	15,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
5	1	3	02.03	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah urusan pemerintahan yang disenerjikan dan diharmonisasikan	4 urusan	25,000,000	30,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
5	5				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				3,017,500,000	4,850,000,000	
5	5	2			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Persentase tindak lanjut hasil kelitbangan, Persentase keberlanjutan inovasi daerah	75% & 90,60%	3,017,500,000	4,850,000,000	
5	5	2	02.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Jumlah Bidang kelitbangan yang dilaksanakan	3 bidang	2,706,500,000	4,410,000,000	
5	5	2	02.01	1	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kajian	1 kajian	200,000,000	300,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
5	5	2	02.01	2	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kajian	1 kajian	200,000,000	300,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
5	5	2	02.01	4	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kajian	1 kajian	200,000,000	300,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
5	5	2	02.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah data inovasi daerah	50 inovasi	6,500,000	10,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
							Jumlah data kajian dan peraturan yang dikelola	400 data			
5	5	2	02.01	13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah rekomendasi dan draft peraturan	10 rekomendasi	2,100,000,000	3,500,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
5	5	2	02.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Jumlah inovasi daerah	150 inovasi	311,000,000	440,000,000	
5	5	2	02.04	2	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah uji coba dan penerapan inovasi dan IPTEK	1 inovasi	50,000,000	75,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
5	5	2	02.04	3	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Desiminasi yang dilaksanakan	3 jenis	250,000,000	350,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
5	5	2	02.04	4	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta Desiminasi Jumlah Peserta Sosialisasi	50 orang 50 orang	11,000,000	15,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
TOTAL									15,000,000,000	17,368,000,000	

RENCANA PROGRAM, DAN SUB KEGIATAN BELANJA LANGSUNG PERANGKAT DAERAH PADA RKPD KOTA BONTANG TAHUN 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
5	2				KEUANGAN				17,000,000,000	18,363,934,095	
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	14,135,037,925	14,533,193,550	
5	2	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				20,027,270	20,475,000	
5	2	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Renja Perangkat Daerah	2 Dokumen	6,619,998	7,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	02.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1,737,500	1,737,500	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	02.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1,737,500	1,737,500	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			9,932,272	10,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				10,934,822,105	11,058,200,000	
5	2	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			10,878,067,346	11,000,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	02.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			52,572,487	54,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	02.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			4,182,272	4,200,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				60,000,000	70,000,000	
5	2	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			60,000,000	70,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				591,170,000	784,100,000	
5	2	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			15,000,000	22,300,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			100,000,000	137,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			70,000,000	78,200,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			30,000,000	38,200,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			8,400,000	8,400,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			367,770,000	500,000,000	Badan Pendapatan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
5	2	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				15,000,000	17,000,000	
5	2	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			15,000,000	17,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2,255,884,800	2,256,474,800	
5	2	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			6,000,000	6,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			355,410,000	356,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1,894,474,800	1,894,474,800	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				258,133,750	326,943,750	
5	2	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			193,133,750	243,133,750	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			50,000,000	68,810,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	02.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			15,000,000	15,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	2			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100% & WTP	178,351,231	228,351,231	
5	2	2	02.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				178,351,231	228,351,231	
5	2	2	02.01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			178,351,231	228,351,231	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Persentase pendapatan pajak daerah	100%	2,686,610,844	3,602,389,314	
5	2	4	02.01		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah				2,686,610,844	3,602,389,314	
5	2	4	02.01	2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			100,000,000	150,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	02.01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			163,000,000	263,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	02.01	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			543,610,844	743,610,844	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	02.01	6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			200,000,000	200,000,000	Badan Pendapatan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
5	2	4	02.01	7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1,000,000,000	1,500,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	02.01	9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			50,000,000	50,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	02.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			430,000,000	455,200,671	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	02.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			50,000,000	50,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	02.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			150,000,000	190,577,799	Badan Pendapatan Daerah
TOTAL									17,000,000,000	18,363,934,095	

RENCANA PROGRAM, DAN SUB KEGIATAN BELANJA LANGSUNG PERANGKAT DAERAH PADA RKPD KOTA BONTANG TAHUN 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
5	2				KEUANGAN				23,500,000,000	22,341,828,595	
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	14,395,694,547	14,935,448,997	
5	2	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				23,522,500	26,000,000	
5	2	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	1 Dokumen	10,000,000	11,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan	2 Laporan	8,522,500	9,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun (LKjIP)	1 Dokumen	5,000,000	6,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9,577,968,577	9,618,000,000	
5	2	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ASN	40 orang	9,512,364,581	9,520,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah usulan bendahara penerima Jumlah usulan bendahara pengeluaran	11 orang 31 orang	58,000,000	89,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	02.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan	1 Laporan	4,081,196	5,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	02.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan	1 Laporan	3,522,800	4,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	02.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				4,000,000	4,400,000	
5	2	1	02.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan	1 Laporan	4,000,000	4,400,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100,000,000	153,000,000	
5	2	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pegawai ASN yang mengikuti pelatihan Jumlah pegawai Non ASN yang mengikuti pelatihan	43 orang 45 orang	100,000,000	153,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				1,345,500,309	1,694,500,000	
5	2	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah jenis komponem instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 jenis	71,880,583	75,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor	12 jenis	250,000,000	300,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
5	2	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bahan logistik/sembako Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	11 item 1 item	289,669,312	300,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan	4 jenis	150,134,507	170,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah media surat kabar	3 jenis	49,207,907	49,500,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	100 Kali	534,608,000	800,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100,000,000	159,548,997	
5	2	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Mebel	4 unit	100,000,000	159,548,997	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2,228,511,691	2,260,000,000	
5	2	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah materai Jumlah surat yang terkirim	901 lembar 9 paket	10,000,000	10,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bulan jasa komunikasi sumber daya air, listrik dan internet	12 bulan	445,800,000	450,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bahan pembersih Jumlah jasa tenaga administrasi Jumlah tenaga kebersihan	16 item 47 orang 5 orang	1,772,711,691	1,800,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,016,191,470	1,020,000,000	
5	2	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional Roda 2 yang dipelihara Jumlah kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang diurus perizinannya Jumlah kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang diurus perizinannya	27 unit 27 unit 15 unit	707,842,551	710,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
							Jumlah Kendaraan Dinas/operasional Roda 4 yang dipelihara	15 unit			
5	2	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Dipelihara	5 jenis	108,348,919	110,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	3 unit	200,000,000	200,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
5	2	2			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100% & WTP	6,175,153,702	4,184,312,672	
5	2	2	02.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				1,492,591,982	1,641,873,180	
5	2	2	02.01	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	237,000,000	260,700,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	02.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	265,000,000	291,500,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	02.01	4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah RKA Kegiatan	264 RKA kegiatan	126,589,992	139,248,991	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	02.01	6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah DPA Pergeseran	15 DPA	91,779,990	100,979,989	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	02.01	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	245,000,000	269,500,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	02.01	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	245,000,000	269,500,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	02.01	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah regulasi /produk hukum yang diterbitkan	2 Dokumen	205,910,000	226,501,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	02.01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	35,656,000	39,221,600	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	02.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	40,656,000	44,721,600	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	02.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				370,461,000	449,451,100	
5	2	2	02.02	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekonsiliasi Pengeluaran Kas Daerah	12 Berita Acara	52,272,000	57,499,200	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	02.02	3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah SPD	372 SPD	82,120,000	90,332,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	02.02	5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekonsiliasi Penerimaan	2 Berita Acara	27,676,000	30,443,600	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	02.02	8	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	7,433,000	8,176,300	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	02.02	9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Berita acara Jumlah Berita acara	11 BA Penerimaan 31 BA pengeluaran	200,960,000	263,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
5	2	2	02.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				812,100,720	992,988,392	
5	2	2	02.03	2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	161,943,300	178,137,630	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	02.03	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Realisasi Anggaran Semester 1 dan Prognosis 6 bulan berikutnya	1 Dokumen	63,782,780	70,161,058	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	02.03	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	97,101,640	106,811,804	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	02.03	6	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kegiatan pendampingan audit eksternal	2 Kegiatan	160,880,000	205,898,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	02.03	8	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Berita acara rekon pelaporan keuangan	31 OPD	33,433,000	36,776,300	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	02.03	9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Revisi/pemutakhiran kebijakan akuntansi	1 Dokumen	0	70,747,600	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	02.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah SOP Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	3 Dokumen	8,710,000	9,581,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	02.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta Workshop/Bimtek Penyusunan LKPD	31 OPD	286,250,000	314,875,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	02.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				3,500,000,000	1,100,000,000	
5	2	2	02.04	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kegiatan darurat dan mendesak	2 kegiatan	3,500,000,000	1,100,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Kesesuaian data rincian BMD dengan Aktiva Tetap di neraca Pemerintah Kota	100%	2,929,151,751	3,222,066,926	
5	2	3	02.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah				2,929,151,751	3,222,066,926	
5	2	3	02.01	1	Penyusunan Standar Harga	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	325,000,000	357,500,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3	02.01	2	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	200,000,000	220,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3	02.01	3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	165,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3	02.01	4	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	225,000,000	247,500,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3	02.01	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	225,000,000	247,500,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
5	2	3	02.01	7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Jumlah Pengamanan	101 Sertifikat Tanah 4 Kali	275,000,000	302,500,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3	02.01	8	Penilaian Barang Milik Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah BMD yang dinilai	100 BMD	200,000,000	220,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3	02.01	9	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	150,000,000	165,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3	02.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pemanfaatan BMD JUmlah Dokumen Pemindahtanganan BMD Jumlah Penghapusan Jumlah penghapusan BMD	1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	625,000,000	687,500,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3	02.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah OPD yang melakukan Rekonsiliasi	31 OPD	225,000,000	247,500,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3	02.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan BMD	1 dokumen	175,000,000	192,500,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3	02.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah OPD yang dibina	31 OPD	154,151,751	169,566,926	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
TOTAL									23,500,000,000	22,341,828,595	

RENCANA PROGRAM, DAN SUB KEGIATAN BELANJA LANGSUNG PERANGKAT DAERAH PADA RKPD KOTA BONTANG TAHUN 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
5	3				KEPEGAWAIAN				13,924,208,593	14,538,790,000	
5	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	10,684,083,593	10,955,000,000	
5	3	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				17,510,000	19,000,000	
5	3	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen	1 dokumen	17,510,000	19,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8,672,622,065	9,000,000,000	
5	3	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	46 orang	8,672,622,065	9,000,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				562,469,000	375,000,000	
5	3	1	02.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	104 stel	100,000,000	150,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kursus singkat/pelatihan/sosialisasi/bimtek yang diikuti sesuai tupoksi	69 kali	314,000,000	70,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	02.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pelaksanaan kegiatan	1 kali	148,469,000	155,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				697,613,298	745,000,000	
5	3	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah jenis alat tulis kantor yang dibutuhkan	10 jenis	146,354,306	155,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang dibutuhkan	10 jenis	120,000,000	130,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
							Jumlah kotak nasi	1050 kotak			
							Jumlah kotak snack	2180 kotak			
							Jumlah porsi makan minum tamu	80 porsi			
5	3	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah jenis barang cetakan & penggandaan yang dibutuhkan	10 jenis	107,082,992	110,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
5	3	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah perjalanan dinas yang dilakukan	69 OH	324,176,000	350,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				36,850,542	42,000,000	
5	3	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	3 jenis	35,719,005	40,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	02.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	1 jenis	1,131,537	2,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				332,434,288	369,000,000	
5	3	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah materai yang tersedia Jumlah surat yang dikirim	600 lembar 70 surat	8,250,000	9,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pemenuhan layanan komunikasi kantor	12 bulan	108,000,000	110,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tenaga Kontrak Daerah	7 orang	216,184,288	250,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				364,584,400	405,000,000	
5	3	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan (Roda Dua)	12 unit	221,584,400	250,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
							Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan (Roda Empat)	5 unit			
							Jumlah perizinan kendaraan dinas/operasional (Roda Dua) Jumlah perizinan kendaraan dinas/operasional (Roda Empat)	12 unit 5 unit			
5	3	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah jenis pemeliharaan peralatan gedung kantor	11 jenis	140,000,000	150,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah jenis pemeliharaan gedung kantor	2 jenis	3,000,000	5,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
5	3	2			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Indeks Dimensi Kualifikasi, Indeks Dimensi Kinerja, Indeks Dimensi Disiplin	15, 25, 4	3,240,125,000	3,583,790,000	
5	3	2	02.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				829,935,000	865,000,000	
5	3	2	02.01	2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen penyusunan kebutuhan pegawai	1 dokumen	20,000,000	22,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	02.01	3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah peserta seleksi penerimaan CASN	2000 peserta	650,000,000	670,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	02.01	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah usulan berkas pemberhentian pegawai	61 berkas	45,000,000	48,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	02.01	8	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah peserta dalam perayaan HUT Kopri	500 orang	21,025,000	25,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	02.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah data	2000 data	93,910,000	100,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	02.02		Mutasi dan Promosi ASN				810,400,000	1,121,000,000	
5	3	2	02.02	1	Pengelolaan Mutasi ASN	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah berkas usulan mutasi	10 berkas	10,400,000	11,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	02.02	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah usulan berkas kenaikan pangkat	467 berkas	200,000,000	210,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	02.02	3	Pengelolaan Promosi ASN	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pegawai yang mengikuti seleksi JPT Jumlah peserta yang mengikuti penilaian kompetensi	10 orang 40 orang	600,000,000	900,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	02.03		Pengembangan Kompetensi ASN				1,155,290,000	1,125,290,000	
5	3	2	02.03	4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah PNS yang mengikuti program pendidikan lanjutan	12 orang	1,110,290,000	1,120,290,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	02.03	13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah jabfung dibina	5 orang	45,000,000	5,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	02.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				444,500,000	472,500,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
5	3	2	02.04	2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah berkas Penilaian Kerja Pegawai yang di evaluasi dan terinput ke dalam aplikasi	2853 berkas	177,000,000	187,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	02.04	3	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen evaluasi	4 dokumen	230,000,000	240,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	02.04	4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah PNS yang menerima penghargaan SLKS	200 PNS	6,000,000	7,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	02.04	7	Pembinaan Disiplin ASN	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kegiatan	2 kali	19,000,000	25,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	02.04	8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kasus	15 kasus	12,500,000	13,500,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	4				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				2,775,791,407	4,330,000,000	
5	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		Indeks Dimensi Kompetensi	32	2,775,791,407	4,330,000,000	
5	4	2	02.01		Pengembangan Kompetensi Teknis				250,000,000	280,000,000	
5	4	2	02.01	3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah peserta diklat	180 orang	250,000,000	280,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	4	2	02.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				2,525,791,407	4,050,000,000	
5	4	2	02.02	8	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah peserta diklat	125 orang	2,525,791,407	4,050,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
TOTAL									16,700,000,000	18,868,790,000	

RENCANA PROGRAM, DAN SUB KEGIATAN BELANJA LANGSUNG PERANGKAT DAERAH PADA RKPD KOTA BONTANG TAHUN 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						
6	1				INSPEKTORAT DAERAH				10,000,000,000	11,123,400,000	
6	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	8,739,100,000	9,562,500,000	
6	1	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7,580,000,000	8,000,000,000	
6	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	Gaji dan Tunjangan ASN	35 orang	7,580,000,000	8,000,000,000	Inspektorat Daerah
6	1	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 orang	100,000,000	150,000,000	
6	1	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	Jumlah pegawai Inspektorat yang mengikuti diklat substantif dan penjenjangan	20 orang	100,000,000	150,000,000	Inspektorat Daerah
6	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				334,000,000	603,000,000	
6	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	Jumlah jenis Peralatan Listrik/Penerangan	8 jenis	15,000,000	15,000,000	Inspektorat Daerah
6	1	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32 Jenis	35,000,000	37,000,000	Inspektorat Daerah
6	1	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga	10 jenis	23,000,000	25,000,000	Inspektorat Daerah
6	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor	16 jenis	100,000,000	115,000,000	Inspektorat Daerah
6	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	13 jenis	50,000,000	50,000,000	Inspektorat Daerah
6	1	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	Jumlah Surat Kabar	1350 eksemplar	11,000,000	11,000,000	Inspektorat Daerah
6	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	100 kali	100,000,000	350,000,000	Inspektorat Daerah
6	1	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				268,000,000	275,000,000	
6	1	1	02.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4	1 unit	218,000,000	225,000,000	Inspektorat Daerah
6	1	1	02.07	8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	Jumlah Aplikasi Penunjang Pengawasan	1 aplikasi	50,000,000	50,000,000	Inspektorat Daerah
6	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				182,100,000	184,500,000	
6	1	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	Jumlah Jasa Surat Menyurat	50 surat	4,500,000	5,000,000	Inspektorat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
6	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	Jumlah jenis penyediaan jasa komunikasi	2 jenis	42,000,000	42,000,000	Inspektorat Daerah
6	1	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	Jumlah jenis peralatan yang mendapatkan pemeliharaan rutin sesuai standar	19 jenis	15,600,000	17,500,000	Inspektorat Daerah
6	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	Jumlah pemenuhan kebutuhan tenaga administrasi non PNS	3 Orang	120,000,000	120,000,000	Inspektorat Daerah
6	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				275,000,000	350,000,000	
6	1	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang memenuhi ketentuan perizinan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	27 unit	275,000,000	350,000,000	Inspektorat Daerah
6	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		cakupan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berbasis risiko	70	725,000,000	865,000,000	
6	1	2	02.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal				635,000,000	745,000,000	
6	1	2	02.01	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	Jumlah penyelesaian pengawasan Kinerja Perangkat Daerah	96 OP	275,000,000	300,000,000	Inspektorat Daerah
6	1	2	02.01	2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	Jumlah penyelesaian pengawasan Keuangan Perangkat Daerah	110 OP	270,000,000	350,000,000	Inspektorat Daerah
6	1	2	02.01	3	Reviu Laporan Kinerja	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	Jumlah penyelesaian reviu Laporan Kinerja	2 OP	25,000,000	30,000,000	Inspektorat Daerah
6	1	2	02.01	4	Reviu Laporan Keuangan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	Jumlah penyelesaian reviu Laporan Keuangan	2 op	30,000,000	30,000,000	Inspektorat Daerah
6	1	2	02.01	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	Jumlah penyelesaian Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	10 OP	35,000,000	35,000,000	Inspektorat Daerah
6	1	2	02.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				90,000,000	120,000,000	
6	1	2	02.02	2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	Jumlah kasus pengaduan masyarakat yang telah selesai ditindaklanjuti	5 kasus	90,000,000	120,000,000	Inspektorat Daerah
6	1	3			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		1.Tingkat Pemenuhan Kebijakan Pengawasan, 2. Perangkat daerah dengan kinerja RB baik	100 & 68	535,900,000	695,900,000	
6	1	3	02.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan				50,900,000	50,900,000	
6	1	3	02.01	1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	Jumlah persetujuan kebijakan teknis	3 dokumen	15,000,000	15,000,000	Inspektorat Daerah
6	1	3	02.01	2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	Jumlah PAK	19 PAK	35,900,000	35,900,000	Inspektorat Daerah
6	1	3	02.02		Pendampingan dan Asistensi				485,000,000	645,000,000	
6	1	3	02.02	1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	Jumlah laporan kegiatan Reformasi Birokrasi	1 Laporan	200,000,000	220,000,000	Inspektorat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
6	1	3	02.02	2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari			75,000,000	75,000,000	Inspektorat Daerah
6	1	3	02.02	3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	Jumlah laporan hasil pemantauan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Kota Bontang	16 Laporan	210,000,000	350,000,000	Inspektorat Daerah
TOTAL									10,000,000,000	11,123,400,000	

RENCANA PROGRAM, DAN SUB KEGIATAN BELANJA LANGSUNG PERANGKAT DAERAH PADA RKPD KOTA BONTANG TAHUN 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7					UNSUR KEWILAYAHAN						
7	1				KECAMATAN						
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	22,708,774,178	23,456,046,203	
7	1	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3,396,592	3,500,000	
7	1	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	2 Dokumen	1,698,296	1,750,000	Kecamatan Bontang Selatan
7	1	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	1,698,296	1,750,000	Kecamatan Bontang Selatan
7	1	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				16,708,446,986	17,543,769,703	
7	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah ASN	12 Bulan	16,703,352,098	17,538,519,703	Kecamatan Bontang Selatan
7	1	1	02.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	1 Tahun	1,698,296	1,750,000	Kecamatan Bontang Selatan
7	1	1	02.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	1,698,296	1,750,000	Kecamatan Bontang Selatan
7	1	1	02.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1,698,296	1,750,000	Kecamatan Bontang Selatan
7	1	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				118,000,000	123,900,000	
7	1	1	02.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	59 Stell	100,000,000	105,000,000	Kecamatan Bontang Selatan
7	1	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan/Pelatihan	34 orang	18,000,000	18,900,000	Kecamatan Bontang Selatan
7	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				985,330,600	877,096,500	
7	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6 Jenis	15,000,000	15,750,000	Kecamatan Bontang Selatan
7	1	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Jenis ATK yang diadakan Jumlah Jenis Peralatan Kantor yang diadakan	46 Jenis 6 Jenis	589,005,000	460,955,250	Kecamatan Bontang Selatan
7	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah jenis bahan logistik atau Sembako Jumlah makan dan minum yang tersedia	21 Jenis 1 Kecamatan	20,000,000	21,000,000	Kecamatan Bontang Selatan
							Jumlah makan dan minum yang tersedia	6 Kelurahan			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	8 Jenis	60,000,000	63,000,000	Kecamatan Bontang Selatan
7	1	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Eksemplar	3 Jenis Bacaan	11,325,600	11,891,250	Kecamatan Bontang Selatan
7	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	47 Kali	290,000,000	304,500,000	Kecamatan Bontang Selatan
7	1	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0	0	
7	1	1	02.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0	0	Kecamatan Bontang Selatan
7	1	1	02.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan Pengadaan Karpet Pengadaan Lampu Taman dan Neon Box	8 Jenis 1 Tahun 1 Paket 1 Paket	410,000,000	410,000,000	Kecamatan Bontang Selatan
7	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4,018,600,000	4,219,530,000	
7	1	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Surat yang terkirim	5 Surat	600	630	Kecamatan Bontang Selatan
7	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	biaya tagihan Telepon, Internet, Air, Listrik	12 bulan	240,000,000	252,000,000	Kecamatan Bontang Selatan
7	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tenaga Kebersihan Jumlah Tenaga Kontrak Daerah	11 orang 87 orang	3,778,000,000	3,966,900,000	Kecamatan Bontang Selatan
7	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				465,000,000	278,250,000	
7	1	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah kendaraan dinas/operasional	14 Unit	135,000,000	141,750,000	Kecamatan Bontang Selatan
7	1	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	14 Unit	10,000,000	10,500,000	Kecamatan Bontang Selatan
7	1	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jenis Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 Tahun	35,000,000	36,750,000	Kecamatan Bontang Selatan
7	1	1	02.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	1 Tahun	285,000,000	89,250,000	Kecamatan Bontang Selatan
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan sesuai SOP, Cakupan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	95%	3,655,500,000	3,838,275,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7	1	2	02.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				510,000,000	535,500,000	
7	1	2	02.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan	2 Kegiatan	450,000,000	472,500,000	Kecamatan Bontang Selatan
7	1	2	02.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah kegiatan	2 Kegiatan	60,000,000	63,000,000	Kecamatan Bontang Selatan
7	1	2	02.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				3,136,500,000	3,293,325,000	
7	1	2	02.02	1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta	220 orang	29,000,000	30,450,000	Kecamatan Bontang Selatan
7	1	2	02.02	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah layanan yang diberikan	4 Layanan	90,000,000	94,500,000	Kecamatan Bontang Selatan
7	1	2	02.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dibina	6 Kelurahan	3,017,500,000	3,168,375,000	Kecamatan Bontang Selatan
7	1	2	02.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				9,000,000	9,450,000	
7	1	2	02.03	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Koordinasi	6 Kali	9,000,000	9,450,000	Kecamatan Bontang Selatan
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat.	100	140,000,000	147,000,000	
7	1	3	02.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				140,000,000	147,000,000	
7	1	3	02.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga	140,000,000	147,000,000	Kecamatan Bontang Selatan
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Tingkat penanganan gangguan Trantibum	100	37,100,000	38,955,000	
7	1	4	02.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				37,100,000	38,955,000	
7	1	4	02.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan	2 Kegiatan	37,100,000	38,955,000	Kecamatan Bontang Selatan
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum	100%	20,000,000	21,000,000	
7	1	5	02.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				20,000,000	21,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7	1	5	02.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kota Bontang, Bontang Selatan, Semua Kelurahan	Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	2 Kegiatan	20,000,000	21,000,000	Kecamatan Bontang Selatan
7					UNSUR KEWILAYAHAN						
7	1				KECAMATAN				2,331,632,737	2,408,717,873	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan sesuai SOP, Cakupan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	95%	363,330,000	367,500,000	
7	1	2	02.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				363,330,000	367,500,000	
7	1	2	02.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Satimpo	Jumlah layanan yang di selenggarakan kelurahan	4 Layanan	363,330,000	367,500,000	Kecamatan Bontang Selatan
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat.	100	1,919,302,737	1,989,767,873	
7	1	3	02.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				606,742,737	611,579,873	
7	1	3	02.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Satimpo	Jumlah Peserta Musrenbang Kelurahan	100 orang	11,500,000	12,075,000	Kecamatan Bontang Selatan
7	1	3	02.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Satimpo	Pembangunan Jalan Lingkungan RT.25 Pembangunan Drainase Lingkungan RT.21 Kelurahan Satimpo Pengecatan Gedung Kantor Kelurahan Satimpo	1 Paket 1 Paket 1 Paket	510,000,000	510,000,000	Kecamatan Bontang Selatan
7	1	3	02.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Satimpo	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dikelurahan	4 Kegiatan	85,242,737	89,504,873	Kecamatan Bontang Selatan
7	1	3	02.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1,312,560,000	1,378,188,000	
7	1	3	02.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Satimpo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga	562,560,000	590,688,000	Kecamatan Bontang Selatan
7	1	3	02.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kota Bontang, Bontang Selatan, Satimpo	Jumlah Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	25 Kegiatan	750,000,000	787,500,000	Kecamatan Bontang Selatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Tingkat penanganan gangguan Trantibum	100	24,000,000	25,200,000	
7	1	4	02.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				24,000,000	25,200,000	
7	1	4	02.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Satimpo	Jumlah Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	1 Kegiatan	24,000,000	25,200,000	Kecamatan Bontang Selatan
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum	100%	25,000,000	26,250,000	
7	1	5	02.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				25,000,000	26,250,000	
7	1	5	02.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kota Bontang, Bontang Selatan, Satimpo	Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	2 Kegiatan	25,000,000	26,250,000	Kecamatan Bontang Selatan
7					UNSUR KEWILAYAHAN						
7	1				KECAMATAN				4,186,159,937	4,311,471,433	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan sesuai SOP, Cakupan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	95%	563,330,000	577,500,000	
7	1	2	02.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				563,330,000	577,500,000	
7	1	2	02.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut	Jumlah layanan yang di selenggarakan kelurahan	4 Layanan	563,330,000	577,500,000	Kecamatan Bontang Selatan
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat.	100	3,573,829,937	3,682,521,433	
7	1	3	02.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1,501,242,737	1,506,304,873	
7	1	3	02.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut	Jumlah Peserta Musrenbang Kelurahan	120 orang	16,000,000	16,800,000	Kecamatan Bontang Selatan
7	1	3	02.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	33 RT	1,400,000,000	1,400,000,000	Kecamatan Bontang Selatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7	1	3	02.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dikelurahan	4 Kegiatan	85,242,737	89,504,873	Kecamatan Bontang Selatan
7	1	3	02.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				2,072,587,200	2,176,216,560	
7	1	3	02.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga	932,587,200	979,216,560	Kecamatan Bontang Selatan
7	1	3	02.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut	Jumlah Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	38 Kegiatan	1,140,000,000	1,197,000,000	Kecamatan Bontang Selatan
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Tingkat penanganan gangguan Trantibum	100	24,000,000	25,200,000	
7	1	4	02.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				24,000,000	25,200,000	
7	1	4	02.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut	Jumlah Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	1 Kegiatan	24,000,000	25,200,000	Kecamatan Bontang Selatan
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum	100%	25,000,000	26,250,000	
7	1	5	02.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				25,000,000	26,250,000	
7	1	5	02.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut	Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	2 kegiatan	25,000,000	26,250,000	Kecamatan Bontang Selatan
7					UNSUR KEWILAYAHAN						
7	1				KECAMATAN						
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan sesuai SOP, Cakupan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	95%	613,330,000	630,000,000	
7	1	2	02.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				613,330,000	630,000,000	
7	1	2	02.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	Jumlah layanan yang di selenggarakan kelurahan	4 Layanan	613,330,000	630,000,000	Kecamatan Bontang Selatan
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat.	100	1,676,436,337	1,735,258,153	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7	1	3	02.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				597,242,737	602,104,873	
7	1	3	02.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	Jumlah Peserta Musrenbang Kelurahan	100 orang	12,000,000	12,600,000	Kecamatan Bontang Selatan
7	1	3	02.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	Pembangunan Badan Jalan Rehabilitasi Gapura dan Pagar Kantor kel. Bontang Lestari Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor Kel.Bontang Lestari	1 Paket 1 paket 1 paket	500,000,000	500,000,000	Kecamatan Bontang Selatan
7	1	3	02.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dikelurahan	4 Kegiatan	85,242,737	89,504,873	Kecamatan Bontang Selatan
7	1	3	02.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1,079,193,600	1,133,153,280	
7	1	3	02.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga	509,193,600	534,653,280	Kecamatan Bontang Selatan
7	1	3	02.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	Jumlah Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	19 Kegiatan	570,000,000	598,500,000	Kecamatan Bontang Selatan
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Tingkat penanganan gangguan Trantibum	100	24,000,000	25,200,000	
7	1	4	02.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				24,000,000	25,200,000	
7	1	4	02.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	Jumlah Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	1 Kegiatan	24,000,000	25,200,000	Kecamatan Bontang Selatan
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum	100%	25,000,000	26,250,000	
7	1	5	02.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				25,000,000	26,250,000	
7	1	5	02.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	2 Kegiatan	25,000,000	26,250,000	Kecamatan Bontang Selatan
7					UNSUR KEWILAYAHAN						
7	1				KECAMATAN				2,552,162,937	2,658,274,583	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan sesuai SOP, Cakupan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	95%	468,330,000	477,750,000	
7	1	2	02.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				468,330,000	477,750,000	
7	1	2	02.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut Indah	Jumlah layanan yang di selenggarakan kelurahan	4 Layanan	468,330,000	477,750,000	Kecamatan Bontang Selatan
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat.	100	2,034,832,937	2,129,074,583	
7	1	3	02.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				247,917,737	252,813,623	
7	1	3	02.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut Indah	Jumlah Peserta Musrenbang Kelurahan	120 orang	12,675,000	13,308,750	Kecamatan Bontang Selatan
7	1	3	02.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut Indah	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Peningkatan Jalan/Semenisasi RT.01	33 RT 1 Paket	150,000,000	150,000,000	Kecamatan Bontang Selatan
7	1	3	02.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut Indah	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dikelurahan	4 Kegiatan	85,242,737	89,504,873	Kecamatan Bontang Selatan
7	1	3	02.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1,786,915,200	1,876,260,960	
7	1	3	02.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut Indah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga	796,915,200	836,760,960	Kecamatan Bontang Selatan
7	1	3	02.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut Indah	Jumlah Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	33 Kegiatan	990,000,000	1,039,500,000	Kecamatan Bontang Selatan
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Tingkat penanganan gangguan Trantibum	100	24,000,000	25,200,000	
7	1	4	02.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				24,000,000	25,200,000	
7	1	4	02.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut Indah	Jumlah Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	1 Kegiatan	24,000,000	25,200,000	Kecamatan Bontang Selatan
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum	100%	25,000,000	26,250,000	
7	1	5	02.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				25,000,000	26,250,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7	1	5	02.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kota Bontang, Bontang Selatan, Tanjung Laut Indah	Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	2 kegiatan	25,000,000	26,250,000	Kecamatan Bontang Selatan
7					UNSUR KEWILAYAHAN						
7	1				KECAMATAN				5,273,025,537	5,472,680,313	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan sesuai SOP, Cakupan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	95%	629,330,000	646,800,000	
7	1	2	02.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				629,330,000	646,800,000	
7	1	2	02.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Berbas Tengah	Jumlah layanan yang di selenggarakan kelurahan	4 Layanan	629,330,000	646,800,000	Kecamatan Bontang Selatan
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat.	100	4,594,695,537	4,774,430,313	
7	1	3	02.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1,310,242,737	1,325,754,873	
7	1	3	02.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Berbas Tengah	Jumlah Peserta Musrenbang Kelurahan	170 orang	25,000,000	26,250,000	Kecamatan Bontang Selatan
7	1	3	02.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Berbas Tengah	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pembuatan Penutup Parit RT.29	62 RT 1 Paket	1,200,000,000	1,210,000,000	Kecamatan Bontang Selatan
7	1	3	02.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Berbas Tengah	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dikelurahan	4 Kegiatan	85,242,737	89,504,873	Kecamatan Bontang Selatan
7	1	3	02.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				3,284,452,800	3,448,675,440	
7	1	3	02.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Berbas Tengah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga	1,424,452,800	1,495,675,440	Kecamatan Bontang Selatan
7	1	3	02.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kota Bontang, Bontang Selatan, Berbas Tengah	Jumlah Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	62 Kegiatan	1,860,000,000	1,953,000,000	Kecamatan Bontang Selatan
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Tingkat penanganan gangguan Trantibum	100	24,000,000	25,200,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7	1	4	02.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				24,000,000	25,200,000	
7	1	4	02.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Berbas Tengah	Jumlah Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	1 Kegiatan	24,000,000	25,200,000	Kecamatan Bontang Selatan
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum	100%	25,000,000	26,250,000	
7	1	5	02.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				25,000,000	26,250,000	
7	1	5	02.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kota Bontang, Bontang Selatan, Berbas Tengah	Kegiatan Pembinaan Wawasan KebangsaanPembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	2 kegiatan	25,000,000	26,250,000	Kecamatan Bontang Selatan
7					UNSUR KEWILAYAHAN						
7	1				KECAMATAN				2,361,863,337	2,476,460,003	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan sesuai SOP, Cakupan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	95%	543,330,000	583,000,000	
7	1	2	02.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				543,330,000	583,000,000	
7	1	2	02.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Berbas Pantai	Jumlah layanan yang di selenggarakan kelurahan	4 Layanan	543,330,000	583,000,000	Kecamatan Bontang Selatan
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat.	100	1,769,533,337	1,842,010,003	
7	1	3	02.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				429,867,737	435,361,123	
7	1	3	02.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Berbas Pantai	Jumlah Peserta Musrenbang Kelurahan	100 orang	24,625,000	25,856,250	Kecamatan Bontang Selatan
7	1	3	02.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Berbas Pantai	Pembangunan Balai Pertemuan Umum dan Gudang Aset RT.24	1 Paket	320,000,000	320,000,000	Kecamatan Bontang Selatan
							Pembangunan Jalan/Jembatan Ulin RT.04 Kelurahan Berbas Pantai	1 Paket			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Pengembangan Aplikasi Pelayanan E-RT	1 Paket			
7	1	3	02.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Berbas Pantai	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dikelurahan	4 Kegiatan	85,242,737	89,504,873	Kecamatan Bontang Selatan
7	1	3	02.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1,339,665,600	1,406,648,880	
7	1	3	02.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Berbas Pantai	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga	619,665,600	650,648,880	Kecamatan Bontang Selatan
7	1	3	02.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kota Bontang, Bontang Selatan, Berbas Pantai	Jumlah Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	24 Kegiatan	720,000,000	756,000,000	Kecamatan Bontang Selatan
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Tingkat penanganan gangguan Trantibum	100	24,000,000	25,200,000	
7	1	4	02.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				24,000,000	25,200,000	
7	1	4	02.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kota Bontang, Bontang Selatan, Berbas Pantai	Jumlah Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	1 Kegiatan	24,000,000	25,200,000	Kecamatan Bontang Selatan
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum	100%	25,000,000	26,250,000	
7	1	5	02.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				25,000,000	26,250,000	
7	1	5	02.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kota Bontang, Bontang Selatan, Berbas Pantai	Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	2 kegiatan	25,000,000	26,250,000	Kecamatan Bontang Selatan
TOTAL									45,604,985,000	47,245,588,561	

RENCANA PROGRAM, DAN SUB KEGIATAN BELANJA LANGSUNG PERANGKAT DAERAH PADA RKPD KOTA BONTANG TAHUN 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Target	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7					UNSUR KEWILAYAHAN							
7	1				KECAMATAN				28,390,407,500		28,876,319,684	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	23,791,657,500		24,047,632,184	
7	1	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2,160,000		2,268,000	
7	1	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang di Susun	2 Dokumen	1,080,000	2 Dokumen	1,134,000	Kecamatan Bontang Utara
7	1	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kelurahan	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	1,080,000	2 Dokumen	1,134,000	Kecamatan Bontang Utara
7	1	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				17,750,843,497		18,638,385,600	
7	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kelurahan	Jumlah ASN	12 Bulan	17,748,693,497	12 Bulan	18,636,128,100	Kecamatan Bontang Utara
7	1	1	02.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kelurahan	Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	2 Dokumen	1,150,000	2 Dokumen	1,207,500	Kecamatan Bontang Utara
7	1	1	02.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kelurahan	Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	1,000,000	2 Dokumen	1,050,000	Kecamatan Bontang Utara
7	1	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				745,000,000		99,750,000	
7	1	1	02.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kelurahan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	55 Stell	705,000,000	55 Stell	57,750,000	Kecamatan Bontang Utara
7	1	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan	4 Orang	40,000,000	4 Orang	42,000,000	Kecamatan Bontang Utara
7	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				737,000,000		523,741,880	
7	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kelurahan	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3 Jenis	5,000,000	3 Jenis	5,750,000	Kecamatan Bontang Utara
7	1	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kelurahan	Jumlah Jenis ATK yang diadakan	35 Jenis	472,000,000	35 Jenis	233,100,000	Kecamatan Bontang Utara
7	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kelurahan	Jumlah jenis bahan logistik/sembako yang diadakakan	16 Jenis	27,000,000	16 Jenis	28,350,000	Kecamatan Bontang Utara
7	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kelurahan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	3 Jenis	65,000,000	3 Jenis	68,250,000	Kecamatan Bontang Utara
7	1	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kelurahan	Jumlah Eksemplar	2 Jenis Bacaan	0	2 Jenis Bacaan	11,891,880	Kecamatan Bontang Utara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Target	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kelurahan	Jumlah Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Makanan dan Minuman	22 Kali 800 Kotak	168,000,000	22 Kali 800 Kotak	176,400,000	Kecamatan Bontang Utara
7	1	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				620,000,000		651,000,000	
7	1	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kelurahan	Jumlah mesin yang diadakan	1 Unit	100,000,000	1 Unit	105,000,000	Kecamatan Bontang Utara
7	1	1	02.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				200,000,000		0	Kecamatan Bontang Utara
7	1	1	02.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kelurahan	Jumlah kegiatan sarana dan prasarana gedung kantor	1 Kegiatan	450,000,000	1 Kegiatan	472,500,000	Kecamatan Bontang Utara
7	1	1	02.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kelurahan	Jumlah jenis peralatan/perlengkapan gedung kantor	5 Jenis	70,000,000	5 Jenis	73,500,000	Kecamatan Bontang Utara
7	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3,683,654,003		3,867,836,704	
7	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kelurahan	Biaya Tagihan Telepon, Air, Listrik dan linternet	12 Bulan	368,210,000	12 Bulan	386,620,500	Kecamatan Bontang Utara
7	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kelurahan	Jumlah Tenaga Kebersihan Jumlah TKD	1 Orang 108 Orang	3,315,444,003	1 Orang 108 Orang	3,481,216,204	Kecamatan Bontang Utara
7	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				253,000,000		264,650,000	
7	1	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kendaraan dinas/operasional	16 Unit	65,000,000	16 Unit	68,250,000	Kecamatan Bontang Utara
7	1	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kelurahan	Jumlah kendaraan dinas/operasional	16 Unit	8,000,000	16 Unit	8,400,000	Kecamatan Bontang Utara
7	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				200,000,000		0	Kecamatan Bontang Utara
7	1	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kelurahan	Jenis Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 Tahun	90,000,000	1 Tahun	94,000,000	Kecamatan Bontang Utara
7	1	1	02.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	1 Tahun	90,000,000	1 Tahun	94,000,000	Kecamatan Bontang Utara
7	1	1	02.13		Penataan Organisasi				199,850,000		0	
7	1	1	02.13	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				199,850,000		0	Kecamatan Bontang Utara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Target	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan sesuai SOP, Cakupan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	95%	4,205,550,000		4,415,827,500	
7	1	2	02.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				448,000,000		470,400,000	
7	1	2	02.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan	2 Kegiatan	440,000,000	2 Kegiatan	462,000,000	Kecamatan Bontang Utara
7	1	2	02.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kelurahan	Jumlah kegiatan	1 Kegiatan	8,000,000	1 Kegiatan	8,400,000	Kecamatan Bontang Utara
7	1	2	02.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				3,747,550,000		3,934,927,500	
7	1	2	02.02	1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kelurahan	Jumlah peserta	250 orang	42,350,000	250 orang	44,467,500	Kecamatan Bontang Utara
7	1	2	02.02	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kelurahan	Jumlah layanan yang diberikan	4 Layanan	74,200,000	4 Layanan	77,910,000	Kecamatan Bontang Utara
7	1	2	02.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dibina	6 Kelurahan	3,631,000,000	6 Kelurahan	3,812,550,000	Kecamatan Bontang Utara
7	1	2	02.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				10,000,000		10,500,000	
7	1	2	02.03	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kelurahan	Jumlah koordinasi	6 Kali	10,000,000	6 Kali	10,500,000	Kecamatan Bontang Utara
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat.	100	349,200,000		366,660,000	
7	1	3	02.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				349,200,000		366,660,000	
7	1	3	02.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan	5 Lembaga	349,200,000	5 Lembaga	366,660,000	Kecamatan Bontang Utara
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Tingkat penanganan gangguan Trantibum	100	14,000,000		14,700,000	
7	1	4	02.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				14,000,000		14,700,000	
7	1	4	02.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kelurahan	Jumlah kegiatan	1 Kegiatan	14,000,000	1 Kegiatan	14,700,000	Kecamatan Bontang Utara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Target	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum	100	30,000,000		31,500,000	
7	1	5	02.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				30,000,000		31,500,000	
7	1	5	02.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kelurahan	Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	2 Kegiatan	30,000,000	2 Kegiatan	31,500,000	Kecamatan Bontang Utara
7					UNSUR KEWILAYAHAN							
7	1				KECAMATAN				1,880,164,200		1,974,172,410	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan sesuai SOP, Cakupan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	95%	213,340,000		224,007,000	
7	1	2	02.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				213,340,000		224,007,000	
7	1	2	02.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Bontang, Bontang Utara, Guntung	Jumlah layanan yang diselenggarakan	4 Layanan	213,340,000	4 Layanan	224,007,000	Kecamatan Bontang Utara
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat.	100	1,607,424,200		1,687,795,410	
7	1	3	02.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				601,925,000		632,021,250	
7	1	3	02.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Bontang, Bontang Utara, Guntung	Jumlah Peserta Musrenbang Kelurahan	62 Orang	13,425,000	62 Orang	14,096,250	Kecamatan Bontang Utara
7	1	3	02.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Bontang, Bontang Utara, Guntung	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1 Kegiatan	513,500,000	1 Kegiatan	539,175,000	Kecamatan Bontang Utara
7	1	3	02.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Bontang, Bontang Utara, Guntung	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dikelurahan	5 Kegiatan	75,000,000	5 Kegiatan	78,750,000	Kecamatan Bontang Utara
7	1	3	02.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1,005,499,200		1,055,774,160	
7	1	3	02.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kota Bontang, Bontang Utara, Guntung	Jumlah lembaga yang diberdayakan	2 Lembaga	465,499,200	2 Lembaga	488,774,160	Kecamatan Bontang Utara
7	1	3	02.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kota Bontang, Bontang Utara, Guntung	Jumlah Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	18 RT	540,000,000	18 RT	567,000,000	Kecamatan Bontang Utara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Target	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Tingkat penanganan gangguan Trantibum	100	45,400,000		47,670,000	
7	1	4	02.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				45,400,000		47,670,000	
7	1	4	02.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kota Bontang, Bontang Utara, Guntung	Jumlah Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	1 Kegiatan	45,400,000	1 Kegiatan	47,670,000	Kecamatan Bontang Utara
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum	100	14,000,000		14,700,000	
7	1	5	02.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				14,000,000		14,700,000	
7	1	5	02.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kota Bontang, Bontang Utara, Guntung	Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	2 Kegiatan	14,000,000	2 Kegiatan	14,700,000	Kecamatan Bontang Utara
7					UNSUR KEWILAYAHAN							
7	1				KECAMATAN							
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan sesuai SOP, Cakupan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	95%	213,335,000		224,001,750	
7	1	2	02.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				213,335,000		224,001,750	
7	1	2	02.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan	Jumlah layanan yang diselenggarakan	4 Layanan	213,335,000	4 Layanan	224,001,750	Kecamatan Bontang Utara
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat.	100	3,285,444,800		3,449,717,040	
7	1	3	02.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				494,336,000		519,052,800	
7	1	3	02.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan	Jumlah Peserta Musrenbang Kelurahan	100 Orang	14,336,000	100 Orang	15,052,800	Kecamatan Bontang Utara
7	1	3	02.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1 Kegiatan	400,000,000	1 Kegiatan	420,000,000	Kecamatan Bontang Utara
7	1	3	02.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	5 Kegiatan	80,000,000	5 Kegiatan	84,000,000	Kecamatan Bontang Utara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Target	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7	1	3	02.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				2,791,108,800		2,930,664,240	
7	1	3	02.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan	Jumlah lembaga kemasyarakatan	2 Lembaga	1,231,108,800	2 Lembaga	1,292,664,240	Kecamatan Bontang Utara
7	1	3	02.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan	Jumlah Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	52 RT	1,560,000,000	52 RT	1,638,000,000	Kecamatan Bontang Utara
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Tingkat penanganan gangguan Trantibum	100	75,400,000		79,170,000	
7	1	4	02.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				75,400,000		79,170,000	
7	1	4	02.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan	Jumlah Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	1 Kegiatan	75,400,000	1 Kegiatan	79,170,000	Kecamatan Bontang Utara
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum	100	14,000,000		14,700,000	
7	1	5	02.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				14,000,000		14,700,000	
7	1	5	02.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan	Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	2 Kegiatan	14,000,000	2 Kegiatan	14,700,000	Kecamatan Bontang Utara
7					UNSUR KEWILAYAHAN							
7	1				KECAMATAN							
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan sesuai SOP, Cakupan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	95%	213,335,000		224,001,750	
7	1	2	02.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				213,335,000		224,001,750	
7	1	2	02.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	Jumlah layanan yang diselenggarakan	4 Layanan	213,335,000	4 Layanan	224,001,750	Kecamatan Bontang Utara
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat.	100	2,877,703,500		3,021,588,675	
7	1	3	02.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				494,455,500		519,178,275	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Target	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7	1	3	02.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	Jumlah Peserta Musrenbang Kelurahan	103 Orang	14,455,500	103 Orang	15,178,275	Kecamatan Bontang Utara
7	1	3	02.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1 Kegiatan	400,000,000	1 Kegiatan	420,000,000	Kecamatan Bontang Utara
7	1	3	02.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Kegiatan	80,000,000	5 Kegiatan	84,000,000	Kecamatan Bontang Utara
7	1	3	02.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				2,383,248,000		2,502,410,400	
7	1	3	02.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	Jumlah lembaga kemasyarakatan	2 Lembaga	1,033,248,000	2 Lembaga	1,084,910,400	Kecamatan Bontang Utara
7	1	3	02.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	Jumlah Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	45 RT	1,350,000,000	45 RT	1,417,500,000	Kecamatan Bontang Utara
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Tingkat penanganan gangguan Trantibum	100	52,000,000		54,600,000	
7	1	4	02.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				52,000,000		54,600,000	
7	1	4	02.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	Jumlah Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	1 Kegiatan	52,000,000	1 Kegiatan	54,600,000	Kecamatan Bontang Utara
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum	100	14,000,000		14,700,000	
7	1	5	02.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				14,000,000		14,700,000	
7	1	5	02.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	2 Kegiatan	14,000,000	2 Kegiatan	14,700,000	Kecamatan Bontang Utara
7					UNSUR KEWILAYAHAN							
7	1				KECAMATAN				2,252,853,200		2,365,495,860	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan sesuai SOP, Cakupan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	95%	363,340,000		381,507,000	
7	1	2	02.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				363,340,000		381,507,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Target	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7	1	2	02.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Baru	Jumlah layanan yang diselenggarakan	4 Layanan	363,340,000	4 Layanan	381,507,000	Kecamatan Bontang Utara
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat.	100	1,789,913,200		1,879,408,860	
7	1	3	02.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				241,870,000		253,963,500	
7	1	3	02.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Baru	Jumlah Peserta Musrenbang Kelurahan	100 Orang	13,870,000	100 Orang	14,563,500	Kecamatan Bontang Utara
7	1	3	02.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Baru	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1 Kegiatan	150,000,000	1 Kegiatan	157,500,000	Kecamatan Bontang Utara
7	1	3	02.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Baru	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Kegiatan	78,000,000	5 Kegiatan	81,900,000	Kecamatan Bontang Utara
7	1	3	02.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1,548,043,200		1,625,445,360	
7	1	3	02.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Baru	Jumlah lembaga kemasyarakatan	2 Lembaga	708,043,200	2 Lembaga	743,445,360	Kecamatan Bontang Utara
7	1	3	02.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Baru	Jumlah Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	28 RT	840,000,000	28 RT	882,000,000	Kecamatan Bontang Utara
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Tingkat penanganan gangguan Trantibum	100	85,600,000		89,880,000	
7	1	4	02.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				85,600,000		89,880,000	
7	1	4	02.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Baru	Jumlah Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	1 Kegiatan	85,600,000	1 Kegiatan	89,880,000	Kecamatan Bontang Utara
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum	100	14,000,000		14,700,000	
7	1	5	02.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				14,000,000		14,700,000	
7	1	5	02.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Baru	Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	2 Kegiatan	14,000,000	2 Kegiatan	14,700,000	Kecamatan Bontang Utara
7					UNSUR KEWILAYAHAN							
7	1				KECAMATAN							
									3,729,416,800		3,915,887,640	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Target	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan sesuai SOP, Cakupan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	95%	213,340,000		224,007,000	
7	1	2	02.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				213,340,000		224,007,000	
7	1	2	02.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Bontang, Bontang Utara, Api-api	Jumlah layanan yang diselenggarakan	4 Layanan	213,340,000	4 Layanan	224,007,000	Kecamatan Bontang Utara
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat.	100	3,452,676,800		3,625,310,640	
7	1	3	02.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1,136,912,000		1,193,757,600	
7	1	3	02.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Bontang, Bontang Utara, Api-api	Jumlah Peserta Musrenbang Kelurahan	100 Orang	16,912,000	100 Orang	17,757,600	Kecamatan Bontang Utara
7	1	3	02.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Bontang, Bontang Utara, Api-api	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1 Kegiatan	1,040,000,000	1 Kegiatan	1,092,000,000	Kecamatan Bontang Utara
7	1	3	02.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Bontang, Bontang Utara, Api-api	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dikelurahan	5 Kegiatan	80,000,000	5 Kegiatan	84,000,000	Kecamatan Bontang Utara
7	1	3	02.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				2,315,764,800		2,431,553,040	
7	1	3	02.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kota Bontang, Bontang Utara, Api-api	Jumlah lembaga kemasyarakatan	2 Lembaga	1,055,764,800	2 Lembaga	1,108,553,040	Kecamatan Bontang Utara
7	1	3	02.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kota Bontang, Bontang Utara, Api-api	Jumlah Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	42 RT	1,260,000,000	42 RT	1,323,000,000	Kecamatan Bontang Utara
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Tingkat penanganan gangguan Trantibum	100	49,400,000		51,870,000	
7	1	4	02.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				49,400,000		51,870,000	
7	1	4	02.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kota Bontang, Bontang Utara, Api-api	Jumlah Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	1 Kegiatan	49,400,000	1 Kegiatan	51,870,000	Kecamatan Bontang Utara
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum	100	14,000,000		14,700,000	
7	1	5	02.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				14,000,000		14,700,000	
7	1	5	02.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan	Kota Bontang, Bontang Utara, Api-api	Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,	2 Kegiatan	14,000,000	2 Kegiatan	14,700,000	Kecamatan Bontang Utara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Target	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					
7					UNSUR KEWILAYAHAN							
7	1				KECAMATAN							
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan sesuai SOP, Cakupan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	95%	213,340,000		224,007,000	
7	1	2	02.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				213,340,000		224,007,000	
7	1	2	02.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Kuala	Jumlah layanan yang diselenggarakan	4 Layanan	213,340,000	4 Layanan	224,007,000	Kecamatan Bontang Utara
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat.	100	1,662,730,000		1,745,866,500	
7	1	3	02.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				562,642,000		590,774,100	
7	1	3	02.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Kuala	Jumlah Peserta Musrenbang Kelurahan	75 Orang	11,642,000	75 Orang	12,224,100	Kecamatan Bontang Utara
7	1	3	02.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Kuala	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1 Kegiatan	475,000,000	1 Kegiatan	498,750,000	Kecamatan Bontang Utara
7	1	3	02.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Kuala	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dikelurahan	5 Kegiatan	76,000,000	5 Kegiatan	79,800,000	Kecamatan Bontang Utara
7	1	3	02.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1,100,088,000		1,155,092,400	
7	1	3	02.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Kuala	Jumlah lembaga kemasyarakatan	2 Lembaga	500,088,000	2 Lembaga	525,092,400	Kecamatan Bontang Utara
7	1	3	02.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Kuala	Jumlah Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	20 RT	600,000,000	20 RT	630,000,000	Kecamatan Bontang Utara
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Tingkat penanganan gangguan Trantibum	100	45,400,000		47,670,000	
7	1	4	02.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				45,400,000		47,670,000	
7	1	4	02.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Kuala	Jumlah Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	1 Kegiatan	45,400,000	1 Kegiatan	47,670,000	Kecamatan Bontang Utara
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum	100	14,000,000		14,700,000	
7	1	5	02.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				14,000,000		14,700,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Target	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7	1	5	02.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Kuala	Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	2 Kegiatan	14,000,000	2 Kegiatan	14,700,000	Kecamatan Bontang Utara
TOTAL									45,533,380,000		46,246,598,309	

RENCANA PROGRAM, DAN SUB KEGIATAN BELANJA LANGSUNG PERANGKAT DAERAH PADA RKPD KOTA BONTANG TAHUN 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7					UNSUR KEWILAYAHAN						
7	1				KECAMATAN				20,743,490,800	21,680,665,901	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	18,053,784,800	18,956,474,601	
7	1	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3,396,592	3,566,420	
7	1	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bontang, Bontang Barat, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	2 Dokumen	1,698,296	1,783,210	Kecamatan Bontang Barat
7	1	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bontang, Bontang Barat, Semua Kelurahan	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	1,698,296	1,783,210	Kecamatan Bontang Barat
7	1	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12,925,297,000	13,571,562,413	
7	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bontang, Bontang Barat, Semua Kelurahan	Jumlah ASN	65 Orang	12,922,750,000	13,568,888,063	Kecamatan Bontang Barat
7	1	1	02.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Bontang, Bontang Barat, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	849	891,45	Kecamatan Bontang Barat
7	1	1	02.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bontang, Bontang Barat, Semua Kelurahan	Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	849	891,45	Kecamatan Bontang Barat
7	1	1	02.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Bontang, Bontang Barat, Semua Kelurahan	Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	849	891,45	Kecamatan Bontang Barat
7	1	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				97,500,000	102,375,000	
7	1	1	02.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Bontang, Bontang Barat, Semua Kelurahan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	44 Stell	22,500,000	23,625,000	Kecamatan Bontang Barat
7	1	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bontang, Bontang Barat, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	75,000,000	78,750,000	Kecamatan Bontang Barat
7	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				564,987,500	593,236,875	
7	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bontang, Bontang Barat, Semua Kelurahan	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 Jenis	35,676,000	37,459,800	Kecamatan Bontang Barat
7	1	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bontang, Bontang Barat, Semua Kelurahan	Jumlah Jenis ATK yang diadakan Jumlah Jenis Peralatan Kantor yang diadakan	25 Jenis 5 Jenis	152,865,000	160,508,250	Kecamatan Bontang Barat
7	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bontang, Bontang Barat, Semua Kelurahan	Jumlah Jenis Bahan Logistik atau Sembako	21 Jenis	84,500,000	88,725,000	Kecamatan Bontang Barat
							Jumlah Makan dan Minum yang Tersedia	600 Kotak			
7	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bontang, Bontang Barat, Semua Kelurahan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	12 jenis	33,254,000	34,916,700	Kecamatan Bontang Barat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7	1	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bontang, Bontang Barat, Semua Kelurahan	Jumlah Eksemplar	1095 Eksemplar	7,117,500	7,473,375	Kecamatan Bontang Barat
7	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bontang, Bontang Barat, Semua Kelurahan	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	30 Kali	251,575,000	264,153,750	Kecamatan Bontang Barat
7	1	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				50,000,000	52,500,000	
7	1	1	02.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bontang, Bontang Barat, Semua Kelurahan	Jumlah Jenis Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Diadakan	6 Jenis 1 Jenis	50,000,000	52,500,000	Kecamatan Bontang Barat
7	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4,000,820,000	4,200,861,000	
7	1	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah surat yang terkirim	4 Surat	100	105	Kecamatan Bontang Barat
7	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bontang, Bontang Barat, Semua Kelurahan	Biaya Tagihan Telepon, Internet, Air, Listrik	12 bulan	150,720,000	158,256,000	Kecamatan Bontang Barat
7	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bontang, Bontang Barat, Semua Kelurahan	Jumlah Tenaga Kebersihan Jumlah Tenaga Kontrak Daerah	23 orang 65 orang	3,850,000,000	4,042,500,000	Kecamatan Bontang Barat
7	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				411,783,708	432,372,893	
7	1	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bontang, Bontang Barat, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	17 unit	166,798,708	175,138,643	Kecamatan Bontang Barat
7	1	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bontang, Bontang Barat, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	17 unit	8,360,000	8,778,000	Kecamatan Bontang Barat
7	1	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bontang, Bontang Barat, Semua Kelurahan	Jenis Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	2 Gedung	205,000,000	215,250,000	Kecamatan Bontang Barat
7	1	1	02.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bontang, Bontang Barat, Semua Kelurahan	Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor	5 Jenis	31,625,000	33,206,250	Kecamatan Bontang Barat
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan sesuai SOP, Cakupan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	95%	2,532,956,000	2,559,603,800	
7	1	2	02.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				436,584,000	458,413,200	
7	1	2	02.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kota Bontang, Bontang Barat, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan	2 Kegiatan	416,584,000	437,413,200	Kecamatan Bontang Barat
7	1	2	02.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Bontang, Bontang Barat, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan	2 Kegiatan	20,000,000	21,000,000	Kecamatan Bontang Barat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7	1	2	02.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				2,088,372,000	2,092,790,600	
7	1	2	02.02	1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kota Bontang, Bontang Barat, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta	150 orang	27,172,000	28,530,600	Kecamatan Bontang Barat
7	1	2	02.02	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kota Bontang, Bontang Barat, Semua Kelurahan	Jumlah layanan yang diberikan	4 Layanan	30,700,000	32,235,000	Kecamatan Bontang Barat
7	1	2	02.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Kelurahan yang dibina Jumlah pemekaran Kelurahan	3 Kelurahan 2 Kelurahan	2,030,500,000	2,032,025,000	Kecamatan Bontang Barat
7	1	2	02.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				8,000,000	8,400,000	
7	1	2	02.03	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kota Bontang, Bontang Barat, Semua Kelurahan	Jumlah Koordinasi	4 Kali	8,000,000	8,400,000	Kecamatan Bontang Barat
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat.	100%	97,000,000	101,850,000	
7	1	3	02.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				97,000,000	101,850,000	
7	1	3	02.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kota Bontang, Bontang Barat, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	3 lembaga 3 Lembaga	97,000,000	101,850,000	Kecamatan Bontang Barat
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Tingkat penanganan gangguan Trantibum	100%	33,600,000	35,280,000	
7	1	4	02.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				33,600,000	35,280,000	
7	1	4	02.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kota Bontang, Bontang Barat, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan	2 kegiatan	33,600,000	35,280,000	Kecamatan Bontang Barat
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum	100%	26,150,000	27,457,500	
7	1	5	02.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				26,150,000	27,457,500	
7	1	5	02.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kota Bontang, Bontang Barat, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan	2 Kegiatan	26,150,000	27,457,500	Kecamatan Bontang Barat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				
7					UNSUR KEWILAYAHAN						
7	1				KECAMATAN						
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan sesuai SOP, Cakupan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	95%	413,330,000	420,000,000	
7	1	2	02.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				413,330,000	420,000,000	
7	1	2	02.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Bontang, Bontang Barat, Kanaan	Jumlah layanan yang diselenggarakan Kelurahan	4 Layanan	413,330,000	420,000,000	Kecamatan Bontang Barat
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat.	100%	981,352,800	951,495,440	
7	1	3	02.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				133,500,000	61,250,000	
7	1	3	02.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Bontang, Bontang Barat, Kanaan	jumlah peserta musrenbang	75 orang	13,500,000	14,000,000	Kecamatan Bontang Barat
7	1	3	02.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Bontang, Bontang Barat, Kanaan	Jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	12 Kegiatan	75,000,000	0	Kecamatan Bontang Barat
7	1	3	02.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Bontang, Bontang Barat, Kanaan	Jumlah kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	4 Kegiatan	45,000,000	47,250,000	Kecamatan Bontang Barat
7	1	3	02.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				847,852,800	890,245,440	
7	1	3	02.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kota Bontang, Bontang Barat, Kanaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga	487,852,800	512,245,440	Kecamatan Bontang Barat
7	1	3	02.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kota Bontang, Bontang Barat, Kanaan	Jumlah Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Kegiatan	360,000,000	378,000,000	Kecamatan Bontang Barat
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Tingkat penanganan gangguan Trantibum	100%	24,000,000	25,200,000	
7	1	4	02.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				24,000,000	25,200,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7	1	4	02.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kota Bontang, Bontang Barat, Kanaan	Jumlah Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	1 Kegiatan	24,000,000	25,200,000	Kecamatan Bontang Barat
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum	100%	15,000,000	15,750,000	
7	1	5	02.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				15,000,000	15,750,000	
7	1	5	02.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kota Bontang, Bontang Barat, Kanaan	Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	2 Kegiatan	15,000,000	15,750,000	Kecamatan Bontang Barat
7					UNSUR KEWILAYAHAN						
7	1				KECAMATAN				2,887,562,000	3,012,943,600	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan sesuai SOP, Cakupan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	95%	423,330,000	430,500,000	
7	1	2	02.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				423,330,000	430,500,000	
7	1	2	02.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Bontang, Bontang Barat, Gunung Telihan	Jumlah layanan yang diselenggarakan Kelurahan	4 Layanan	423,330,000	430,500,000	Kecamatan Bontang Barat
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat.	100%	2,420,232,000	2,536,243,600	
7	1	3	02.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				787,500,000	821,875,000	
7	1	3	02.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Bontang, Bontang Barat, Gunung Telihan	Jumlah Peserta Musrenbang Kelurahan	132 Orang	15,500,000	16,275,000	Kecamatan Bontang Barat
7	1	3	02.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Bontang, Bontang Barat, Gunung Telihan	Jumlah pemasangan paving block Jumlah perbaikan drainase Jumlah renovasi jembatan Jumlah semenisasi jalan	2 jalan 1 drainase 1 jembatan 1 jalan	617,000,000	647,850,000	Kecamatan Bontang Barat
7	1	3	02.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Bontang, Bontang Barat, Gunung Telihan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Kegiatan	155,000,000	157,750,000	Kecamatan Bontang Barat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Kendaraan Roda Tiga Perlengkapan Pos Security	1 Unit 1 Paket			
7	1	3	02.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1,632,732,000	1,714,368,600	
7	1	3	02.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kota Bontang, Bontang Barat, Gunung Telihan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga	732,732,000	769,368,600	Kecamatan Bontang Barat
7	1	3	02.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kota Bontang, Bontang Barat, Gunung Telihan	Jumlah Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	30 Kegiatan	900,000,000	945,000,000	Kecamatan Bontang Barat
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Tingkat penanganan gangguan Trantibum	100%	24,000,000	25,200,000	
7	1	4	02.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				24,000,000	25,200,000	
7	1	4	02.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kota Bontang, Bontang Barat, Gunung Telihan	Jumlah Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	1 Kegiatan	24,000,000	25,200,000	Kecamatan Bontang Barat
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum	100%	20,000,000	21,000,000	
7	1	5	02.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				20,000,000	21,000,000	
7	1	5	02.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kota Bontang, Bontang Barat, Gunung Telihan	Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	2 Kegiatan	20,000,000	21,000,000	Kecamatan Bontang Barat
7					UNSUR KEWILAYAHAN						
7	1				KECAMATAN				4,467,254,400	4,666,620,620	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan sesuai SOP, Cakupan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	95%	433,330,000	441,000,000	
7	1	2	02.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				433,330,000	441,000,000	
7	1	2	02.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	Jumlah layanan yang diselenggarakan Kelurahan	4 Layanan	433,330,000	441,000,000	Kecamatan Bontang Barat
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat.	100%	3,987,924,400	4,177,320,620	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7	1	3	02.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1,169,500,000	1,217,975,000	
7	1	3	02.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	Jumlah peserta Musrenbang Kelurahan	100 Orang	14,500,000	15,225,000	Kecamatan Bontang Barat
7	1	3	02.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	Jumlah drainase yang direhab Jumlah gapura yang dibangun Jumlah Gedung yang direhab Jumlah lampu gapura yang diadakan	2 drainase 1 gapura 3 Gedung 1 unit	895,000,000	939,750,000	Kecamatan Bontang Barat
							Jumlah pagar yang diadakan Jumlah Plang Nama Jalan	1 pagar 130 Unit			
7	1	3	02.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	Jenis barang yang diadakan	7 Jenis	260,000,000	263,000,000	Kecamatan Bontang Barat
							Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Kegiatan			
7	1	3	02.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				2,818,424,400	2,959,345,620	
7	1	3	02.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga	1,288,424,400	1,352,845,620	Kecamatan Bontang Barat
7	1	3	02.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	Jumlah Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	51 Kegiatan	1,530,000,000	1,606,500,000	Kecamatan Bontang Barat
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Tingkat penanganan gangguan Trantibum	100%	24,000,000	25,200,000	
7	1	4	02.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				24,000,000	25,200,000	
7	1	4	02.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	Jumlah Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	1 Kegiatan	24,000,000	25,200,000	Kecamatan Bontang Barat
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum	100%	22,000,000	23,100,000	
7	1	5	02.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				22,000,000	23,100,000	
7	1	5	02.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kota Bontang, Bontang Barat, Belimbing	Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta	2 Kegiatan	22,000,000	23,100,000	Kecamatan Bontang Barat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				
TOTAL									29,531,990,000	30,772,675,561	

RENCANA PROGRAM, DAN SUB KEGIATAN BELANJA LANGSUNG PERANGKAT DAERAH PADA RKPD KOTA BONTANG TAHUN 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						
8	1				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				11,780,000,000	11,306,316,000	
8	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	8,054,449,751	8,106,316,000	
8	1	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				30,000,000	30,000,000	
8	1	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	dokumen	12 buah	25,000,000	25,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen LKIP	10 dok	5,000,000	5,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5,259,133,751	5,260,000,000	
8	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah PNS Perkantoran	193 kali	5,249,133,751	5,250,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	02.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	JUmlah laporan	5 dok	5,000,000	5,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	02.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Laporan semesteran dan prognosis	10 dok	5,000,000	5,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				225,000,000	225,000,000	
8	1	1	02.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				50,000,000	50,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pegawai yang mengikuti Kegiatan	25 pegawai	175,000,000	175,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				1,308,846,000	1,308,846,000	
8	1	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah alat dan bahan listrik Jumlah bahan dan alat kebersihan Jumlah dan Jenis Bahan komputer Jumlah jenis ATK yang disediakan	5 jenis 20 jenis 20 jenis 54 buah	350,000,000	350,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
							Jumlah unit penyediaan peralatan kantor Jumlah unit penyediaan perlengkapan kantor	5 unit 3 unit			
8	1	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	peralatan rumah tangga	5 jenis	10,000,000	10,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah jenis logistik kantor yang disediakan	18 jenis	100,346,000	100,346,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Jumlah kotak makanan dan snack	1970 kotak			
8	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah jenis Barang cetak dan penggandaan yang disediakan	10 jenis	48,500,000	48,500,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perjalanan Dinas	157 kali	800,000,000	800,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				325,000,000	325,000,000	
8	1	1	02.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pengadaan kendaraan roda 2	4 kendaraan	125,000,000	125,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	02.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sewa gedung sekretariat bersama	1 gedung	200,000,000	200,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				545,470,000	545,470,000	
8	1	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10,000,000	10,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tagihan listrik,air dan telepon	12 bulan	55,000,000	55,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah penyediaan TKD	12 orang	480,470,000	480,470,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				361,000,000	412,000,000	
8	1	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kendaraan roda 2 dan 4	20 unit	300,000,000	350,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang memenuhi ketentuan perizinan	21 unit	37,000,000	37,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah peralatan kantor	35 unit	24,000,000	25,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	2			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		Prosentase masyarakat yang mengikuti penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	36	542,000,000	600,000,000	
8	1	2	02.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				542,000,000	600,000,000	
8	1	2	02.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah peserta pelatihan belanegara Jumlah peserta sosialisasi PPWK Jumlah peserta sosialisasi revitalisasi Pancasila	200 orang 200 orang 200 orang	210,000,000	250,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Jumlah peserta upacara hari hari besar	600 orang			
8	1	2	02.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah fasilitasi rapat FPK	4 kali	332,000,000	350,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	3			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Persentase peran partai politik dan lembaga pendidikan dalam pendidikan politik	61	1,443,200,000	960,000,000	
8	1	3	02.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik				1,443,200,000	960,000,000	
8	1	3	02.01	3	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah peserta sosialisasi cakrawala budaya politik dan gender Jumlah proposal banpol yang terverifikasi	300 orang 10 Proposal	1,433,200,000	950,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	3	02.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Monitoring situasi politik	12 kali	10,000,000	10,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Persentase pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	50	184,000,000	250,000,000	
8	1	4	02.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat				184,000,000	250,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
8	1	4	02.01	3	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ormas yang diverifikasi Jumlah peserta sosialisasi ormas Jumlah proposal hibah yang diverifikasi	5 ormas 200 ormas 3 proposal	141,000,000	200,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	4	02.01	4	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah rapat koordinasi tim pengawasan ormas	6 kali	43,000,000	50,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	5			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Persentase Peningkatan pembinaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	73	773,000,000	530,000,000	
8	1	5	02.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				773,000,000	530,000,000	
8	1	5	02.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah peserta sosialisasi pencegahan narkotika Peta Daerah Rawan Narkoba Sewa gedung	150 orang 1 peta 1 tahun	550,000,000	270,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	5	02.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Objek Fasilitas Jumlah rapat koordinasi FKUB Jumlah rapat koordinasi Pakem	2 objek 4 kali 3 kali	213,000,000	250,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	5	02.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Monitoring bidang ekonomi	12 kali	10,000,000	10,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	6			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Persentase Penanganan Konflik	100	783,350,249	860,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
8	1	6	02.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial				783,350,249	860,000,000	
8	1	6	02.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Fasilitasi rapat forkopimda Fasilitasi rapat tim PKS Jumlah rakor forum FKDM Jumlah rakor wasdin	12 kali 3 kali 4 kali 4 kali	773,350,249	850,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	6	02.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Monitoring TKA	12 kali	10,000,000	10,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TOTAL									11,780,000,000	11,306,316,000	

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat ditunjukkan melalu pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah dari masing-masing aspek dan fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah kota sesuai dengan kewenangan yang ada.

6.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah tahun 2022

Dalam upaya pencapaian prioritas pembangunan daerah 2022, maka pemerintah kota bontang menetapkan target pada indikator kinerja utama daerah tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 6. 1 Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target	
		Satuann	Nilai
1	2	3	4
1	Nilai LPPD	Predikat	Tinggi
2	Opini BPK	predikat	WTP
3	Indeks SPBE	Nilai	2,8
4	IKM	predikat	BAIK
5	Persentase penurunan konflik dan	Persen	Menurun
6	Indeks kualitas perkotaan	Indeks	81,02
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	69,01
8	Pertumbuhan Ekonomi sektor industri	Persen	2,38
9	Pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan	Persen	5,13
10	Indeks Gini	Indeks	0,375
11	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	19.7555
12	Pertumbuhan nilai insvestasi	Persen	-1,2
13	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	86,9
14	Tingkat partisipasi pemuda dalam pembangunan	Persen	7,34
15	Angka harapan lama sekolah	Angka	13,3
16	Rata-rata lama sekolah	Angka	10,91
17	Usia harapan hidup	Angka	74,44
18	Persentase balita stunting	Persen	18,4
19	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	9
20	Persentase PMKS	Persen	5,5

6.2. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Program prioritas pada setiap urusan penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh tiap-tiap perangkat daerah dapat

ditunjukkan pada indikator penyelenggaraan pemerintahan daerah berikut ini:

Tabel 6. 2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target Kinerja
	Daerah		2022
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT			
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi			
1	Pertumbuhan PDRB dengan Migas	Persen	2,00-3,00
2	Laju Inflasi	Persen	2,7
3	Nilai PDRB perkapita dengan Migas	juta rp.	321,5
4	Nilai PDRB perkapita non Migas	juta rp.	181,75
5	Prosentase kriminalitas yang tertangani	Persen	88,16
6	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	Persen	15,81
7	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	87
Fokus Kesejahteraan Masyarakat			
	Pendidikan		
1	Angka melek huruf	Persen	99,44
2	Angka partisipasi kasar		
	SD/MI/Paket A (%)	Persen	103,45
	SMP/MTs/Paket B (%)	Persen	102,66
	SD/MI/Paket A	Persen	1,74
	SMP/MTs/Paket B	Persen	1,73
	SD/MI/Paket A	Persen	93,42
	SMP/MTs/Paket B	Persen	81,22
2	Kesehatan		
	Persentase balita gizi buruk	Persen	0,01
3	Ketenagakerjaan		
	Rasio penduduk yang bekerja	Rasio	0,96
	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Persen	69,88
Fokus Seni Budaya dan Olahraga			
	Kebudayaan		
1	Jumlah grup kesenian/ 10000 penduduk	unit per 10rb penduduk	2,06
2	Jumlah gedung/ 10000 penduduk	unit per 10rb penduduk	0,14
	Pemuda dan Olahraga		
1	Jumlah gedung olahraga/ 10000 penduduk	unit per 10rb penduduk	0,14
Aspek Pelayanan Umum			
	Pendidikan		
	Pendidikan dasar:		
1	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	Rasio	28,2
2	Rasio guru/murid	Rasio	522

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target Kinerja
	Daerah		2022
3	Rasio guru/murid per kelas rata- rata	Rasio	52,2
	Pendidikan menengah:		
1	Angka partisipasi sekolah	Persen	826,63
2	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	Rasio	34,35
3	Rasio guru terhadap murid	Rasio	680,66
4	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	Rasio	68,06
	Fasilitas Pendidikan:		
1	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Persen	91,8
2	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	Persen	84,85
	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :		
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (APK)	Persen	78,65
	Angka Putus Sekolah:		
1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Persen	0
2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Persen	0
	Angka Kelulusan:		
1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	Persen	100
2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)	Persen	100
3	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Persen	100
4	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	93,88
	Kesehatan		
1	Rasio Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) per-satuan penduduk	Rasio	1:16.000
2	Cakupan Kepesertaan BPJS	Persen	0,99
3	Persentase FKTP milik pemerintah yang terakreditasi	Persen	1
4	terbangunya Sistem informasi kesehatan daerah (SikDa) terpadu	Persen	0,95
5	Jumlah FKTP dengan SDM sesuai standar (jumlah, jenis dan kompetensi)	FKTP	6
6	Jumlah tenaga kesehatan yang mendapat pelatihan sesuai standar	Orang	75
7	Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan peningkatan Pendidikan	Orang	20
8	Jumlah Rumah Sakit dengan SDM sesuai Standar	RS	5
9	Prevalensi balita gizi kurang	Persen	0,14
10	Prevalensi Baduta Stunting	persen	0,18
11	Prevalensi balita Gizi kurus	persen	0,08
12	Angka Kematian ibu	Rasio / 100.000 Kelahiran Hidup	100/100ribu kelahiran hidup
13	Angka Kematian Bayi	Rasio / 1.000 Kelahiran Hidup	12/1.000 Kelahiran Hidup

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target Kinerja
	Daerah		2022
14	Angka kesembuhan TB	Rasio	0,91
15	Prevalensi HIV	persen	0,18
16	IR DBD	Rasio	145/100.000 penduduk
17	Prevalensi Hipertensi	persen	24
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	91,7
2	Jumlah rumah tinggal bersanitasi	%	97,23
3	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	rasio	101,8
4	Jumlah rumah layak huni	%	96,76
5	Panjang jalan dilalui Roda 4 (Km)	Km	195,34
6	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) (Meter)	Meter	13.765,00
7	Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	Km	2,71
8	Persentase Panjang drainase dalam kondisi baik	persen	92,02
9	Luas kawasan pemukiman kumuh (Hektar)	hektar	60
10	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	rasio	0,17
11	Kesesuaian terhadap RTRW	persen	85
12	Persentase rumah tangga yang terlayani air minum	persen	86,1
	Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman		
1	Jumlah Rumah tangga pengguna air bersih	rumah tangga	24.646,00
2	Rumah tangga pengguna listrik (%)	persen	88,98
3	Rumah tangga ber-Sanitasi	rumah tangga	97,34
4	Rasio rumah layak huni	persen	96,94
	Perhubungan		
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	orang	60.457,00
2	Rasio Ijin Trayek	rasio	0
3	Jumlah uji KIR angkutan umum	angkutan	67
4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	buah	8
5	Kepemilikan KIR angkutan umum	Persen	24,73
6	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) menit	menit	30
7	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum (Rp)	Rp.	40.000,00
	Komunikasi dan Informatika		
1	Web site milik pemerintah daerah	website	65
2	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	persen	93,91
3	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	persen	81,6

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target Kinerja
	Daerah		2022
	Lingkungan Hidup		
1	Persentase penanganan sampah	persen	99
2	Persentase Penduduk berakses air minum	persen	98,55
3	Persentase Luas pemukiman yang tertata	persen	74,31
4	Jumlah titik pantau kualitas lingkungan (air dan udara)	titik	121 titik
5	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan	persen	100
6	Penegakan hukum lingkungan	persen	100
	Kependudukan dan Catatan Sipil		
1	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	rasio	0,99
2	Rasio bayi berakte kelahiran	rasio	0,96
3	Rasio pasangan berakte nikah	rasio	0,8
4	Kepemilikan KTP (%)	persen	99
5	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	persen	70,81
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	persen	47,78
2	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	persen	5,41
3	Rasio KDRT	rasio	0,04
4	Partisipasi angkatan kerja perempuan	persen	33,7
5	perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	persen	100
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	orang	2
2	Rasio akseptor KB	persen	70
3	Cakupan peserta KB aktif	persen	73,2
4	Laju Pertumbuhan Penduduk	persen	1,87
5	Total Fertility Rate (TFR)	angka	2,1
6	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	persen	14,98
	Sosial		
1	Jumlah Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	sarana	13
2	Persentase PMKS yg memperoleh bantuan sosial	persen	100
3	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	persen	100
	Tenaga Kerja		
1	Angka sengketa pengusaha- pekerja per tahun	angka	7,09
2	Pencari kerja yang ditempatkan	Persen	19,4
3	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	kasus	0
4	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan	Persen	1,61
	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target Kinerja
	Daerah		2022
1	Persentase koperasi aktif	Persen	94,87
2	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM (KSP/USP)	unit	9.210,00
3	Jumlah BPR/LKM (hanya BPR)	unit	4
4	Usaha Mikro dan Kecil	Persen	10
	Penanaman Modal		
1	Jumlah investor berskala nasional PMDN	investor	95
2	Jumlah investor berskala nasional PMA	investor	9
3	Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN	juta Rp	4.150.000
4	Jumlah nilai investasi berskala nasional PMA	000 \$	169.102
5	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (rupiah)	Rp.	2.409.537,59
	Kebudayaan		
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	kegiatan	10
2	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	unit	3
3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	unit	103
	Kepemudaan dan Olahraga		
1	Jumlah organisasi pemuda	organisasi	60
2	Jumlah organisasi olahraga (Pengkot)	Klub	222
3	Jumlah kegiatan kepemudaan	kegiatan	16
4	Jumlah kegiatan olahraga	kegiatan	15
	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri		
1	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (kegiatan)	kegiatan	66
2	Kegiatan pembinaan politik daerah (kegiatan)	kegiatan	59
	Ketahanan Pangan		
1	Regulasi ketahanan pangan	regulasi	5
2	Ketersediaan pangan utama (%)	Persen	87
3	Ketersediaan energi dan protein perkapita	Persen	100
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	kelompok	5
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	kelompok	20
3	Jumlah LPM	kelompok	5
4	LPM Berprestasi (%)	Persen	1
5	PKK aktif (%)	Persen	100
6	Posyandu aktif (%)	Persen	100
7	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	Persen	2,5
	Kearsipan		
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	50
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	kegiatan	47
	Perpustakaan		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target Kinerja
	Daerah		2022
1	Jumlah perpustakaan (Daerah, Sekolah, swasta)	unit	239
2	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	orang	29.940,00
3	Jumlah Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	buah	149.653,00
	Pariwisata		
1	Jumlah kunjungan wisatawan	orang	234.327,00
2	Lama kunjungan wisata	hari	
3	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dengan MIGAS	Juta Rp.	357.366,00
4	Persentase PAD sektor Pariwisata	persen	2,51
	Kelautan dan Perikanan		
1	Produksi perikanan		
2	Ikan Tangkap	persen	100
3	Ikan Budidaya	persen	100
4	Konsumsi ikan	kg	57,49
	Perdagangan		
1	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dengan MIGAS	persen	3,41
2	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB tanpa MIGAS	persen	6,04
3	Ekspor Bersih Perdagangan (Million \$)	juta \$	Meningkat
	Perindustrian		
1	Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB dengan MIGAS	persen	69,59
2	Pertumbuhan Industri rumah	persen	1
	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		
1	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	persen	100
2	Persentase Penegakan PERDA	persen	100
	Pertanahan		
1	Penyelesaian kasus tanah Negara	persen	65
	Statistik		
1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	sistem	-
	Persandian		
1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	persen	25,81
ASPEK DAYA SAING			
Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah			
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rp	949.901,00
2	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	Rp	1.634.991,00
3	Produktivitas total daerah		63,81
Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur			
1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	rasio	0,0023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target Kinerja
	Daerah		2022
2	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	orang	28.026,00
Kesesuaian Tata Ruang			
1	Luas wilayah industri	ha	2.710,00
2	Luas wilayah banjir	ha	790,46
3	Jenis dan jumlah bank dan cabang	unit	36
4	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel	unit	30
5	Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih	persen	90,02
6	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	indeks	59,1
7	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	indeks	86,5
8	Timbulan sampah yang ditangani	ton	214,64
9	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	96,98
10	Komunikasi dan Informatika		
11	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	%	93,27
12	Proporsi individu yang mengakses internet	%	79
Fokus Iklim Berinvestasi			
1	Angka kriminalitas	angka	Menurun
2	Jumlah demo	kali	1
3	Lama proses perijinan	hari	1
Fokus Sumber Daya Manusia			
1	Rasio lulusan S1/S2/S3	rasio	0,06
2	Rasio ketergantungan	rasio	42,04

BAB VII PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bontang Tahun 2022 merupakan dokumen yang disusun untuk memberikan gambaran kepada semua stakeholder pembangunan Kota Bontang tentang arah dan kebijakan pembangunan Pemerintah Kota Bontang Tahun 2022. Adapun penyusunan dokumennya mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

RKPD Tahun 2022 disusun dengan memperhatikan dan melakukan sinkronisasi dengan arahan kebijakan pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022, arahan kebijakan pembangunan provinsi Tahun 2022, hasil evaluasi pembangunan hingga Tahun 2020, dan pencapaian target RPJMD tahun perencanaan serta penelaahan terhadap pokok-pokok pikiran DPRD. Prioritas pembangunan dalam RKPD Tahun 2022, sepenuhnya juga disusun berdasarkan isu dan permasalahan aktual, khususnya menyangkut kebijakan penanggulangan Pandemi COVID-19 dengan berbagai dampaknya kepada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Sebagai perencanaan pembangunan tahunan pertama periode RPJMD 2021-2026, RKPD Kota Bontang tahun 2022 mengacu pada arahan kebijakan pembangunan RPJPD Tahun 2005-2020, dan telah mengakomodasi arahan prioritas pembangunan sesuai dengan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih yang saat ini dalam proses penyusunan Rancangan Awal RPJMD.

Sejalan dengan upaya menggali seluas-luasnya aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, penyusunan RKPD telah melalui tahapan forum konsultasi publik, forum musrenbang yang melibatkan seluruh perangkat daerah dan para pemangku kepentingan serta penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD. Tahapan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas penyusunan perencanaan melalui pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif, pendekatan *top down*, dan pendekatan *bottom up*. Hal ini ditujukan agar semua ruang yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan telah digunakan semua pihak untuk menyampaikan aspirasinya dalam penyusunan perencanaan pembangunan.

Dengan disetujuinya RKPD Kota Bontang Tahun 2022 ini, maka akan menjadi acuan seluruh Perangkat Daerah dalam melakukan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2022.

WALI KOTA BONTANG,



BASRI RASE